

2019

Laporan Tahunan
Annual Report

IPC 
Dredging & Shipyard



MENCIPTAKAN PELUANG UNTUK BISNIS BERKELANJUTAN

Creating Opportunities for Business Sustainability



Menciptakan Peluang untuk Bisnis Berkelanjutan

Creating Opportunities for Business Sustainability



Pada tahun 2019, Perusahaan fokus untuk menciptakan peluang demi keberlanjutan bisnis. Perusahaan menciptakan peluang bisnis melalui peremajaan kapal dan alat produksi untuk menunjang aktivitas operasional. Perusahaan saat ini tengah dalam proses untuk pengadaan Kapal Keruk tipe *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD) berkapasitas 2.700m³. Sebuah Tim Bersama telah dibentuk untuk mempersiapkan keperluan teknis dan memperlancar proses pengadaan.

Dalam memperkuat kapasitas internal Perusahaan, pada tahun 2019 juga dilakukan *customer gathering*. Perusahaan memandang hal ini perlu untuk dilakukan untuk bersama-sama mengatasi hambatan operasional pengerjaan proyek yang tertunda karena permasalahan perizinan.

Perusahaan juga telah memperkuat kapasitas SDM dengan merekrut tenaga kerja baru untuk menempati berbagai posisi strategis. Penambahan tenaga kerja juga dilakukan di sisi operasional untuk memperlancar proses operasi di kapal dan di darat.

Sejumlah pengembangan internal yang dilakukan menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pembaharuan bagi Perusahaan. Penguatan kapabilitas internal diharapkan dapat memberikan kekuatan strategis bagi Perusahaan untuk membuka peluang bisnis yang baru untuk mempertahankan keunggulan di pasar pengerukan dan galangan nasional berkelas dunia serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

In 2019, the Company has made its business to be focused on creating opportunities for business sustainability. The Company has renewed its ship as well as its operating tools to support the operational activities. A Dredging Ship of *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD) type with 2,700m³ will be one of the Company's main operating assets soon. A Joint Team was formed to make the necessary technical preparation to accelerate the procurement process.

In terms of internal capabilities, the Company has also conducted various customer gathering events throughout 2019. This is important for both the Company and clients to join forces in clearing the issues on operational permit that have made several projects to be postponed.

The Company has also reinforced its HR through new talents that have been recruited to occupy several strategic positions. The operational team has also gained new member to smooth the operation on the ship and on the ground.

The internal reinforcement throughout 2019 has made the year to be a year of renewal for the Company. Through the internal reinforcement, the Company has hoped to gain a strategic advantage to open new business opportunities to guard its existence as the leading entity with world class dredging and shipyard services and ensure business sustainability.

Daftar Isi

Table Of Contents

Tema <i>Theme</i>	3	Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>	76
Daftar Isi <i>Table Of Contents</i>	4	Profil Pejabat Senior <i>Senior Management</i>	83
Ikhtisar Kinerja 2019 <i>Performance Highlight in 2019</i>		Profil Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Profile</i>	86
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	8	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Composition</i>	92
Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>	10	Struktur Grup <i>Group Structure</i>	94
Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Report</i>	11	Daftar Entitas Anak, Joint Venture dan/atau Entitas Asosiasi <i>List of Subsidiaries, Joint Venture and/or Associates</i>	95
Rasio-rasio Keuangan <i>Financial Ratios</i>	12	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham <i>Chronology of Share Issuance and/or Listing</i>	96
Ikhtisar Operasional <i>Operating Ratios</i>	13	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya <i>Chronology of Securities Issuance and/or Listing</i>	96
Ikhtisar Saham <i>Share Highlights</i>	14	Sinergi Perusahaan <i>Corporate Synergy</i>	97
Informasi Obligasi <i>Bond Information</i>	14	Lembaga dan Profesional Penunjang Pasar Modal/ Perusahaan <i>Professionals and Institutions Supporting the Company/ Capital Market</i>	98
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya <i>Other Source of Funds Information</i>	14	Informasi pada Situs Web Perusahaan <i>Information on Company Website</i>	99
Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	15	Analisis & Pembahasan Manajemen <i>Analisis & Pembahasan Manajemen</i>	
Peristiwa Penting <i>Important Events</i>	16	Tinjauan Umum <i>General Overview</i>	102
Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan <i>Report to the Shareholders and Stakeholders</i>		Rencana Kerja dan Kebijakan Strategis 2019 <i>Strategy and Work Plan Policy in 2019</i>	107
Laporan Dewan Komisaris <i>Report from the Board of Commissioners</i>	20	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha <i>Operational Overview per Business Segment</i>	108
Laporan Direksi <i>Report from the Board of Directors</i>	32	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>	110
Pertanggungjawaban Atas Laporan Tahunan 2019 <i>Responsibility for the 2019 Annual Report</i>	45	Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspects</i>	130
Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>		Prospek Usaha <i>Business Prospect</i>	135
Identitas Perusahaan <i>Corporate Identity</i>	48	Informasi Kelangsungan Usaha <i>Going Concern</i>	137
Sekilas Rukindo <i>Rukindo at a Glance</i>	51	Tinjauan Pendukung Bisnis <i>Business Support Review</i>	
Jejak Langkah <i>Milestones</i>	53	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>	140
Visi, Misi, dan Nilai/Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Values/Cultures</i>	54	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	160
Tujuan dan Bidang Usaha Perusahaan <i>Company's Objective and Business Field</i>	58	Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i>	
Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	59	Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Legal Basis of Corporate Governance Implementation</i>	170
Wilayah Operasi <i>Areas of Operation</i>	60	Prinsip-prinsip GCG serta Komitmen dan Penerapannya <i>GCG Principles, Commitment, and Implementation</i>	171
Peta Pasar Pengerukan <i>Dredging Market Map</i>	62	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Implementation Objectives</i>	173
Alat Produksi <i>Production Equipment</i>	64	Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Implementation of Sustainable Governance</i>	174
Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	68	Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Socialization of Good Corporate Governance Policies</i>	182
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>	70	Struktur dan Kebijakan Penerapan GCG <i>GCG Structures and Policies</i>	183

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Information Regarding Major and Controlling Shareholders</i>	186	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access to Company Information and Data</i>	272
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	187	Transparansi Praktik Bad Corporate Governance <i>Transparency of Bad Corporate Governance</i>	273
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	192	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	
Direksi <i>Board of Directors</i>	204	Komitmen Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Commitment</i>	276
Assessment Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors</i>	213	Referensi Dasar Hukum CSR <i>CSR Legal Basis</i>	276
Pengungkapan Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	221	Struktur Pengelola CSR <i>CSR Management Structure</i>	277
Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Disclosure of Concurrent Position between Board of Commissioners and Board of Directors</i>	223	Metode dan Lingkup Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Implementation Methods and Scope</i>	278
Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi <i>Share Ownership Disclosure on Board of Commissioners and Directors</i>	226	Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Kegiatan Perusahaan <i>Affected or Influential Stakeholders due to the Company Activities</i>	280
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diversity Policies for Board of Commissioners and Directors</i>	227	Isu-isu terkait Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Kegiatan Perusahaan <i>Issues related to the Social, Economic, and Environmental Impacts of the Company's Activities</i>	281
Komite Audit <i>Audit Committee</i>	230	Pengelolaan Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Aktivitas Bisnis <i>Management of Social, Economic and Environmental Impacts due to the Business Activities</i>	282
Fungsi Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Function</i>	240	Strategi dan Program Kerja Penanganan Isu-isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan <i>Strategy and Work Program for Handling Social, Economic and Environmental Issues</i>	283
Fungsi Manajemen Risiko <i>Risk Management Function</i>	241	Tanggung Jawab Sosial Lebih dari Sekedar Kewajiban <i>Social Responsibility Beyond Obligation</i>	284
Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary for the Board of Commissioners</i>	242	Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial <i>Work Plan and Budget Realization of Social Responsibility Programs</i>	285
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	245	Tanggung Jawab Terkait Hak Asasi Manusia <i>Responsibilities Regarding to Human Rights</i>	286
Audit Internal <i>Internal Audit</i>	248	Tanggung Jawab Terkait Operasi yang Adil <i>Responsibilities Regarding Fair Operations</i>	289
Audit Eksternal <i>External Audit</i>	252	Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup <i>Environmental Responsibility</i>	293
Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	255	Tanggung Jawab Kepada Pekerja <i>Responsibility to Our Workers</i>	297
Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>	258	Tanggung Jawab di Bidang Sosial Masyarakat <i>Social Responsibility towards the Community</i>	302
Pedoman Perilaku <i>Code of Conduct</i>	260	Tanggung Jawab kepada Pelanggan <i>Responsibility to Customers</i>	305
Gratifikasi <i>Gratification</i>	263		
Kebijakan Anti Korupsi <i>Anti-Corruption Policy</i>	264		
Kebijakan Anti Penyuapan <i>Anti-Bribery Policies</i>	264		
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>State Official Wealth Report (LHKPN)</i>	265		
Whistleblowing System <i>Whistleblowing System</i>	266		
Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan <i>Significant Cases that the Company is Facing</i>	269		
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	270		
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik <i>Funding Information for Political Activities</i>	270		
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Goods and Services Procurement Policy</i>	271		



1

Ikhtisar Kinerja 2019

Performance Highlights in 2019



“

Rukindo merupakan perusahaan pengerukan dan galangan kapal nasional dengan keunggulan teknis dan pengalaman luas dengan tujuan untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Rukindo is a national company in dredging and reclamation that has a capability in terms of technical advantage and experiences to become a world class company.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Disajikan dalam Rupiah
In Rupiah

Keterangan Description	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Revenues	158.646.884.749	95.790.574.350	158.290.485.021	226.913.134.732	156.204.513.820
Beban Usaha Operating Expenses	(156.924.259.889)	(77.063.860.502)	(140.548.598.517)	(201.188.846.376)	(166.966.716.832)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	5.265.927.641	8.220.917.439	10.069.370.925	22.300.017.828	17.510.348.892
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	(6.905.015.642)	(626.061.529)	(4.810.724.675)	(23.230.276.401)	(4.221.128.924)
Laba Usaha Income from Operations	83.536.859	26.321.569.758	23.000.532.754	24.794.029.783	2.527.016.956
Pendapatan Keuangan Finance Income	251.017.375	592.646.056	1.434.263.942	3.337.674.376	1.172.421.579
Beban Keuangan Finance Expenses	(26.440.637.001)	(9.733.365.215)	(6.781.805.650)	(13.376.250.342)	(14.088.781.975)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Penghasilan Income (Loss) Before Final Tax & Income Tax	(26.106.082.767)	17.180.850.599	17.652.991.046	14.755.453.817	(10.389.343.440)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(1.703.239.023)	(3.110.246.889)	(1.160.375.125)	(4.959.021.799)	(3.747.529.928)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax	(27.809.321.790)	14.070.603.710	16.492.615.921	9.796.432.018	(14.136.873.368)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)					
Kini Current	(9.700.816.232)	-	-	-	-
Tangguhan Deferred	5.169.564.322	977.274.382	4.308.816.998	7.696.937.035	3.575.351.048

Disajikan dalam Rupiah
 In Rupiah

Keterangan Description	2015	2016	2017	2018	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	(32.340.573.700)	15.047.878.092	20.801.432.919	17.493.369.053	(10.561.522.320)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income Net of Income Tax					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti Remeasurements of defined benefit plans		-	-	(2.559.175)	(11.708.653)
Pajak penghasilan terkait Related income tax		-	-	639.794	2.927.163
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income Net of Income Tax		-	-	(1.919.381)	(8.781.490)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for The Year	(32.340.573.700)	15.047.878.092	20.801.432.919	17.491.449.672	(10.570.303.810)

Catatan/Notes:

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Rukindo tidak mencatatkan saham Perusahaan di bursa saham untuk publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai Laba per Saham. Selain itu, Perusahaan tidak menerapkan Laporan Keuangan Konsolidasian sehingga tidak terdapat Laba, baik Laba Tahun Berjalan ataupun Laba Komprehensif, yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali. Angka tahun 2018 mengalami penyajian kembali dan reklasifikasi (*restatement*).

In the last 5 (five) years, Rukindo had not listed its shares in the capital market for public. Therefore, there is no information regarding Earnings per Share. In addition, the Company did not apply a Consolidated Financial Statements and therefore there is no information regarding Income, both Income for the Current Year of Comprehensive Income, which attributed to Owners of the Parent and Non-Controlling Interests. The 2018 numbers were restated and reclassified (*restatement*).

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Disajikan dalam Rupiah
In Rupiah

Keterangan Description	2015	2016	2017	2018	2019
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	78.188.605.269	88.958.357.883	103.711.097.522	130.792.640.791	113.259.423.246
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	287.936.657.207	273.407.162.224	291.499.940.659	265.345.429.254	247.235.253.871
Jumlah Aset Total Assets	366.125.262.476	362.365.520.107	395.211.038.181	396.138.070.045	360.494.677.117
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	507.428.775.736	489.598.429.655	240.816.296.696	214.542.599.983	199.110.980.721
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	41.859.772.810	40.882.498.430	36.708.716.544	46.417.995.449	36.776.525.593
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	549.288.548.546	530.480.928.085	277.525.013.240	260.960.595.432	235.887.506.314
Ekuitas Equity	(183.163.286.070)	(168.115.407.978)	117.686.024.941	135.177.474.613	124.607.170.803
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities and Equity	366.125.262.476	362.365.520.107	395.211.038.181	396.138.070.045	360.494.677.117

Catatan/Notes:

Angka tahun 2018 mengalami penyajian kembali dan reklasifikasi (*restatement*).
The 2018 numbers were restated and reclassified (*restatement*).

Laporan Arus Kas

Cash Flow Report

 Disajikan dalam Rupiah
 In Rupiah

Keterangan Description	2015	2016	2017	2018	2019
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	(42.033.620.737)	43.122.195.250	30.719.108.373	15.701.839.642	(18.115.000.981)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(1.204.100.303)	(2.261.156.542)	(31.152.266.939)	(8.630.339.763)	(2.053.603.181)
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (used for) Financing Activities	20.000.000.000	(1.190.000.000)	(4.550.000.000)	(2.750.000.000)	(4.500.000.000)
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	-	-	-	4.595.958	5.979.410
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(23.237.721.040)	39.671.038.708	(4.983.158.566)	4.326.095.837	(24.662.624.752)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	32.967.719.526	9.729.998.486	49.401.037.194	44.417.878.628	48.743.974.465
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	9.729.998.486	49.401.037.194	44.417.878.628	48.743.974.465	24.081.349.713

Catatan/Notes:

 Angka tahun 2018 mengalami penyajian kembali dan reklasifikasi (*restatement*).

 The 2018 numbers were restated and reclassified (*restatement*).

Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Keterangan Description	Satuan Unit	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Lancar Current Ratio	%	15,41	18,17	43,07	60,96	56,88
Rasio Cepat Quick Ratio	%	3,50	11,39	20,53	41,52	21,09
Rasio Kas Cash Ratio	%	1,92	10,09	18,44	22,72	12,09
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	%	150,03	146,39	70,22	65,88	65,43
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	N/A	N/A	235,82	193,05	189,30
Rasio Liabilitas Jangka Panjang Terhadap Ekuitas Long-Term Debt to Equity	%	N/A	N/A	31,19	34,34	29,51
Rasio Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	%	N/A	N/A	17,68	12,94	N/A
Rasio Imbal Hasil Laba Terhadap Total Aset (ROA) Return on Assets (ROA)	%	N/A	4,15	5,26	4,42	N/A
Rasio Perputaran Piutang Turnover Ratio	hari days	28	27	13	36	68

Ikhtisar Operasional

Operating Ratios

Disajikan dalam Rupiah
In Rupiah

Keterangan Description	2015	2016	2017	2018	2019
Pengerukan dan Reklamasi Dredging and Reclamation	111.062.664.115	22.329.872.799	84.897.002.613	141.932.771.371	103.452.811.634
Bareboat Charter/Time Charter Bareboat Charter/Time Charter	30.907.523.717	48.771.211.017	49.589.196.671	49.039.558.627	29.232.451.453
Jasa Galangan Shipyard Services	14.823.734.921	18.452.900.531	7.832.419.014	19.575.079.230	19.597.844.554
Sewa dan Kerja Sama Usaha Galangan Shipyard Rental and Cooperation	1.826.791.996	6.236.590.003	2.725.075.781	3.321.144.992	2.732.182.061
Pembangunan Kapal Ship Building Services	-	-	13.224.290.942	13.044.580.512	1.189.224.118
Survei Survey	26.170.000	-	22.500.000	-	-
Total Pendapatan Total Revenues	158.646.884.749	95.790.574.350	158.290.485.021	226.913.134.732	156.204.513.820

Catatan/Notes:

Angka tahun 2018 mengalami penyajian kembali dan reklasifikasi (*restatement*).

The 2018 numbers were restated and reclassified (*restatement*).

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Informasi Saham dan Aksi Korporasi

Sampai dengan akhir tahun 2019, Rukindo tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan. Rukindo juga tidak melakukan aksi korporasi di sepanjang tahun 2019. Jumlah 612.164 lembar saham dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar 99,9% dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sebesar 0,09%.

Dividen Saham

Untuk tahun buku 2019, Rukindo tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham. Kebijakan pembagian dividen mengacu kepada Anggaran Dasar, sementara keputusan pembagian dividen berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Share Information and Corporate Actions

Until the end of 2019, Rukindo had not traded its shares and therefore there is no information regarding the share price during its highest, lowest, and closing moment as well as the volume of which it was traded. In addition, Rukindo had not conducted any corporate action in 2019. The total 612,164 shares owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) by 99.9% and PT Pengembang Pelabuhan Indonesia by 0.09%.

Share Dividend

In 2019 fiscal year, Rukindo did not share any dividend to the Shareholders. The dividend payment policy refers to the Articles of Association, while the decision on dividend payment lies on the General Meeting of Shareholders.

Informasi Obligasi

Bond Information

Per 31 Desember 2019, Rukindo tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbilan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2019, Rukindo had not issued any bond/sharia bonds/convertible bonds and therefore there is no information regarding outstanding bond/sharia bond/convertible bonds, interest/reward rate, maturity date and bond/sharia bond ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Other Source of Funds Information

Per 31 Desember 2019, Rukindo tidak menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) atau pendanaan berbentuk utang lainnya.

As of December 31, 2019, Rukindo had not issued Medium Term Note (MTN) or other funds in the form of debts.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Perusahaan Jasa Pengerukan Terkemuka & Terpercaya dengan Mutu & Kualitas Pelayanan Memuaskan 2019

Leading & Trusted Dredging Company with Excellent Quality & Satisfactory Services in 2019

Diterima dari "Bangun Indonesia dengan Cinta" Tahun 2019.

Received from "Bangun Indonesia dengan Cinta" in 2019.



Keunggulan Kualitas Perusahaan

Quality Excellence

Diterima dari Indonesia Quality Excellence tahun 2019.

Received from Indonesia Quality Excellence in 2019.



CSR Terbaik Indonesia Award 2019

Best of The Best CSR Indonesia Award 2019

Diterima dari Majalah CSR Indonesia dalam ajang CSR Award & Summit 2019.

Received from CSR Indonesia Magazine at the CSR Award & Summit 2019.



Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2019

Winner of PR Award Indonesia 2019

Diterima dari "Humas Indonesia" (member of PR Indonesia Group) atas kinerja humas Perusahaan dalam kategori Terpopuler di Media Online 2019 Sub Kategori Anak BUMN Non Tbk.

Received from "Humas Indonesia" (member of PR Indonesia Group) for the Company's public relation performance in the category of The Most Popular in the 2019 Online Media of Non-Listed SOE Subsidiary.

Peristiwa Penting

Important Events



23 April 2019

April 23, 2019

Rapat koordinasi, bertempat di Cabang Pontianak, mengenai pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pontianak.

Coordination meeting at Pontianak Branch regarding the dredging lane at Pontianak Port.



24 April 2019

April 24, 2019

Kunjungan kerja ke Pelabuhan Pontianak.

Site visit to Pontianak Port.



28 Mei 2019

May 28, 2019

Acara pelepasan program Mudik Bersama dengan memberangkatkan 100 orang peserta yang mudik menggunakan 2 (dua) bus dari Tanjung Priok ke Purwokerto.

A releasing ceremony for 100 participants of "Mudik Bersama" (homecoming) program who used 2 (two) buses from Tanjung Priok to Purwokerto.



29 Juli 2020

July 29, 2020

Penandatanganan Akta Notaris, bertempat di Rukindo, untuk Pengangkatan Direksi PT Pengerukan Indonesia.

The signing of Notary Deed of Board of Directors Appointment at Rukindo.



7 Agustus 2019

August 7, 2019

Penyerahan 10 ekor kambing kepada musala, masjid, dan yayasan sekitar Rukindo.

Donation of 10 goats to praying houses and other social institutions around Rukindo.



4 September 2019

September 4, 2019

Pekerjaan Docking KKC Ranau bertempat di Galangan dan Perbengkelan Kapal Rukindo.

Docking work of KKC Ranau at Rukindo's Shipyard and Workshop.



26 September 2019
September 26, 2019

Penandatanganan MoU dengan Intraco Ltd, bertempat di Rukindo, untuk kerja sama CSD Batang Hari 30.

The signing of MoU for CSD Batang Hari 30 cooperation with Intraco Ltd at Rukindo.



21 Oktober 2019
October 21, 2019

Sosialisasi kegiatan pemadam kebakaran di Ruang Rapat Rukindo.

Socialization of fire extinguishing program at the Meeting Room of Rukindo.



31 Oktober 2019
October 31, 2019

Peluncuran 9 (sembilan) kapal sampah milik Suku Dinas Lingkungan kepulauan Seribu.

The launching of 9 (nine) garbage ships of Environmental Department of Kepulauan Seribu.



28-29 November 2019
November 28-29, 2019

Rukindo mengikuti kegiatan Pameran RAKERNAS Grup IPC di PMLI, Ciawi, Bogor.

Rukindo participated in the General Working Meeting of IPC Group at PMLI, Ciawi, Bogor.



6 Desember 2019
December 6, 2019

Keikutsertaan dalam kegiatan IPC Culture Festival di Kantor IPC, Tanjung Priok.

Participated in the IPC Culture Festival at IPC Office at Tanjung Priok.



20 Desember 2019
December 20, 2019

Kegiatan donor darah di Gedung Serba Guna Rukindo.

Blood donation activity at Rukindo.



2

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to the Shareholders and Stakeholders





“

Perusahaan memiliki kapabilitas yang mumpuni dan fasilitas unggulan akan galangan kapal dan perbengkelan serta lahan yang cukup untuk perkembangan lini bisnis dan mempertahankan kualitas Rukindo untuk mencapai kualitas perusahaan berkelas dunia.

The Company has the qualities and excellent facilities for shipyard and workshop as well as enough land for the development of our business lines and maintain the quality of Rukindo to become a world class company.



Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners



Hambra

Komisaris Utama

President Commissioner

Dewan Komisaris mengapresiasi keputusan Direksi menjalankan kerja sama dengan mitra strategis dan optimalisasi alat produksi untuk persiapan pengembangan usaha di masa depan.

The Board of Commissioners appreciates the decision of the Board of Directors in working closely with strategic partners and optimizing the production equipment in preparation for future business development.

Para Pemegang Saham dan Sege-nap Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Bimbingan-Nya, sebagai Komisaris Utama, atas nama Dewan Komisaris, izinkanlah kami menyampaikan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Dewan Komisaris telah menjaga tingkat independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan. Kami senantiasa mengedepankan kepentingan Perusahaan dan memastikan Perusahaan berjalan sesuai dengan rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sebelum memulai laporan Dewan Komisaris, perkenalkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan pada tahun 2019. Per 31 Desember 2019, Pemegang Saham telah mengangkat Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 31 Desember 2019. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2019, komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Prasetyadi
Komisaris	: Bambang Supriyadi Ervan
Komisaris	: Syaiful Islam

Seiring dengan berjalannya waktu dalam proses pembuatan Laporan Tahunan 2019 yang diselesaikan pada pertengahan 2020, terjadi perubahan Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: KP.03/8/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor: PPI-623-08062020-012 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama, Perusahaan mengangkat Hambra sebagai Komisaris Utama menggantikan Prasetyadi. Keputusan ini telah diaktakan melalui Akta No. 39 tanggal 15 Juni 2020. Dengan demikian,

To Our Respected Shareholders and Stakeholders,

By giving praise and gratitude to God Almighty for His Blessings and Guidance, as President Commissioner, on behalf of the Board of Commissioners, allow us to convey the results of our supervision on the Company's management to the Shareholders and Stakeholders. The Board of Commissioners has maintained the level of independence in performing the duties and responsibilities in overseeing the management of the Company. We have always prioritized the interests of the Company and ensured that the Company has been running in accordance with the business plan.

Changes to the Composition of the Board of Commissioners

Before we start to discuss about our report, allow us to discuss certain issues related to changes in the composition of the Board of Commissioners in 2019. As of December 31, 2019, the Shareholders have appointed the Company's Board of Commissioners based on the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding Amendment to the Articles of Association of the Company and the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners that have been notarized based on Deed No. 63 dated December 31, 2019. Accordingly, as of December 31, 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner	: Prasetyadi
Commissioner	: Bambang Supriyadi Ervan
Commissioner	: Syaiful Islam

As the Annual Report for Fiscal Year 2019 was being draft to meet its mid 2020 submission, there was a change in the Board of Commissioners' composition. Based on the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) Number: KP.03/8/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 and Number: PPI-623-08062020-012 on June 8, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of President Commissioner, the Company has appointed Hambra to take over Prasetyadi as the President Commissioner. This decision has been ratified by the Deed No. 39 on June 15 2020. Accordingly, by the

pada saat Laporan Tahunan 2019 ini diselesaikan, susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Hambra

Komisaris : Bambang Supriyadi Ervan

Komisaris : Syaiful Islam

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas pengawasan yang diemban oleh Dewan Komisaris pada periode tahun buku 2019 dilakukan oleh Dewan Komisaris sebelumnya yaitu Dani Rusli Utama.

Kami telah menerima laporan pengawasan dan menelaah isi dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kami berkomitmen untuk meneruskan tugas pengawasan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisaris sebelumnya dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh para Pemegang Saham.

Kami, selaku Dewan Komisaris yang baru, sangat mengapresiasi kerja keras anggota Dewan Komisaris sebelumnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah memberikan rekomendasi dan nasihat yang membangun untuk membawa Perusahaan melewati tahun 2019 dengan baik.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Kondisi perekonomian global di sepanjang 2019 mengalami tekanan dari berbagai aspek seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tensi geopolitik yang terus meningkat, pelemahan ekonomi di Asia dan beberapa negara secara hampir merata di seluruh penjuru dunia. Rantai pasok global cenderung stagnan sehingga mengakibatkan arus pergerakan komoditas menjadi terhambat. Secara umum, perekonomian global di tahun 2019 lebih diwarnai oleh tren penurunan yang terjadi secara merata dan menurunkan pertumbuhan perekonomian global dari sebelumnya diprediksi di angka 3,3% menjadi 2,9%.

Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tetap berdaya dan Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 tetap terjaga di atas angka 5,02% dan terus meningkat untuk mencapai angka pertumbuhan final sebesar 5,10%. Angka pertumbuhan ini memang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar

time this Annual Report for Fiscal Year 2019 is finished, the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner : Hambra

Commissioner : Bambang Supriyadi Ervan

Commissioner : Syaiful Islam

Hence, it can be said that the supervisory from the Board of Commissioners in the fiscal year 2019 was carried out by the previous Board of Commissioners, Dani Rusli Utama.

We have received the supervisory report and have examined its contents and evaluated its compliance with the applicable provisions in the Company's Articles of Association as well as the laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance. We are committed to continue the work of the previous Board of Commissioners and pay the trust that our Shareholders have given to us.

We, as the new Board of Commissioners, really appreciate the hard work that the previous Board of Commissioners has given and would like to give our highest appreciation because their recommendation and inputs have brought the Company to pass 2019.

Assessment on the Performance of the Board of Directors

The global economic conditions in 2019 have come under pressure from various aspects including the trade war between the United States and China, the geopolitical tension, as well as the economic downturn in Asia and several countries that have gone almost evenly throughout the world. The global supply chains have tended to stagnate, hampering the commodity flow. In general, the global economy in 2019 was filled by a downward trend in almost every country and decreased the global economic growth from the early prediction of 3.3% to 2.9%.

In the midst of a global economic slowdown, Indonesia still managed to maintain its economy to be resilient and Bank Indonesia has noted that the national economic growth rate in 2019 was above 5.02% and has continued to increase to reach a final growth rate of 5.10%. This growth is still lower 5.17% in 2018 but it is still relatively high compared to other countries that tend to decline. The economic growth was

5,17% namun angka pertumbuhan ini tetap tergolong tinggi dibandingkan kondisi negara lain yang cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga di tengah penurunan kinerja ekspor.

Perusahaan memandang bahwa pergerakan barang akan selalu tetap dijaga untuk berjalan dengan optimal. Hal ini menjadi sebuah optimisme tersendiri bagi Perusahaan mengingat industri pelabuhan memiliki peran sentral untuk memastikan kebutuhan domestik tetap terjaga dan potensi pengembangan ekonomi ke luar negeri dapat terealisasi. Kondisi ekonomi dan industri tidak mempengaruhi secara langsung kinerja Perusahaan, namun Dewan Komisaris senantiasa memonitor dinamika ekonomi dan industri dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk melindungi keberlanjutan usaha Rukindo.

Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi Perusahaan sangat memahami kondisi ekonomi dan industri yang membayangi Perusahaan. Sebagai perusahaan pengerukan dengan rekam jejak yang kuat, Rukindo memiliki keunggulan bisnis yang potensial untuk pengembangan usaha. Dewan Komisaris melihat komitmen kuat yang ditunjukkan Direksi untuk meningkatkan kinerja usaha ke level selanjutnya yang lebih tinggi.

Sebagai perusahaan pengerukan yang berada di bawah Grup IPC, sangat penting bagi Perusahaan untuk memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Penilaian kinerja Direksi pada tahun 2019 telah dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019. RKAP tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/30/1/12/PAP/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-100-30012019-020 tanggal 30 Januari 2019 dengan realisasi per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP. Target pengerjaan pengerukan merupakan salah satu bagian penting dari pencapaian target Grup IPC secara keseluruhan untuk menjadi perusahaan berkelas dunia untuk mendukung visi besar Pemerintah Indonesia akan Poros Maritim Dunia.

Pada tahun 2019, kinerja finansial Perusahaan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Dari sisi pendapatan, Perusahaan berhasil merealisasikan sejumlah Rp156,20 miliar atau 42,71% dari target RKAP 2019 sebesar Rp365,73 miliar. Pada tahun 2019, Perusahaan menderita kerugian Rp10,57 miliar. Hasilnya, tingkat kesehatan Perusahaan dari sisi realisasi aspek

supported by domestic demand that has been maintained amidst the declining export performance.

The Company views that the movement of goods will always be maintained to run optimally. This is an optimism for the Company considering that the port industry has a central role to ensure that domestic needs are maintained and the potential for overseas economic development can be realized. The economic and industrial conditions do not directly affect the Company's performance, but the Board of Commissioners constantly monitors the economic and industrial dynamics and takes anticipatory steps needed to protect the sustainability of Rukindo's business.

The Board of Commissioners believed that the Directors is fully aware of the economic and industrial conditions and the impact on the Company. As a company with a strong record in dredging sector, Rukindo has a potential business advantage for business development. The Board of Commissioners has seen the strong commitment that the Directors have shown to improve our business performance to a higher level.

As a dredging company under IPC Group, it is very important for the Company to meet the Key Performance Indicator (KPI) that the Shareholders have determined. The evaluation on the Board of Directors in 2019 has been compared with the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of 2019. The RKAP has been determined based on Circular GMS Decree Number: SK.03/30/1/12/PAP/UT/PI.II-19 and Number: PPI-100-30012019-020 on January 30, 2019 with the realization as of December 31, 2019 that has been audited by the KAP. The dredging target is an important part of achieving the overall target of IPC Group to become a world-class company that supported the great vision of Indonesian Government on the Global Maritime Axis.

In 2019, the Company's financial performance was lower compared to 2018. In terms of revenues, the Company has realized a total of Rp156.20 billion or 42.71% of the targeted Rp365.73 billion of 2019 RKAP. In 2019, the Company suffered a loss of Rp10.57 billion. This achievement has made the Company's soundness level in terms of the financial realization in 2019 to be 21.50, lower than the targeted 47.00 in RKAP

keuangan tahun 2019 mencapai skor 21,50, lebih rendah dari skor RKAP sebesar 47,00. Pencapaian ini membuat kondisi Perusahaan dikategorikan sebagai Kurang Sehat "BBB".

Salah satu indikator kinerja operasional Perusahaan adalah kinerja produksi Jasa Pengerukan yang pada tahun 2019 terealisasi sebesar 1,64 juta m³ atau 46,34% dari RKAP 2019 sebesar 3,53 juta m³. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,77 juta m³, terjadi penurunan produksi Jasa Pengerukan sebesar 7,43%. Kinerja Jasa Galangan tahun 2019 menyelesaikan *docking* kapal sebanyak 33 unit dengan 62.325 GT. Bila dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 32 unit kapal *docking* dengan 62.869 GT, terjadi peningkatan yang relatif kecil di tahun 2019. Realisasi produksi tersebut menghasilkan tingkat kesehatan aspek operasional Perusahaan dengan skor 17,00. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2019 dengan skor 29,60, tingkat kesehatan Perusahaan dikategorikan sebagai Kurang Sehat "BBB".

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kerja keras Direksi. Komitmen yang kuat dan semangat juang yang tinggi mencerminkan loyalitas dan tanggung jawab Direksi dalam berupaya untuk mencapai target usaha. Walaupun pencapaian operasional dan finansial meleset dari target, namun Dewan Komisaris mengapresiasi keputusan Direksi untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun perbaikan dan penguatan. Tahun 2019 menjadi tahun perbaikan dan penguatan bagi Perusahaan dari berbagai sisi, termasuk proses kerja administrasi untuk mendukung keselarasan kinerja *back office* dan operasional di lapangan, peremajaan serta perbaikan alat-alat produksi dan perkapalan, serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dengan perekrutan tenaga kerja baru dan sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif.

Terdapat permasalahan dalam hal penagihan piutang pekerjaan yang telah selesai yang belum optimal. Hal ini tentunya menghambat Perusahaan untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Sejumlah pekerjaan juga mengalami penundaan di tahun 2019 karena belum lengkapnya dokumen yang terkait dengan perijinan, terutama izin lingkungan terkait Perubahan Rencana Kerja dari Pemilik Proyek. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Direksi untuk lebih aktif mencari potensi pendapatan dari peluang usaha yang lain sembari menekan biaya produksi untuk memaksimalkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

score. This achievement has made the Company to be categorized as "BBB" Less Sound.

One of the Company's indicators of operational performance is the Dredging Services which in 2019 was 1.64 m³ or 46.34% from 3.53 m³ of RKAP 2019. Compared to 1.77 million m³ in the previous year, the performance of Dredging Services decreased by 7.43%. The Shipyard Services performance in 2019 recorded 33 units of docking ships with 62,325 GT. Compared to 32 units of docking ships with 62,869 GT in the previous year, there was a slight increase in 2019. The production performances which previously mentioned had made the Company's score of soundness level in operational aspect reached 17.00. Compared to the score target of 29.60 in 2019, the Company's soundness level is considered to be Less Sound "BBB".

The Board of Commissioners highly appreciates the hard work the the Directors have shown. The strong commitment and fiery fighting spirit reflected the loyalty and accountability of the Directors in striving to achieve business targets. Even if the operational and financial targets were not achieved, the Board of Commissioners appreciates the decision of the Directors to make 2019 a year of improvement and reinforcement. The year of improvement and reinforcement in 2019 was done in various aspects, including administration to support a seamless operation between the back office and operational performance on field, renewing and improving the production and shipping equipment, and enhancing the quality of Human Resources (HR) by recruiting new workers and implementing advance appraisal system.

There were issues in the collecting accounts receivable from the completed work. This certainly prevents the Company from achieving the targeted profit achievement. A number of projects have also been delayed in 2019 due to incomplete documents related to licensing, especially environmental permits related to Changes in Work Plans from Project Owners. This is a major homework for the Directors to be more active in looking for other potential business opportunities while reducing production costs to maximize the overall financial performance.

Walaupun di tengah sejumlah tantangan, Dewan Komisaris mengapresiasi sejumlah tindakan perbaikan yang dilakukan Direksi untuk menjelang tahun-tahun ke depannya dengan lebih baik. Dewan Komisaris berharap bahwa Direksi tidak pernah berhenti untuk berinovasi dalam mengoptimalkan dan meremajakan utilitas produksi Perusahaan guna memaksimalkan kinerja finansial dan senantiasa menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target. Sejumlah pencapaian yang belum sesuai dengan target diharapkan akan menjadi pemacu semangat Direksi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target ke depannya.

Melihat pencapaian lainnya yang telah ditunjukkan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi tetap memperhatikan kualitas kinerja pendukung usaha Perusahaan dan senantiasa mengedepankan pengelolaan Perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat, salah satunya dari hasil program "Survei Kepuasan Pekerja". Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kepuasan pekerja (*Employee Satisfaction Index*) adalah sebesar 3,20 dari skala 5,00 indeks. Nilai ini termasuk dalam kategori "Cukup Puas". Nilai tertinggi untuk kepuasan pekerja secara umum adalah pada pernyataan "Pengetahuan dan keahlian saya telah sesuai untuk menjalankan tugas" dengan indeks kepuasan 3,67. Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen telah melakukan hal yang tepat dalam menempatkan pekerja sesuai dengan kompetensi dan mendukung pengembangan keahlian melalui program pelatihan yang berkualitas dan berguna untuk mendukung kinerja SDM.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Perusahaan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan RKAP 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Direksi meskipun telah berhasil menunjukkan komitmen dan etos kerja yang tinggi di tengah tantangan usaha. Diharapkan Direksi dapat memperhatikan beberapa catatan penting yang menjadi perhatian ke depannya, namun Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan kapasitas pengalaman dan kualitas profesional para anggota Direksi, catatan-catatan tersebut akan tercapai seiring dengan perkembangan usaha.

Although in the midst of challenges, the Board of Commissioners really appreciates the reinforcement actions that the Directors have initiated to improve future performance. The Board of Commissioners has high hope that the Directors will never stop innovating in optimizing and reinforcing the Company's production utilities to maximize financial performance and always be success in achieving targets. The achievements that were still off targets are expected to trigger the Directors to improve their performance and achieve the future targets.

Based on other achievements, the Board of Commissioners believed that the Directors have continued to be aware of the quality of the Company's supporting business units and have always prioritized a sound and responsible management on the Company. This can be seen, one of them through the "Employee Satisfaction Survey" program. Based on the survey, the Employee Satisfaction Index is 3.20 out of the 5.00 index scale. This can be categorized as "Somewhat Satisfied". The highest value for the general satisfaction goes to "My knowledge and skills are adequate to do my job" with a satisfaction index of 3.67. The Board of Commissioners believed that the management has done placed the workers in accordance with their competencies and also supported their development through quality training programs that are useful to support HR performance.

Based on the Board of Commissioners' supervision on the Company's performance as of December 31, 2019, compared to the 2019 RKAP, the Board considers that there is still a sizable amount of homework for the Directors despite their success in demonstrating high commitment and splendid work ethic in the midst of business challenges. It is expected that the Board of Directors can pay attention to some important notes for future business activities, but the Board believes that with their capacities, experiences and professional qualities, these important notes will be achieved in line with business development.

Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Strategis

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk menilai jalannya pengelolaan Perusahaan tidak hanya berdasarkan kinerja akhir tahun buku tapi juga di sepanjang proses operasional Perusahaan selama tahun buku di 2019. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi kebijakan strategis.

Mekanisme utama dari tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris adalah melalui mekanisme rapat. Keputusan mengenai rapat Dewan Komisaris dilakukan bersama dengan Komite Audit. Hal ini juga berpengaruh terhadap mekanisme rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, yang juga mengundang Komite Audit di setiap pelaksanaannya. Seiring dengan perubahan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2019, mekanisme rapat internal Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi akan ditelaah berdasarkan evaluasi mengenai efektivitas pelaksanaan rapat dan perkembangan usaha ke depannya.

Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2019 yang diadakan bersama dengan Komite Audit. Walaupun demikian, Komite Audit juga memiliki mekanisme rapat internal komite yang dilaksanakan dengan mengundang Dewan Komisaris. Sedangkan rapat gabungan (rapat koordinasi) bersama Direksi dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali.

Secara garis besar agenda dalam setiap rapat selalu berkisar pada pembahasan kinerja operasi dan kinerja keuangan Perusahaan di sepanjang tahun buku. Perusahaan membutuhkan pengawasan yang komprehensif mengenai kinerja usaha yang cukup mengalami tantangan di tahun 2019. Selain itu, pokok pembahasan dalam rapat juga membahas mengenai kinerja aset Perusahaan dari segi kapal – yang merupakan aset krusial dalam pelaksanaan aktivitas operasional, kinerja percepatan penagihan piutang, optimalisasi produksi pengerukan, penyelesaian kewajiban hutang, informasi kemunduran proyek, dan pengembangan bisnis Perusahaan.

Secara khusus, Dewan Komisaris juga telah memberikan rekomendasi dan saran kepada manajemen terkait beberapa hal dalam hal evaluasi capaian target dan realisasi RKAP bulanan, tindak lanjut evaluasi laporan Triwulan Kinerja Perusahaan, isu strategis pengembangan bisnis, dan terkait penyusunan RJPP 2020-2024 dan RKAP 2020.

Supervision on Strategic Policy Implementation

The Board of Commissioners is also responsible to assess the management of the Company, but not only based on its end of year performance, as we have also assessed the Company's operational activities during the fiscal year 2019. This can be seen from the implementation of our supervisory duties towards the implementation of strategic policies.

Our main mechanism of supervision was carried out through a meeting mechanism. Decisions regarding Board of Commissioners meetings were made together with the Audit Committee. This has also affected the mechanism of our coordination meetings with the Directors, which were also conducted by inviting the Audit Committee. In line with the changes in the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2019, the mechanism of the Board's internal and coordination meetings is also reviewed based on the evaluation of the effectiveness of the meeting and future business development.

The Board of Commissioners has held 3 (three) internal meetings in 2019 with the Audit Committee. The Audit Committee also has its own internal meeting and the Board of Commissioners was invited. While the joint meetings (coordinating meetings) with the Directors were held 8 (eight) times.

Broadly speaking, the agenda in each meeting always revolves around the discussion of operational and financial performance in the fiscal year. The Company needs comprehensive supervision on its business performance in facing the challenging 2019. In addition, the meetings have also discussed the Company's assets in terms including vessel – which is crucial to our operation, acceleration on receivables collection, optimization of dredging activities, settlement of debt obligations, project setback, and business development.

In particular, the Board of Commissioners has also given recommendations and suggestions to the management on several matters on monthly targets and realizations according to RKAP, follow-up on the Company's Quarterly Performance report, strategic business development issues, and the preparation of RJPP 2020-2024 and RKAP 2020.

Pada tahun 2019, Direksi telah mempertimbangkan arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang material terkait pencapaian target dan keberlangsungan usaha. Kesepakatan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi juga telah dipatuhi dan dijalankan oleh Direksi dengan penuh komitmen.

Dewan Komisaris belum memiliki organ-organ pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan sehingga pada tahun 2019 proses pengawasan dilakukan dengan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan Perusahaan, sesuai dengan koridor peraturan dan perundang-undangan terkini mengenai Perseroan Terbatas, tanpa melangkahi wewenang Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi sangat kooperatif dan memahami kondisi Perusahaan saat ini dan menerima setiap masukan dan arahan dengan terbuka. Hal ini menjadi sebuah nilai positif yang tentunya menjadi kabar baik bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris akan terus memperkuat sinergi dengan Direksi untuk mencapai pertumbuhan usaha berkelanjutan dan komitmen ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan bersama dengan organ-organ pendukung Dewan Komisaris ke depannya.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Kinerja Komite Audit dapat dilihat dalam beberapa hal berikut:

1. Melakukan kajian hasil kinerja Perusahaan dan informasi keuangan, baik secara triwulanan, per semester ataupun tahunan.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi dan saran atas temuan Auditor Internal yang disepakati oleh manajemen.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya dan memastikan telah mendapatkan prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.

In 2019, the Directors have considered our directions and recommendations when making material decisions related to targets and business continuity. The joint agreements between the Board of Commissioners and the Directors have also been followed and implemented by the Directors.

The Board of Commissioners has the Audit Committee the supporting organ to assist the supervisory function and a Secretary to the Board of Commissioners to assist with administrative issues. In 2019, the supervision process was carried out effectively thanks to the supporting committee and the Board of Commissioners has also been involved in the Company's activities, but still within the corridor of the applicable laws and regulations regarding Limited Liability Companies, without overstepping the authority of the Directors. The Board of Commissioners considers that the Directors has been very cooperative and understands the current condition of the Company and is very open to input and direction. This is positive which and we believed to be good news for Shareholders and Stakeholders. The Board of Commissioners will continue to strengthen the synergy with the Directors to achieve sustainable business growth and this commitment will be developed together with our supporting organs.

Evaluation of Committee Performance Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, functions and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the supporting committees. The Board of Commissioners has the Audit Committee the supporting organ to assist the supervisory function and a Secretary to the Board of Commissioners to assist with administrative issues. In 2019, the Board of Commissioners has considered that the Audit Committee has performed properly in assisting the supervisory duties of the Board of Commissioners. The Audit Committee's performance can be seen as the following:

1. Reviewing the Company's performance and financial information, either quarterly, semesterly or annually.
2. Overseeing the follow-up of recommendations and suggestions on the Internal Auditor findings that the management has agreed.
3. Providing recommendations on improvement of the management control system and its implementation and ensuring that it has obtained satisfactory evaluation on all information that the Company has issued.

4. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
5. Melaksanakan tugas khusus lainnya mencakup pelaksanaan survei lapangan untuk melihat kondisi fisik unit-unit kapal keruk yang dimiliki Perusahaan dalam rangka penghapusbukuan.

Dewan Komisaris tidak memiliki komite lainnya. Terkait dengan Komite Manajemen Risiko, fungsi ini diemban oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam hal penilaian terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris, dapat disimpulkan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan yang berhubungan dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja organ pendukung fungsi pengawasan yang kami jalankan. Implementasi program kerja serta fungsi masing-masing organ pendukung, yang dijalankan dengan tepat, akan mendorong penerapan standar tata kelola yang baik secara menyeluruh di setiap aktivitas Perusahaan.

Penilaian Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Sasaran kinerja Perusahaan untuk tahun depan tertuang dalam RKAP 2020 berdasarkan Surat Direksi Nomor: 2/12/11/Dirut-2019 tanggal 2 Desember 2019. Kami telah mempelajari RKAP dimaksud dan berpandangan bahwa sasaran-sasaran tersebut, meskipun sangat menantang, tetapi dapat direalisasikan. Kami percaya apabila Perusahaan berhasil melaksanakan strategi-strategi usaha secara matang, melalui penetapan RKAP, maka proyeksi Pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp216,85 miliar dapat dicapai.

Persetujuan dan optimisme Dewan Komisaris didasarkan kepada rencana pengerjaan proyek dan juga pengoptimalan pengoperasian penyewaan alat produksi. Direksi juga telah menetapkan strategi peraih proyek pasar sebesar 3,46 juta m³ dengan nilai kontrak sebesar Rp382,52 miliar yang dirasa sangat realistis dan tepat untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Operasi.

Pencapaian RKAP tahun 2020 perlu dikawal dan dilaporkan secara berkala. Terlebih lagi mengingat tahun 2020 telah diawali dengan pandemi Covid-19 yang menghambat kinerja ekonomi dan operasional seluruh industri, tidak terkecuali

4. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest.
5. Carrying out other special tasks including work visit to assess the physical condition of the dredging units that the Company own for write-off.

The Board of Commissioners has no other committee. Related to the Risk Management Committee, this function is carried out by the Board of Commissioners and the Audit Committee. In terms of the performance of the Secretary to the Board of Commissioners, it can be concluded that the Secretary has assisted the Board of Commissioners in performing administrative function related to the Board of Commissioners' supervisory duties.

The Board of Commissioners highly appreciates the performance of its supporting organ. The implementation of the working program and their functions, which conducted properly, will encourage the overall implementation of good governance standards in every activity of the Company.

Assessment on Business Prospects Prepared by the Directors

The Company's targets for next year are set out in the 2020 RKAP that is based on the Decree of the Directors Number: 2/12/11/Dirut-2019 on December 2, 2019. We have studied the RKAP and believed that these goals, although very challenging, can be realized. We believe that if the Company succeeds in performing the business strategies on the RKAP, the projected revenues of Rp216.85 billion in 2020 can be achieved.

The approval and optimism of the Board of Commissioners is based on the project work plan and also the optimization from the procurement of production equipment. The Directors have also set the projection for market acquisition to be 3.46 million m³ with a contract value of Rp382.52 billion which is considered very realistic and appropriate to support the achievement of the Operating Revenues.

The progress to achieve the 2020 RKAP needs to be monitored and reported regularly. Especially considering that 2020 is started with the Covid-19 pandemic which impeded the economic and operational performance of the entire

industri pelabuhan yang dijalankan oleh Rukindo. Tantangan semakin berat ada di mata namun tentunya hal ini tidaklah harus menjadi hambatan untuk terus meningkatkan kinerja usaha dan mencapai target usaha.

Kondisi tersebut tentu saja mengharuskan setiap *progress* usaha diukur dengan seksama dan manajemen harus siap untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan antisipasi. Diharapkan Direksi dapat segera mencari cara terbaik untuk mengantisipasi isu di tahun 2019 seperti kesulitan penagihan piutang dan tidak berhenti untuk mencari potensi pendapatan dari sumber-sumber yang lain. Dewan Komisaris merasa optimis dengan pemaparan strategi usaha Direksi ke depannya dan akan selalu berkomitmen untuk mendampingi Direksi menjalankan usaha sesuai dengan pokok-pokok strategi yang telah ditetapkan.

Penilaian atas Tata Kelola Perusahaan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Rukindo berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang berlaku di Indonesia. Dengan pertumbuhan usia Perusahaan yang semakin matang, komitmen ini senantiasa diperlihatkan melalui peningkatan implementasi GCG.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai hal berkaitan terkait aspek Tata Kelola Perusahaan:

1. Melakukan pengawasan terhadap *Area of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil asesmen tahun 2018;
2. Mendistribusikan kepada unit terkait sehubungan dengan AOI yang setiap hari akan ditindaklanjuti; dan
3. Melakukan koordinasi dengan komite pendukung dan bersama-sama dengan Direksi dan seluruh karyawan menindaklanjuti hasil AOI berdasarkan asesmen GCG tahun 2018.

Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga, PT Multi Utama Indojasa (*MUC Consulting Group*) yang independen, untuk menilai penerapan GCG secara berkala. Penerapan GCG di tahun 2018 telah dilaksanakan dan hasil penilaiannya telah keluar di tahun 2019. Berdasarkan penilaian, capaian skor GCG Perusahaan adalah sebesar 90,548, yang kemudian dibulatkan menjadi 90,55 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 90,55%.

industry, including the port industry. Fiercer challenge is in the front, but of course, this does not have to be the obstacle to continue improving business performance and achieve business targets.

These conditions, of course, require each business progress to be measured carefully and the management must prepare the next steps for future improvement and anticipation. The Directors is expected to find the best way in anticipating 2019 issues including the difficulty to collect receivables and not stopping to look for potential income from other sources. The Board of Commissioners is optimistic about the future strategy that the Directors have set and will always assist them in conducting business in accordance with the agreed strategic points.

Assessment on Corporate Governance and Whistleblowing System

Rukindo is committed to developing the Company to be in accordance with the applicable business ethics and the principles of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia. Along with the Company's age that has becoming more mature, this commitment is always shown through the improvement of GCG implementation.

In 2019, the Board of Commissioners has performed the following activities related to Corporate Governance:

1. Supervise the Area of Improvement (AOI) from the 2018 assessment;
2. Distribute the AOI to related units and receive daily follow up; and
3. Coordinate with the supporting committee and together with the Directors and all workers to follow up on the AOI from the 2018 assessment.

The Company has used the services of a third-party, an independent consultant called PT Multi Utama Indojasa (*MUC Consulting Group*), to regularly assess the implementation of GCG. The GCG implementation in 2018 has been conducted and the assessment results have been released in 2019. Based on the assessment, the Company's GCG score is 90.548, which rounded to 90.55 from the total maximum value of 100.00 and is equivalent to 90.55%. There is an increase from

Mengalami peningkatan dari penilaian penerapan GCG di tahun 2017 yang sebelumnya tercatat sebesar 85,942 atau 85,94%. Dari 54 rekomendasi tahun buku 2018, Rukindo telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh *assessor* pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2019 Rukindo hanya mendapatkan 27 rekomendasi.

Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan *best practice*. Kami sangat mengapresiasi komitmen setiap Insan Rukindo dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG dan terus mendorong serta mengingatkan untuk senantiasa mempertahankan performa positif yang telah dicapai.

Dalam hal *Whistleblowing System* (WBS), pengelolaan WBS di Rukindo terintegrasi pada Entitas Pengendali yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH. Tata cara pelaporan, alur proses dan tindak lanjut laporan dilakukan oleh Rukindo. Dewan Komisaris mengapresiasi Manajemen yang telah terus berpegang pada pedoman WBS. Koordinasi dengan Komite IPC BERSIH senantiasa dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Komitmen untuk menjalankan sistem WBS sangat penting untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu jalannya usaha Perusahaan. Sistem WBS tersedia untuk semua pemangku kepentingan, termasuk Insan Rukindo dan/atau Perwakilan Pemangku Kepentingan Rukindo dalam kaitan pelanggaran Etika Bisnis dan Etika Kerja Rukindo.

Sebagai Dewan Komisaris, kami mendukung pelaksanaan sistem WBS dan pelaporannya secara maksimal dan senantiasa mengingatkan Direksi untuk menjalankan sistem ini dengan berdasarkan prinsip transparansi dan menjamin hak-hak perlindungan bagi pelapor. Di sepanjang 2019, berdasarkan (surat nota laporan WBS), tidak ada pelaporan WBS dari seluruh Pemangku Kepentingan di lingkungan Perusahaan. Dewan Komisaris menilai penerapan sistem WBS akan semakin membuat Perusahaan semakin dipercaya para Pemangku Kepentingan. Pelaksanaan sistem WBS akan menjadi bagian dari pengendalian internal yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha Perusahaan yang dapat memberi nilai lebih bagi Pemangku Kepentingan.

the 2017 assessment result of 85,942 or 85.94%. Rukindo has followed up all 54 recommendations in fiscal year 2018 and in 2019, Rukindo only has 27 recommendations.

Some assessment aspects have gone according to the standard and best practice. We greatly appreciate the commitment of every Personnel of Rukindo in implementing GCG principles and continue to encourage and remind them to maintain the positive performance.

In terms of the Whistleblowing System (WBS), the management of WBS at Rukindo is integrated with the Controlling Entity, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), through IPC BERSIH Committee. The reporting procedures, process flow and follow-up reports are conducted by Rukindo. The Board of Commissioners appreciates that the Management has continued to adhere to the WBS guidelines. Coordination with IPC BERSIH Committee has been conducted intensively and continuously. Commitment to implement the WBS system is very important to prevent any disruption to the Company's business. The WBS system is available for all Stakeholders, including Personnel of Rukindo and/or Stakeholder Representatives in relation to violations of our Business Ethics and Work Ethics.

As the Board of Commissioners, we support the implementation of the WBS system and its reporting mechanism and always remind the Directors to run this system based on the principle of transparency and protect the rights of the whistleblower. In 2019, based on xx, there were no WBS reports from all Stakeholders against the Company. The Board of Commissioners considers that the implementation of the WBS system will make the Company to be more trusted by the Stakeholders. The implementation of the WBS system will be a part of an important internal control for the continuity of the Company's business that is more valueable for the stakeholders.

Seluruh komponen Perusahaan memiliki kewajiban untuk menerapkan komitmen GCG dalam setiap aktivitas usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Rukindo memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan usaha pelabuhan dalam memenuhi konsumsi dalam negeri dan memastikan kelancaran distribusi ke luar negeri. Praktik usaha yang bertanggung jawab menjadi sebuah hal yang mutlak untuk diemban oleh setiap Insan Rukindo secara adil dan merata tanpa pandang bulu. Implementasi prinsip-prinsip GCG dan khususnya penerapan WBS niscaya dapat mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan memberikan kepastian bagi Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan akan pengelolaan Perusahaan yang sehat sesuai dengan rencana usaha dan memaksimalkan nilai bisnis.

Apresiasi dan Penutup

Atas nama Dewan Komisaris, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Direksi dan segenap jajaran Manajemen serta seluruh pekerja Perusahaan yang telah bekerja keras, memperlihatkan komitmen tinggi, dan berdedikasi penuh dalam menjalani aktivitas usaha. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Pemegang Saham, pelanggan, mitra kerja, dan seluruh Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perusahaan. Dengan komitmen tinggi untuk terus berinovasi dan melakukan penguatan usaha di berbagai aspek, kami optimis Rukindo akan semakin kokoh dan mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pengerukan, galangan dan perbaikan kapal yang terpercaya.

All of the Company's components have an obligation to implement GCG commitments in every business activity. Rukindo plays an important role in ensuring the sustainability of the port business in meeting domestic consumption and ensuring the smooth distribution abroad. Responsible business practices are absolute and need to be carried out by every Personnel of Rukindo in a fair and equitable manner. The implementation of GCG principles and in particular, the application of WBS, can undoubtedly prioritize the interests of the Company over personal interests and provide certainty for Shareholders and all Stakeholders for a sound management that is in accordance with the business plan and maximizing business value.

Appreciation and Closing

On behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my gratitude and appreciation to the Directors and all Management and all workers who have worked hard, showed high commitment, and fully dedicated in conducting business activities. Appreciation also goes to the Shareholders, customers, business partners, and all Stakeholders for their trusts and supports for the Company. With a high commitment to continue to innovate and strengthen business aspects, we are optimistic that Rukindo will be stronger and able to maintain its position as a reliable dredging and shipyard company.

Jakarta, Juli/July

Atas nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners



Hambra

Komisaris Utama

President Commissioner

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors



Wahyu Hardiyanto

Direktur Utama

Managing Director

Perusahaan menjadikan tahun 2019 sebagai tahun perbaikan dan penguatan di berbagai aspek untuk mengembangkan lini bisnis dan tetap menjadi yang terdepan di bidang pengerukan dan reklamasi.

The Company has made 2019 as the year of improvement and reinforcement in various aspects to develop our lines of business and remain as the leading name in the dredging and reclamation.

Para Pemegang Saham dan Sege-nap Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Perkenankan kami membuka Laporan Tahunan ini dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya membuat Perusahaan dapat melewati tahun 2019 dengan cukup baik di tengah tahun yang penuh tantangan. Sebagai Direktur Utama, atas nama Direksi, berikut kami sampaikan laporan pengelolaan Perusahaan selama tahun 2019.

Mempertahankan posisi sebagai perusahaan pengerukan terdepan yang unggul di pasar Indonesia merupakan sebuah tantangan. Namun hal ini juga memberikan sebuah dasar yang kuat bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan berperan besar dalam aktivitas distribusi barang dan komoditas lainnya di industri kepelabuhan bagi kepentingan masyarakat. Dengan dukungan Dewan Komisaris dan strategi yang tepat, Direksi merasa optimis untuk senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam mencapai target-target Perusahaan.

Perubahan Komposisi Direksi

Seperti halnya pada laporan Dewan Komisaris, izinkan kami untuk mengawali laporan kami dengan memaparkan mengenai perubahan komposisi Direksi. Hal ini dirasa penting mengingat telah terjadi perubahan komposisi keseluruhan anggota Direksi oleh Pemegang Saham yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: sK.03/I/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan Nomor: PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi yang telah diaktakan berdasarkan Akta No. 217 tanggal 29 Juli 2019, Pemegang Saham telah mengangkat kami sebagai anggota Direksi yang baru. Dengan demikian, komposisi anggota Direksi Perusahaan yang baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Wahyu Hardiyanto
Direktur Keuangan dan SDM	: Indra Sigit Satyaputra
Direktur Komersial dan Teknik	: Ari Santoso

To Our Respected Shareholders and Stakeholders,

Allow us open this Annual Report by giving our grateful to God, for His blessings and grace that allow the Company to get through the challenging year in 2019. As the Managing Director, on behalf of the Board of Directors, we submit the report of our management on the Company in 2019.

Maintaining the position as a leading dredging company that excels in the Indonesian market is a challenge. However, this also provides a strong basis for the Company to continue to improve the performance and play a major role in the distribution of goods and other commodities in the port industry for the benefit of the people. With the support of the Board of Commissioners and the proper strategy, we are optimistic to always strive and work hard in achieving the Company's targets.

Changes to the Composition of the Board of Directors

Similar to the report from the Board of Commissioners, allow us to begin our report by explaining the changes in the composition of the Board of Directors. We consider this to be important since there is a change in the overall composition of the Board of Directors that the Shareholders have instructed in mid-2019.

Based on the Decision of the Company's Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) Number: sK.03/I/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-01012019-001 dated July 1, 2019 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors that have been notarized under Deed No. 217 dated 29 July 2019, the Shareholders appointed us as new members of the Board of Directors. Accordingly, the composition of the new members of the Company's Board of Directors is as follows:

Managing Director	: Wahyu Hardiyanto
Director of Finance and HR	: Indra Sigit Satyaputra
Director of Commercial and Engineering	: Ari Santoso

Mengingat keanggotaan Direksi yang baru diangkat dimulai pada pertengahan tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa tugas pengelolaan Perusahaan juga atas hasil pengelolaan Direksi sebelumnya, yaitu M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, dan Muhammad Yusuf. Kami, selaku Direksi baru, sangat mengapresiasi kerja keras beliau dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mengelola Perusahaan dengan penuh komitmen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil pelaporan Direksi pada Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari hasil pengelolaan yang telah dilakukan oleh anggota Direksi sebelumnya. Kami selaku Direksi yang baru telah menerima dengan baik laporan yang dimaksud dengan telah melaksanakan proses transisi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menyebabkan suatu permasalahan yang material terhadap aktivitas usaha Perusahaan. Kami berkomitmen untuk meneruskan pengelolaan usaha yang telah dilakukan dengan baik oleh anggota sebelumnya dan membayar kepercayaan yang diberikan oleh para Pemegang Saham.

Analisis Umum

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 mengalami periode terburuknya semenjak berakhirnya krisis global satu dekade yang lalu. Meningkatnya hambatan perdagangan dibarengi dengan ketidakpastian yang membayangi aktivitas bisnis secara global. Sejumlah kasus tampak nyata pada negara-negara yang tergolong ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dimana perlambatan ekonomi telah membayangi kedua negara adidaya tersebut.

Mitra dagang utama Indonesia yaitu Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat masing-masing mengalami perlambatan kondisi ekonomi yang juga turut mempengaruhi laju perdagangan global dan investasi dengan Indonesia. Perlambatan juga dialami sebagian besar negara di dunia dan membuat Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,9%. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi seperti melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia, tingginya tingkat ketegangan dalam perdagangan, dan juga tekanan pasar keuangan yang harus dihadapi beberapa negara berkembang.

Since the new Directors took the office in mid-2019, it can be said that the task of managing the Company is also based on the management from the Directors, namely M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, and Muhammad Yusuf. We, as the new Directors, greatly appreciate their hard work and give our highest appreciation for the commitment that they have shown in managing the Company.

Based on this explanation, the report from the Board of Directors in this Annual Report is inseparable from the management of our previous members. As the new Directors, we have received the report and carried out the transition process properly and made necessary preparations to anticipate any problems to the Company's business activities. We are committed to continuing the business management from the previous members and intended to paying the trust that the Shareholders have given to us.

General Analysis

The global economic growth in 2019 has experienced its worst period since the end of the global crisis a decade ago. The increasing trade barriers were coupled with uncertainties that overshadow global business activities. A number of cases were evident in developed countries including the United States and China, in which the economic slowdown has overshadowed the two superpowers.

Indonesia's main trading partners such as Singapore, China, South Korea and the United States experienced an economic slowdown that has affected the pace of global trade and investment with our country. Most countries have also experienced the slowdown and made the World Bank revised the global economic growth from 3.3% to 2.9%. There were various factors causing the economic slowdown such as weakening world trade and manufacturing activities, high levels of trade tension, and also the pressure on financial market that must also be faced by the developing countries.

Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tetap berdaya dan Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 tetap terjaga di atas angka 5,02% dan terus meningkat untuk mencapai angka pertumbuhan final sebesar 5,10%. Angka pertumbuhan ini memang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17% namun angka pertumbuhan ini tetap tergolong tinggi dibandingkan kondisi negara lain yang cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga di tengah penurunan kinerja ekspor.

Stabilnya permintaan domestik pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kestabilan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04%, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Investasi yang terjaga juga mendorong peningkatan permintaan domestik dimana tercatat investasi bangunan tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja lapangan usaha dari jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

Dari sisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Rupiah ditutup mencapai level terkuat di tahun 2019 yaitu pada angka Rp13.865/USD. Walaupun demikian, penguatan Rupiah sebelum mencapai level tertinggi tersebut seringkali mengalami "*flash crash*" kecil atau pelemahan secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Sentimen pasar terus beranjak naik dan cenderung positif akibat dari kesepakatan dagang fase I AS-Tiongkok yang menjadi faktor utama dalam membuat pelaku pasar bersemangat dan mendorong penguatan Rupiah.

Pelabuhan nasional memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional dan menghadapi tantangan ekonomi global. Industri pelabuhan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri sangat strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Dalam menghadapi persaingan global dan menjadi salah satu poros maritim dengan peran sentral, Indonesia perlu mendorong konektivitas perdagangan lintas laut yang semakin dapat diandalkan. Peran pelabuhan sangat penting untuk ditingkatkan dan tentunya memiliki prospek bisnis yang baik.

In the midst of a global economic slowdown, the Indonesian economy remained resilient and Bank Indonesia has recorded that the national economic growth in 2019 was maintained above 5.02% and continued to increase to reach a final growth rate of 5.10%. This growth rate is indeed lower than 5.17% in 2018 but still relatively high compared to other countries that tend to decline. The economic growth was supported by the steady domestic demand amidst the decline in the export performance.

The steady domestic demand in 2019 was influenced by the steady household consumption which grew 5.04%, not much different from the 5.05% growth in the previous year. The steady household consumption was driven by the controlled inflation and a good level of consumer confidence. The investment also grew steadily and encouraged an increase in domestic demand in which the investment in construction grew by 5.37%, not much different from 5.41% in 2018. From the business field perspective, the economic growth in 2019 was driven primarily by the performance in the tertiary sectors including the communication and information, the financial and insurance services and others.

In terms of the exchange rate of Rupiah against the US Dollar, Rupiah was closed at its strongest level at Rp13,865/USD in 2019. However, before reaching its highest level, Rupiah often experienced a small "*flash crash*" or a sudden weakening in a short time. Market sentiment continued to rise and tended to be positive due to the US-China trade agreement phase I that made the financial market excited and encouraged the performance of Rupiah.

National ports have an important role in strengthening the national economy and facing the challenges of the global economy. The port industry is an essential supporting factor for domestic and foreign trade activities and is very strategic to encourage equitable development and independent economic growth. In facing the global competition and becoming the global maritime axis, Indonesia needs to reinforce its sea trade with a reliable connectivity. The port has an important role that will always be improved and has a good business prospect.

Faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang sangat baik ke depannya. Populasi Indonesia yang semakin bertambah dan dipenuhi oleh generasi produktif membutuhkan dukungan pergerakan arus pasokan barang dan komoditas serta orang yang memadai untuk menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi.

Kebijakan Strategis Tahun 2019

Perusahaan menyusun target dan program kerja yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 dengan didasari salah satunya berdasarkan analisis kondisi makro dan mikro seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beserta pertimbangan terhadap kondisi internal Perusahaan. Pertimbangan lainnya dalam menentukan target kerja adalah rencana jangka panjang Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024.

Dalam menjalani usaha di tengah usianya yang semakin dewasa, Rukindo dibebankan dengan segenap target usaha untuk menjaga tingkat kesehatan perusahaan dan mendukung kinerja Entitas Pengendali yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Terdapat sejumlah target usaha yang telah ditetapkan dalam RKAP 2019 yang diharapkan dapat adanya peningkatan volume jasa pengerukan dan jasa usaha galangan dari tahun sebelumnya.

Sejumlah rencana strategis lainnya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan berbagai upaya perbaikan untuk penguatan *existing business* termasuk pada Jasa Pengerukan;
2. Melakukan pengembangan Jasa Galangan dan Perbengkelan Kapal;
3. Melakukan kerja sama mitra dalam rangka optimalisasi alat produksi;
4. Melakukan perbaikan menyeluruh di segala bidang guna meningkatkan kualitas dan proses bisnis Perusahaan;
5. Melakukan restrukturisasi permodalan dari Pemegang Saham atau sumber eksternal untuk memperbaiki struktur modal Perusahaan;
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur dan standar biaya Perusahaan guna mencapai efektivitas dan efisiensi biaya;
7. Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan, rekrutmen dan pemberian *reward & punishment* yang sesuai guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

These factors indicated that Indonesia has a profitable growth opportunity going forward. Indonesia's growing population with its productive generation needed the support of the seamless supply of goods and commodities as well as adequate human capital to drive economic activities.

Strategic Policy in 2019

The Company has prepared the working targets and programs which set forth in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), which prepared on the basis of macro and micro conditions as previously described, by taking into consideration the Company's internal conditions. Another consideration in determining the targets is the Company's long-term plan as outlined in the Company's 2020-2024 Long-Term Plan (RJPP).

In conducting business in the midst of its increasingly mature age, Rukindo is charged with business targets to maintain the level its soundness and support the Controlling Entity, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). There are a number of business targets in the 2019 RKAP which are expected to increase the volume of dredging and shipyard business services from the previous year.

Other strategic plans that have been carried out in 2019 were:

1. Performing various improvement to strengthen existing business including Dredging Services;
2. Developing Shipyard and Ship Repair Services;
3. Partnering to optimize production equipment;
4. Performing comprehensive improvements in all fields to improve the Company's quality and business processes;
5. Restructuring capital from shareholders or external sources to improve the Company's capital structure;
6. Evaluating the structure and cost standards to achieve cost effectiveness and efficiency;
7. Developing Human Resources (HR) through training, recruitment and reward & punishment programs to increase labor productivity.

Rancangan strategi yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan rancangan strategi yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan seiring dengan perjalanan usaha dan tantangan yang dihadapi Perusahaan. Direksi senantiasa menempatkan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas usaha untuk menghadapi tantangan usaha yang semakin dinamis.

Kinerja 2019

Direksi dan segenap jajaran Manajemen serta seluruh karyawan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi untuk dapat menjalankan inisiatif strategi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan produktivitas usaha. Implementasi strategi juga dilakukan dengan selalu menitikberatkan kemampuan Perusahaan untuk beradaptasi dengan tantangan operasional yang cukup rumit sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan manuver usaha yang inovatif dengan perhitungan yang valid. Kemampuan Perusahaan untuk berinisiatif dan mengambil tindakan cepat sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi rencana strategis, dan jika tidak berhasil diterapkan di tahun berjalan, tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penerapan di tahun yang akan datang.

Di tahun 2019, Pendapatan Perusahaan mencapai Rp156,20 miliar atau 42,71% dari target RKAP 2019 sebesar Rp365,73 miliar. Perusahaan menghasilkan kegiatan produksi dari dua aktivitas utama yaitu Jasa Pengerukan dan Jasa Galangan. Produksi Jasa Pengerukan terealisasi sebesar 1,64 juta m³ atau 46,34% dari RKAP 2019 sebesar 3,53 juta m³. Kinerja Jasa Galangan tahun 2019 menyelesaikan docking kapal sebanyak 33 unit dengan 62.325 GT. Bila dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 32 unit kapal *docking* dengan 62.869 GT, terjadi peningkatan yang relatif kecil. Pada tahun 2019, Perusahaan mengalami kerugian Rp10,57 miliar.

Pencapaian target produksi dan operasional usaha yang masih belum sesuai dengan target tentunya meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang penting untuk segera dibenahi Perusahaan di tahun mendatang. Kinerja keuangan yang mengalami tekanan di sepanjang tahun 2019 juga memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi Perusahaan.

These strategies were designed to be flexible and can be adjusted along with our business journey and the increasing challenges. The Directors have always put the principles of prudence and business flexibility to face the dynamic business challenges.

Performance in 2019

The Directors, the Management and all workers are always working together and coordinating to conduct the agreed strategic initiatives to our best to increase business productivity. The strategy is implemented by always emphasizing the Company's ability to adapt to the complex operational challenges so that it does not rule out the possibility to take innovative business maneuvers with thorough calculations. The ability of the Company to take the initiative and acted quickly is needed as one of the criterias for assessing the strategic plan, and if it is not implemented successfully in the current year, it can certainly be considered to be implemented in the coming year.

In 2019, the Company's Revenues were Rp156.20 billion or 42.71% of the targeted Rp365.73 billion in the 2019 RKAP. The Company generated its production activities from two main activities of Dredging Services and Shipyard Services. The Dredging Services in 2019 generated 1.64 m³ or 46.34% of the targeted 3.53 million m³ in the 2019 RKAP. The Shipyard Services in 2019 finished 33 units of docking ships with 62,325 GT. Compared to last year with 32 units of docking ships with 62,869 GT, there was a relatively small increase. In 2019, the Company suffered a loss of Rp10.57 billion.

The achievement of both production and operational targets that are still lacking compared to the targets has certainly leaves a number of important homeworks to be addressed immediately in the coming year. The financial performance that was under pressure throughout 2019 has also been a challenge for the Company.

Kendala, Tantangan, dan Upaya Penyelesaian

Melihat kondisi yang dialami Perusahaan, dengan adanya penurunan kinerja dan realisasi target yang masih jauh dari RKAP 2019, dapat disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan yang dijalankan masih belum dapat dikatakan efektif di tahun 2019. Akan tetapi, Direksi masih menyimpan optimisme bahwa strategi tahun 2019 merupakan strategi yang bersifat fleksibel dan dapat terus dilanjutkan di tahun sebelumnya mengingat sebagian besar fokus strategi tersebut menitikberatkan kepada aspek penguatan/perbaikan (*reinforcement*). Hal ini juga sejalan dengan pokok-pokok rekomendasi dan masukan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris dari hasil rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Secara garis besar, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan pada tahun 2019 adalah:

1. Permasalahan lahan;
2. Terhambatnya proses penagihan piutang dari pengerjaan yang sudah selesai;
3. Proses produksi yang terkendala akibat proses pengadaan kapal ataupun alat produksi lainnya yang tidak lagi efektif;
4. Proses penyelesaian hutang;
5. Tertundanya pengerjaan pengerukan beberapa proyek karena permasalahan kontrak dan kelengkapan dokumen perizinan meliputi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan analisa dampak lingkungan (ANDAL).

Kendala yang dihadapi Perusahaan bervariasi mulai dari yang disebabkan oleh kondisi internal ataupun eksternal Perusahaan. Mengantisipasi permasalahan internal Perusahaan, Direksi telah menetapkan langkah strategis untuk menyeleraskan proses koordinasi antar unit kerja, terutama unit kerja di lapangan dan unit kerja di bidang administrasi. Hal ini tentunya menjadi penting terutama untuk mengantisipasi kendala proses operasional dan penagihan piutang terhadap pekerjaan yang telah selesai.

Dalam mengantisipasi tantangan dan dinamika eksternal, Perusahaan lebih mengintensifkan upaya kerja sama dengan mitra bisnis dan melakukan koordinasi dengan seluruh cabang-cabang dan anak perusahaan lainnya di lingkungan Grup IPC.

Constraints, Challenges, and Solutions

Seeing the conditions that the Company has experienced, with the decline in performance and failure to achieve targets according to the 2019 RKAP, it can be concluded that the strategies and policies in 2019 have not yet run effectively. However, we are still optimistic that the strategy in 2019 has the flexibility to be continued in the following year given that we are focusing on reinforcing our capabilities. This is also in line with the main recommendations and inputs from the Board of Commissioners that were conveyed at our coordination meeting.

Broadly speaking, the challenges that the Company had to face in 2019 were:

1. Land issues;
2. Obstruction on the process of collecting receivables from completed works;
3. Production processes were constrained by the procurement process of vessels or other equipment that were no longer effective;
4. Debt settlement process;
5. Project delay on dredging services due to contract issues and the completeness of licensing documents on analysis on environmental impacts, including AMDAL and ANDAL.

The Company had been facing various challenges due to the internal and external conditions. In anticipating its internal problems, the Directors have prepared the strategic steps to harmonize the coordination process between working units, especially those on the field and on administration process. This is certainly important, especially to anticipate operational challenges that will affect the collection of accounts receivable from finished work.

In anticipating external challenges and dynamics, the Company has intensified its collaborative efforts with business partners and made strong coordination with all branches and other subsidiaries within the IPC Group.

Upaya-upaya tersebut juga dilakukan dengan berdasarkan pokok-pokok rekomendasi yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris. Memang masih belum terlihat adanya hasil yang maksimal namun Direksi optimis bahwa upaya-upaya yang dilakukan tahun 2019 dapat menjadi dasar yang kuat untuk melangkah ke tahun-tahun berikutnya. Upaya perbaikan internal dan koordinasi dengan pihak eksternal tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat dan diharapkan seluruh upaya tersebut akan dapat membuahkan hasil di tahun-tahun yang akan datang.

SDM dan Implementasi Teknologi

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengimplementasi sistem teknologi yang unggul, kompetitif, dan memiliki daya saing yang tinggi di bidang pengerukan dan reklamasi. Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan terhadap 2 (dua) aspek pendukung bisnis tersebut secara profesional dan inovatif.

Perusahaan telah menetapkan rencana strategis roadmap pengembangan SDM 2019-2023. Tahun 2019 dipilih menjadi tahun pengembangan awal mengingat di tahun tersebut, Perusahaan mulai aktif untuk merekrut pekerja baru secara agresif untuk mengisi beberapa posisi strategis dan dalam rangka regenerasi Sumber Daya Manusia.

We have done all of those efforts to be in line with the recommendations from the Board of Commissioners. Indeed, the results were not what we had hoped for, but we are optimistic that what we have done can be a strong basis for moving into the following years. The process of internal improvement and coordination with external parties cannot be done in a short time and hopefully all of these efforts will begin to produce the results that we hoped in the following years.

HR and Technology Implementation

The Company is committed to maintaining the quality of Human Resources (HR) and implementing a superior, competitive, and high-tech information technology system in the dredging and reclamation fields of services. The Company has applied a management system on 2 (two) aspects of business support in a professional and innovative way.

The Company has set a strategic HR roadmap of 2019-2023. We have chosen 2019 as the initial development year since the Company has also began to recruit new employees to fill the strategic positions and also regenerate its Human Resources.

Rencana Strategis Roadmap Pengembangan SDM Strategic Plan for HR Development Roadmap



Dari sisi inovasi teknologi, pengelolaan teknologi informasi di Rukindo dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat Perusahaan dan Hukum yang dibantu oleh staf Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.26/4/1/DIRUT-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Struktur Organisasi. Perusahaan memanfaatkan kecanggihan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung kinerja usaha dan proses bisnis sehari-hari.

In terms of technology innovation, the management of information technology at Rukindo becomes the responsibility of the Corporate Secretary and Legal, assisted by the Information Technology staff, as stipulated in the Decree of the Board of Directors No.26/4/1/DIRUT-2018 on April 26, 2018 regarding Organizational Structure. The Company takes advantage of the advance Information Technology (IT) to support business performance and daily business processes.

1

- *Pembenahan Infrastruktur melalui analisa kebutuhan, heatmap, audit (peripherals, PC, network)*
- *Data Storage & Data Central* dengan pengadaan perangkat server, serta instalasi OS dan konfigurasi server, yang mendukung proses sentralisasi data
- *Networking* dengan pengadaan perangkat jaringan yang menghubungkan seluruh pengguna berikut peralatan pendukungnya.
- *Infrastructure Improvement through needs analysis, heatmap, audit (peripherals, PC, network)*
- *Data Storage & Data Central through the provision of server equipment, installation of OS and server configuration, which supported the data centralization process*
- *Networking through the procurement of network devices that connect all users and their supporting equipment.*

2

- *Data Processing*, pengolahan dan pengelolaan data dengan mengacu kepada kebutuhan Organisasi/Perusahaan.
- *Need Analysis*, menggali kebutuhan Organisasi/Perusahaan atas kebutuhan aplikasi berbasis data.
- *Application Development*, pengembangan aplikasi yang bersifat high priority yang berimplikasi langsung pada operasional Organisasi/Perusahaan.
- *Data Evaluation*, evaluasi atas pertumbuhan data dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang memiliki implikasi langsung terhadap penggunaan perangkat (storage & peripherals).
- *IT Governance & IT Security*, manajemen TI dan Keamanan data serta upaya *preventive* dalam mengatasi ancaman dari luar.
- *Data Processing, data processing and management that refer to the needs of the Organization/Company.*
- *Need Analysis, exploring the needs of Organization/Company for data-based applications.*
- *Application Development, the development of high priority applications that has direct implications on the operations of the Organization/Company.*
- *Data Evaluation, an evaluation of data growth and other needs that have direct implications for the use of devices (storage & peripherals).*
- *IT Governance & IT Security, IT management and data security as well as preventive efforts in overcoming external threats.*

3

- *Review*, melakukan peninjauan ulang atas upaya yang sudah dilakukan.
- *Re Plan*, perencanaan ulang atas hasil yang sudah dicapai dengan mengacu kepada kebutuhan dan arah kebijaksanaan Organisasi/Perusahaan.
- *Review, reviewing the conducted activities.*
- *Re Plan, re-planning the achievement by referring to the needs and direction of the Organization/Company policy.*

Pengembangan infrastruktur TI di Rukindo difokuskan kepada pengembangan infrastruktur jaringan dalam 3 (tiga) hal utama yaitu:

1. Penambahan *Bandwidth* ISP dan *Backup*
2. Perancangan *Data Center*
3. Perancangan Sistem *Monitoring* Operasional Kapal

Mengingat cakupan pengembangan TI yang cukup besar pada 3 (tiga) hal disebutkan sebelumnya, Perusahaan menetapkan bahwa pengembangan akan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahun 2020-2024. Tahun 2019 menjadi tahun persiapan awal pengembangan TI dan akan terus dilanjutkan di tahun 2020 hingga ke tahun-tahun berikutnya dengan sejumlah adaptasi yang dirasakan perlu ke depannya.

Prospek Usaha

Kondisi perekonomian global 2020 masih dibayangi oleh kekhawatiran kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Laporan Prospek Ekonomi Global terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 berada di angka 2,5% seiring dengan pemulihan perdagangan dan investasi secara bertahap. Bank Dunia memberi catatan bahwa pemulihan ekonomi secara global sangat bergantung kepada realisasi komitmen Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk meredakan perseteruan dagang mereka. Apabila kedua negara sepakat untuk melanjutkan perbincangan dari perjanjian awal yang telah dimulai sebelumnya maka hal tersebut diprediksi akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, terdapat pula pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini bisa saja membuat berbagai prediksi ekonomi dan bisnis mengalami perubahan yang sangat besar.

Di tengah ketidakpastian global, negara-negara berkembang masih menyimpan rasa optimisme yang cukup tinggi, termasuk Indonesia, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran angka 5% dengan pertumbuhan maksimal mencapai 5,5%. Dari sisi industri kepelabuhan, kebutuhan akan pengembangan pelabuhan dan aktivitas pendukungnya masih tetap akan berjalan dalam skala besar. Fokus Pemerintah Indonesia saat ini untuk mengedepankan pembangunan dan perbaikan sistem distribusi dan logistik membawa optimisme tersendiri bagi bidang usaha Perusahaan dalam hal pengerukan.

The development of IT infrastructure at Rukindo is focused on 3 (three) main areas, including:

1. Additional ISP and Backup Bandwidth
2. Data Center Design
3. Design on Vessel Operational Monitoring System

As the scope of IT development on the earlier 3 (three) aspects is quite large, the Company has determined that the development will be carried out continuously starting from 2020 to 2024. We have started the initial preparation in 2019 and will continue to do so in 2020 and in the following years with an ongoing adaptation whenever necessary during the process.

Business Prospect

The global economy in 2020 is still overshadowed by fears of a continuing trade war between the United States and China. The latest Global Economic Prospect Report from the World Bank has estimated that the global economy in 2020 will grow 2.5% as the trade and investment starting to recover. The World Bank has mentioned that the recovery will depend on the commitment between the United States (US) and China to settle their trade war. If the two countries agree to continue the initial agreement then it may have a positive influence on the development of global economy. In addition, there is also this Covid-19 pandemic that is quite concerning. This condition could have made the earlier economic and business predictions to change quite drastically.

In the midst of global uncertainty, the developing countries can still be optimistic, such as Indonesia with its national economic growth target of around 5% to 5.5%. In terms of the port industry, the need for all ports to be enhanced along with the supporting activities will continue to run on a large scale. The current focus of the Indonesian Government to prioritize the development and improvement of distribution and logistics systems has brought us to be confident about our business sector in terms of dredging services.

Sasaran kinerja Perusahaan untuk tahun depan tertuang dalam RKAP 2020 yang telah kami usulkan berdasarkan Surat Direksi Nomor: 2/12/11/Dirut-2019 tanggal 2 Desember 2019. Dewan Komisaris telah mempelajari RKAP dimaksud dan sepakat bahwa sasaran-sasaran tersebut, meskipun sangat menantang, tetapi dapat direalisasikan. RKAP telah menetapkan target Pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp382,52 miliar atau meningkat 145% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp156,20 miliar. Target tersebut akan didukung dengan target pendukung lainnya dalam hal target pasar sebesar 3,46 juta m³ dengan nilai kontrak sebesar Rp382,52 miliar yang dirasa sangat realistis dan tepat untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Operasi.

Selain itu, upaya pencapaian target juga didukung dengan strategi-strategi lainnya sebagai berikut:

1. Pengadaan kapal TSHD 2700;
2. Restrukturisasi hutang;
3. Kerja sama dengan pihak lain, seperti Intraco Ltd, untuk meraih proyek pengerukan dan reklamasi di Bangladesh;
4. Koordinasi dengan seluruh cabang-cabang Grup IPC untuk mempercepat proses administrasi dan perizinan proyek-proyek Grup IPC;
5. Kerja sama perbaikan alat produksi dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia;
6. Pengembangan Galangan dan Perbengkelan Kapal melalui pengadaan *Airbag System*.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019

Direksi melihat bahwa Perusahaan tetap konsisten dengan komitmennya untuk senantiasa mengembangkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dapat dilihat dari hasil penerapan GCG di tahun 2018 telah dilaksanakan dan hasil penilaiannya telah keluar di tahun 2019. Berdasarkan penilaian, capaian skor GCG Perusahaan adalah sebesar 90,548, yang kemudian dibulatkan menjadi 90,55 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 90,55%. Mengalami peningkatan dari penilaian penerapan GCG di tahun 2017 yang sebelumnya tercatat sebesar 85,942 atau 85,94%. Dari 54 rekomendasi tahun buku 2018, Rukindo telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh *assessor* pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2019 Rukindo hanya mendapatkan 27 rekomendasi.

The Company's targets for next year have been set forth in the 2020 RKAP that we have proposed through the Decree of the Board of Directors Number: 2/12/11/Dirut-2019 on December 2, 2019. The Board of Commissioners has studied the RKAP and agreed that these goals, although very challenging, are achievable. The RKAP has set a target for revenues in 2020 to be Rp382.52 billion, 145% higher than the realization of Rp156.20 billion in 2019. It will be supported by other supporting targets such as 3.46 million m³ target market with a Rp382.52 billion contract that is considered to be very realistic and appropriate to support the achievement of the Operating Revenues.

In addition, we have planned several strategies as follow to achieve targets:

1. Procurement of TSHD 2700 vessel;
2. Debt restructurization;
3. Cooperation with other parties, such as Intraco Ltd, to achieve dredging and reclamation projects in Bangladesh;
4. Coordination with all branches of IPC Group to accelerate the administration and licensing processes for projects within IPC Group;
5. Cooperation in to improve production equipment with PT Jasa Armada Indonesia Tbk and PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia;
6. Shipyard and Workshop Development through the procurement of Airbag System.

Corporate Governance Implementation Development in 2019

The Directors have seen that the Company is consistent when it comes to continuous development of the Good Corporate Governance (GCG) implementation. This can be seen from the 2018 GCG implementation assessment that have come out in 2019. Based on the assessment, the Company obtained the score of 90.548, rounded to 90.55, of the total maximum score of 100.00, which is equivalent with 90.55%. There was an increase from the 2017 assessment of 85,942 or 85.94%. Rukindo has followed up the 54 recommendations in fiscal year 2018 and in 2019, the recommendations were only amounted to 27 points.

Kami meyakini peningkatan nilai yang telah kami capai saat ini tidak terlepas dari dukungan seluruh Pemangku Kepentingan Perusahaan. Kami senantiasa melakukan berbagai peningkatan untuk dapat semakin meningkatkan reputasi Rukindo dan menumbuhkan kepercayaan Pemangku Kepentingan. Hal ini akan menjadi dorongan tersendiri bagi Perusahaan untuk memacu usaha mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan tetap memegang teguh pada etika bisnis dan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perusahaan selalu menjaga dan mengawasi jalannya sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Tentunya hal ini juga didukung dengan sinergi yang kuat dengan Entitas Pengendali yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH. Direksi akan memastikan bahwa penanganan kasus yang sudah terbukti dan melibatkan Insan Rukindo dapat dilaksanakan secara objektif, tanpa memihak satu pihak, dengan ketetapan sanksi yang sesuai dengan kebijakan dan koridor hukum yang berlaku.

Direksi selalu mendorong penempatan GCG dalam *fase* keberlanjutan usaha Perusahaan dan bersama Dewan Komisaris dan segenap organ pendukung, akan senantiasa memastikan peningkatan implementasi dan komitmen penerapan GCG di setiap aktivitas usaha Rukindo.

Pelaksanaan Kegiatan CSR

Perusahaan tidak dapat melangsungkan aktivitas operasionalnya sendiri dan menyadari bahwa dukungan masyarakat sekitar sangat penting. Kesadaran ini juga meluas tidak hanya menyentuh sisi sosial namun juga kelestarian lingkungan di tempat Perusahaan beroperasi.

Komitmen Rukindo dalam menjalankan program CSR ditunjukkan melalui Keputusan Direksi Nomor: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pengelolaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan program CSR di Rukindo dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh satu Organ Perusahaan yang khusus. Pengelolaan CSR dikelola secara khusus oleh Sekretariat Perusahaan dan Legal yang memiliki peran sebagai organ penghubung antara Perusahaan dengan masyarakat melalui rangkaian kegiatan komunikasi, salah satunya mengenai aspek tanggung jawab sosial Rukindo.

We believe that our increasing score cannot be separated from the support of all of the Company's Stakeholders. We have always been improving to enhance Rukindo's reputation and grow the confidence of our Stakeholders toward the Company. This will be a special driving force for the Company to strengthen our efforts in achieving sustainable business growth while remaining committed to business ethics and Good Corporate Governance practices.

The Company has always been maintaining and overseeing the Whistleblowing System (WBS). This is also supported by strong synergy with the Controlling Entity, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the establishment of the IPC BERSIH Committee. The Directors will ensure that the cases, those that have been proven and also involving Personnel of Rukindo, can be follow up objectively, without taking sides, according to the provisions regarding available sanction that is in accordance with the applicable policies and legislation.

The Directors have always encouraged that GCG should be placed at an important position in the Company's business sustainability phase and together with the Board of Commissioners and all supporting organs, will always ensure the implementation will be increased and the commitment will be reinforced in all of Rukindo's business activities.

CSR Activities

The Company cannot conduct its own operational activities and realizes that the support from our surrounding community is very important. This awareness has extended not only on the social side, but also on the environmental sustainability in which the Company operates.

Rukindo's commitment regarding CSR programs shown through the Decree of the Board of Directors Number: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 on October 12, 2016 regarding the Management of Corporate Social and Environmental Responsibilities. The implementation of CSR program at Rukindo is managed professionally and responsibly by a special Corporate Organ. CSR management is specifically managed by the Corporate Secretary and Legal as the liaison organ between the Company and the community through a series of communication activities, one of which concerns social responsibility aspect.

Perusahaan juga terus menekankan implementasi aspek tanggung jawab sosial (CSR) dengan memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini kami jalankan sebagai sebuah cara Grup CASA untuk memberikan timbal balik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar aktivitas operasional. Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengadopsi ISO 26000 dengan 7 (tujuh) pilar CSR yang berpusat pada organisasi Perusahaan. Sebagai Direksi, kami sangat merasakan dampak positif dari penerapan CSR yang berstandar praktik terbaik, terutama dalam hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Sebagai salah satu penerapan CSR yang bernilai positif bagi usaha Perusahaan adalah penekanan pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan dalam wilayah kerja Perusahaan. Hal ini penting untuk memperlancar aktivitas usaha dan mendukung kinerja usaha yang maksimal.

Apresiasi dan Penutup

Tahun 2019 menjadi salah satu tonggak usaha yang penting bagi Perusahaan dalam rangka penguatan dan pembenahan internal Perusahaan. Peremajaan alat-alat produksi dan penyelarasan proses bisnis antar unit kerja administrasi dan lapangan menjadi salah satu upaya untuk mendukung kinerja operasional dan finansial. Masih terdapat beberapa isu, baik dari sisi internal dan eksternal, yang menjadi catatan penting untuk segera dibereskan dalam tahun-tahun mendatang. Walaupun demikian, tentunya segenap upaya penguatan di tahun 2019 membawa optimisme tersendiri untuk meningkatkan kinerja ke level selanjutnya untuk menyongsong pertumbuhan baru. Atas nama Direksi, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Kepada seluruh Pemangku Kepentingan, Direksi menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kerja sama yang telah tercipta selama ini. Kepada seluruh karyawan, Direksi ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Mari kita tingkatkan performa Perusahaan di tahun yang akan datang dan berkontribusi untuk menopang aktivitas bisnis di industri pelabuhan secara nasional.

The Company will continue to emphasize the implementation of social responsibility (CSR) by taking into account the social needs of our communities. We are doing this as a way for us to give back to the community and the environment surrounding operational activities. In 2019, the Company has adopted ISO 26000 with 7 (seven) CSR pillars where all are centered on the Company's organization. As the Board of Directors, we have felt the positive impact of implementing CSR according to the best practice standards, especially in the Company's relations with our stakeholders. One of the CSR applications that has brought a positive impact for the Company's business is our focus on Health and Safety Environment at our working area. This is important to facilitate business activities and support maximum business performance.

Appreciation and Closing

We have made 2019 as one of our important business milestones to strengthen and revamp the Company's internal affairs. Reinforcement of production equipment and alignment of business processes between the work units on administration and on the field is one of our strategies to boost the operational and financial performances. There were a number of issues unresolved, both internally and externally, and those will become important notes for us to quickly find the solution in the coming years. Nevertheless, all of our efforts in 2019 have their own share of optimism to improve future performance and obtain new level of growth. On behalf of the Board of Directors, allow me to express my gratitude to the Shareholders for their trust. To all Stakeholders, we would like to extend our appreciation and gratitude for the cooperation all this time. To all employees, we wanted to give our highest appreciation for their dedication and hard work and commitment in providing the best service. Let us improve the Company's performance in the coming year and contribute to sustain business activities in the national port industry.

Jakarta, Juli/July
Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Wahyu Hardiyanto
Direktur Utama
Managing Director

Pertanggungjawaban Atas Laporan Tahunan 2019

Responsibility for the 2019 Annual Report

Laporan Tahunan PT Pengerukan Indonesia untuk periode tahun buku 2019 telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Pengerukan Indonesia yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan diaudit oleh auditor independen. Laporan Tahunan memuat data dan informasi mengenai kinerja dan kegiatan PT Pengerukan Indonesia pada tahun 2019 serta pembahasan singkat mengenai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi usaha selama tahun berjalan.

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat hingga Laporan Tahunan 2019 selesai dibuat telah menandatangani pernyataan pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan 2019. Sebagai penjelasan, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengerukan Indonesia pada tahun 2019. Perubahan Dewan Komisaris terjadi menjelang akhir tahun 2019 dan perubahan Direksi terjadi pada pertengahan tahun 2019. Seiring dengan berjalannya waktu dalam proses pembuatan Laporan Tahunan 2019 yang diselesaikan pada pertengahan 2020, terjadi pergantian Dewan Komisaris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas pengawasan yang diemban oleh Dewan Komisaris pada periode tahun buku 2019 dilakukan oleh Dewan Komisaris sebelumnya. Walaupun demikian, tugas pengelolaan Perusahaan tahun buku 2019 tetap dijalankan oleh anggota Direksi yang menjabat hingga 31 Desember 2019.

The Annual Report of PT Pengerukan Indonesia for the fiscal year 2019 is made according to the Financial Statements of PT Pengerukan Indonesia that has ended on December 31, 2019 and has been presented with the applicable accounting principles in Indonesia and audited by an independent auditor. The Annual Report presents the data and information regarding the Company's performance and activities in 2019 as well as the discussion regarding the financial condition and business results during the period.

The Board of Commissioners and Board of Directors who take the position until the Annual Report 2019 is finished have signed the responsibility statement on the Annual Report 2019. As a background, there was a change in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia in 2019. The changes in the Board of Commissioners occurred by the end of 2019 while the Directors were changed mid-2019. During the process of finishing the Annual Report 2019 in mid-2020, there was another change on the Board of Commissioners. Hence, it can be said that the supervisory from the Board of Commissioners in the fiscal year 2019 was carried out by the previous Board of Commissioners. And the Company's management in fiscal year 2019 is done by the Directors who are still in the position as of December 31, 2019.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Hambra
Komisaris Utama
President Commissioner

Bambang Supriyadi Ervan
Komisaris
Commissioner

Syaiful Islam
Komisaris
Commissioner

Direksi

Board of Directors

Wahyu Hardiyanto
Direktur Utama
Managing Director

Indra Sigit Satyaputra
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Ari Santoso
Direktur Komersial dan Teknik
Director of Commercial and Engineering



3

Profil Perusahaan

Company Profile



“

Pada tahun 2019 kami melakukan perkuatan strategi, operasional, dan SDM sebagai upaya untuk penguatan fundamental bagi masa depan Perusahaan. Dengan langkah ini diharapkan dapat memperbesar pertumbuhan usaha Perusahaan serta berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

In 2019, we made a strengthening strategy, operational, and HR as an effort for fundamental reinforcement of the Company's future. With this measure, it is expected to increase the growth of the Company's business and plays a role in sustainable development.



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	PT Pengerukan Indonesia
Nama Bisnis Business Name	Rukindo
Bidang Usaha Line of Business	Pelayanan jasa pengerukan dan galangan Dredging and shipyard services
Produk dan Jasa Products and Services	Pengerukan, reklamasi, pekerjaan teknik sipil, konsultasi, survei, galangan dan perbengkelan, keagenan, penguasaan (konsesi), penyewaan Dredging, reclamation, civil engineering works, consultation, survey, shipyard and workshop, agency, controlling, consession, rental
Status Perusahaan Company Status	Entitas Anak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) : 99,9% PT Pengembang Pelabuhan Indonesia : 0,1%
Tanggal Pendirian Establishment Date	30 April 1983 April 30, 1983
Tahun Beroperasi Komersial Commercially Operable	1991
Akta Pendirian Establishment Deed	Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 Deed No. 2 dated October 1, 1991
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Bajumi, S.H., dan ditetapkan oleh Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 1991 Nomor 27/CN/PDT.P/1991/PN.JKT. PST dan tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Oktober 1992 No. 83 Deed of Establishment No. 2 dated October 1, 1991 of Notary Achmad Bajumi, S.H., set forth by the Decision Letter of Central Jakarta District Court Judge dated September 30, 1991 No. 27/CN/PDT.P/1991/PN.JKT.PST, and Supplementary to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated October 16, 1992 No. 83
Modal Dasar Authorized Capital	Rp2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid Capital	Rp612.164.000.000
Total Pekerja Total Workers	150 orang people
Kantor Pusat Head Office	Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta Utara, 14430
Call Center	+62 21 4301380 (Hunting)
Faks Fax	+62 21 4353669
Website	https://www.rukindo.co.id
Email	admin@rukindo.co.id
Akun Media Sosial Social Media Accounts	Facebook : PT-Pengerukan-Indonesia Twitter : @pt-rukindo
Pengaduan Gratifikasi Gratifications Complaint	0813 8547 4927
Whistleblowing System	laporkangratifikasi@rukindo.co.id



Sebagai entitas anak dari PT Pelabuhan Indonesia II, logo Rukindo mengacu kepada logo PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Company (IPC). Terdapat kalimat "*Dredging & Shipyard*" yang menandakan identitas Rukindo dan bidang usaha yang dijalankan.

1. Anak panah yang melesat di atas air atau horizon dan menjadi representasi dari konsep pergerakan Perusahaan yang dinamis.
2. Cahaya matahari pagi yang merepresentasikan perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh pekerja terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan Perusahaan.
3. Sisi biru logo menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis, serta fleksibilitas dari setiap komponen Perusahaan dalam menghadapi setiap tantangan.
4. IPC dengan tulisan abu-abu gelap merupakan *brand* yang merepresentasikan citra modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasi kepercayaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II, Rukindo logo refers to the logo of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or the Indonesia Port Company (IPC). The sentence "*Dredging & Shipyard*" signifies the identity of Rukindo and the line of business it operates.

1. A dashed arrow above the water or horizon represents a concept of the Company's dynamic movement.
2. Sunrise represents the spirit of change, strength, optimism, and the pride of employees toward their Company that drives them to work together to achieve the organization's goals.
3. The blue represents a dynamic new era for both the Company and employees where all of the Company's elements move in a flexible way in facing challenges.
4. IPC's name written in dark grey font becomes a brand that represents a modern image, confidence, and professionalism as well as illustrating our trust to all Stakeholders.

Sekilas Rukindo

Rukindo at a Glance



PT Pengerukan Indonesia, selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Rukindo, sebelumnya berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan yang didirikan berdasarkan PP No. 18 Tahun 1983. Pada tahun 1991 Perusahaan mengalami perubahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1991. Perubahan ini diaktakan melalui Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Bajumi, S.H., dan ditetapkan oleh Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 1991 Nomor 27/CN/PDT.P/1991/PN.JKT.PST dan tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Oktober 1992 No. 83.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember 2017 karena adanya penambahan modal yang telah ditetapkan melalui Akta Notaris No. 48 tanggal 28 Desember 2017 di hadapan Dahlia S.H., Notaris di Jakarta.

Perusahaan dikenal dengan nama "Rukindo" saat melakukan aktivitas bisnisnya dengan pelanggan, mitra kerja, dan *Stakeholder* lainnya.

PT Pengerukan Indonesia, hereinafter refer to as "Company" or "Rukindo", previously was established as a General Company (Perum) Pengerukan based on PP No. 18 in 1983. In 1991, the Company transformed into Limited Liability Company (Persero) PT Pengerukan Indonesia based on the Government Regulation (PP) No. 9 in 1991. This was ratified through the Deed of Establishment No. 2 on October 1, 1991, which made before the Notary, Achmad Bajumi, S.H., set forth by the Decision Letter of Central Jakarta District Court Judge dated September 30, 1991 No. 27/CN/PDT.P/1991/PN.JKT. PST, and Supplementary to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated October 16, 1992, No. 83.

The Company's Articles of Association has been amended several times. The last amendment occurred on December 28, 2017 due to additional capital through Notary Deed No. 48 dated December 28, 2017 before Dahlia S.H., Notary in Jakarta.

The Company is known as "Rukindo" when conducting business activities with customers, business partners, and other Stakeholders.

Sebelum Perusahaan dibentuk, kegiatan pengerukan dilakukan oleh Pemerintah melalui Jawatan Pelabuhan yang memberikan layanan di bidang pengerukan. Pemerintah kemudian membentuk badan usaha "PN Pelabuhan" yang menetapkan bahwa fungsi layanan pengerukan sebagai salah satu tugas unit usaha PN Pelabuhan Daerah I s/d IX sebelum kemudian direorganisasi menjadi 5 (lima) Perusahaan Umum (Perum), yaitu Perum Pelabuhan I s/d IV dan Perum Pengerukan. Melalui berbagai pertimbangan, pada tahun 1991 akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan status Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pemerintah kemudian merestrukturisasi PT Pengerukan Indonesia (Persero) dengan mengalihkan kepemilikan saham kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Rukindo telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka dengan daya saing tinggi di bidang pengerukan. Saat ini Perusahaan memiliki jangkauan wilayah operasional yang tersebar di seluruh Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi (Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Pontianak, TPK Koja, Pelabuhan Ciwandan (Banten), Pelabuhan Cirebon, Proyek CNOOC, Pelabuhan Vopak). Dengan menawarkan pelayanan pengerukan berkonsep *Total Solution* mulai dari awal hingga akhir, Rukindo terus memperkuat sinergi dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan entitas anak lainnya dan juga pelanggan eksternal.

Sumber Daya Manusia yang profesional dan andal menjadi dasar penopang pertumbuhan usaha Perusahaan. Para pekerja Perusahaan sangat memahami medan di berbagai wilayah pengerukan dan dengan rencana strategis untuk meremajakan alat dan fasilitas pendukung lainnya, Perusahaan percaya dapat mendukung rencana besar Entitas Induk merealisasikan *World Class Performance* yang terintegrasi. Perusahaan akan terus berupaya menciptakan peluang untuk memenuhi harapan para *Stakeholder* dan pada akhirnya mendorong arus pertumbuhan perdagangan dan membawa Indonesia tumbuh menjadi negara dengan ekonomi kuat dan maju.

Before the Company was established, the dredging activities were conducted by the Government through Port Office. The Government then formed a business entity called "PN Pelabuhan" which stipulated that dredging services became the responsibility of Regional PN Pelabuhan I to IX before then reorganized into 5 (five) Public Companies (Perum), Perum Pelabuhan I to IV and Perum Pengerukan (Dredging). Through various considerations, in 1991, the Government finally decided to change the status of Perum Pengerukan (Dredging) to a Limited Liability Company. The Government then restructured PT Pengerukan Indonesia (Persero) by transferring share ownership to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Rukindo became one of the leading companies with high competitiveness in dredging. Currently the Company has a range of operational areas spreading throughout Indonesia including Java, Sumatera, Kalimantan, Bali and Sulawesi (Tanjung Priok Port, Teluk Bayur Port, Pontianak Port, TPK Koja, Ciwandan Port (Banten), Cirebon Port, CNOOC Project, Vopak Port). With Total Solution concept of dredging services from start to finish, Rukindo continues to strengthen synergies with SOE companies and other subsidiaries as well as external customers.

Professional and reliable human resources are the basis for sustaining the Company's business growth. The Company's employees are well-versed in dredging services and with a strategic plan to rejuvenate the equipment and other supporting facilities, the Company believes it can support the masterplan to realize an integrated World Class Performance. The Company will continue to create opportunities to meet the expectations of Stakeholders and ultimately encourage the flow of trade growth and bring Indonesia to grow into a country with a strong and developed economy.

Jejak Langkah

Milestones

1964

Dibentuknya PN Pelabuhan pada tanggal 19 Mei 1964 tentang Pembinaan dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran di mana fungsi layanan pengerukan mulai dialihkan menjadi salah satu tugas unit usaha PN Pelabuhan Daerah I s/d IX.

PN Pelabuhan was formed on May 19, 1964 regarding Guiding and Administration of Ports and Sailing Areas in which the dredging services was transferred to be one of the business units of Regional PN Pelabuhan I to IX.

1969

PN Pelabuhan Daerah I s/d IX dinyatakan dalam status likuidasi dan berada di bawah Badan Pengusahaan Pelabuhan.

Regional PN Pelabuhan I to IX was established with liquidation status and became under Port Concession Agency.

1983

PN Pelabuhan I s/d IX direorganisasi menjadi Perum Pelabuhan I s/d IV dan Perum Pengerukan.

PN Pelabuhan I to IX were reorganized as Perum Pelabuhan (Port) I to IV and Perum Pengerukan (Dredging).

1991

Pengalihan bentuk Perum Pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan.

Transferred from Perum Pengerukan (Dredging) to Limited Liability Company.

2013

Penambahan Penyertaan Modal tentang Peralihan Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia dari Pemerintah Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Additional Capital Participation regarding the Transfer of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia from the Indonesian Government to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2014

Melakukan restrukturisasi aset, restrukturisasi Sumber Daya Manusia, dan restrukturisasi utang.

Restructured assets, Human Resources and debt.

2019

Perusahaan mulai melakukan ekspansi pasar untuk mendapatkan pelanggan baru di luar Grup IPC.

The Company expanded its market to gain new customers outside IPC Group.

Visi, Misi, dan Nilai/Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Values/Cultures

Visi dan Misi Perusahaan telah dirumuskan dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi serta jajaran Manajemen. Perusahaan senantiasa menelaah Visi dan Misi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan usaha serta tantangan bisnis yang senantiasa berubah.

Visi dan Misi Perusahaan pada tahun buku 2019 telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dengan melibatkan jajaran Manajemen, dengan kesimpulan bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih relevan dengan perkembangan usaha dan tantangan bisnis yang dihadapi Perusahaan saat ini.

The Company's Vision and Mission were formulated with the involvement from Board of Commissioners and Board of Directors and all Management levels. The Company regularly reviewed the Vision and Mission to ensure the relevancy with business development and changing business challenges.

The Company's Vision and Mission in fiscal year 2019 has been reviewed by the Board of Commissioners and Board of Directors, with the involvement from all Management levels, and came to a conclusion that the Company's Vision and Mission are still relevant with the business development and business challenges that the Faced nowadays.

V VISION

"Menjadi Perusahaan Pengerukan dan Galangan Berkelas Dunia"

"Become a World Class Dredging and Shipyard Company"

M I S I MISSION

"Memaksimalkan Nilai Tambah untuk Pemangku Kepentingan"

"Maximizing Value Added for Stakeholders"

High Level Business Strategy Pencapaian Visi dan Misi

High Level Business Strategy to Achieve Vision and Mission

<p>Visi Perusahaan Company Vision</p>	<p>Menjadi Perusahaan Pengerukan dan Galangan Berkelas Dunia Become a World Class Dredging and Shipyard Company</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki citra perusahaan yang baik melalui pelayanan dengan kualitas terbaik dalam bidang jasa pengerukan dan/atau reklamasi serta jasa galangan kapal; Memiliki alat produksi kapal keruk dengan teknologi baru dan berproduktivitas tinggi; Memiliki fasilitas infrastruktur galangan yang modern; Menerapkan standar operasional yang efisien; Kompetensi SDM tinggi dan profesional; <i>Profit sustainability</i>; Mengimplementasikan kebijakan "zero accident" serta mampu memenuhi SLA/SLG yang disepakati dengan pengguna jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Creating a positive corporate image by giving the best quality of services in dredging and/or reclamation as well as shipyard; Own dredgers that are equipped with new technology and have high productivities; Own modern shipyard facilities; Implementing efficient operational standard; Having professional HR with high competencies; Profit sustainability; Implementing "zero accident" policy that can meet the agreed SLA/SLG with service users.
<p>Misi Perusahaan Company Mission</p>	<p>Memaksimalkan Nilai Tambah untuk Pemangku Kepentingan Maximizing Value Added for Stakeholders</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> PEMEGANG SAHAM Memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui <i>best practice</i> GCG. PEGAWAI Memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi. PELANGGAN DAN MITRA Meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra. MASYARAKAT DAN NEGARA INDONESIA Memastikan kelancaran dan keamanan alur pelayaran dan kolam pelabuhan dalam mendukung proses arus perdagangan di wilayah pelabuhan untuk menunjang perekonomian Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> SHAREHOLDERS Maximizing value creation for shareholders through improvement of financial performance and optimization of governance management through best practices of GCG. EMPLOYEES Maximizing employee satisfaction by focusing on capabilities and improvement of their welfare through reinforcement of integrity and innovation. CUSTOMERS AND PARTNERS Increasing the qualities of products and services by utilizing the latest technologies and capabilities to guarantee the satisfaction of customers and partners. INDONESIA AND ITS PEOPLE Ensures the process and safety of shipping lane and port basin to support the trading activities in port areas to support the country's economy for the welfare of its people.
<p>Strategi Umum Grand Strategy</p>	<p>Strategi umum yang akan dilaksanakan dalam program jangka panjang (2020-2024) adalah: "Memperkuat sumber daya produksi untuk meningkatkan market share jasa pengerukan dan galangan".</p> <p>The grand strategy that will be implemented in the long-term program (2020-2024) is: "Reinforcement of production resources to increase the market share in dredging and shipyard".</p>	

<p>Strategi Imperatif Imperative Strategy</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi teknologi di kapal keruk; 2. Melakukan sinergi dengan perusahaan mitra dalam penyelesaian pekerjaan pengerukan serta dalam rangka pengembangan pasar pengerukan dan reklamasi; 3. Membangun <i>captive market</i> pengerukan dan galangan di wilayah BUMN (Pelindo) melalui Pelindo Incorporated; 4. Meningkatkan sinergi dengan anak perusahaan IPC (IPC Group) dalam peningkatan sumber daya dan produktivitas serta pendanaan; 5. Menjaga tingkat kehandalan kapal; 6. Pengadaan kapal baru; 7. Peningkatan peralatan galangan; 8. Sinergi kemitraan dalam pengoperasian galangan; 9. Rekrutmen SDM profesional bidang pengerukan dan galangan; 10. Restrukturisasi hutang; 11. Optimalisasi aset tidak produktif bekerja sama dengan mitra; 12. Compliance terhadap regulasi; 13. Peningkatan tingkat kepuasan pekerja; 14. Sinergi Perusahaan dalam pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adapting to modern technology in dredger; 2. Synergizing with business partners to complete the dredging project and improve the dredging and reclamation markets; 3. Building captive market of dredging and shipyard within SOEs (Pelindo) through Pelindo Incorporated; 4. Reinforcing the synergy with subsidiaries of IPC (IPC Group) to increase the Company's resources, productivities and funding; 5. Maintaining the reliability of ships; 6. Procurement of new ships; 7. Improvement of shipyard tools; 8. Synergizing partnerships in shipyard operation; 9. Recruiting professional HR in dredging and shipyard; 10. Restructuring debt; 11. Optimizing unproductive assets, in collaboration with partners; 12. Compliance with regulations; 13. Increasing the satisfaction level of employees; 14. Company's synergy in dredging and/or reclamation.
<p>Kunci Penentu Key Enables</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisnis model Perusahaan yang adaptif. 2. Rekayasa teknik dan manajemen yang berkelanjutan. 3. Sistem Manajemen Keuangan yang efisien. 4. Sumber Daya Manusia yang profesional dan Budaya Perusahaan yang berorientasi pada kinerja. 5. Operasi dan pelayanan yang prima. 6. Cabang dan Entitas Anak yang mandiri dan bersinergi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptive company's business model. 2. Sustainable engineering & management. 3. Efficient Financial Management System. 4. Professional Human Resources & performance-oriented company culture. 5. Service and Operational Excellence. 6. Independent and synergized Branches and Subsidiaries.

Nilai/Budaya Perusahaan

Perusahaan meyakini bahwa untuk memotivasi setiap pekerja menuju satu tujuan yang sama, yakni realisasi Visi Perusahaan, maka diperlukan sebuah panduan untuk membantu para pekerja dalam bertindak dan bertingkah laku sebagai keluarga besar Rukindo setiap harinya. Panduan tersebut telah disusun dalam bentuk Nilai/Budaya Perusahaan yang melekat pada seluruh pekerja Perusahaan dalam melaksanakan Misi Perusahaan untuk mencapai Visi Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi turut serta terlibat secara aktif dalam penyusunan Nilai/Budaya Perusahaan. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menelaah dan menyimpulkan bahwa Nilai/Budaya Perusahaan masih relevan dengan perkembangan usaha dan tantangan bisnis yang dihadapi Perusahaan saat ini.

- **Service Excellence**
Memberikan pelayanan mutu yang baik, harga bersaing, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan aman, yang diwujudkan melalui tata kerja yang efektif dan efisien, serta sumber daya yang andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
- **Professional**
Menjunjung tinggi nilai kemampuan membangun, memelihara dan menguntungkan bisnis usaha Perusahaan yang berdaya saing tinggi, berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan Perusahaan yang terbaik di Indonesia.
- **Integrity**
Berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal serta disiplin dan patuh terhadap norma-norma hukum, etika, dan kesucilaan yang berlaku di Perusahaan.
- **Responsibility**
Memikul semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di *job description*, serta patuh dan bekerja sebatas tugas dan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh Perusahaan.
- **Initiative**
Mampu dan mau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menunggu diperintah, serta memahami pentingnya kontribusi setiap pekerja bagi Perusahaan.
- **Teamwork**
Bekerja secara kelompok dengan keterampilan dan kompetensi yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai misi serta tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien.

Corporate Values/Cultures

The Company believes in order to motivate the workers towards the same goal, which is the achievement of the Company's Vision, a guideline is needed to assist the workers in daily activities as part of Rukindo family. The guideline was compiled into Corporate Values/Cultures attached to all employees in carrying out the Company's Mission to achieve the Company Vision.

The Board of Commissioners and Board of Directors were involved in creating the Corporate Values/Cultures. In 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors have reviewed and concluded that the Corporate Values/Cultures were relevant with the business development and challenges that the Company faced.

- **Service Excellence**
Providing good quality services, competitive prices, timely and safe work completion, which is realized through effective and efficient work procedures, and reliable resources to meet customer satisfaction.
- **Professional**
Upholding the value of the ability to build, maintain, and benefit the company's business that is highly competitive, customer satisfaction-oriented, and striving to be the best company in Indonesia.
- **Integrity**
Honest in interacting with internal and external parties, discipline, and adhere to legal norms, ethics, and morality that apply in the company.
- **Responsibility**
Carrying out all obligations and duties in accordance with the boundaries in the job description and complying and working to the extent of the duties and responsibilities allowed by the company.
- **Initiative**
Able and willing to do what needs to be done without waiting for orders and understand the importance of employee's contribution to the company.
- **Teamwork**
Working in team with complementary skills and competencies and committed to achieving the company's mission and goals effectively and efficiently.

Tujuan dan Bidang Usaha Perusahaan

Company's Objective and Business Field

Sebagai Entitas Anak dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Rukindo turut serta melaksanakan dan mendukung kelancaran pola angkut barang yang menggunakan fasilitas kapal dan pelabuhan terutama pelabuhan-pelabuhan yang menjadi bagian dari perusahaan induk.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Rukindo participates in implementing and supporting the streamlined pattern of transport of goods using the vessel and port facilities, especially ports that are part of the parent company.

Tujuan Perusahaan Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS tertanggal 19 Maret 2014, Nomor 19 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang jasa pengerukan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Company's Objective Based on Articles of Association

Based on the GMS Resolutions as outlined in the Deed of GMS Resolutions No. 19 dated March 19, 2014 by Notary Nanda Fauz Iwan SH, the Company's objective and purposes is to conduct a business in dredging services and optimization of resources utilization owned by the Company to produce high quality goods and/or services and highly competitive services to obtain/pursue profits in order to increase the Company's value by applying the Limited Liability Company principles.

Kegiatan Usaha Saat Ini

Kegiatan usaha yang dijalankan Rukindo saat ini adalah di bidang jasa pengerukan dengan keandalan yang baik. Rata-rata Perusahaan melakukan kegiatan pengerukan setiap tahunnya di 6 (enam) lokasi. Informasi mengenai peta wilayah pengerukan Perusahaan dapat dilihat pada Bab Peta Pasar Pengerukan. Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan kegiatan pengerukan di 7 (tujuh) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Current Business Activity

Rukindo is a reliable business entity engaging in in dredging service. In average, the Company's dredging activity was conducted in 6 (six) locations. Information regarding the map of Company's dredging areas can be seen in the Dredging Market Map. In 2019, the Company's dredging activity was conducted in 7 (seven) locations with the following details:

No.	Jenis Pengerukan Types of Dredging	Lokasi Location	Keterangan (Volume) Description (Volume)
1.	Pengerukan Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Tanjung Priok Dredging Maintenance in Tanjung Priok Port Basin	Tanjung Priok, Jakarta	80.000 m ³
2.	Pengerukan Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Sunda Kelapa Dredging Maintenance in Sunda Kelapa Port Basin	Sunda Kelapa, Jakarta	53.000 m ³
3.	Pengerukan Pemeliharaan Alur Pelabuhan Pulau Baai Dredging Maintenance in Pulau Baai Port Channel	Bengkulu	563.000 m ³
4.	Pengerukan Pemeliharaan Alur Pelabuhan Pontianak Dredging Maintenance in Pontianak Port Channel	Pontianak	804.200 m ³
5.	Pengerukan Kolam Pelabuhan Teluk Bayur Dredging in Teluk Bayur Port Basin	Teluk Bayur, Padang	59.000 m ³
6.	Pengerukan Alur dan Kolam Tersus TPPI Tuban Dredging in TTPITuban Tersus Channel and Basin	Tuban	560.000 m ³
7.	Pengerukan Pendalaman Kolam Pelabuhan Tanjung Priok Dredging in Tanjung Priok Port Basin	Tanjung Priok, Jakarta	76.000 m ³

Produk dan Jasa

Products and Services



Untuk mencapai maksud dan tujuan usaha yang telah disampaikan sebelumnya, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk;
2. Reklamasi dan transportasi hasil keruk untuk kegiatan pembangunan;
3. Pekerjaan teknik sipil (*civil works*) yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan, dan bangunan;
4. Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengerukan dan reklamasi;
5. Survei hidrografi dan topografi serta penyelidikan tanah (*soil investigation*);
6. Jasa galangan dan perbengkelan untuk perbaikan, pemeliharaan, pengembangan kapal keruk dan alat bantu serta kapal-kapal lainnya untuk keperluan usaha sendiri maupun untuk pihak lain serta penyediaan fasilitas untuk menunjang usaha pengerukan dan reklamasi;
7. Jasa keagenan perusahaan/kapal keruk dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pengerukan dan reklamasi;
8. Kegiatan penguasaan (konsesi) dan penambangan pasir;
9. Usaha penyewaan alat produksi, fasilitas penunjang produksi dan pengawakan kapal.

Terkait dengan segmen pasar, kelompok pelanggan Rukindo terbagi menjadi pelanggan Entitas Induk, PT Pelindo II (Persero), termasuk pelanggan BUMN lainnya dan pelanggan eksternal. Pelanggan dari Entitas Induk terdiri dari segmen pelanggan pengerukan dan perbaikan kapal sedangkan pelanggan eksternal berasal dari pengerukan dan perbaikan kapal.

To achieve the business objectives which mentioned earlier, the Company is able to conduct the following main business activities:

1. Dredging of shipping channels, port basin, and other location which requires dredging services;
2. Reclamation, transportation of dredging output, procurement/development of land and building;
3. Civil work related to dredging, reclamation, development of land and building;
4. Consulting services related to dredging, reclamation, development of land;
5. Hydrographical and topographical survey, and soil investigation;
6. Shipyard and workshop services for repair, maintenance, and development of dredgers and their supporting tools, and other vessels, either for own business purposes or for other parties, as well as providing dredging and reclamation supporting facilities;
7. Corporate/dredger agency services and other services related to dredging and reclamation;
8. Sand controlling (concession) and mining activities;
9. Rent of production tools, production supporting facilities, and ship crewing.

On market segment, Rukindo's customer group is divided into customers of the Parent Entity, PT Pelindo II (Persero), including other SOEs and external customers. Customers from the Parent Entity consist of dredging and vessel repair customers while external customers are dredging and vessels repair.

Wilayah Operasi

Areas of Operation

Selama tahun 2019, Rukindo tidak memiliki entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, sehingga tidak ada informasi terkait alamat entitas anak dan/atau kantor cabang. Namun demikian Rukindo memiliki kantor perwakilan area operasi di beberapa wilayah Indonesia.

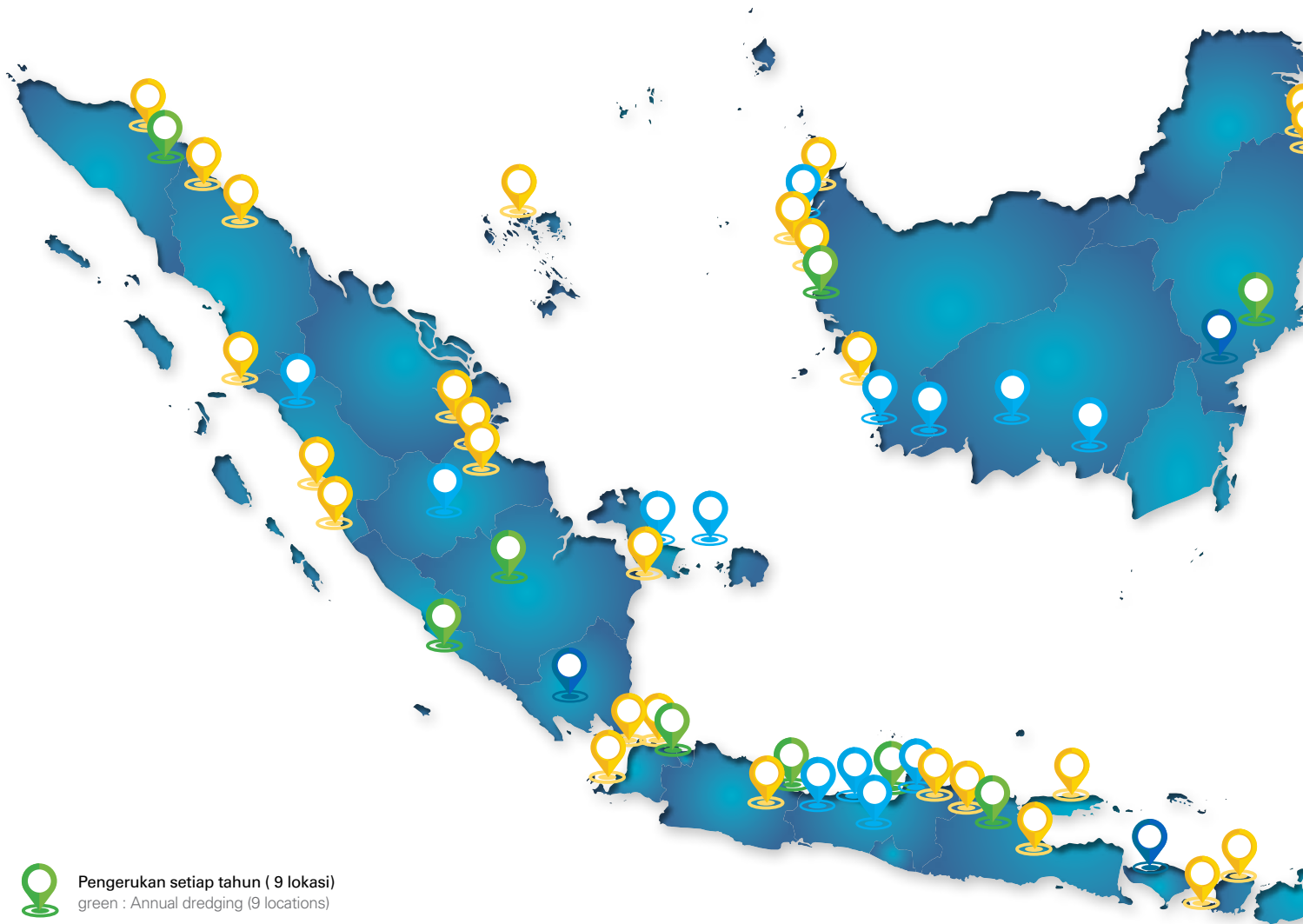


During 2019, Rukindo did not own subsidiaries and/or branches or representatives, and therefore there were no information related to addresses of subsidiaries and/or branches. However, Rukindo own several offices of operational areas in several areas in Indonesia.



Peta Pasar Pengerukan

Dredging Market Map



Pengerukan setiap tahun (9 lokasi)
green : Annual dredging (9 locations)



Pengerukan setiap 2 tahunan (13 lokasi)
Blue: Bi-Annual dredging (13 locations)



Pengerukan setiap 2 tahunan (35 lokasi)
Yellow : Bi-Annual dredging (35 locations)



Pengerukan Capital (8 lokasi)
Capital dredging (8 locations)

Jumlah (65 lokasi)
Total (65 locations)



Alat Produksi

Production Equipment

Perusahaan memiliki berbagai peralatan penunjang bisnis untuk melaksanakan kegiatan utama di bidang pengerukan dan kegiatan usaha lainnya. Alat produksi yang dimiliki Perusahaan terdiri dari berbagai jenis kapal, dengan fungsi yang berbeda-beda, *graving dan airbag dock* serta perbengkelan kapal, dan alat produksi galangan.

Manajemen memandang bahwa tahun 2019 menjadi tahun penting untuk melakukan persiapan peremajaan alat-alat produksi. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Kesiapan alat produksi yang dapat selalu diandalkan dan sangat efektif untuk menjalani proses pengerukan sesuai rencana akan selalu menjadi ujung tombak bisnis Perusahaan dan faktor pembeda dengan pesaing lainnya.

Perusahaan telah membentuk Tim Bersama untuk pengadaan Kapal Keruk tipe *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD) berkapasitas 2.700 m³. Pembentukan Tim Bersama ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No: 29/11/20/RKD-2019. Anggota dari Tim Bersama ini terdiri dari para pekerja PT Pengerukan Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Secara garis besar, Tim Bersama ini memiliki tugas dan kewajiban untuk menganalisis, mengevaluasi dan membahas hal-hal terkait pengadaan kapal TSHD. Pembahasan tersebut salah satunya adalah seputar penyusunan *General Arrangement, Ship Particular, Ship Layout* dan hal-hal lainnya. Tim Bersama wajib membuat laporan mengenai perkembangan tugas yang telah dijalankan dan melaporkannya ke Direksi melalui Direktur Utama.

The Company owns various business support equipment to conduct main activities in dredging and other activities. The Company's production equipment consists of various types of vessels, with different functions, *graving and airbag dock* and vessels workshops, and shipyard production equipment.

Management believed that 2019 was an important year to prepare for the rejuvenation of production equipment. The Company is always committed to providing the best service for customers. Well maintained production equipment can be a powerful tool to assure the dredging process goes according to plan and differentiate the Company from its competitors.

The Company has formed a Joint Team to procure a 2,700 m³ Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) Vessel. The Joint Team has been formed by the Decree of the Directors No: 29/11/20/RKD-2019. Members of the Joint Team consist of workers from PT Pengerukan Indonesia and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In general, the Joint Team has the duty and obligation to analyze, evaluate and discuss matters related to the procurement of TSHD vessel. One of the discussions is regarding the *General Arrangement, Ship Particular, Ship Layout* and other matters. The Joint Team must make a progress report and submit it to the Directors through the Managing Director.

Kapal Keruk Penghisap Lumpur

Trailing Suction Hopper Dredgers

Nama Kapal Vessel Name	Kapasitas Hopper Hopper Capacity (m ³)	Panjang Keseluruhan Total Length (m)	Lambung Kapal Moulded Breadth (m)	Tinggi Kapal Moulded Depth (m)	Panjang Muatan Loaded Drought (m)	Total Daya Total Installed Power (hp)	Kedalaman Pengerukan Dredging Depth (m)	Tonase Bobot Mati Deadweight Tonnage (ton)
Bali II	5.000	124,40	18,00	10,30	7,90	10.770	30	10.420
Aru II	5.000	124,40	18,00	10,30	7,90	10.770	30	10.420
Irian Jaya	4.000	109,88	18,04	8,05	7,10	7.560	20	8.305
Kalimantan II	4.000	109,88	18,04	8,05	7,10	7.560	20	8.305
Timor	2.000	95,00	18,04	7,00	5,00	7.550	20	3.600

Kapal Keruk Bor Penghisap Lumpur

Cutter Suction Dredgers

Nama Kapal Vessel Name	Diameter Pipa Pelepasan Discharge Pipe (inch)	Panjang Keseluruhan Overall Length (m)	Lambung Kapal Moulded Breadth (m)	Tinggi Kapal Moulded Depth (m)	Total Daya Total Installed Power (hp)	Kedalaman Pengerukan Dredging Depth (m)	Tonase Bobot Mati Deadweight Tonnage (ton)
Batang Hari	30	80,00	18,50	7,00	13.980	24,00	1.630

Kapal Keruk Cangkrum

Grab/Clamshell Dredgers

Nama Kapal Vessel Name	Kapasitas Clamshell Clamshell Capacity (m ³)	Panjang Keseluruhan Overall Length (m)	Lambung Kapal Moulded Breadth (m)	Tinggi Kapal Moulded Depth (m)	Total Daya Total Installed Power (hp)	Kedalaman Pengerukan Dredging Depth (m)	Tonase Bobot Mati Deadweight Tonnage (ton)
Batur	5,50	28,00	13,00	2,60	455	20	333,29
Ranau	5,50	28,00	13,00	2,60	455	20	333,29
Poso	5,50	28,00	13,00	2,60	455	20	333,29

Kapal Bak Lumpur dan Kapal Tunda

Hopper Barge and Tug Boat

Nama Kapal Vessel Name	Kapasitas Hopper Hopper Capacity (m ³)	Panjang Keseluruhan Overall Length (m)	Lambung Kapal Moulded Breadth (m)	Tinggi Kapal Moulded Depth (m)	Total Daya Total Installed Power (hp)	GT (Ton)	NT (Ton)
Natuna	1.000	43,01	14,00	4,90	47	740	222
RKD 1000-1	1.000	43,00	14,00	4,90	47	740	222
SB Cempaka	500	47,63	9,75	3,36	960	518	156
SB Seroja	500	47,63	9,75	3,36	960	518	156
SB Seruni	500	48,62	9,75	3,36	960	541	163
SB Melati	500	28,00	9,75	3,36	960	541	163
SB Teratai	500	47,63	9,75	3,36	960	518	156
SB 101	1.000	48,80	12,20	4,70	47	781	265
BKMP XLII	-	16,00	4,50	2,20	350	31	18

Graving dan Airbag Dock Serta Perbengkelan Kapal

Graving and Airbag Dock and Vessel Workshop

Graving Dock Graving Dock		Bengkel Workshop		Galangan Baru dengan Airbag System New Shipyard with Airbag System	
Panjang Length	: 130 m	Bengkel Pelimbugan Docking Workshop	: 1.200 m ²	Panjang Length	: 130 m
Lebar Width	: 23 m	Bengkel Mesin Machine Workshop	: 1.200 m ²	Lebar Width	: 36 m
Tinggi Height	: 8 m	Gudang Warehousing	: 744 m ²	Kapasitas Capacity	: 5.000 GT
Kapasitas Capacity	: 10.000 GT				

Alat Produksi Galangan

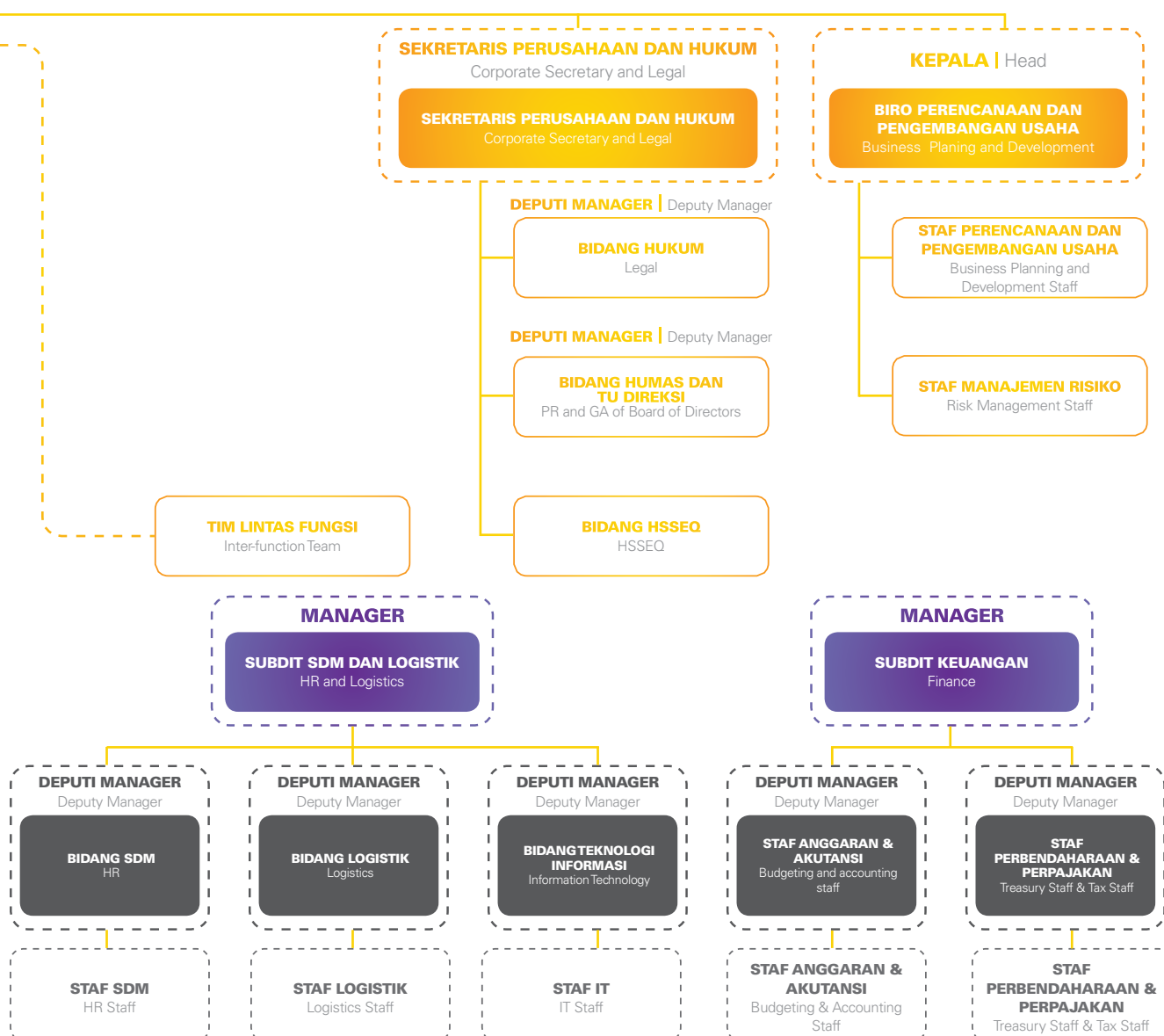
Shipyard Production Equipment

No.	Nama Alat Equipment	Spesifikasi Spesification	Jumlah (Unit) Total (Unit)	Status Status
1.	Welding Machine SMAW (380 V)	-	39	Milik sendiri Self-owned
2.	Welding Machine SMAW (220 V)	-	4	Milik sendiri Self-owned
3.	Welding Machine TIG	Inverter AC/DC, Model ADC200	1	Milik sendiri Self-owned
4.	Rolling Plate Machine	Kapasitas maksimal 12 MM Maximum capacity 12 MM	3	Milik sendiri Self-owned
5.	Rolling Plate Machine	Kapasitas maksimal 8 MM Maximum capacity 8 MM	1	Milik sendiri Self-owned
6.	High pressure water jet machine	Merek Denshin, kapasitas 300 bar Denshin, capacity 300 bar	1	Milik sendiri Self-owned
7.	High pressure water jet machine	Merek Denshin, kapasitas 350 bar Denshin, capacity 350 bar	1	Milik sendiri Self-owned
8.	Kabel Las dan aksesorisnya (SMAW) Welding Cable and its accessories (SMAW)	-	10	Milik sendiri Self-owned
9.	Cutting Torch	-	9	Milik sendiri Self-owned
10.	Trafo Las Genset Yanmar	-	2	Milik sendiri Self-owned
11.	Cutting Whell Portable	Denyo, DC welder machine/AC genset	1	Milik sendiri Self-owned
12.	Blower 18"	Electric blower 18"	10	Milik sendiri Self-owned
13.	Blower 12"	Electric blower 12"	20	Milik sendiri Self-owned
14.	Hand Grinder Portable	-	2	Milik sendiri Self-owned
15.	Chain block (3T)	Kapasitas 3 ton 3 ton capacity	4	Milik sendiri Self-owned
16.	Chain block (5T)	Kapasitas 5 ton 5 ton capacity	4	Milik sendiri Self-owned
17.	Lever chain block (6T)	Kapasitas 6 ton 6 ton capacity	2	Milik sendiri Self-owned
18.	Jack lifting (20T)	Kapasitas 20 ton 20 ton capacity	4	Milik sendiri Self-owned
19.	Lathe Machine (1)	Panjang 9,5 meter; merek YAM, tipe YAM9000H Length 9.5 meter; YAM brand, YAM9000H type	1	Milik sendiri Self-owned
20.	Lathe Machine (1)	Panjang 2,5 meter; merek GROMATIK, tipe 250 Length 2.5 meter; GROMATIK brand, 250 type	1	Milik sendiri Self-owned
21.	Drilling Machine (1)	Scrap besar; merek Smit & Mills Large Scrap; Smit & Mills	1	Milik sendiri Self-owned

No.	Nama Alat Equipment	Spesifikasi Specification	Jumlah (Unit) Total (Unit)	Status Status
22.	Drilling Machine (2)	Scrap kecil; merek Gromatic; tipe 350L Small Scrap; Gromatic; type 350L	1	Milik sendiri Self-owned
23.	Drilling Machine (1)	Bor besar; merek Cincinati Gilbert; manual Large drill; Cincinati Gilbert brand; manual	1	Milik sendiri Self-owned
24.	Drilling Machine (2)	Bor kecil; merek Ashina; manual Small drill; Ashima; manual	1	Milik sendiri Self-owned i
25.	Drilling Machine (3)	Bor kecil; merek Groenegen; manual Small drill; Groenegen; manual	1	Milik sendiri Self-owned
26.	Propeller Balancing	Balancing manual	1	Milik sendiri Self-owned
27.	Auto hacksaw Machine	Mesin gergaji kayu besar Large wood sawing machine	1	Milik sendiri Self-owned
28.	Auto hacksaw Machine	Merek Tomita; mesin gergaji kayu kecil Tomita; small wood sawing machine	1	Milik sendiri Self-owned
29.	Automatic hacksaw Machine Steel	Merek Klaeger; model K2180W; tipe K801 Klaeger; K2180W model; K801 type	1	Milik sendiri Self-owned
30.	Hydraulic Cylinders Jacks Lifting	Merek Enerpac; kapasitas 150 KN Enerpac 150 KN; capacity	1	Milik sendiri Self-owned
31.	Electric Driven Hydraulic Pump	Merek RIKEN Seiki; kapasitas 2.000 bar RIKEN Seiki 2,000 bar capacity	1	Milik sendiri Self-owned
32.	Manual Hand Pump Hydraulic	Merek RIKEN Seiki; kapasitas 2.000 bar RIKEN Seiki 2,000 bar capacity	1	Milik sendiri Self-owned
33.	Fuel injector test bench	Merek Bosch; kapasitas 400 bar Bosch 400 bar capacity	1	Milik sendiri Self-owned
34.	Air compressor	Kapasitas 12 bar 12 bar capacity	1	Milik sendiri Self-owned i
35.	Battery Charger	Portable	2	Milik sendiri Self-owned
36.	Pompa Celup 3 phase Submersible Pump 3 phase	Diameter 4"; 3 phase; 380V	1	Milik sendiri Self-owned
37.	Pompa Celup 1 phase Submersible Pump 1 phase	Diameter 1"; 1 phase; 220V	1	Milik sendiri Self-owned
38.	Pompa Celup 1 phase Submersible Pump 1 phase	Diameter 2"; 1 phase; 220V	1	Milik sendiri Self-owned
39.	Hand driller	Bor tangan; 220V; 50hz Hand drill 220V; 50hz	1	Milik sendiri Self-owned
40.	Dial Gauge	Merk Mitutoyo; kapasitas 0-1.000 mikron Mitutoyo; 0-1,000 micron capacity	3	Milik sendiri Self-owned
41.	Portable Multigas Detector	Gas Alert MaxXT II	1	Milik sendiri Self-owned
42.	Trafo Step up 380V-440V-480V	Kapasitas 250 KVA; 50Hz Capacity 250 KVA; 50Hz	1	Milik sendiri Self-owned
43.	Trafo Step down 380V-220V	Kapasitas 250 KVA; 50Hz Capacity 250 KVA; 50Hz	1	Milik sendiri Self-owned
44.	Megger Test Digital 2500V	-	1	Milik sendiri Self-owned
45.	Workshop Overhead Cranes	Merek Kone cranes; kapasitas 5 ton Kone cranes; 5 ton capacity	1	Milik sendiri Self-owned
46.	Mobile Crane (35T)	Kapasitas 35 ton 35 ton capacity	2	Milik sendiri Self-owned
47.	Forklift (10T)	Merek TCM; kapasitas 10 ton TCMI 10 ton capacity	1	Milik sendiri Self-owned
48.	Forklift (2,5T)	Merek Toyota & TCM; kapasitas 2,5 ton Toyota & TCMI 2.5 ton capacity	2	Milik sendiri Self-owned
49.	Forklift (5T)	Merek TCM; kapasitas 5 ton TCM; 5 ton capacity	1	Milik sendiri Self-owned

Selama tahun 2019, Rukindo tidak memiliki entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, sehingga tidak ada informasi terkait alamat entitas anak dan/atau kantor cabang. Namun demikian Rukindo memiliki kantor perwakilan area operasi di beberapa wilayah Indonesia.

During 2019, Rukindo did not own subsidiaries and/or branches or representatives, and therefore there were no information related to addresses of subsidiaries and/or branches. However, Rukindo own several offices of operational areas in several areas in Indonesia.



Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019.

The Company's organization structure was ratified based on the Decree of the Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 which issued on May 15, 2019.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris Rukindo tahun 2019. Informasi mengenai profil Dewan Komisaris yang terdapat pada Laporan Tahunan ini memuat informasi mengenai pejabat terakhir yang tercatat per 31 Desember 2019 dan pejabat sebelumnya.

The composition of the Board of Commissioners was changed in 2019. The information regarding the Board of Commissioners profile in this Annual Report consist of the officials as of December 31, 2019 and those prior to the date.



Syaiful Islam
Komisaris
Commissioner

Hambra
Komisaris Utama
President Commissioner

Bambang Supriyadi Ervan
Komisaris
Commissioner



Profil Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 dan pada saat Laporan Tahunan untuk periode tahun buku 2019 selesai dibuat pertengahan 2020
Board of Commissioners Profile as of December 31, 2019 and as of the Annual Report for the fiscal year 2019 is done by mid-2020

Hambra

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	51 tahun per 31 Desember 2019 Ketapang, 10 Oktober 1968	51 years old as of December 31, 2019 Ketapang, October 10, 1968
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2010) Sarjana Hukum Universitas Pattimura Ambon (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Magister of Business Law from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2010) Bachelor of Law Pattimura Ambon University (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: KP03/8/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor: PPI-623-08062020-012 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama dan telah diaktakan melalui Akta No. 39 tanggal 15 Juni 2020.	Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) Number: KP03/8/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 and Number: PPI-623-08062020-012 on June 8, 2020 regarding the Dismission and Appointment of President Commissioner that has been ratified by the Deed No. 39 on June 15, 2020.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial (2015-2016) Kepala Biro Hukum (2012-2015) Plt. Inspektur (2014) Plt. Kepala Biro Hukum (2012) Kepala Bagian Perundang-undangan (2010-2012) Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan (2006-2010) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (2002-2006) 	<ul style="list-style-type: none"> Expert Staff of Strategic Communication and Industrial Relationship (2015-2016) Head of Legal Bureau (2012-2015) Act. Inspector (2014) Act. Legal Head Bureau (2012) Head of Legislation (2010-2012) Head of Corporate Governance Implementation and Legislation (2006-2010) Head of Public Relations Sub Section (2002-2006)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	Business Infrastructure Deputy
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Bambang Supriyadi Ervan

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	62 tahun per 31 Desember 2019 Tarakan, 2 Januari 1957	62 years old as of December 31, 2019 Tarakan, January 2, 1957
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Ilmu Pengetahuan Hubungan Masyarakat dari Boston University, Massachusetts, Amerika Serikat (1993) Sarjana Fakultas Publisistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1981) 	<ul style="list-style-type: none"> Master of Science of Public Relations from Boston University, Massachusetts, United States (1993) Bachelor in Publication from Padjajaran University, Bandung (1981)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 31 Desember 2019.	Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No. 63 dated December 19, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (2017) Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (2016-2017) Kepala Pusat Data dan Informasi (2014-2016) Kepala Pusat Komunikasi Publik (2007-2014) 	<ul style="list-style-type: none"> Chief of Communication and Public Information Bureau (2017) Chief of Communication and Information Technology Center (2016-2017) Chief of Information and Data Center (2014-2016) Chief of Public Communication Center (2007-2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi Informasi dan Kehumasan (2017-sekarang)	Expert Staff of Transportation Ministry of Information Technology and Public Relations (2017-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Syaiful Islam

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	57 tahun per 31 Desember 2019 Makassar, 14 Februari 1962	57 years old as of December 31, 2019 Makassar, February 14, 1962
Domisili Domicile	Bekasi	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> Master in Management from Sriwijaya University, Palembang, South Sumatera Bachelor of Geology Engineering from Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi (1986)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 31 Desember 2019.	Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No. 63 dated December 19, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Bukit Asam Prima (entitas anak PT Bukit Asam) (2017) Senior Manager Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam (2016-2017) Direktur Utama PT Bumi Sawindo Permai (2014-2017) 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Bukit Asam Prima (subsidiary of PT Bukit Asam) (2017) Senior Manager of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam (2016-2017) President Director of PT Bumi Sawindo Permai (2014-2017)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Prasetyadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	50 tahun per 31 Desember 2019 Bandung, 7 Agustus 1969	50 years old as of December 31, 2019 Bandung, August 7, 1969
Domisili Domicile	Bekasi	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister bidang Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2015) Master pada bidang <i>Port & Coastal Engineering</i> dari University of Le Havre, Prancis (1998) Sarjana Teknik Bidang Mesin/Konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (1993) 	<ul style="list-style-type: none"> Master in Management from Airlangga University, Surabaya (2015) Master in Port & Coastal Engineering from University of Le Havre, France (1988) Bachelor in Machinery/Construction Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (1993)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 31 Desember 2019.	Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No. 63 dated December 19, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> CEO di Terminal Teluk Lamong, entitas anak PT Pelabuhan Indonesia III, Surabaya (2014-2016) Manajer Senior Departemen Teknik dan Operasi PT Pelabuhan Indonesia III, Surabaya (2010-2014) Manajer Senior Departemen Teknik dan Operasi PT Pelabuhan Indonesia IV, Makassar (2007-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> CEO of Lamong Bay Terminal, subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III, Surabaya (2014-2016) Senior Manager of Engineering and Operation Department at PT Pelabuhan Indonesia III, Surabaya (2010-2014) Senior Manager of Engineering and Operation Department at PT Pelabuhan Indonesia IV, Makassar (2007-2010)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (IPC), Jakarta (2016-sekarang)	Director of Operation and Information System of PT Pelabuhan Indonesia II (IPC), Jakarta (2016-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.

Profil Dewan Komisaris sebelum Pergantian
Board of Commissioners Profile Prior to Change



Dani Rusli Utama

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	48 tahun per 31 Desember 2019 Bandung, 14 Januari 1971	48 years old as of December 31, 2019 Bandung, January 14, 1971
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Infrastruktur dari Yokohama National University, Jepang (1999) Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Master in Infrastructure Management from Yokohama National University, Japan (1999) Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/20/1/1/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003066 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 16 Februari 2017.	Shareholders Circular Decision Number: HK.568/20/1/1/PI.II-17 and Number: PPI-623-003066 regarding Appointment of President Commissioner and was notarized based on Deed No. 09 dated February 16, 2017.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Teknik dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2015-2016) Komisaris Utama PT Akses Pelabuhan Indonesia (2014-2015) Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012-2015) Kepala Biro Strategis Perseroan di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012) Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2010-2011) General Manager Pelabuhan Palembang (2009-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> Director of Engineering and Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) President Director of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2015-2016) President Commissioner of PT Akses Pelabuhan Indonesia (2014-2015) President Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012-2015) Head of Strategic Bureau at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012) Director of Human Resources of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2010-2011) General Manager of Palembang Port (2009-2010)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Terdapat perubahan dalam komposisi Direksi Rukindo tahun 2019. Informasi mengenai profil Direksi yang terdapat pada Laporan Tahunan ini memuat informasi mengenai pejabat terakhir yang tercatat per 31 Desember 2019 dan pejabat sebelumnya.

The composition of the Board of Directors was changed in 2019. The information regarding the Board of Commissioners profile in this Annual Report consist of the officials as of December 31, 2019 and those prior to the date.



Indra Sigit Satyaputra
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Ari Santoso
Direktur Komersial dan Teknik
Director of Commercial and Engineering

Wahyu Hardiyanto
Direktur Utama
Managing Director

Profil Direksi per 31 Desember 2019
Board of Directors Profile as of December 31, 2019



Wahyu Hardiyanto

Direktur Utama
Managing Director

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	53 tahun per 31 Desember 2019 Rangkasbitung, 25 Mei 1966	53 years old as December 31, 2019 Rangkasbitung, May 25, 1966
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari ITN, Malang (1992) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering from ITN, Malang (1992)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: sK.03/I/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan Nomor: PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 217 tanggal 29 Juli 2019.	Shareholders Circular Decision Number: sK.03/I/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No. 217 dated July 29, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Engineering di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2018-2019) General Manager di Cabang Pelabuhan Pontianak (2016) General Manager Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2012-2016) Deputi General Manager Operasi di Terminal III Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2012) Staf Utama Teknik Sr. Kantor Pusat (2011-2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Director of Engineering at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2018-2019) General Manager at Pontianak Port (2016) General Manager Terminal at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2012-2016) Deputi General Manager of Operation at Terminal III Tanjung Priok Port (2012) Senior Main Staff of Engineering at Head Office (2011-2012)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Indra Sigit Satyaputra

Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	53 tahun per 31 Desember 2019 Yogyakarta, 25 Agustus 1966	53 years old as of December 31, 2019 Yogyakarta, August 25, 1996
Domisili Domicile	Bekasi	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister dari University D' Amiens, Prancis (1998) Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Master from D' Amiens University, France (1998) Bachelor of Economy from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan Nomor: PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 217 tanggal 29 Juli 2019.	Shareholders Circular Decision Number: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No. 217 dated July 29, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Perusahaan di PT Jasa Armada Indonesia (2017-2019) Staf Direksi di PT Jasa Armada Indonesia (2017) Direktur Keuangan & SDM di PT IPC TPK (2013-2014) Koordinator Utama PMO Bidang Support & Enablers Sr KPO (2012-2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Secretary at PT Jasa Armada Indonesia (2017-2019) Board of Directors Staff at PT Jasa Armada Indonesia (2017) Director of Finance & HR at PT IPC TPK (2013-2014) Main Coordinator of PMO of Support & Enablers Sr KPO (2012-2013)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Ari Santoso

Direktur Komersial dan Teknik
Director of Commercial and Engineering

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	46 tahun per 31 Desember 2019 Jakarta, 14 Mei 1973	46 years old as of December 31, 2019 Jakarta, May 14, 1973
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Business Administration dari Renmin University, Tiongkok (2012) Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Bandar Lampung (2003) Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Master in Business Administration from Renmin University, China (2012) Master in Marketing Management from Bandar Lampung University (2003) Bachelor of Economy and Accounting from Trisakti University, Jakarta (1999)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan Nomor: PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No. 217 tanggal 29 Juli 2019.	Shareholders Circular Decision Number: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No. 217 dated July 29, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> VP Hubungan Pelanggan (2018-2019) VP Hubungan Lembaga (2017-2019) Senior Specialist Teknik dan Manajemen Risiko (2016-2017) GM Cabang Bengkulu (2015-2016) GM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (2014-2015) 	<ul style="list-style-type: none"> VP of Customer Relationship (2018-2019) VP of Institution Relationship (2017-2019) Senior Specialist of Engineering and Risk Management (2016-2017) GM of Bengkulu Branch (2015-2016) GM of Planning and Business Development (2014-2015)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.

Profil Direksi sebelum Pergantian
Board of Directors Profile Prior to Change



M. Hadi Syafitri Noor
Direktur Utama
Managing Director

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	50 tahun per 31 Desember 2019 Pontianak, 10 Desember 1969	50 years old as of December 31, 2019 Pontianak, December 10, 1969
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Coastal Engineering and Port Development dari UNESCO-IHE, Delft, Belanda (2011) Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Tanjung Pura (1996) 	<ul style="list-style-type: none"> Master in Coastal Engineering and Port Development from UNESCO-IHE, Delft, Netherland (2011) Bachelor of Civil Engineering from Tanjung Pura University (1996)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi.	Shareholders Circular Decision Number: HK.568/10/3/9/PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 on March 10, 2017 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia (2014-2017) General Manager Cabang Pelabuhan Jambi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016) Asisten Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013) Asisten Senior Manager Pengembangan Fasilitas dan Pengelolaan Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Director of Commercial and Engineering of PT Pengerukan Indonesia (2014-2017) General Manager of Jambi Port of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016) Assistant Senior Manager of Construction Design at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013) Assistant Senior Manager of Facility Development and Environmental Management at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2013)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Budi Priyanto
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	54 tahun per 31 Desember 2019 Purwodadi, 24 November 1965	54 years old as of December 31, 2019 Purwodadi, November 24, 1965
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister dari Erasmus University, Rotterdam (2010) Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta (1999) Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1990) 	<ul style="list-style-type: none"> Master from Erasmus University, Rotterdam (2010) Master in Management from Trisakti University, Jakarta (1999) Bachelor of Economy from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1990)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi.	Shareholders Circular Decision Number: HK.568/10/3/9/PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 on March 10, 2017 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan dan SDM PT IPCTPK (2014) Koordinator PMO Bidang Implementation Project Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014) Koordinator Utama PMO Bidang Unlock Capacity Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2014) Direktur SDM dan Administrasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2012-2013) Senior Manager Perencanaan dan Pengembangan Bisnis II di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Director of Finance and HR of PT IPCTPK (2014) PMO Coordinator of Implementation Project at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014) PMO Main Coordinator of Unlock Capacity at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2014) Director of HR and Administration of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2012-2013) Senior Manager of Business Planning and Development II at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.



Muhammad Yusuf

Pt. Direktur Komersial dan Teknik
Act. Director of Commercial and Engineering

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	61 tahun per 31 Desember 2019 Bantaeng, 31 Mei 1958	61 years old as of December 31, 2019 Bantaeng, May 31, 1958
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Perkapalan dari Universitas Hasanuddin (1982) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Shipping Engineering from Hasanuddin University (1982)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK.03/21/3/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: PPI-623-005167 tanggal 6 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi.	Shareholders Circular Decision Number: SK.03/21/3/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: PPI-623-005167 on April 6, 2018 regarding Appointment of Members of Board of Directors.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> GM Unit Galangan PT Pengerukan Indonesia (2017-2018) GM Galangan II (2012-2014) GM Galangan IV dan Paliat (2010) Manajer Galangan Paliat (2006-2010) Manajer SKS (2004-2006) Kepala Cabang PT DKB Semarang (2001) Manager Produksi PT DKB (2000-2001) Kadiv. Produksi PT DKB (1998-2000) Kabag. Pengembangan Usaha PTK DKB (1998) Kabag. Umum PT DKB (1997-1998) Kabag. Estimasi PT DKB (1994-1997) Departemen Pemasaran PT DKB (1991) Kabag. Pemasaran PT Kodja (1991) Kabag. Pusat Data PT Kodja (1990-1991) Kabag. Teknologi PT Kodja (1988-1990) 	<ul style="list-style-type: none"> GM of Shipyard Unit of PT Pengerukan Indonesia (2017-2018) GM Shipyard II (2012-2014) GM Shipyard IV and Paliat (2010) Manager Paliat Shipyard (2006-2010) Manager SKS (2004-2006) Branch Head of PT DKB Semarang (2001) Manager Production of PT DKB (2000-2001) Division Head Production of PT DKB (1998-2000) Division Head Business Development of PT DKB (1998) Division Head General of PT DKB (1997-1998) Division Head Estimation of PT DKB (1994-1997) Marketing Department of PT DKB (1991) Division Head Marketing of PT Kodja (1991) Division Head Data Center of PT Kodja (1990-1991) Division Head Technology of PT Kodja (1988-1990)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.	No affiliation with other Commissioners, Directors and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan.	Has no share at the Company.

Profil Pejabat Senior

Senior Management



Amir Indra Sassongko Padmoprayitno

Kepala Satuan Pengawas
Intern Head of Internal Audit

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	49 tahun per 31 Desember 2019 Jakarta, 21 April 1970 49 years old as of Desember 31, 2019 Jakarta, April 21, 1970
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Sosiologi Administrasi Niaga dari Universitas Krisnadwipayana (1996) Bachelor of Sociology of Business Administration from Krisnadwipayana University (1996)
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Operasi Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok (2012-2013) • Manager Operasi Terminal I, Pelabuhan Tanjung Priok (2010-2012) • Pemeriksa Komersial dan Operasi Senior, Satuan Pengawas Internal, Kantor Pusat (2009-2010) • Asisten Senior Manager Pelayanan Petikemas, Direktorat Operasi, Kantor Pusat (2009) • Asisten Manager Pelayanan Kapal dan Barang, Divisi Jasa, Pelabuhan Palembang (2007-2009) • Asisten Manager Usaha Terminal, Divisi Jasa, Pelabuhan Palembang (2006-2007) <ul style="list-style-type: none"> • Operation Manager of Terminal II, Tanjung Priok Port (2012-2013) • Operation Manager of Terminal II, Tanjung Priok Port (2010-2012) • Senior Auditor of Commerce and Operation, Internal Audit Unit, Head Office (2009-2010) • Stevedoring Assistant Senior Manager, Operation Directorate, Head Office (2009) • Shipping Services and Goods Assistant Manager, Service Division, Palembang Port (2007-2009) • Terminal Business Assistant Manager, Service Division, Palembang Port (2006-2007)



Yasarman
Sekretaris Perusahaan dan Hukum
Corporate Secretary and Legal

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	59 tahun per 31 Desember 2019 Solok, 10 November 1960 59 years old as of Desember 31, 2019 Solok, November 10, 1960
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya (2016) Magister Hukum Bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2005) Sarjana Hukum dari Universitas Bung Hatta (1986) Master in Notary from Jayabaya University (2016) Master in Business Law from IBLAM Law School (2005) Bachelor of Law from Bung Hatta University (1986)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 28 April 2017 diterbitkan oleh Direktur Keuangan dan SDM Certain Time Working Agreement on April 28, 2017 issued by Director of Finance and HR
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Perusahaan (2010-2017) Manajer Tender & Kontrak Bagian Pengembangan Usaha Dan Pemasaran (2006-2010) Manajer Hubungan Industrial Bagian Sumber Daya Manusia (2004-2006) Manajer Tender & Kontrak Bagian Pengembangan Usaha Dan Pemasaran (2003-2004) Kepala Bidang Hukum Biro Sekretariat Perusahaan (1997-2003) Corporate Secretary (2010-2017) Tender & Contract Manager of Business Development and Marketing (2006-2010) Industrial Relationship Manager of Human Resources (2004-2006) Tender & Contract Manager of Business Development and Marketing (2006-2010) Legal Head of Corporate Secretary (1997-2003)

Profil Manajer

Manager Profil



Zulfa Irawan Anton
Kepala Biro Perencanaan &
Pengembangan Usaha
Head of Business Planning &
Development



Beni Hermawan
Manager Komersial
Commercial Manager



Nurhadi
Manager Armada dan
Galangan
Fleet and Shipyard Manager



Agung Romaniyanto
Manager Keuangan
Finance Manager



Nawisworo
Manager SDM & Logistik
HR & Logistics Manager

Profil Sumber Daya Manusia

Human Resources Profile

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis, Rukindo senantiasa memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia berjalan dengan baik untuk mendorong terwujudnya operasional kerja yang prima dan bisnis yang unggul. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten menjadi sebuah keharusan dan senantiasa ditingkatkan sesuai kebutuhan Perusahaan dan perkembangan industri.

Komposisi Pekerja

Per 31 Desember 2019, jumlah pekerja Perusahaan mencapai 167 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 135 pekerja. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perekrutan pekerja baru. Dari total 167 orang tersebut, pekerja Rukindo terdiri dari:

1. Pegawai Tetap Rukindo = 14 orang
2. Pekerja Organik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 4 orang
3. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) = 132 orang
4. Pekerja *Outsourcing* = 17 orang

Profil SDM Perusahaan memiliki tingkat latar belakang yang beragam dari berbagai aspek. Di sini Perusahaan ingin menunjukkan bahwa Rukindo menerima keberagaman latar belakang setiap pekerja tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik yang bersangkutan.

Komposisi Pekerja berdasarkan Status

Status Status	2018					2019				
	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total
		Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total			Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total	
Organik Organic	11	1	-	1	12	18	-	-	-	18
Non Organik Non Organic	27	34	62	96	123	27	38	84	122	149
Jumlah Total	38	35	62	97	135	45	38	84	122	167

In facing the dynamic business challenges, Rukindo ensures that human resources management runs accordingly to encourage the realization of excellent working operational and business performance. The demand for adequate and competent Human Resources (HR) is a necessity and always be enhanced in accordance with Company's need and industry development.

Workers Composition

As of December 31, 2019, the total workers reached 167 people, increased from 135 workers from the previous year. This increased was due to the recruit of new worker. From the total 167 people, workers of Rukindo consist of:

1. Organic Workers of Rukindo = 14 people
2. Organic Workers of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 4 people
3. Specific Time Workers (PKWT) = 132 people
4. Outsourcing = 17 people

The Company's HR profile has different background from various aspects. Here the Company wanted to show that Rukindo accepted workers that came from various background without differentiating their race, religion, ethnicity, gender, and physical condition.

Workers Composition based on Status

Komposisi Pekerja berdasarkan Pendidikan

Workers Composition based on Education

Status Status	2018					2019				
	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total
		Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total			Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total	
Magister (S2) Master (S2)	6	2	2	4	10	7	-	2	2	9
Sarjana (S1) Bachelor (S1)	25	10	2	12	37	29	4	6	10	39
Diploma (D3) Diploma (D3)	2	2	2	4	6	5	2	11	13	18
SLTA High School	5	18	50	68	73	4	29	58	87	91
SLTP Junior High School	-	3	6	9	9	-	3	6	9	9
SD Elementary School	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Jumlah Total	38	35	62	97	135	45	38	84	122	167

Komposisi Pekerja berdasarkan Usia

Workers Composition based on Age

Status Status	2018					2019				
	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total	Administrasi Administration	Operasional Operational			Jumlah Total
		Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total			Darat Land	Laut Sea	Jumlah Total	
≤ 30 tahun years old	6	6	7	13	19	21	1	10	11	32
31-40 tahun years old	10	7	8	15	25	10	13	10	23	33
41-50 tahun years old	10	15	19	34	44	8	16	30	46	54
51-55 tahun years old	9	4	19	23	32	3	5	19	24	27
> 55 tahun years old	38	3	9	12	15	3	3	15	18	21
Jumlah Total	38	35	62	97	135	45	38	84	122	167

Pengembangan Kompetensi Pekerja

Rukindo menyadari bahwa pekerja merupakan sumber daya Perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja operasional dan bisnis sehingga harus dikelola dan senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan. Program pengembangan pekerja dilakukan melalui pendidikan karir dan profesi, keterampilan, kursus, latihan, penataran, seminar, lokakarya, dan pelatihan manajemen dan teknis. Setiap jenis pengembangan dilakukan sesuai dengan

Competency Development

Rukindo believed that workers are important for the Company to increase its operational and business performance and therefore need to be managed and always enhanced continuously. The competency development programs for workers were done through various career educational programs, workshops, courses, seminar, and training on management and technical skills. Every development program was conducted based on the Company's needs to increase

kebutuhan Perusahaan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental para pekerja. Rukindo memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan usaha dan pelaksanaannya akan dikaitkan dengan jenjang jabatan yang berlaku di Rukindo.

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan telah menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan pekerja yang diselenggarakan oleh pihak internal, termasuk Grup IPC, dan eksternal Perusahaan. Program-program tersebut memiliki tujuan umum untuk memenuhi kesenjangan dalam tingkat kompetensi saat ini dan tingkat kompetensi yang diharapkan untuk memenuhi berbagai rencana strategis korporasi Rukindo dan Entitas Induk maupun rencana kerja setiap unit dan divisi masing-masing.

the knowledge and skills and mental of every worker. Rukindo gave the same opportunity to all workers to obtain education and training in accordance with business development and the implementation was determined based on the applicable career development at Rukindo.

In 2019, the Company has conducted the training and development programs given by both internal, including IPC Grup, and external parties of the Company. Those programs were generally conducted to fill the gap and competence level that the Company is expecting to achieve the business goals, including from the Parent Entity, as well as each business unit.

Pengembangan Kompetensi Pekerja

Competency Development Cost

	Nama Pendidikan/Pelatihan Name of Training/Education	Peserta (Orang) Participant (People)
PEKERJA DARAT LAND WORKER		
SATUAN PENGAWAS INTERN INTERNAL AUDIT UNIT		
	Audit Intern Tingkat Manajerial Internal Audit – Managerial Level	2
	<i>Workshop Risk Based Internal Auditing</i> Workshop Risk Based Internal Auditing	2
	<i>Workshop Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif</i> Workshop – Writing Effective Report for Internal Audit	1
SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAN HUKUM CORPORATE SECRETARY AND LEGAL		
	<i>Good Corporate Governance Implementation</i> Good Corporate Governance Implementation	1
	Perencanaan Peraturan Perundang-undangan (<i>Legislative Drafting</i>) Legislative Drafting	1
	Membuat dan Mengelola Situs Web Perusahaan Creating and Managing Corporate Website	1
	IT – Keamanan Informasi IT – Information Security	1
	<i>Corporate Secretary</i> Corporate Secretary	1
BIRO PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUSINESS PLANNING AND DEVELOPMENT BUREAU		
	<i>Company Strategic Planning</i> Company Strategic Planning	2
	<i>Finnon – Understanding Financial Statement</i> Finnon – Understanding Financial Statement	2
	<i>Managing Innovation for Growth</i> Managing Innovation for Growth	2
	<i>Business Development Planning</i> Business Development Planning	2
	<i>Seminar on Dredging and Reclamation</i> Seminar on Dredging and Reclamation	2

Nama Pendidikan/Pelatihan Name of Training/Education	Peserta (Orang) Participant (People)
SUBDIT PEMASARAN MARKETING SUB DIRECTORATE	
<i>Marketing Management</i> Marketing Management	1
<i>Negotiation Skill for Business</i> Negotiation Skill for Business	2
<i>Project Management</i> Project Management	2
<i>Project Management and Risk Management</i> Project Management and Risk Management	2
<i>Advance Competitive Marketing Strategy</i> Advance Competitive Marketing Strategy	2
SUBDIT OPERASI OPERATION SUB DIRECTORATE	
<i>Operation Management</i> Operation Management	2
<i>Operation Planning Control</i> Operation Planning Control	2
<i>Project Management</i> Project Management	2
SUBDIT ARMADA FLEET SUB DIRECTORATE	
<i>Feasibility Study</i> Feasibility Study	3
<i>Integrated Risk Management</i> Integrated Risk Management	2
<i>Engineering Fixed Asset Management</i> Engineering Fixed Asset Management	2
<i>Maintenance Management</i> Maintenance Management	5
<i>Project Management</i> Project Management	5
<i>Efficient Lean Management</i> Efficient Lean Management	2
NDT – UT MT PT Level 1 NDT – UT MT PT Level 1	5
<i>Corrosion Inspector</i> Corrosion Inspector	5
K3 Umum General HSE	5
SUBDIT LOGISTIK LOGISTIC SUB DIRECTORATE	
<i>Purchasing Management</i> Purchasing Management	2
<i>Warehouse Management</i> Warehouse Management	2
<i>Workshop Pengadaan Barang dan Jasa</i> Workshop on Goods and Services Procurement	2
<i>Logistic Management</i> Logistic Management	2
<i>Project Management and Risk Management</i> Project Management and Risk Management	2
<i>Negotiation Skill for Business</i> Negotiation Skill for Business	2

Nama Pendidikan/Pelatihan Name of Training/Education	Peserta (Orang) Participant (People)
SUBDIT SDM DAN UMUM HR AND GENERAL SUB DIRECTORATE	
<i>Talent Management</i> Talent Management	2
<i>Practical Behaviour Based Interview</i> Practical Behaviour Based Interview	2
<i>Industrial Relations Conflict Resolution</i> Industrial Relations Conflict Resolution	3
Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Employment Regulation	3
Pelatihan PKWT dan <i>Outsourcing</i> Training for PKWT and Outsourcing	2
Struktur dan Skala Upah Wage Structure and Scale	2
Manajemen Perawatan Gedung Building Maintenance	2
IHT Elektrisen Kapal IHT Vessel Electricity	15
SUBDIT KEUANGAN FINANCE SUB DIRECTORATE	
<i>Understanding Financial Statement</i> Understanding Financial Statement	1
<i>Financial Statement Analysis</i> Financial Statement Analysis	1
PPH Pasal 21 – Praktis dan Sistematis Income Tax Article 21 – Practical and Systematic	2
Pelatihan Terkait Pajak Pertambahan Nilai Training on Value Added Tax	2
Koreksi Fiskal & Penyusunan SPT PPh Badan Fiscal Correction & Annual Tax Return of Corporate Income Tax	2
SUBDIT HSSEQ HSSEQ SUB DIRECTORATE	
Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 Risk Management based on ISO 31000	1
ISPS Code – CSO ISPS Code – CSO	2
ISPS Code – DPA ISPS Code – DPA	2
GALANGAN DAN PERBENGKELAN KAPAL SHIPYARD AND VESSEL WORKSHOP	
<i>Welder</i> Welder	2
Pemadam Kebakaran Fire Extinguisher Training	2
P3K First Aid	3
<i>Marine Surveyor</i> Marine Surveyor	2
<i>Welding Inspector</i> Welding Inspector	2
Listrik Electrical	2
Electrical K3 HSE Electrical	2

Nama Pendidikan/Pelatihan Name of Training/Education		Peserta (Orang) Participant (People)
SEMINAR, SIMPOSIUM, PENATARAN DAN SEJENISNYA SEMINAR, SIMPOSIUM, TRAINING AND ALIKE		5
PELATIHAN DARI GRUP IPC TRAINING FROM IPC GROUP		5
PEKERJA LAUT SEA WORKER		
KAPAL HOPPER HOPPER VESSEL		
Operator Crane (Kapal Hopper dan Clamshell) Crane Operator (Hopper and Clamshell)		5
DIKLAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORSTRAINING		
Pelatihan dari Grup IPC Training From IPC Group		9
Minuat Indonesia – <i>Problem Solving Decision Making</i> Minuat Indonesia – Problem Solving Decision Making		3
<i>Creative Thinking Technique</i> Creative Thinking Technique		3
DIKLAT KOMISARIS BOARD OF DIRECTORS TRAINING		
Pelatihan dari Grup IPC Training From IPC Group		6
Minuat Indonesia – <i>Problem Solving Decision Making</i>	Minuat Indonesia – Problem Solving Decision Making	3
<i>Creative Thinking Technique</i>	Creative Thinking Technique	3
Jumlah	Total	182

Biaya Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2019, biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi pekerja berjumlah Rp1.529.350.500. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp675.858.769.

Competency Development Cost

The total cost to develop the competency of Company's workers during 2019 was Rp1,529,350,500. This figure increased compared to the previous year which amounted to Rp675,858,769.

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Pemegang Saham Rukindo

Rukindo Shareholders

Kepemilikan Saham Rukindo per 31 Desember 2019

Rukindo Shareholders as of December 31, 2019

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	611.622	611.622.000.000	99,9
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	542	542.000.000	0,09
Jumlah Total	612.164	612.164.000	100%

Catatan: Nilai nominal saham adalah Rp1.000.000/lembar saham
Note: Share nominal value is Rp1,000,000/share

Informasi 20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya

Rukindo hanya memiliki dua Entitas Induk Perusahaan yang memiliki saham Perusahaan yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjadi entitas pengendali dengan kepemilikan 99,9% dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dengan kepemilikan 0,09%.

Information on 20 Major Shareholders and Ownership Percentage

Rukindo only has two Parent Entities owning the Company shares, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the controlling entity with 99.9% ownership and PT Pengembang Pelabuhan Indonesia with 0.09% ownership.

Nama Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo merupakan Entitas Anak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan kepemilikan 99,9% sehingga tidak terdapat pemegang saham lain yang memiliki 5% atau lebih saham.

Shareholders with Ownership More than 5%

As of December 31, 2019 Rukindo is the subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with 99.9% ownership and there were no other shareholders who owned 5% or more shares.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat (Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5%)

Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak ada kelompok pemegang saham dari masyarakat. Rukindo merupakan Entitas Anak dari Entitas Induk yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, masing-masing dengan kepemilikan 99,9% dan 0,09%, secara berturut-turut.

Shareholders from General Public (with Ownership Less than 5%)

As of December 31, 2019 there was no group of shareholders from the general public. Rukindo is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), a State-Owned Enterprise (BUMN), and PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, with ownership of 99.9% and 0.09%, respectively.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali hingga Nama Pemilik Akhir

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan pemegang saham utama Perusahaan dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Dengan demikian, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi Entitas Pengendali Perusahaan. Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir Perusahaan.

Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2019 the Board of Commissioners and the Board of Directors did not own the Company's shares either directly or indirectly.

Information Regarding Major Shareholder/ Controlling Entity until Ultimate Owners

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the Company's major shareholder with 99.99% ownership. This makes PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) the Company's Controlling Entity. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is fully owned (100% share ownership) by the Government of the Republic of Indonesia under the guidance of the Ministry of SOEs. Accordingly, the Government of the Republic of Indonesia is the entity's ultimate owner.

Struktur Grup

Group Structure



Pemerintah Republik Indonesia
Governance of the Republic of Indonesia



Daftar Entitas Anak, Joint Venture dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries, Joint Venture and/or Associates

Entitas Anak

Entitas Anak merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Entitas Induk, di mana Entitas Induk memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional Entitas Anak untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Entitas Anak tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo tidak memiliki Entitas Anak.

Joint Venture, Perusahaan Asosiasi dan Special Purpose Vehicle (SPV)

Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) adalah Perusahaan bersama yang mana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada perusahaan ini keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo tidak memiliki Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*).

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan di mana perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo tidak memiliki Perusahaan Asosiasi.

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo tidak memiliki *Special Purposed Vehicle* (SPV).

Subsidiaries

Subsidiaries refer to a company controlled by the Parent Entity, in which the Parent Entity has the authority to regulate financial and operational policies of subsidiaries to obtain benefits from the Subsidiaries' activities. As of 31 December 2019, Rukindo does not have any subsidiary.

Joint Venture, Associates and Special Purpose Vehicle (SPV)

Joint Venture Companies refer to a joint venture company where the parties have their own participating interest, and an agreement regulates the control shared for an activity. The strategic financial and operational decisions related to the activities in this company are required to be taken through consensus by all parties sharing control. As of 31 December 2019, Rukindo does not have any Joint Venture Company.

Associates refer to companies in which the Company holds significant influence and is not a subsidiary or does not hold a participating interest in a joint venture company. On the other hand, the definition of "Significant Influence" refers to the authority to participate in formulating financial and operational policies, but not controlling or jointly controlling the policies. As of 31 December 2019, Rukindo does not have any Associate.

Special Purpose Vehicle (SPV) is a company with a limited purpose or focus to carry out special or temporary activities. As of 31 December 2019, Rukindo does not have a Special Purpose Vehicle (SPV).

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing aksi korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing aksi korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2019 the Company did not issue shares to the public, did not conduct an Initial Public Offering and did not trade its shares on any stock exchange. Therefore there is no information related to issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, share price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange at which Company shares are listed.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Securities Issuance and/or Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

As of December 31, 2019 the Company did not issue any securities or others. Therefore, there is no information regarding the names of securities, the year of issuance, interest rates, the maturity date, the value, the name of the exchange where securities are listed, and rank.

Sinergi Perusahaan

Corporate Synergy

Sebagai Entitas Anak IPC, dan mengemban serta tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kepelabuhan di Indonesia dalam rangka meningkatkan pergerakan arus barang di seluruh Nusantara, Rukindo juga bersinergi dengan Entitas Anak IPC lainnya dan juga BUMN lainnya.

As a Subsidiary of IPC, bearing the same responsibility to conduct port activities in Indonesia to transport goods throughout the archipelago, Rukindo also synergizes with other Subsidiaries and SOEs.

No.	Mitra Kerja Sama Working Partners	MoU/PKS MoU/PKS	Keterangan Description
Sinergi antar Entitas Anak Grup IPC Synergy between Subsidiaries of IPC Group			
1.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	PKS	Kontrak sewa ruangan kantor selama 5 (lima) tahun dari 2017-2022 dengan potensi pendapatan sebesar Rp2,4 miliar. Renting office space for 5 (five) years, 2017-2022, with a potential income of Rp2.4 billion.
2.	PT Electronic Data Intercharge Indonesia	PKS	Penyelesaian pengembangan aplikasi <i>e-procurement</i> yang terintegrasi dengan gudang persediaan. Created the e-procurement application, integrated with inventory warehouse.
Sinergi dengan Cabang IPC Synergy with IPC Branch			
1.	IPC Cabang Sunda Kelapa	PKS	Penyelesaian pengerukan kolam Pelabuhan Sunda Kelapa dengan volume 53.099 m3 yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Finished dredging 53,099 m3 Sunda Kelapa Port basin on April 2019.
2.	IPC Cabang Tanjung Priok	PKS	Penyelesaian pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Priok dengan volume 81.451 m3 yang telah dilaksanakan pada semester pertama 2019. Finished dredging 81,451 m3 Tanjung Priok Port basin on the first semester.
3.	IPC Cabang Pontianak	PKS	Perkembangan pekerjaan alur pelabuhan Pontianak (<i>carry over</i> 2018) dengan volume 804.000 m3 telah mencapai 50%. Construction of 804,000 m3 Pontianak Port channel (<i>carry over</i> from 2018) and has reached 50%.
4.	IPC Cabang Teluk Bayur	PKS	Penyelesaian pengerukan kolam Pelabuhan Teluk Bayur dengan volume 59.257 m3 yang telah dilaksanakan pada 2 Oktober 2019. Finished dredging 59,257 m3 Tanjung Bayur Port basin on October 2, 2019.
Sinergi dengan BUMN lainnya Synergy with other SOEs			
1.	PT PP Presisi Tbk (Entitas Anak PT PP/Subsidiary of PT PP)	MoU	Pembentukan SPV (<i>Special Purpose Vehicle</i>) bisnis reklamasi yang sudah mencapai tahap kajian kelayakan aktivitas operasional dan kerja sama bisnis oleh konsultan independen yang ditunjuk bersama. The feasibility study (on operation and business partnership) of a SPV (Special Purpose Vehicle) is ongoing by an independent consultant – appointed together with the other partner.
2.	PT BNI (BNI Life Insurance)	MoU	Kerja sama asuransi kesehatan. Health insurance cooperation.
3.	PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban	SPK	Kontrak Pekerjaan Pengerukan Terminal Khusus Pelabuhan TPPI Tuban dengan volume 560.000 m3 yang telah mencapai tahap Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3). The Special Terminal Dredging Working Contract of 560,000 m3 at TPPI Tuban Port has now reached Approval for Dredging (PK3).

Lembaga dan Profesional Penunjang Pasar Modal/Perusahaan

Professionals and Institutions Supporting the Company/Capital Market

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak menggunakan lembaga dan profesional penunjang pasar modal, namun Perusahaan menggunakan lembaga dan profesional penunjang aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

In 2019, the Company did not use any institution or professional for capital market, however the Company did use the assistance of institutions or professionals to support its business activity including the following:

Lembaga Institution	Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Purwanto, Sungkoro & Surja	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190, Indonesia	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	2019
Notaris Notary	Nanda Fauz Iwan S.H., MKn.,	Royal Palace Blok C Jalan Prof. DR. Soepomo No.178A, Tebet, Menteng Dalam, Jakarta 12870, Indonesia	Notaris Notary	2019

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari 2017-2019 adalah:

The list of Public Accountant Firm and the Accountant audited the Company's Financial Statement in the last 3 (three) years from 2017 to 2019 are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Jasa Lainnya Other Services	Opini Opinion
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion
2018	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Muhammad Kurniawan Izin No. AP0240	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion
2017	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Muhammad Kurniawan Izin No. AP0240	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on Company Website

Perusahaan memberikan kemudahan akses informasi secara transparan, aktual, dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk regulator maupun masyarakat luas. Komitmen ini ditegakkan dengan berdasarkan kepada peraturan POJK No. 8/POJK.04/2015. Perusahaan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi melalui situs Perusahaan yaitu www.rukindo.co.id.

The Company ensures that Shareholder and Stakeholders, including regulators and general public, can access corporate information easily and always provide transparent, updated and accurate information. This commitment is upheld based on POJK regulation No. 8/POJK.04/2015. The Company strives to provide the information and maintained it to be reliable and integrated at the Company's website, www.rukindo.co.id.

No.	Informasi Information	Situs Web Perusahaan Company Website
1.	Profil Perusahaan Company Profile	√
2.	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Profile	√
3.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guideline	√
4.	Laporan Keuangan Financial Statement	√
5.	Karir Career	√
6.	Smart Procurement Smart Procurement	√
7.	Pengumuman Lelang Auction Announcement	√



4

Analisis & Pembahasan Manajemen

Analisis & Pembahasan Manajemen



Perusahaan memberikan perhatian besar pada pengelolaan Sumber Daya Manusia yang unggul dan pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja usaha.

The Company has always been giving its full attention to the Human Resources management for generating excellent workforce and utilizing the advance Information Technology to support business performance.

Tinjauan Umum

General Overview



PEREKONOMIAN GLOBAL

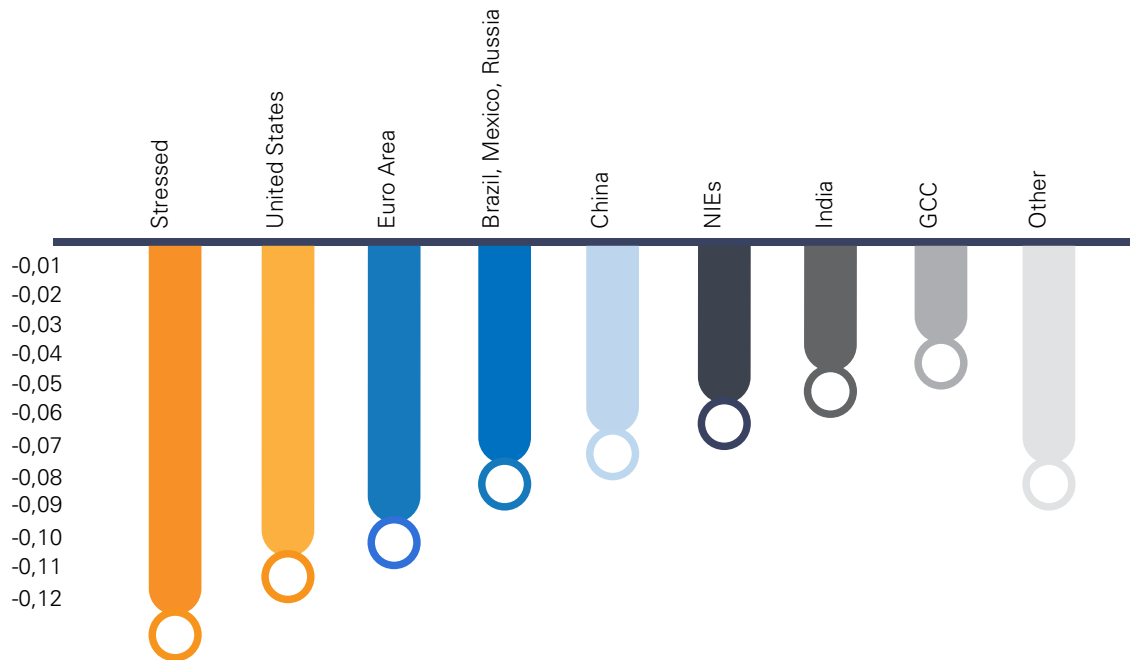
Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 mengalami periode terburuknya semenjak berakhirnya krisis global satu dekade yang lalu. Meningkatnya hambatan perdagangan dibarengi dengan ketidakpastian membayangi aktivitas bisnis secara global. Sejumlah kasus tampak nyata pada negara-negara yang tergolong ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dimana perlambatan ekonomi telah membayangi kedua negara adidaya tersebut.

Negara-negara lain juga memiliki permasalahan yang spesifik seperti Argentina dengan kondisi finansial mereka yang ketat, tensi geopolitik yang meningkat di Iran, dan permasalahan sosial di Venezuela, Libya, Yemen. Secara umum, perekonomian global di tahun 2019 lebih diwarnai oleh tren penurunan yang terjadi secara merata.

THE GLOBAL ECONOMY

The global economic growth in 2019 was at the worst period since the end of the global crisis a decade ago. The increasing trade barriers were also accompanied by uncertainty that overshadowed the global business activities. A number of cases were evident in countries that are classified as developing economies such as the United States and China where the economic slowdown has overshadowed the two superpowers.

There were other countries that were troubled, each with its own problem such as Argentina with their tight financial conditions, increasing geopolitical tension in Iran, and social problems in Venezuela, Libya, Yemen. In general, the global economy in 2019 was filled by a downward trend that occurs equally.



Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Keterangan:

Stressed economies: Argentina, Iran, Libya, Sudan, Turki, Venezuela

NIEs: newly industrialized Asian economies

GCC: Gulf Cooperation Council

Source: International Monetary Fund (IMF)

Notes:

Stressed economies: Argentina, Iran, Libya, Sudan, Turki, Venezuela

NIEs: newly industrialized Asian economies

GCC: Gulf Cooperation Council

PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tetap berdaya dan Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 tetap terjaga di atas angka 5,02% dan terus meningkat untuk mencapai angka pertumbuhan final sebesar 5,10%. Angka pertumbuhan ini memang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17% namun angka pertumbuhan ini tetap tergolong tinggi dibandingkan kondisi negara lain yang cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga di tengah penurunan kinerja ekspor.

Stabilnya permintaan domestik pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kestabilan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04%, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan

THE NATIONAL ECONOMY

Amidst the global economic slowdown, the Indonesian economy remains resilient and the Bank of Indonesia has recorded that the national economic growth in 2019 was maintained at above 5.02% and continued to increase to reach the final growth rate of 5.10%. This growth rate is indeed lower than the achievement of 5.17% in 2018 it is still relatively high compared to other countries that tend to decline. The economic growth was supported by domestic demand which could be maintain amidst the decline in export performance.

The stable domestic demand in 2019 was influenced by the stability of household consumption which grew 5.04%, not much different from the growth of 5.05% in the previous year. The stable household consumption is driven by the government's success in controlling inflation and maintained

tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Investasi yang terjaga juga mendorong peningkatan permintaan domestik dimana tercatat investasi bangunan tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja lapangan usaha dari jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

a good level of consumer confidence. The investment was also encouraged through an increase in domestic demand in which the investment growth in construction was 5.37%, not much different than 5.41% in 2018. From the business perspective, the economic growth in 2019 was driven primarily by the performance of service sectors in the tertiary segment, especially the communication and information sector, the financial and insurance services and others.

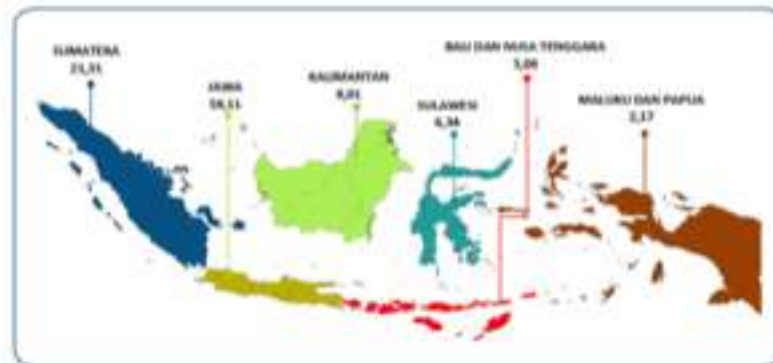
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha
GDP Growth in Several Business Fields



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 65/08/Th.XXII, 5 Agustus 2019
Source: Official Gazette of Statistics Agency No. 65/08/Th.XXII, August 5, 2019

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 59,11%; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,31%, Pulau Kalimantan 8,01%; dan Pulau Sulawesi 6,34%; serta sisanya 5,23% disumbangkan pulau-pulau lainnya yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua masing-masing sebesar 3,06% dan 2,17%.

The spatial economic structure of Indonesian in 2019 was still dominated by several provincial groups of Java, which contributed 59.11% to the Gross Domestic Product; followed by Sumatra Island with 21.31%, Kalimantan Island with 8.01%; and Sulawesi Island with 6.34%; and the remaining 5.23% came from other islands including Bali and Nusa Tenggara, as well as Maluku and Papua with 3.06% and 2.17%, respectively.



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 65/08/Th.XXII, 5 Agustus 2019
Source: Official Gazette of Statistics Agency No. 65/08/Th.XXII, August 5, 2019

Dari sisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Rupiah ditutup mencapai level terkuat di tahun 2019 yaitu pada angka Rp13.865/USD. Walaupun demikian, penguatan Rupiah sebelum mencapai level tertinggi tersebut seringkali mengalami "flash crash" kecil atau pelemahan secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Sentimen pasar terus beranjak naik dan cenderung positif akibat dari kesepakatan dagang fase I AS-Tiongkok yang menjadi faktor utama dalam membuat pelaku pasar bersemangat dan mendorong penguatan Rupiah.

In terms of the exchange rate of Rupiah against US Dollar, Rupiah ws closed at its strongest level in 2019 at Rp13,865/ USD. However, the strengthening of Rupiah before reaching its highest level was often experienced a small "flash crash" or a sudden weakening in a short time. Market sentiment continued to rise and tends to be positive due to the trade agreement of phase I between US and China was a major factor in making the market to be excited and this encouraged the strengthening of Rupiah.



INDUSTRI JASA KEPELABUHAN

Pelabuhan nasional memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional dan menghadapi tantangan ekonomi global. Industri pelabuhan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri sangat strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Dalam menghadapi persaingan global dan menjadi salah satu poros maritim dengan peran sentral, Indonesia perlu mendorong konektivitas perdagangan lintas laut yang semakin dapat diandalkan. Peran pelabuhan sangat penting untuk ditingkatkan dan tentunya memiliki prospek bisnis yang baik.

Melalui jasa pelayanan pengerukan dan galangan kapal serta jasa pelengkap lainnya, Rukindo memiliki peran penting dalam kancah industri kepelabuhan di Indonesia. Pengerukan pelabuhan menjadi salah satu pelayanan penting yang sangat diperlukan oleh pelabuhan. Pelabuhan di Indonesia saat ini terus mengalami pembenahan dan perbaikan, tentunya hal ini juga turut mendukung peningkatan kinerja Rukindo di tahun berjalan dan tahun-tahun ke depannya.

PORT SERVICE INDUSTRY

The national ports have an important role in strengthening the national economy and facing the challenges of the global economy. The port industry acted as a support for the domestic and foreign trade activities and its position is very strategic to encourage equitable development and independent economic growth. In facing the global competition and becoming the global maritime axis, Indonesia needs to further encourage the reliability of its maritime connectivity. The role of port is very important to be improved and certainly has good business prospects.

Through dredging and shipyard services and other complementary services, Rukindo has an important role in the port industry in Indonesia. Dredging has become one of the important services that is needed by ports. The ports in Indonesia continue to improve and being repaired, which mean that this is the support that Rukindo needs to improve the current performance and in the future.

Rencana Kerja dan Kebijakan Strategis 2019

Strategy and Work Plan Policy in 2019

Rencana kerja dan kebijakan strategis Perusahaan tahun 2019 tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019. Perusahaan, melalui Direksi, diwajibkan untuk menyusun RKAP setiap tahunnya untuk disampaikan ke Dewan Komisaris dengan berbagai masukan sebelum kemudian disempurnakan kembali dan disetujui serta disahkan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan RKAP tahun 2019, Perusahaan merumuskan sasaran kinerja sebagai target pencapaian pada tahun pelaksanaan anggaran Perusahaan. Upaya Perusahaan dalam mencapai target-target dalam RKAP 2019 tertuang dalam Rencana Kerja Manajemen 2019. Sepanjang tahun 2019, rencana strategis yang berhasil diterapkan oleh Perusahaan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengusahaan bisnis *eksisting* dengan pengadaan kapal baru tipe TSHD yang masih dalam proses.
2. Menjalinkan kerja sama dengan pihak luar dalam bidang pengerukan dan galangan berskala besar menggunakan kapal mitra sesuai dengan kualifikasi proyek.
3. Mendorong pertumbuhan bisnis pengerukan dan galangan secara horizontal dan vertikal baik di lingkungan IPC *group* dan Pemerintah.
4. Revaluasi aset tetap dan optimalisasi aset kapal tidak produktif melalui kerja sama kemitraan serta penerbitan surat utang dalam rangka pendanaan.
5. Pemantapan integrasi ISO Galangan dengan Kantor Pusat.
6. *Customer Gathering* dalam rangka menggali aspirasi pelanggan dan potensi yang bisa dikembangkan.
7. Pengendalian dan *monitoring* terhadap pencapaian pendapatan, biaya, investasi, kinerja operasional dan KPI secara bulanan.

The Company's work plan and strategic policies in 2019 were outlined in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The Company, through the Board of Directors, is required to prepare an annual RKAP to be submitted to the Board of Commissioners for their inputs before being refined, approved and endorsed by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Based on the 2019 RKAP, the Company has set the targets of achievement. The Company's efforts in achieving the targets in the 2019 RKAP were then set out in the 2019 Management Work Plan. In 2019, the strategic plans have successfully been implemented by the Company, which were as follows:

1. Strengthened the existing business by procuring new TSHD ship, which still under process.
2. Established cooperation with external parties in the dredging and large-scale shipyard using the partner's ships that have been prepared in accordance with project qualifications.
3. Encouraged the growth of dredging and shipyard businesses through horizontal and vertical methods within the Group of IPC and the Government.
4. Revaluated the fixed assets and optimized unproductive ship assets through partnership and bonds issuance for funding.
5. Consolidated the integration of ISO for Shipyard with Head Office.
6. Conducted Customer Gathering to explore customer aspirations and any potential that can be developed.
7. Controlled and monitored the revenue, costs, investment, operational performance and KPIs on a monthly basis.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Overview per Business Segment

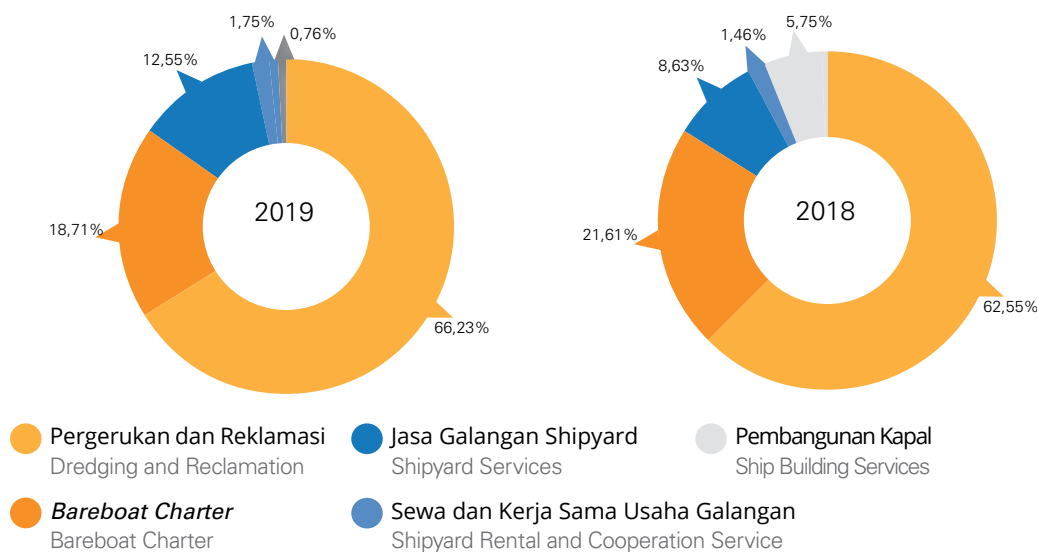
Rincian pendapatan menurut jenis jasa adalah sebagai berikut:

The detail of the Company's income by type of service is as follows:

Keterangan Description	2019 (Rp)	Profitabilitas 2019 (%) Profitability (%)	2018 (Rp)	Profitabilitas 2018 (%) Profitability (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
					Selisih (Rp) Differences (Rp)	%
Pengerukan dan Reklamasi Dredging and Reclamation	103.452.811.634	66,23	141.932.771.371	62,55	(38.479.959.737)	(27,11)
Bareboat Charter Bareboat Charter	29.232.451.453	18,71	49.039.558.627	21,61	(19.807.107.174)	(40,39)
Jasa Galangan Shipyard Services	19.597.844.554	12,55	19.575.079.230	8,63	22.765.324	0,12
Sewa dan Kerja Sama Usaha Galangan Shipyard Rental and Cooperation	2.732.182.061	1,75	3.321.144.992	1,46	(588.962.931)	(17,73)
Pembangunan Kapal Ship Building Services	1.189.224.118	0,76	13.044.580.512	5,75	(11.855.356.394)	(90,88)
Total	156.204.513.820	100,00	226.913.134.732	100,00	(70.708.620.912)	(31,16)

Profitabilitas Pendapatan Menurut Jenis Jasa 2018-2019

Profitability of Revenues by Type of Services 2018-2019



Kegiatan Usaha

Jasa Pengerukan

Perusahaan melakukan jasa pengerukan alur pelayaran menggunakan kapal berjenis *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD). Rukindo melaksanakan kegiatan pengerukan alur pelayaran untuk mendukung lalu lintas kapal di beberapa pelabuhan. Pengerukan alur pelayaran bertujuan untuk merawat tingkat kedalaman air yang disesuaikan dengan standar dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sehingga lalu lintas kapal baik keluar dan masuk berjalan dengan aman dan lancar. Sedangkan pengerukan kolam pelabuhan menggunakan kapal keruk berjenis *Clamshell*.

Produksi jasa pengerukan pada 2019 direalisasi sebesar 1,64 juta m³ atau 46,34% dari RKAP 2019 sebesar 3,53 juta m³, yang diperoleh dari segmen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pihak Ketiga Dalam Negeri.

Jasa Galangan

Segmen bisnis galangan yang dilaksanakan oleh Rukindo mencakup jasa perbaikan (reparasi) atau *docking* kapal, pembangunan kapal baru, sewa dan kerja sama usaha galangan, dan jasa *floating repair*. Keempat jasa tersebut meliputi sejumlah kegiatan antara lain replating outfitting piping *cleaning & scraping*, *blasting & painting*, *pump & valve*, *propulsion* & kemudi, jangkar & rantai jangkar, elektrik & akomodasi, navigasi *equipment*, *deck machinery*, *engine*, dan *general service*.

Produksi jasa galangan di tahun 2019 terdiri dari jumlah kapal *docking* sebanyak 33 unit dengan 62.325 GT.

Business Activities

Dredging Services

The Company is conducting a dredging service of shipping line using *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD) ship. Rukindo conducts the dredging activities to support the traffic of ships in several ports. The dredging of shipping lanes is aimed to maintain the level of water depth according to the standards of the Harbormaster's Office and the Port Authority (KSOP) so that the traffic of ships can go in and out safely and smoothly. Meanwhile, the dredging of the port basin uses the ship of a *Clamshell* type.

The realization of dredging service in 2019 was 1.64 million m³ or 46.34% of the 2019 RKAP of 3.53 million m³, obtained from the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Domestic Third Party segments.

Shipyards Services

The shipyard business segment that Rukindo is conducting includes repair or ship docking, construction of new ships, rental and shipyard business cooperation, and floating repair services. The four services include a number of activities including replating outfitting piping cleaning & scraping, blasting & painting, pump & valve, propulsion & steering, anchors & anchor chains, electrical & accommodation, navigation equipment, deck machinery, engine, and general service.

The shipyard service in 2019 consists of 33 docking vessels with 62,325 GT.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Analisa dan pembahasan berikut ini mengacu kepada laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.

TINJAUAN POSISI KEUANGAN

Tabel Aset Perusahaan per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Jumlah Aset Total Assets	360.494.677.117	396.138.070.045	(35.643.392.928)	(9,00)
Aset Lancar Current Assets				
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	113.259.423.246	130.792.640.791	(17.533.217.545)	(13,41)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	24.081.349.713	48.743.974.465	(24.662.624.752)	(50,60)
Piutang Usaha - Neto Trade Receivables – Net	17.909.391.478	40.340.610.489	(22.431.219.011)	(8,85)
Pendapatan yang Masih akan Diterima Accrued Income	37.962.737.316	16.814.032.548	21.148.704.768	93,54
Persediaan Inventories	12.760.793.652	4.833.946.622	7.926.847.030	163,98
Uang Muka Advances	-	514.457.810	(514.457.810)	(100,00)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	19.788.502.655	18.728.988.010	1.059.514.645	5,66
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	756.648.432	816.630.847	(59.982.415)	(7,35)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	247.235.253.871	265.345.429.254	19.935.454.676	8,77
Aset Tetap - Neto Fixed Assets – Net	247.235.253.871	227.299.799.195	(18.110.175.383)	(6,83)
Aset Lain-Lain Other Assets	-	38.045.630.059	(38.045.630.059)	(100,00)

INFORMATION PRESENTATION STANDARD AND CONFORMITY WITH INDONESIAN SAK

The following analysis and discussion refer to the Company's financial statements which ended December 31, 2019, that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja with a fair opinion, in all material respects. The Company's financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) that have been issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants.

FINANCIAL POSITION REVIEW

Table of Company's Assets as of December 31, 2019

Aset

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp360,49 miliar atau lebih rendah Rp35,64 miliar atau lebih rendah 9,00% dari total aset Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp396,14 miliar. Hal ini disebabkan karena penurunan pada Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar Perusahaan.

Aset Lancar

Aset Lancar Perusahaan di tahun 2019 tercatat sebesar Rp113,26 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp17,53 miliar atau lebih rendah 13,41% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp130,79 miliar. Penurunan ini terutama terjadi karena Kas dan Setara Kas menurun sebesar Rp24,66 miliar atau lebih rendah 50,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel Kas dan Setara Kas Perusahaan per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Kas Cash	44.138.095	64.497.587	(20.359.492)	(31,57)
Kas Pada Bank Cash In Banks	4.037.211.618	5.529.476.878	(1.492.265.260)	(26,99)
Deposito Berjangka Time Deposits	20.000.000.000	43.150.000.000	(23.150.000.000)	(53,65)
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalent	24.081.349.713	48.743.974.465	(24.662.624.752)	(50,60)

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perusahaan di tahun 2019 tercatat sebesar Rp24,08 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp24,66 miliar atau lebih rendah 50,60% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp48,74 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan terbesar di Deposito Berjangka yang menurun sebesar Rp23,15 miliar atau 53,65% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Piutang Usaha

Piutang Usaha Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp17,91 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp22,43 miliar atau 55,60% lebih rendah dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp40,34 miliar.

Pendapatan yang Masih akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang

Assets

The Company's total assets as of December 31, 2019 were Rp360.49 billion or Rp35.64 billion lower or 9.00% lower of the total assets of Rp396.14 billion in 2018. This was mainly due to a decrease in Current Assets and Non-Current Assets.

Current Assets

The Company's Current Assets in 2019 was Rp113.26 billion. The amount was decreased by Rp17.53 billion or lower by 13.41% from Rp130.79 billion in 2018. This decrease mainly occurred because the Cash and Cash Equivalents decreased by Rp24.66 billion or 50.60% lower compared to the previous year.

The Table of Company's Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2019

Cash and Cash Equivalents

The Company's Cash and Cash Equivalents in 2019 were Rp24.08 billion. The amount has decreased by Rp24.66 billion or 50.60% lower from Rp48.74 billion in 2018. This decrease occurred mainly due to the largest decrease in Time Deposits by Rp23.15 billion or 53.65% lower compared to the previous year.

Trade Receivables

The Company's Trade Receivables in 2019 were recorded at Rp17.91 billion. This note has decreased by Rp22.43 billion or 55.60% lower from Rp40.34 billion in 2018.

Accrued Income

Accrued revenues represent receivables from customers for services which have been delivered by the Company, but not yet billed (unbilled receivable). The Company's Accrued Income

belum difakturkan). Pendapatan yang Masih akan Diterima Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp37,96 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp21,15 miliar atau lebih tinggi 125,78% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp16,81 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan yang masih akan diterima berasal dari jasa pengerukan, pemeliharaan alur kolam, pembangunan kapal dan sewa gedung.

Persediaan

Persediaan Perusahaan terdiri dari suku cadang dan bahan bakar minyak. Persediaan Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp12,76 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp7,93 miliar atau 163,98% lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp4,83 miliar.

Uang Muka

Uang Muka Perusahaan pada tahun 2019 tercatat nihil setelah pada tahun 2018 sebelumnya tercatat sebesar Rp514,46 juta. Hal ini terjadi karena Perusahaan tidak mendapatkan uang muka sebagaimana pada tahun 2018 yang sebagian besar merupakan uang muka atas manajer proyek, unit usaha galangan and pejabat struktural dan nonstruktural.

Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pajak dibayar dimuka seluruhnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Dibayar di Muka Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp19,79 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,06 miliar atau naik 5,66% dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp18,73 miliar.

Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka Perusahaan dibebankan selama masa manfaat atau kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban Dibayar di Muka Perusahaan pada tahun 2019 merupakan pembayaran untuk asuransi. Beban Dibayar di Muka Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp756,65 juta. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp59,98 juta atau 7,35% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp816,63 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp18,11 miliar atau 6,83% lebih rendah dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp265,3 miliar. Aset Tidak Lancar

in 2019 was Rp37.96 billion. The amount has increased by Rp21.15 billion or 125.78% higher from Rp16.81 billion in 2018. As of December 31, 2019, and 2018, accrued income mainly arises from dredging, port basin maintenance, ship building services and rental of building.

Inventories

The Company's inventory comprises of spare parts and fuel. The Company's inventory in 2019 was Rp12.76 billion. This amount has increased by Rp7.93 billion or 163.98% higher from Rp4.83 billion in 2018.

Advances

The Company's Advances in 2019 were zero after in 2018 they were recorded at Rp514.46 million. This occurred because the Company did not receive the advances as in 2018 which mainly came from the advance for project manager, shipyard business unit and structural and non-structural officers.

Prepaid Taxes

As of December 31, 2019, and 2018, prepaid taxes represent Value Added Tax (VAT). Prepaid Taxes of the Company in 2019 were recorded at Rp19.79 billion. This amount has increased by Rp1.06 billion or 5.66% higher from Rp18.73 billion in 2018.

Prepaid Expenses

The Company's Prepaid Expenses are recognized as expenses over their beneficial or contract periods using the straight-line method. The Company's Prepaid Expenses in 2019 were made for insurance. The Company's Prepaid Expenses in 2019 were Rp756.65 million. This amount has decreased by Rp59.98 million or 7.35% lower from Rp816.63 million in 2018.

Total Non-Current Assets

The Company's Non-Current Assets decreased by Rp18.11 billion or 6.83% lower from Rp265.3 billion in 2018. The Non-Current Assets comprises of Fixed Assets – Net and Other

terdiri dari Aset Tetap - Neto dan Aset Lain-Lain. Aset Tetap - Neto mengalami peningkatan Rp19,94 miliar atau 8,77% lebih tinggi dari Rp227,30 miliar menjadi Rp247,24 miliar. Sedangkan Perusahaan pada 2019 tidak mencatat Aset Lain-lain (nihil) setelah sebelumnya tercatat sebesar Rp38,04 miliar pada tahun 2018.

Assets. Fixed Assets – Net have increased by Rp19.94 billion or 8.77% higher from Rp227.30 billion to Rp247.24 billion. In addition, in 2019, the Company's Other Assets were zero after they were recorded at Rp38.04 billion in 2018.

Tabel Liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of Company's Liabilities as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	235.887.506.314	260.960.595.432	(25.073.089.118)	(9,61)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	199.110.980.721	214.542.599.983	(15.431.619.262)	(7,19)
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	83.991.191.817	83.841.858.484	149.333.333	0,18
Utang Usaha Trade Payables	10.437.504.022	32.302.492.966	(21.864.988.944)	47,62
Utang Lain-lain Other Payables	7.287.664.524	6.903.544.237	384.120.287	(12,75)
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues	1.710.578.403	2.808.688.493	(1.098.110.090)	(51,45)
Beban Akrua Accrued Expense	18.139.488.359	9.879.702.843	8.259.785.516	83,60
Utang Pajak Taxes Payable	1.200.118.239	1.938.971.892	(738.853.653)	(38,11)
Pinjaman Jangka Panjang - Bagian Lancar Long Term Loans - Current Maturities	74.576.359.139	75.242.399.980	(666.040.841)	(0,89)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Bagian Lancar Other Non-Current Liabilities - Current Maturities	1.768.076.218	1.624.941.088	143.135.130	8,81
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities				
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	36.776.525.593	46.417.995.449	(9.641.469.856)	(20,77)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	25.297.826.393	28.876.104.603	(3.578.278.210)	(12,29)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	281.792.641	155.145.617	126.647.024	81,63
Pinjaman Jangka Panjang - Bagian Lancar Long Term Loans - Net of Current Maturities	10.250.000.000	14.551.585.730	(4.301.585.730)	(29,56)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Bagian Lancar Other Non-Current Liabilities - Net of Current Maturities	946.906.559	2.835.159.499	(1.888.252.940)	(66,60)

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp235,89 miliar atau lebih rendah Rp25,07 miliar atau 9,61% lebih rendah lebih rendah dari jumlah Liabilitas tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp260,96 miliar.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan di tahun 2019 tercatat sebesar Rp199,11 miliar. Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp15,43 miliar atau 7,19% lebih rendah dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp214,54 miliar. Penurunan ini terjadi terutama karena Utang Usaha menurun sebesar Rp21,86 miliar atau 67,69% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Utang Usaha Perusahaan kepada pihak ketiga di 2019 menurun Rp22,65 miliar atau 71,60% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perusahaan telah melunasi utang usahanya.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek Perusahaan merupakan pinjaman kepada pihak berelasi yaitu Pelindo II. Pinjaman Jangka Pendek Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp83,99 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp149,33 juta atau 0,18% lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp83,84 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya bunga dan denda.

Tabel Utang Usaha Perusahaan per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Pihak Ketiga Third Parties	8.987.104.215	31.640.874.980	(22.653.770.765)	(71,60)
Pihak Berelasi Related Parties	1.450.399.807	661.617.986	788.781.821	119,22
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	10.437.504.022	32.302.492.966	(21.864.988.944)	(67,69)

Utang Usaha

Utang Usaha Perusahaan di tahun 2019 tercatat Rp10,44 miliar. Utang Usaha Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp21,86 miliar atau 67,69% lebih rendah dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp32,30 miliar. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan pada Utang Usaha Pihak Ketiga yang menurun sebesar Rp22,65 miliar atau 71,60% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena Perusahaan melunasi utangnya.

Total Liabilities

The Company's total Liabilities as of December 31, 2019, amounted to Rp235.89 billion or lower by Rp25.07 billion or 9.61% lower than Rp260.96 billion last year.

Current Liabilities

The Company's Current Liabilities in 2019 were Rp199.11 billion. The Company's Current Liabilities decreased by Rp15.43 billion or 7.19% lower from Rp214.54 billion in 2018. This decrease occurred mainly because the Trade Payable decreased by Rp21.86 billion or 67.69% lower compared to the previous year. The Company's Trade Payables to third parties in 2019 decreased by Rp22.65 billion or 71.60% lower from the previous year. This decrease occurred because the Company has paid the debt.

Short-Term Loans

The Company's Short-Term Loans are loans to related parties, Pelindo II. The Company's Short-Term Loans in 2019 were Rp83.99 billion. This was higher by Rp149.33 million or 0.18% higher than Rp83.84 billion in 2018. This increase occurred because of the interests and penalties.

The Table of Company's Trade Payables as of December 31, 2019

Trade Payables

The Company's Trade Payables in 2019 were Rp10.44 billion. The Company's Trade Payables decreased by Rp21.86 billion or 67.69% lower from Rp32.30 billion in 2018. This occurred because there was a decrease in Trade Payables to Third Parties which decreased by Rp22.65 billion or 71.60% lower compared to the previous year. This decrease occurred because the Company paid its debts.

Tabel Utang Lain-lain Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of the Company's Other Payables as of December 31, 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			Selisih (Rp)	(%)
Pihak Ketiga Third Parties	6.524.007.960	5.910.000.337	614.007.623	10,39
Pihak Berelasi Related Parties	763.656.564	993.543.900	(229.887.336)	(23,14)
Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables	7.287.664.524	6.903.544.237	384.120.287	5,56

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain Perusahaan tahun 2019 tercatat sebesar Rp7,29 miliar. Utang Lain-lain Perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp384,12 juta atau 5,56% lebih tinggi dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp6,90 miliar. Peningkatan ini terjadi karena utang kepada karyawan dan kepada Pelindo II meningkat. Utang kepada karyawan seluruhnya merupakan uang titipan karyawan. Utang kepada Pelindo II seluruhnya merupakan utang imbalan kerja karyawan Pelindo II yang ditugaskan di Perusahaan.

Other Payables

The Company's Other Payables were Rp7.29 billion. The Company's Other Payables increased by Rp384.12 million or 5.56% higher from Rp6.90 billion in 2018. This increase occurred because the payables to employees and Pelindo II have also increased. Payables to employees represents payables for deposits from employees. Payables to Pelindo II represents payables for employees benefits of Pelindo II's employee which were assigned to the Company.

Tabel Beban Akruwal Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of the Company's Accrued Expenses as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Operasional Proyek dan Subkontraktor Project Operation and Subcontractor	9.276.621.153	4.232.787.026	5.043.834.127	119,16
Perbaikan Kapal Vessels Repairs	4.824.339.009	2.388.932.532	2.435.406.477	101,95
Upah Karyawan Employees' Wages	2.212.647.494	1.890.886.090	321.761.404	17,02
Jasa Profesional Professional Fees	431.467.000	456.500.000	(25.033.000)	(5,48)
Lain-Lain Others	1.394.413.703	910.597.195	483.816.508	53,13
Jumlah Beban Akruwal Total Accrued Expenses	18.139.488.359	9.879.702.843	8.259.785.516	83,60

Beban Akruwal

Beban Akruwal Perusahaan tahun 2019 tercatat sebesar Rp18,14 miliar. Beban Akruwal Perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp8,26 miliar atau 83,60% lebih tinggi dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp9,88 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pada Beban Operasional Proyek dan Subkontraktor yang meningkat sebesar Rp5,04 miliar atau 119,16% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Akruwal Operasional Proyek dan Subkontraktor merupakan biaya atas pekerjaan pengerukan dan biaya terkait pembuatan kapal tunda milik Pelindo II.

Accrued Expenses

The Company's Accrued Expenses in 2019 were Rp18.14 billion. The Company's Accrued Expenses increased by Rp8.26 billion or 83.60% higher from Rp9.88 billion in 2018. This increase was mainly due to an increase in Project Operation and Subcontractor Expenses which increased by Rp5.04 billion or 119.16% higher compared to the previous year. The Accrued Expenses for the Operations of the Project and the Subcontractors are costs related to dredging and the related costs to make tugboats owned by Pelindo II.

Utang Pajak

Utang Pajak Perusahaan terdiri dari pajak penghasilan, PPN keluaran, dan pajak lain-lain. Utang Pajak Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,20 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp738,85 juta atau 38,11% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1,94 miliar. Penurunan ini terjadi terutama karena adanya penurunan pada pajak penghasilan yang harus dibayarkan Perusahaan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp36,78 miliar. Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp9,64 miliar atau 20,77% lebih rendah dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp46,42 miliar. Penurunan ini terjadi karena karena Perusahaan telah mengurangi sebagian besar liabilitas jangka panjangnya.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp25,30 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp3,58 miliar atau 12,39% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp28,88 miliar. Penurunan ini terjadi karena Aset Tetap Perusahaan juga mengalami penurunan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp281,79 juta. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp126,65 juta atau 81,63% lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp155,15 juta. Peningkatan ini terjadi karena adanya perubahan penghitungan liabilitas imbalan kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar

Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp10,25 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp4,30 miliar atau 29,56% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp14,55 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Setelah Dikurangi Bagian Lancar

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Setelah Dikurangi Bagian Lancar Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp946,91 juta. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp1,89 miliar atau 66,60% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp2,84 miliar.

Taxes Payable

The Company's Taxes Payable comprises of income taxes, VAT out and other taxes. The Company's Taxes Payable in 2019 was Rp1.20 billion. It decreased by Rp738.85 million or 38.11% lower from Rp1.94 billion in 2018. This decrease occurred mainly due to a decrease in income tax that the Company had to pay.

Non-Current Liabilities

The Company's Non-Current Liabilities in 2019 were Rp36.78 billion. The Company's Non-Current Liabilities decreased by Rp9.64 billion or 20.77% lower from Rp46.42 billion in 2018. This decrease occurred because the Company has reduced most of its non-current liabilities.

Deferred Tax Liabilities

The Company's Deferred Tax Liabilities in 2019 were Rp25.30 billion. This amount has decreased by Rp3.58 billion or 12.39% lower from Rp28.88 billion in 2018. This decrease occurred because the Company's Fixed Assets were also decreased.

Employee Benefits Liability

The Company's Employee Benefits Liability in 2019 was Rp281.79 million. This amount has increased by Rp126.65 million or 81.63% higher from Rp155.15 million in 2018. This increase occurred due to changes in the calculation of employee benefits liabilities using the Projected Unit Credit method.

Long Term Loans - Net of Current Maturities

Long-Term Loans - Net of Current Maturities of the Company in 2019 were Rp10.25 billion. It has decreased by Rp4.30 billion or 29.56% lower from Rp14.55 billion in 2018.

Other Non-Current Liabilities - Net of Current Maturities

Other Non-Current Liabilities - Net of Current Maturities in 2019 were Rp946.91 million. It has decreased by Rp1.89 billion or 66.60% lower from Rp2.84 billion in 2018.

Tabel Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of Company's Equity as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Obligasi Wajib Konversi Mandatory Convertible Bonds	195.000.000.000	195.000.000.000	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully Paid	612.164.000.000	612.164.000.000	-	-
Cadangan Umum General Reserve	4.165.070.971	4.165.070.971	-	-
Akumulasi Defisit Accumulated Deficit	(686.721.900.168)	(676.151.596.358)	(10.570.303.810)	1,56
Jumlah Ekuitas Total Equity	124.607.170.803	135.177.474.613	(10.570.303.810)	(7,82)

Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp124,61 miliar atau lebih rendah Rp10,57 miliar atau 7,82% lebih rendah dari jumlah Ekuitas tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp135,18 miliar.

Equity

The Company's Equity as of December 31, 2019 was Rp124.61 billion, which was Rp10.57 billion lower or 7.82% lower than the previous year's total Equity of Rp135.18 billion.

TINJAUAN LAPORAN LABA RUGI**REVIEW OF PROFIT OR LOSS STATEMENT**

Tabel Laba Rugi Komprehensif Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of Comprehensive Profit or Loss Statement of the Company as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Pendapatan Revenues	156.204.513.820	226.913.134.732	(70.708.620.912)	(31,16)
Beban Usaha Operating Expenses	(166.966.716.832)	(201.188.846.376)	34.222.129.544	(17,01)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	17.510.348.892	22.300.017.828	(4.789.668.936)	(21,48)
Beban Operasi Lainnya Other operating expenses	(4.221.128.924)	(23.230.276.401)	19.009.147.477	(81,83)
Laba Usaha Income from Operations	2.527.016.956	24.794.029.783	(22.267.012.827)	(89,81)
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.172.421.579	3.337.674.376	(2.165.252.797)	(64,87)
Beban Keuangan Finance Expenses	(14.088.781.975)	(13.376.250.342)	(712.531.633)	5,33
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Final Tax and Income Tax	(10.389.343.440)	14.755.453.817	(25.144.797.257)	(170,41)

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(3.747.529.928)	(4.959.021.799)	1.211.491.871	(24,43)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax	(14.136.873.368)	9.796.432.018	(23.933.305.386)	(244,31)
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefit				
Kini Current	-	-	-	-
Tangguhan Deferred	3.575.351.048	7.696.937.035	(4.121.585.987)	(53,55)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for The Year	(10.561.522.320)	17.493.369.053	(28.054.891.373)	(160,37)
Penghasilan Komprensensif Lain Setelah Pajak Penghasilan Other Comprehensive Income Net of Income Tax				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti Re-measurements of defined benefit plans	(11.708.653)	(2.559.175)	(9.149.478)	357,52
Pajak penghasilan terkait Related income tax	2.927.163	639.794	2.287.369	357,52
Penghasilan Komprensensif Lain Setelah Pajak Penghasilan Other Comprehensive Income Net of Income Tax	(8.781.490)	(1.919.381)	(6.862.109)	357,52
Total Laba (Rugi) Komprensensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for The Year	(10.570.303.810)	17.491.449.672	(28.061.753.482)	(160,43)

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp156,20 miliar, turun sebesar Rp70,71 miliar atau 31,16% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp226,91 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena seluruh jenis jasa yang ditawarkan Perusahaan pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Revenues

The Company's Revenues in 2019 were Rp156.20 billion, down Rp70.71 billion or 31.16% lower compared to Rp226.91 billion in 2018. The decline occurred because all Company's services in 2019 declined.

Tabel Beban Usaha Perusahaan per 31 Desember 2019

The Table of Company's Operating Expenses as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Kerja sama Mitra Usaha Partnership	65.966.314.792	102.359.661.658	(36.393.346.866)	(35,55)
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	28.427.166.450	30.679.861.253	(2.252.694.803)	(7,34)
Bahan Material	20.300.444.464	22.206.427.358	(1.905.982.894)	(8,58)
Penyusutan Depreciation	18.840.560.043	20.476.432.676	(1.635.872.633)	(7,99)
Umum General	11.698.614.648	9.668.575.019	2.030.039.629	21,00
Amortisasi Amortization	10.513.069.837	4.467.808.962	6.045.260.875	135,31
Perbaikan dan Pemeliharaan Repair and Maintenance	5.428.218.953	6.551.392.490	(1.123.173.537)	(17,14)
Asuransi Insurance	3.373.294.119	2.820.773.873	552.520.246	19,59
Administrasi Kantor Office Administration	2.419.033.526	1.957.913.087	461.120.439	23,55
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	166.966.716.832	201.188.846.376	(34.222.129.544)	(17,01)

Beban Usaha

Beban Usaha Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp166,97 miliar, turun sebesar Rp34,22 miliar atau 17,01% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp201,19 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada Beban Kerja sama Mitra Usaha yang menurun sebesar Rp36,39 miliar atau 35,55% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Kerja sama Mitra Usaha terutama merupakan beban subkontrak alat bantu pengerukan dalam menyediakan kegiatan pelayanan pengerukan dan pemeliharaan alur kolam.

Pendapatan Operasi Lainnya

Pendapatan operasi lainnya merupakan pendapatan yang sebagian besar berasal dari laba penjualan aset tetap. Pendapatan Operasi Lainnya pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp17,51 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp4,79 miliar atau 21,48% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp22,30 miliar.

Beban Operasi Lainnya

Beban Operasi Lainnya yang dicatatkan Perusahaan di tahun 2019 sebagian besar merupakan Denda yang tercatat sebesar Rp3,39 miliar. Beban Operasi Lainnya pada tahun

Operating Expenses

The Company's Operating Expenses in 2019 were Rp166.97 billion, down Rp34.22 billion or 17.01% lower compared to Rp201.19 billion in 2018. The decrease occurred mainly due to a decrease in Partnership Expenses by Rp36.39 billion or 35.55% lower compared to the previous year. Partnership Expenses mainly represent subcontracting costs for dredging supporting equipment in terms of providing dredging services and port basin maintenance.

Other Operating Income

Other operating income represents the income which came mostly from the income of the selling of fixed assets. Other Operating Income in 2019 was Rp17.51 billion. This amount has decreased by Rp4.79 billion or 21.48% lower from Rp22.30 billion in 2018.

Other Operating Expenses

Other Operating Expenses in 2019 mainly came from Penalties of Rp3.39 billion. Other Operating Expenses in 2019 were Rp4.22 billion. It has decreased by Rp19.01 billion or

2019 tercatat sebesar Rp4,22 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp19,01 miliar atau 81,83% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp23,23 miliar. Penurunan ini terjadi karena Perusahaan sudah tidak mencatatkan penyusutan penurunan nilai persediaan dan aset tetap, penyesuaian atas hasil surat ketetapan pajak, beban pajak, dan penyisihan penurunan nilai piutang.

Laba Usaha

Laba Usaha Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp2,53 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp22,27 miliar atau 89,81% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp24,79 miliar. Penurunan ini terjadi karena Pendapatan Perusahaan di tahun 2019 juga mengalami penurunan.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan Keuangan terdiri dari bunga deposito - neto dan jasa giro. Pendapatan Keuangan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,17 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp2,16 miliar atau 64,87% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp3,34 miliar. Penurunan ini terjadi karena Perusahaan tidak lagi mencatatkan keuntungan dari penyesuaian suku bunga efektif.

Beban Keuangan

Beban Keuangan terdiri dari bunga pinjaman dan administrasi bank. Beban Keuangan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp14,09 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp712,53 juta atau 5,33% lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp13,38 miliar. Peningkatan ini terjadi karena bunga pinjaman.

LAPORAN ARUS KAS

Tabel Arus Kas Perusahaan per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Arus Kas Neto yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided By (Used In) Operating Activities	(18.115.000.981)	15.701.839.642	(33.816.840.623)	(215,37)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used In Investing Activities	(2.053.603.181)	(8.630.339.763)	6.576.736.582	(76,20)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(4.500.000.000)	(2.750.000.000)	(1.750.000.000)	63,64

81.83% lower from Rp23.23 billion in 2018. This decrease occurred because the Company had not recorded allowance for impairment of inventories and fixed assets, adjustment for tax assessment letter, as well as tax expenses.

Income from Operations

The Company's Income from Operations in 2019 was Rp2.53 billion. It has decreased by Rp22.27 billion or 89.81% lower from Rp24.79 billion in 2018. This decrease occurred because the Company's Revenues in 2019 were also decreased.

Finance Income

Finance Income consists of interest on time deposit - net and interest on current accounts. Financial Income in 2019 was Rp1.17 billion. It has decreased by Rp2.16 billion or 64.87% lower from Rp3.34 billion in 2018. This decrease occurred because the Company had not recorded anymore gain on effective interest rate adjustment.

Finance Expenses

Finance Expenses consist of interests on loan and bank charges. The Finance Expenses in 2019 was Rp14.09 billion. It has increased by Rp712.53 million or 5.33% higher from Rp13.38 billion in 2018. This increase occurred because of interests on loan.

CASH FLOWS STATEMENT

The Table of Company's Cash Flows as of December 31, 2019

Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	5.979.410	4.595.958	1.383.452	30,10
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) In Cash and Cash Equivalents	(24.662.624.752)	4.326.095.837	(28.988.720.589)	(670,09)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	48.743.974.465	44.417.878.628	4.326.095.837	9,74
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	24.081.349.713	48.743.974.465	(24.662.624.752)	(50,60)

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat Arus Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi sebesar Rp18,12 miliar dari sebelumnya tercatat sebagai Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp15,70 miliar. Hal ini terjadi karena terutama karena penerimaan dari pelanggan berkurang Rp54,92 miliar atau 26,20% lebih rendah dari Rp209,60 miliar di tahun 2018 menjadi Rp154,68 miliar di tahun 2019.

Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp2,05 miliar. Catatan ini mengalami penurunan sebesar Rp6,58 miliar atau 76,20% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp8,63 miliar. Hal ini terjadi terutama karena penerimaan dari pelanggan berkurang Rp54,92 miliar atau 26,20% lebih rendah dari Rp209,60 miliar di tahun 2018 menjadi Rp154,68 miliar di tahun 2019.

Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,50 miliar. Catatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,75 miliar atau 63,64% lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp2,75 miliar.

Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun

Perusahaan membukukan Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2019 sebesar Rp24,08 miliar atau turun 50,60% dibandingkan posisi Kas dan Setara Kas awal tahun 2018 sebesar Rp48,74 miliar.

Net Cash Flows Provided by Operating Activities

In 2019, the Company recorded a Net Cash Flow Used in Operating Activities of Rp18.12 billion from a previously recorded Net Cash Flow of of Rp15.70 billion Provided By Operating Activities. This happened mainly because the receipts from customers decreased by Rp54.92 billion or 26.20% lower from Rp209.60 billion in 2018 to Rp154.68 billion in 2019.

Net Cash Flows Used In Investing Activities

Net Cash Flows Used In Investment Activities in 2019 was Rp2.05 billion. It has decreased by Rp6.58 billion or 76.20% lower from Rp8.63 billion in 2018. This occurred mainly due to the decrease in receipts from customers by Rp54.92 billion or 26.20% lower from Rp209.60 billion in 2018 to Rp154.68 billion in 2019.

Cash from Financing Activities

Cash from Financing Activities in 2019 were Rp4.50 billion which used for payment of loans. It has increased by Rp1.75 billion or 63.64% from Rp2.75 billion in 2018.

Cash and Cash Equivalents at End of Year

The Company posted its Cash and Cash Equivalents at end of 2019 amounted to Rp24.08 billion, down 50.60% compared to the position of its Cash and Cash Equivalents at the beginning of 2018 which amounted to Rp48.74 billion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Kemampuan Membayar Utang

Rasio solvabilitas dan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang.

Tabel Rasio Solvabilitas per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Differences	(%)
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	65,43	65,88	(0,44)	(0,67)
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	189,30	193,05	(3,75)	(1,94)

Rasio solvabilitas menjadi indikator dalam menilai kemampuan Perusahaan untuk membayar seluruh utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio tersebut terdiri dari rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas.

Nilai rasio Utang Terhadap Aset tahun 2019 sebesar 65,43% Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 65,88%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah liabilitas yang menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai rasio Utang Terhadap Ekuitas tahun 2019 sebesar 189,30%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 193,05%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah ekuitas yang menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel Rasio Likuiditas per 31 Desember 2019

Uraian Description	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Differences	(%)
Rasio Kas Cash Ratio	12,09	22,72	(10,63)	(46,77)
Rasio Cepat Quick Ratio	21,09	41,52	(20,43)	(49,21)
Rasio Lancar Current Ratio	56,88	60,96	(4,08)	(6,69)

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, mengindikasikan bahwa Rukindo mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

ABILITY TO PAY DEBT, COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Ability to Pay Debt

Solvency and liquidity ratios are used to measure the Company's ability to pay debts.

The Table of Solvency Ratio as of December 31, 2019

Solvency becomes the indicator in assessing the ability of the Company to repay all long-term and short-term debt. The ratio consists of debt to asset and debt to equity ratios.

The Debt to Asset ratio in 2019 was 65.43%. This value is lower than 65.88% in 2018. This was influenced by the decline of liabilities compared to the previous year. While the value of the Debt to Equity ratio in 2019 was 189.30%. This value was lower than 193.05% in 2018. This was influenced by the decline of equity from the previous year.

The Table of Liquidity Ratio as of December 31, 2019

Liquidity ratio is calculated to measure the Company's ability to settle its short-term obligations. The level of liquidity can be seen from the cash ratio, fast ratio, and current ratio. The higher these values signify that Rukindo is able to meet its obligations that will soon mature.

Nilai Rasio Kas tahun 2019 sebesar 12,09%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 22,72%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai saldo kas sebesar 50,60% dan liabilitas jangka pendek sebesar 7,19%.

The Cash Ratio in 2019 was 12,09%. This value was lower than 22.72% in 2018. This was mainly caused by a decrease in the cash balances by 50.60% and short-term liabilities by 7.19%.

Nilai Rasio Cepat tahun 2019 sebesar 21,09%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 41,52%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah piutang usaha Perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 55,60%.

The Quick Ratio in 2019 was 21.09%. This value was higher than 41.52% in 2018. This was influenced by the decrease of the Company's trade receivables by 55.60%.

Nilai Rasio Lancar tahun 2019 sebesar 56,88%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 60,96%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan aset lancar sebesar 13,41% dan liabilitas jangka pendek sebesar 7,19%.

The Current Ratio in 2019 was 56.88%. This value was lower than 60.96% in 2018. This was influenced by a decrease in current assets by 13.41% and short-term liabilities by 7.19%.

Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectability

Tabel Kolektibilitas Piutang per 31 Desember 2019

The Table of Receivables Collectability as of December 31, 2019

Uraian Description	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Differences	(%)
Piutang Usaha - Neto (Rp)	17.909.391.478	40.340.610.489	(22.431.219.011)	(55,60)
Kolektibilitas Piutang (hari)	68	36	32	88,89

Tingkat Kolektibilitas Piutang (*collection period*) digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang. Nilai *collection period* Rukindo tahun 2019 tercatat sebesar 68 hari. Nilai ini tercatat lebih lambat dibandingkan tahun 2018 yaitu 36 hari. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan yang masih akan diterima Perusahaan dari pihak berelasi yang meningkat 93,54%.

The Collectability Level (*collection period*) is used to assess the Company's ability to collect receivables. Rukindo's collection period in 2019 was 68 days. This value was slower than 36 days in 2018. This was influenced by the increase in unearned revenues by 93.54%.

RASIO PROFITABILITAS

PROFITABILITY RATIO

Tabel Rasio Profitabilitas per 31 Desember 2019

The Table of Profitability Ratio as of December 31, 2019

Uraian Description	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Differences	(%)
Rasio Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	(8,48)	12,94	(21,42)	(165,56)
Rasio Imbal Hasil Laba Terhadap Total Aset (ROA) Return on Assets (ROA)	(2,93)	4,42	(7,35)	(166,41)

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas. Beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan sebagai pengukuran yaitu *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA).

Nilai ROE dan ROA Perusahaan tahun 2019 tercatat negatif karena Perusahaan mengalami kerugian.

The Company's ability to generate profits is measured using profitability ratios. Several ratios that are used as measurements are Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA).

The Company's ROE and ROA in 2019 were negative because the Company suffered a loss.

STRUKTUR MODAL

Tabel Struktur Modal per 31 Desember 2019

Struktur Modal Capital Structure	2019 (Rp)	Kontribusi (%) Contribution (%)	2018 (Rp)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
					Selisih (Rp) Differences (Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	199.110.980.721	55,23	214.542.599.983	54,16	(15.431.619.262)	(7,19)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	36.776.525.593	10,20	46.417.995.449	11,72	(9.641.469.856)	(20,77)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	235.887.506.314	65,43	260.960.595.432	65,88	(25.073.089.118)	(9,61)
Ekuitas Equity	124.607.170.803	34,57	135.177.474.613	34,12	(10.570.303.810)	(7,82)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	360.494.677.117	100,00	396.138.070.045	100,00	(35.643.392.928)	(9,00)

CAPITAL STRUCTURE

The Capital Structure as of December 31, 2019

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Rukindo memiliki kebijakan untuk fokus dalam menggunakan Liabilitas Jangka Pendek sebagai sumber modalnya. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan pinjaman dari Pelindo II. Fokus pada Liabilitas Jangka Pendek dilakukan karena untuk menyelesaikan pembayaran utang dan juga kelancaran proses produksi, termasuk penyelesaian permasalahan beberapa kapal TSHD yang dimiliki Perusahaan.

Dasar pemilihan kebijakan penyusunan struktur modal Rukindo adalah penyusunan rencana permodalan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Rukindo juga

Management Policy on Capital Structure

Rukindo has a policy to focus on using Current Liabilities as its capital source. This was done through the loan from Pelindo II. The Company was focusing on Current Liabilities to pay its debt and make the production process went smoothly, including solving the problems of several TSHD ships that the Company owned.

The basis for setting the policy on capital structure is the preparation to protect the Company's ability to maintain its business continuity. Rukindo has also considered the latest economic developments to determine the Company's capital

mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini untuk menentukan struktur permodalan Perusahaan. Rencana struktur modal Rukindo per 31 Desember 2019 yang telah ditetapkan oleh Direksi telah melalui pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengembangan usaha dan memaksimalkan nilai usaha bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Tujuan Ikatan Material Investasi Barang Modal

Selama tahun 2018, Rukindo melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan.

Sumber Dana

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal Rukindo, yaitu Entitas Induk PT Pelindo II (Persero).

Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2019, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Rukindo disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Rukindo telah menetapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*) untuk meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing di pasar yang dapat merugikan Perusahaan.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Rukindo melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, sarana dermaga dan dok, bangunan, kapal keruk, alat bantu, peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor. Investasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Rukindo.

structure. Rukindo's capital structure as of December 31, 2019 was established by the Board of Directors and has been through various consideration as well as the recommendations from the Board of Commissioners in terms of business development and to maximize the business value for Shareholders and Stakeholders.

Material Bond for Investment of Capital Expenditure

Investment of Capital Expenditure is to spend funds to purchase fixed assets or add value to fixed assets for future benefits.

Purpose of Material Bond for Investment of Capital Expenditure

During 2019, Rukindo has done several material commitments of capital expenditures to support the Company's operations.

Source of Funds

The source of funds for capital expenditures came from Rukindo's internal funds, for the Parent Entity PT Pelindo II (Persero).

Hedging from Foreign Currency

The commitments in 2019 did not use foreign currencies and were conducted in accordance with the obligation to use Rupiah in every transaction within the territory of the Republic of Indonesia. Rukindo's Financial Statements are prepared in Rupiah, while the transactions in foreign currencies were already translated into Rupiah using the exchange rates on the date of the transaction. Rukindo has established a hedging policy to minimize the risk of fluctuations in foreign exchange rates that can harm the Company.

Realization of Investment on Capital Expenditures

Rukindo has made the investment of capital expenditures on fixed assets such as land, jetty and dock facilities, buildings, dredgers, tools, equipment, vehicles, and office equipments. The investments were conducted to support Rukindo's operations.

Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp3,83 miliar untuk memperoleh aset tetap untuk keperluan operasional. Investasi untuk keperluan operasional merupakan investasi penting dan sangat bernilai bagi Rukindo. Hal ini tentu saja mengingat bidang usaha Perusahaan yang bergerak di pengerukan dan galangan kapal yang memerlukan alat-alat terbaik untuk memberikan pelayanan pengerjaan proyek secara maksimal dan sesuai target.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan tanggal 30 April 2019.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2019 tidak terdapat informasi keuangan mengenai transaksi yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di Perusahaan, selain yang telah diungkapkan pada Laporan Keuangan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Investasi

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima Rp9,5 miliar dari penjualan aset tetap dan mengeluarkan biaya sebesar Rp3,83 miliar untuk memperoleh aset tetap. Pencatatan ini masih dalam tahap batas wajar dan tidak tergolong dalam transaksi yang material.

Ekspansi

Pada tahun 2019, Rukindo tidak melakukan kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi.

Divestasi

Pada tahun 2019, Rukindo tidak melakukan kegiatan investasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi.

The Company had spent Rp3.83 billion to obtain fixed assets for operational needs. Investment for operational needs is important and very valuable for Rukindo. This is of course with consideration of the Company's line of business in dredging and shipyard which require the best equipment to provide maximum services and deliver on target.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

There is no material information and facts that occurred after the accountant's reporting date on April 30, 2019.

FINANCIAL INFORMATION THAT CONTAINS EXTRAORDINARY AND UNCOMMON EVENTS

During 2019 there were no financial information regarding transactions that were extraordinary and rare at the Company, other than those that had been disclosed in the Financial Statements.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, DEBT/CAPITAL ACQUISITION OR RESTRUCTURING

Investment

In 2019, the Company received Rp9.5 billion from the proceeds of fixed assets and incurred a cost of Rp3.83 billion to obtain fixed assets. These were all listed as reasonable and were not classified as material transactions.

Expansion

In 2019, Rukindo did not conduct any expansion activity and therefore there was no information regarding the purpose, values and sources of funds for expansion activities.

Divestment

In 2019, Rukindo did not conduct any divestment and therefore so there was no information regarding the purpose, values and sources of funds for divestment.

Akuisisi

Pada tahun 2019, Rukindo tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang dan Modal

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang dan modal.

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Rukindo mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Pasal 26 Tentang Penggunaan Laba yaitu penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Pembayaran Dividen Tahun 2019

Perusahaan tidak membayarkan dividen pada tahun 2019 karena mengalami kerugian.

Pembayaran Dividen Tahun 2018

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 April 2018, Pemegang Saham Rukindo menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Tahun Buku 2017 sebesar Rp20.801.432.919 untuk Cadangan Umum sebesar 100% dan tidak melakukan pembagian dividen, sehingga tidak terdapat informasi mengenai dividen kas per saham, *dividend payout ratio*, tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2019, Rukindo bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Acquisitions

In 2019, Rukindo did not make any acquisition and therefore so there was no information regarding the purpose, values and sources of funds for acquisitions.

Debt and Capital Restructuring

In 2019, the Company did not restructure its debt and capital.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Rukindo's dividend policy refers to the Law Number 40 in 2007 regarding Limited Liability Companies and Articles of Association in Article 26 Regarding Profit Use on the use of net profit including the amount of allowance for possible losses decided by the GMS. All net income after reserves is distributed to Shareholders as dividends unless determined otherwise by the GMS. Dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance.

Dividend Payment in 2019

The company did not pay dividends in 2019 because it suffered losses.

Dividend Payment in 2018

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) on April 26, 2018, the Shareholders had determined that the Profit of Fiscal Year 2017 which amounted to Rp20,801,432,919 was used 100% for General Reserves and no dividends were distributed and therefore so there was no information on cash dividends per share, dividend payout ratio, announcement date and cash dividend payment.

REALIZATION OF PUBLIC OFFERING

Until December 31, 2019, Rukindo was not a public listed company and had not yet made a public offering, so there was no information regarding the total funds that the Company acquired, the planned of funds use, details of funds use, balance of funds, date of GMS approval on the realization of the use of proceeds.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tahun 2019 telah disetujui oleh kedua belah pihak dan bersifat wajar sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Sifat dan Pihak Berelasi

Rukindo melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak yaitu dengan:

1. Pelindo II
2. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
3. PT Jasa Armada Indonesia Tbk
4. PT ASDP Indonesia Ferry
5. PT PAL Indonesia (Persero)

Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Rukindo menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar dan bebas dari konflik kepentingan.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION THAT CONTAINS CONFLICTS OF INTEREST AND/OR WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

During 2019, there were no transactions that contain conflicts of interest and therefore there were no information that can be disclosed.

Transactions with Affiliated or Related Parties

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties. An entity is considered to be related if either directly or indirectly, can control or jointly control, or has significant influence over the Company in making financial and operational decisions. An entity is also considered to be related if the entity is controlled by the Business Group.

All transactions with related parties in 2019 have been approved by both parties and were conducted fairly in accordance with PSAK 7 (revised 2010) "Related Party Disclosure".

Nature and Related Parties

Rukindo engages on transactions with related parties, which were conducted based on prices and terms agreed between the parties, namely with:

- Pelindo II
- PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk
- PT ASDP Indonesia Ferry
- PT PAL Indonesia (Persero)

Transaction Fairness

All transactions with related parties were conducted in accordance with policies and conditions that both parties have agreed, and Rukindo considers that all transactions were conducted reasonably in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2010) regarding Related Party Disclosure. This indicates that the Company has conducted fair transactions with related parties and free from conflicts of interest.

Kebijakan Mekanisme Review Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan peraturan atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh badan regulasi yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja Rukindo.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy

Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan
ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
Improvement to PSAK 46 - Income Taxes
Foreign currency Transaction and Advance Consideration
34 - Uncertainty over Income Tax Treatments

Policy Mechanism for Reviewing Transactions and Compliance with Related Regulations

The mechanism to review the transactions with related parties was done through an audit process that was conducted by both internal and external auditors. To ensure the fair transactions and compliance with the generally accepted accounting standards in Indonesia, the earlier discussion of affiliated transactions have been audited by the Auditor.

AMENDMENTS TO THE LAWS AND REGULATIONS WHICH HAVE A SIGNIFICANT EFFECT ON THE COMPANY

In 2019, there were no changes to regulations or new regulations that were issued by the regulators that had a significant impact on Rukindo's performance.

Changes on Accounting Policy

In the current year, the Company has adopted new standards, a number of amendments and interpretations of PSAK that were issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which were relevant to the operations and effective for the accounting period beginning on January 1, 2019.

Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
This application has no significant impact on financial reporting and disclosures in financial statements.

Kontribusi Terhadap Negara

Rukindo berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak. Sebagai Wajib Pajak, Rukindo senantiasa melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai Pemotong Pajak, Rukindo secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak yang meliputi PPh Pasal 4 ayat 2; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan. Pada tahun 2019, total pungutan dan pembayaran pajak adalah sebesar Rp15,15 miliar. Secara keseluruhan Perusahaan tidak memiliki persoalan pajak di tahun 2019.

Contribution to the State

Rukindo is committed to fulfilling its obligations as a Taxpayer and as a Tax Withholder. As a taxpayer, Rukindo always paid its corporate income tax, value added tax (PPN), land and building tax (PBB). As a Tax Withholder, Rukindo has also participated in deducting any taxable objects including Income Tax Article 4 paragraph 2; Article 21 Income Tax on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 for income received by corporate taxpayers. In 2019, the total tax withholding and payment were Rp15.15 billion. Overall, the Company has no tax issues in 2019.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Perusahaan melakukan pemasaran pada bidang usaha pengerukan dan galangan kapal. Perusahaan menawarkan jasa pengerukan dan galangan kapal berdasarkan perjanjian *business to business* (B to B) ke pelanggan. Pelanggan Rukindo terfokus pada satu bidang industri yaitu kepelabuhan dengan rincian sebagai berikut:

Segmen DIPA/APBN

Perusahaan telah menetapkan untuk tidak melakukan kegiatan pemasaran untuk segmen DIPA/APBN.

Segmen IPC Group

Perusahaan telah memperkirakan akan mendapat pekerjaan pengerukan dengan total volume sebesar 1,48 juta m³ dari segmen IPC Grup dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Target Pemasaran Rukindo untuk IPC Grup Tahun 2019

No.	Proyek Project	Target Volume (ribu m ³) Volume Target (thousand m ³)
1.	Proyek Alur Bengkulu Alur Bengkulu Project	596
2.	Proyek Kolam Pelabuhan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Port Basin	70
3.	Proyek Kolam Pelabuhan Tanjung Priok Tanjung Priok Port Basin	201
4.	Proyek Kolam Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port Basin	59

Segmen Pihak III Dalam Negeri

Perusahaan telah menetapkan untuk tidak melakukan kegiatan pemasaran untuk segmen Pihak III Dalam Negeri. Akan tetapi, pada segmen ini, Perusahaan telah memutuskan untuk mengikuti beberapa tender antara lain:

1. Proyek pengerukan alur pelabuhan Marunda
2. Proyek Pengerukan pelabuhan Jorong Kalimantan Selatan
3. Proyek Pengerukan Jetty 2 PLTU Suralaya
4. Proyek Pengerukan Kolam Nilam Pelabuhan Tanjung Perak
5. Proyek Pengerukan Terminal Khusus TPPITuban
6. Proyek Pengerukan PLTU Pangkalan Susu

The Company has conducted its own marketing activities in the dredging and shipyard. The Company offers its dredging and shipyard services based on business to business (B to B) agreements to customers. Rukindo's customers are focused on one sector, the port, with the following details:

DIPA/APBN segment

The Company has determined to not conduct any marketing activity for the DIPA/APBN segment.

IPC Group Segment

The Company has estimated to receive dredging projects with a total volume of 1.48 million m³ from IPC Group with the following details:

The Table of Marketing Target of Rukindo for IPC Group in 2019

Domestic Third Party Segments

The Company has determined to not conduct any marketing activity for the Domestic Third Party. However, in this segment, the Company had participated in several tenders, including:

1. Marunda port dredging project
2. Jorong port dredging in South Kalimantan
3. Dredging Jetty 2 of Suralaya Power Plant
4. Dredging of Nilam Basin at Tanjung Perak Port
5. Dredging the Special Terminal Project of TPPI Tuban
6. Dredging of Coal-Fired Power Plant of Pangkalan Susu

Jasa Penyewaan Alat Produksi

Jasa penyewaan alat produksi yang ditawarkan Perusahaan memiliki target pasar yaitu Pihak III Dalam Negeri dan Pihak III Luar Negeri. Dalam menjangkau kedua pasar tersebut, Perusahaan telah melakukan aktivitas pemasaran di tahun 2019 sebagai berikut:

Pihak III Dalam Negeri Third Party Domestic	Memperoleh kontrak kerja sama perbaikan dan pengoperasian TSHD Timor untuk 5 (lima) tahun. Obtain a cooperation contract to repair and operate TSHD Timor for 5 (five) years.
Pihak III Luar Negeri Third Parties Overseas	Belum ada kontrak baru untuk penyewaan (<i>charter</i>) kapal. No new contract on ship chartering.

Jasa Galangan

Dalam hal jasa galangan kapal, realisasi pekerjaan *docking* yang didapatkan Perusahaan mencapai 35 unit kapal.

Jasa Usaha Lain

Jasa usaha lain direalisasi kontrak sebesar Rp2,57 miliar.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba Rugi

Tabel Laba Rugi Tahun 2019 dengan Target 2019 serta Proyeksi Tahun 2020

Deskripsi Description	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2020 2020 Projection
Pendapatan Usaha Operating Revenues	156.204.513.820	365.734.069.467	42,71	216.851.472.084
Beban Usaha Operating Expenses	166.966.716.832	310.189.525.236	53,83	193.993.056.449
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	2.527.016.956	55.544.544.231	4,55	21.772.818.746
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	(10.570.303.810)	31.645.908.173	(33,40)	5.478.076.015

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak dapat merealisasikan target-target Pendapatan Usaha serta Laba Usaha dan Laba Setelah Pajak. Pendapatan Usaha Perusahaan hanya terealisasi 42,71% dari target. Laba Usaha juga hanya terealisasi 4,55%. Perusahaan juga tidak dapat merealisasikan Laba Setelah Pajak setelah mengalami kerugian Rp10,57 miliar.

Berdasarkan RKAP 2020 yang telah disahkan pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2/12/11/DIRUT-2019, Perusahaan telah menetapkan

Rental of Production Equipment

The rental of production equipment was targeted on a specific target market, the Domestic and Foreign Third Party. In reaching both markets, the Company has conducted the following marketing activities in 2019:

Shipyards

In shipyard, the docking reached 35 ships.

Other Services

Other services were realized through Rp2.57 billion contracts.

COMPARISON OF 2019 TARGETS AND REALIZATION AND 2020 PROJECTION

Target, Realization and Projection of Profit and Loss

The Table of 2019 Profit and Loss and 2020 Projection

In 2019, the Company could not achieve the targets on Revenues, Operating Income and Income After Tax. The Company's Operating Revenues were 42.71% of the target. Operating Income was 4.55%. The Company could not realize its Profit After Tax after experiencing a loss of Rp10.57 billion.

Based on the 2020 RKAP which was ratified on December 2, 2019 with the Decree Number: 2/12/11/DIRUT-2019, the Company has set the above 2020 targets. The Company sets

proyeksi tahun 2020 seperti yang telah diungkapkan di atas. Perusahaan menetapkan proyeksi tersebut dengan berdasarkan optimisme kondisi eksternal (makro ekonomi dan industri nasional). Perusahaan juga telah menetapkan berbagai strategi untuk mempertahankan *captive market* dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mencapai target-target tersebut di atas. Manajemen Rukindo merasa optimis bahwa, walaupun sulit, namun target-target tersebut di atas dapat dicapai.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan

Tabel Posisi Keuangan 2019 dengan Target 2019 serta Proyeksi Tahun 2020

Deskripsi Description	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2020 2020 Projection
Aset Assets	360.494.677.117	512.915.437.834	70,28	375.718.711.296
Liabilitas Liabilities	235.887.506.314	266.014.542.969	88,67	245.633.464.477
Ekuitas Equity	124.607.170.803	246.900.894.865	50,47	130.085.246.819

Perusahaan belum mencapai realisasi 2019 pada target Aset, Liabilitas dan Ekuitas sesuai RKAP 2020. Walaupun demikian, realisasi tersebut mampu dicapai di atas 50%, bahkan Liabilitas Perusahaan berhasil terealisasi di atas 80% yaitu 80,67%.

Perusahaan telah menetapkan proyeksi peningkatan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan untuk tahun 2020. Penetapan proyeksi ini didasarkan pada rencana strategis Perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan aset seperti kapal hingga peremajaan alat-alat produksi lainnya.

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Mengenai Sumber Daya

Tabel Posisi Keuangan 2019 dengan Target 2019 serta Proyeksi Tahun 2020

Deskripsi Description	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2020 2020 Projection
Personil Personnel				
a. Jumlah SDM (orang) Workforce (people)	167	197	84,77	188
b. Produktivitas SDM (ribuan Rupiah) HR Productivity (thousands of Rupiah)	146.101	334.606	43,66	314.237

the projections based on the optimism on external conditions (national macroeconomic and industry). The Company has also established various strategies to maintain the captive market of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to achieve the above projections. Rukindo's management is optimistic that, although difficult, the targets above are achievable.

Target, Realization and Projection of Financial Position

The Realization Table of 2019 Financial Position with 2019 Target and 2020 Projection

In 2019, the Company could not reach the targets on Assets, Liabilities and Equity that were set forth on the 2020 RKAP. Nevertheless, the realization was above 50%, including on Liabilities which went above 80% or 80.67% to be precise.

The Company has set a projection to increase the Assets, Liabilities and Equity for 2020. These projections were set based on the Company's strategic plan to increase production capacity through the addition of assets, such as ships, and replacement of other production equipments.

Target, Realization and Projection of Company's Performance Regarding Resources

The Table of 2019 Financial Position Based on Target and 2020 Projection

Deskripsi Description	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2020 2020 Projection
Alat Produksi Production Equipment				
Jumlah alat produksi beroperasi Total production equipment in operation	5	5	100	7
Volume produksi (m3) Production volume (m3)	1.638.277	3.535.358	46,34	3.462.672
Hari Kerja Keruk (HKK) Dredging Work Day (HKK)	705	1.018	69,25	1.002

Sumber Daya Manusia

Dari sisi perekrutan jumlah pekerja, Rukindo telah merekrut 30 orang pekerja baru di sepanjang tahun 2019. Dengan demikian, per 31 Desember 2019, jumlah pekerja Perusahaan tercatat sebanyak 167 orang, dengan pencapaian sebesar 84,77% dari target. Informasi mengenai komposisi pekerja baru yang direkrut Perusahaan, berikut dengan Sub Direktorat (Subdit) yang diisi, terdapat pada Tinjauan Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2020, Perusahaan memproyeksikan jumlah pekerja pada akhir tahun 2020 mencapai 188 orang dengan komposisi sebanyak 29 orang pekerja organik dan sebanyak 159 orang pekerja non organik.

Dari sisi produktivitas SDM, di sepanjang tahun 2019, realisasi produktivitas SDM mencapai Rp146,10 juta. Realisasi ini mencapai 43,66% dari target. Pada tahun 2020, Perusahaan menetapkan proyeksi produktivitas SDM tahun 2020 mencapai Rp314,24 juta.

Dari sisi pengembangan kompetensi, pada tahun 2019 Perusahaan telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kerja yang diikuti 182 orang peserta. Pada tahun 2020, dalam hal pengembangan kompetensi pekerja, Perusahaan memproyeksikan pengembangan kompetensi untuk meraih target usaha dalam rangka memajukan bisnis Perusahaan. Informasi pengembangan kompetensi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan karyawan terdapat di Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Alat Produksi

Dari sisi jumlah alat produksi yang beroperasi, Rukindo mencatatkan realisasi 2019 sesuai dengan target yaitu 5 (lima) alat produksi. Di tahun 2020, Perusahaan menetapkan proyeksi untuk pencapaian alat produksi mencapai 7 (tujuh) alat produksi yang beroperasi.

Human Resources

In terms of recruitment, Rukindo has recruited 30 new workers in 2019. This has made the number of the Company's workers as of December 31, 2019 to be 167 people, achieving 84.77% of the target. Information regarding the composition of new workers that the Company has recruited, along with the Sub Directorates that have been filled out, is available in the Business Support Review in this Annual Report. In 2020, the Company has set a projection that by the end of 2020 the new workers to be recruited will reach 188 people comprising of 29 organic workers and 159 non-organic workers.

In terms of HR productivity, in 2019, the realization was Rp146.10 million. This was 43.66% of the target. In 2020, the Company has set the HR productivity projection for 2020 to be Rp314.24 million.

In terms of competency development, in 2019, the Company has conducted various training and development programs which followed by 182 participants. In 2020, the competency development will be set to achieve business projection for the Company's business growth. Information on competency development regarding employee education and/or training is available in the Company Profile in this Annual Report.

Production Equipment

In terms of the number of production equipment in operation in 2019, Rukindo recorded the realization to be according the target of 5 (five) production equipment. In 2020, the Company has set the projection to reach 7 (seven) production equipment in operation.

Volume produksi Perusahaan pada akhir tahun 2019 mencapai 1.638.277m³. Pencapaian ini merupakan 46,34% dari target sebesar 3.535.358 m³. Di tahun 2020, Perusahaan menetapkan proyeksi untuk mencapai volume produksi sebesar 3.462.672 m³.

Hari Kerja Keruk (HKK) pada tahun 2019 mencapai 705 HKK atau sebesar 69,25% dari target 1.018 HKK. Di tahun 2020, Perusahaan menetapkan proyeksi untuk mencapai jumlah HKK sebesar 1.002 HKK.

Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Pada tahun 2019, kinerja finansial Perusahaan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Dari sisi pendapatan, Perusahaan berhasil merealisasikan sejumlah Rp156,20 miliar atau 42,71% dari target RKAP 2019 sebesar Rp365,73 miliar. Pada tahun 2019, Perusahaan menderita kerugian Rp10,56 miliar dari laba tahun 2018 sebesar Rp17,49 miliar. Hasilnya, tingkat kesehatan Perusahaan dari sisi realisasi aspek keuangan tahun 2019 mencapai skor 21,50, lebih rendah dari skor RKAP sebesar 47,00. Pencapaian ini membuat kondisi Perusahaan dikategorikan sebagai Kurang Sehat "BBB".

The Company's production volume at the end of 2019 was 1,638,277m³. This achievement was 46.34% of the targeted 3,535,358 m³. In 2020, the Company has set a projection to reach a production volume of 3,462,672 m³.

Dredging Work Day (HKK) in 2019 reached 705 HKK or 69.25% of the targeted 1,018 HKK. In 2020, the Company has set a projection to reach 1,002 HKK.

Key Performance Indicators and Soundness Level

The Company's financial performance in 2019 decreased compared to 2018. In terms of revenue, the Company managed to realize a total of Rp156.20 billion or 42.71 % of the targeted Rp365.73 billion in 2019 RKAP. In 2019, the Company suffered a loss of Rp10.56 billion, which in 2018 was a profit of Rp17.49 billion. As a result, the Company's soundness level in terms financial aspects in 2019 was 21.50, lower than the targeted score of 47.00 in RKAP. This made the the Company to be categorized as Less Sound "BBB".

Prospek Usaha

Business Prospect

Laporan Prospek Ekonomi Global terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 berada di angka 2,5% seiring dengan pemulihan perdagangan dan investasi secara bertahap. Bank Dunia memberi catatan bahwa pemulihan ekonomi secara global sangat bergantung kepada realisasi komitmen Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk meredakan perseteruan dagang mereka. Apabila kedua negara sepakat untuk melanjutkan perbincangan dari perjanjian awal yang telah dimulai sebelumnya maka hal tersebut diprediksi akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia.

Bank Dunia kembali menekankan pentingnya kedua negara, yaitu AS dan Tiongkok, untuk mempercepat realisasi kesepakatan perdagangan di antara mereka. Dengan kekuatan ekonomi yang masif dari kedua negara tersebut, mencapai hampir 40% dari PDB global dan seperempat perdagangan global, peran AS dan Tiongkok dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global sangatlah vital. Pada tahun 2020, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan akan mencapai 1,8%, setelah sebelumnya tumbuh 2,3% pada 2019. Sedangkan PDB Tiongkok akan naik kurang dari 6% untuk pertama kalinya sejak 1990, dengan harapan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 5,9%.

Laporan Prospek Ekonomi Global Bank Dunia juga menyebutkan adanya indikasi perlambatan ekonomi di kawasan Euro akibat Brexit. Jepang juga diprediksi akan mengalami penderitaan pelemahan akut di bidang manufaktur dan ekspor dan ekonomi akan terus melambat dengan pertumbuhan yang diperkirakan hanya 0,7%. Pertumbuhan Argentina diproyeksikan melambat 1,9% di tahun 2020, sementara Brazil dan Meksiko masing-masing akan meningkat 2,0% dan 1,2%, jauh lebih cepat daripada tahun lalu. India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 5,8%, sementara Turki diperkirakan akan berekspansi hingga 3,0% setelah sebelumnya tidak terjadi pertumbuhan pada 2019. Timur Tengah diperkirakan akan mengalami lonjakan pertumbuhan menjadi 2,4% di tahun 2020 setelah hampir tidak ada pertumbuhan pada 2019.

Memasuki awal tahun 2020, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,75%. Prospek pemulihan ekonomi dunia di 2020

The latest report of the Global Economic Prospect which released by the World Bank showed that the estimation for global economic growth in 2020 will be 2.5% as the trade and investment began to slowly recover. The World Bank pointed out that the global economic recovery relies on the realization of the commitment between the United States (US) and China to settle their trade wars. If the two countries agree to move from the earlier initial agreement then it is predicted to have a positive influence on the development of global economic growth.

The World Bank again stressed the importance of the two countries, namely the US and China, to accelerate the trade agreements. With the massive economic power that the two countries have, reaching nearly 40% of the global GDP and a quarter of global trade, the role of US and China in influencing global economic growth is vital. In 2020, the World Bank has estimated that the US economic growth to reach 1.8%, after growing 2.3% in 2019. In addition, China's GDP will rise by less than 6% for the first time since 1990 or expected to be growing 5.9%.

The World Bank's Global Economic Prospect has also discussed the indications of an economic slowdown in Euro due to Brexit. Japan is also predicted to suffer from an acute weakening in manufacturing and exports and the economy will continue to slow down with 0.7% growth. Argentina's growth is projected to slow down by 1.9% in 2020, while Brazil and Mexico will increase by 2.0% and 1.2%, respectively, faster than last year. India is expected to grow 5.8%, while Turkey is expected to expand by 3.0% after zero growth in 2019. The Middle East is expected to accelerate its growth to 2.4% in 2020 after experienced almost no growth in 2019.

Entering early 2020, Bank Indonesia decided to maintain BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 5.00%, the Deposit interest rate at 4.25%, and the Lending interest rate at 5.75%. The global economic recovery in 2020 is beginning to show some good prospect and is now supporting the decline of

mulai terlihat dan mendukung berlanjutnya penurunan ketidakpastian pasar keuangan global akibat adanya optimisme pasca kesepakatan *phase 1 trade deal* AS-Tiongkok.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2020 dapat mencapai kisaran 5,1% hingga 5,5% setelah sebelumnya di tahun 2019 mencapai 5,1%. Sementara ke depannya, Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2020 tetap terjaga dalam kisaran sasarannya sebesar $3,0 \pm 1\%$.

Kondisi eksternal yang positif memicu Rukindo untuk terus berupaya meningkatkan kinerja operasional dengan strategi usaha sebagai berikut:

1. Melakukan berbagai upaya perbaikan untuk penguatan *existing business* terutama pada jasa pengerukan;
2. Melakukan pengembangan jasa galangan dan perbengkelan kapal yang sangat prospektif;
3. Melakukan kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka penyiapan alat produksi sesuai kebutuhan proyek dan dalam rangka optimalisasi aset alat produksi yang kurang produktif;
4. Melakukan restrukturisasi utang Perusahaan untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan;
5. Melakukan perbaikan di segala bidang guna peningkatan kualitas dan proses bisnis Perusahaan;
6. Melakukan upaya efektifitas dan efisiensi biaya untuk meningkatkan profitabilitas Perusahaan;
7. Melakukan pengembangan SDM melalui program diklat, rekrutmen dan pemberian *reward* dan *punishment* guna peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM.

uncertainty in global financial market as the market began to show optimism after the US-China phase 1 trade deal.

Bank Indonesia has estimated that the overall economic growth in 2020 can reach around 5.1% to 5.5% after reaching 5.1% in 2019. In the future, Bank Indonesia is committed to maintaining price stability so that the inflation in Consumer Price Index (CPI) in 2020 can be maintained within the target range of $3.0 \pm 1\%$.

The optimistic external conditions had triggered Rukindo to continue working to improve operational performance with the following business strategies:

1. Conduct various improvements to strengthen existing business, especially in dredging;
2. Develop prospective shipyard and workshop services;
3. Collaborate with strategic partners to prepare production equipment that is in accordance with what the project needs and to optimize the Company's less productive productive equipment;
4. Restructure the Company's debts to improve the financial position;
5. Make improvements in all fields to improve the Company's quality and business processes;
6. Strive for effectiveness and cost efficiency to increase the Company's profitability;
7. Develop human resources through training programs, recruitment as well as rewards and punishment to increase the productivity and competency of our HR.

Informasi Kelangsungan Usaha

Going Concern

Industri kepelabuhan dipercaya akan terus bertumbuh karena dukungan industri lainnya seperti industri pariwisata, infrastruktur, dan juga energi. Dari industri pariwisata, keputusan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali diyakini akan menjadi peluang yang baik bagi pelayaran wisata domestik mengingat 8 (delapan) dari destinasi wisata tersebut merupakan objek wisata bahari.

Infrastruktur Indonesia dipercaya akan terus mengalami pertumbuhan setidaknya sampai 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini tentunya akan mendorong pergerakan bahan-bahan dan muatan bangunan di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan program mandatori biodiesel 30% (B30) yang akan memunculkan kebutuhan baru untuk mengangkut *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) untuk keperluan distribusi.

Berdasarkan pandangan atas beberapa kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Rukindo, Manajemen telah melakukan *assessment* risiko atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Rukindo dan mengambil langkah-langkah antisipasi ke depannya yaitu:

1. Mempertahankan *captive market* Perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Kerja sama dengan Kantor Pusat IPC dan Anak Perusahaan untuk peraihan Proyek-Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Mempertahankan peraihan proyek pengerukan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berekspansi ke luar di non PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Pengembangan *Vessel Operating Monitoring System* berbasis IT;
5. Pengembangan kapasitas produksi Perusahaan di berbagai bidang.

The port industry is believed to continue to grow because of the support of other industries such as the tourism, infrastructure, and energy. From the tourism industry, the decision from the Government of Indonesia to set 10 priority tourist destinations outside Bali is believed to be a good opportunity for domestic tourist voyages since 8 (eight) of these tourist destinations are marine tourism.

Indonesia's infrastructure is believed to continue to grow for at least in the next 5 (five) years. This will certainly encourage the movement of building materials within the country.

The Government of Indonesia has also implemented a mandatory 30% biodiesel (B30) program that will create new demand to transport fatty acid methyl esters (FAME) for distribution purposes.

Based on several external conditions that can affect Rukindo's business, the Management has conducted a risk assessment on certain issues that may bring significant impact on Rukindo's business continuity and has taken necessary actions in the future, such as:

1. Maintain the Company's captive market from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Collaborate with IPC Head Office and Subsidiaries to win National Strategic Projects (PSN);
3. Maintain the acquisition of dredging projects within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and expand beyond PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Develop its IT-based Vessel Operating Monitoring System;
5. Develop the Company's production capacity in various fields.



5

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review



“

Perusahaan memberikan perhatian besar pada pengelolaan Sumber Daya Manusia yang unggul dan pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja usaha.

The Company has always been giving its full attention to the Human Resources management for generating excellent workforce and utilizing the advance Information Technology to support business performance.



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Rukindo mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berdasarkan pada strategi dan rencana bisnis untuk merealisasikan Visi dan Misi Perusahaan. Manajer Subdit SDM dan Umum, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.26/4/1/DIRUT-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Struktur Organisasi, menjalankan pengelolaan SDM yang kemudian diserahkan kepada Divisi SDM. Fokus Divisi SDM menjalankan strategi pengelolaan SDM yang mengedepankan pengembangan kualitas pekerja berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan industri perkapalan, khususnya di bidang pelayanan jasa pengerukan dan galangan.

Dalam menjalankan pengelolaan SDM di lingkungan Rukindo, Divisi SDM memiliki tugas-tugas pokok untuk mengelola para pekerja melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, penetapan target individu berdasarkan target usaha Perusahaan dan kontrak manajemen, pemastian pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan regulasi, dan pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang kerja lainnya. Pengelolaan SDM di lingkungan Rukindo diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Perusahaan.

Rukindo manages its Human Resources (HR) based on the business strategies that has been formulated to realize the Company's Vision and Mission. The Manager of HR and General Sub Directorate, as regulated in the Decree of Board of Directors No.26/4/1/DIRUT-2018 on April 26, 2018 regarding the Organization Structure, manages the Company's HR before then mandated to HR Division. The HR Division is directed to conduct the HR management strategy that is focusing on the development of workers' competencies in accordance with the Company needs as well as the development in shipping industry, particularly in dredging and shipyard.

In managing the HR of Rukindo, the HR Division refers to its main duties of managing workers through training and competency development, settlement of individual target that is based on the Company's target and management contract, fulfillment of workers' rights in accordance with regulations, and other supporting facilities. The HR Management within Rukindo is regulated based on the Decree of Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 on May 15, 2019 regarding the Management Organization and Procedure of the Company.

Pedoman Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM di Rukindo dilakukan secara terstruktur dan terencana sesuai dengan strategi bisnis dan diarahkan untuk sepenuhnya mendukung pengembangan usaha Perusahaan. Pengelolaan tersebut diatur dalam beberapa pedoman umum yang disusun dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan bisnis Rukindo. Pedoman-pedoman ini diatur dalam beberapa kebijakan pengelolaan SDM yang mencakup:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.044/KP011/XII/DIRUT-2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pola Pengadaan Pekerja.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.067/KP035/VII/DIRUT-2017 Tentang Penilaian Performansi Bulanan (P2B).
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/10/3/Dirut-2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus Pekerja.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD. 052/KP.201/XII/DIRUT-2016 Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Penghasilan Pekerja Status Darat.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.002/KP.1012/II/DIRUT-2016 Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Cuti Pekerja.
6. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.007/KP.502/III/DIRUT-2016 Tanggal 17 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Rukindo Nomor: KD.016/Kp.602/Vii/Dirut-2015, Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai, Pekerja Dan Pensiunan.
7. Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.013/KP.208/V/DIRUT-2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Bagian Produksi Unit Galangan.
8. Surat Keputusan Direksi Nomor: 1/3/3/RKD-2019 Tanggal 3 Januari 2019 Tentang Pedoman Nomor Urut Pekerja Perusahaan (Nupp).
9. Surat Keputusan Direksi Nomor: 10/1/1/Dirut-2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: KD.035/Kp.201/IV/Dirut-2017 Tanggal 19 April 2017 Tentang Penghasilan Pekerja.
10. Surat Keputusan Direksi Nomor: 27/1/2/Dirut-2018 Tanggal 27 Januari 2018 Tentang Pelaksanaan Praktika Kerja.
11. Surat Keputusan Direksi Nomor: 3/1/8/Dirut-2018 Tanggal 3 Januari 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Direksi, Komisaris Independen, Pekerja dan Pensiunan Pegawai.

Guideline of HR Management

The HR Management at Rukindo is conducted structurally in accordance with the business strategy and is directed to fully support the Company's business development. The management is regulated in several guidelines – formulated, and regularly evaluated – to ensure its conformity with the business development of Rukindo. These guidelines are regulated in several policies as the following:

1. Decree of Board of Directors Number: KD.044/KP011/XII/DIRUT-2016 on November 29, 2016 regarding Pattern of Workers Procurement
2. Decree of Board of Directors Number: KD.067/KP035/VII/DIRUT-2017 regarding Monthly Performance Assessment Policy (P2B).
3. Decree of Board of Directors Number: 15/10/3/Dirut-2018 on October 15, 2018 regarding the Determination and Procedures to Reward the Workers with Bonuses.
4. Decree of Board of Directors Number: KD. 052/KP.201/XII/DIRUT-2016 on December 15, 2016 regarding the Income of Land Workers.
5. Decree of Board of Directors Number: KD.002/KP1012/II/DIRUT-2016 on May 2, 2016 regarding Paid Leave for Workers.
6. Decree of Board of Directors Number: KD.007/KP502/III/DIRUT-2016 on March 17, 2016 regarding the Amendment of Board of Directors Decree Number: KD.016/Kp.602/Vii/Dirut-2015 on July 24, 2015 regarding Procedures of Healthcare Services for Workers and Retirees.
7. Decree of Board of Directors Number: KD.013/KP.208/V/DIRUT-2016 on May 25, 2016 regarding Overtime for Workers on Shipyard.
8. Decree of Board of Directors Number: 1/3/3/RKD-2019 on January 3, 2019 regarding Guideline of Worker's Serial Number.
9. Decree of Board of Directors Number: 10/1/1/Dirut-2018 on October 1, 2018 regarding Amendment of Board of Directors Decree Number KD.035/Kp.201/IV/Dirut-2017 on April 19, 2017 regarding Worker's Income.
10. Decree of Board of Directors Number: 27/1/2/Dirut-2018 on January 27, 2018 regarding Working Implementation.
11. Decree of Board of Directors Number: 3/1/8/Dirut-2018 on January 3, 2018 regarding Healthcare Services for Board of Directors, Independent Commissioner, Workers and Retirees.

12. Surat Keputusan Direksi Nomor: 1/2/1/Dirut-2018 Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas.
13. Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/4/1/Dirut-2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen.
14. Surat Keputusan Direksi Nomor: 10/8/1/Dirut-2018 Tanggal 8 Oktober 2018 Tentang Pola Pengadaan Awak Kapal.
15. Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/10/3/Dirut-2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Pekerja.
16. Surat Keputusan Direksi Nomor: 17/12/11/Dirut-2018 Tanggal 17 Desember 2018 Tentang Amandemen Keputusan Direksi Tentang Penghasilan Non Bulanan Pekerja.

12. Decree of Board of Directors Number: 1/2/1/Dirut-2018 on January 2, 2018 regarding Work Travel.
13. Decree of Board of Directors Number: 26/4/1/Dirut-2018 on April 26, 2018 regarding Organization and Management Working Procedure.
14. Decree of Board of Directors Number: 10/8/1/Dirut-2018 on October 8, 2018 regarding the Pattern of Crew Procurement.
15. Decree of Board of Directors Number: 15/10/3/Dirut-2018 on October 15, 2018 regarding Determination and Procedures to Reward the Workers with Bonuses.
16. Decree of Board of Directors Number: 17/12/11/Dirut-2018 on December 17, 2018 regarding Amendment of Board of Directors Decree on Non Monthly Payment for Workers.

Roadmap Sumber Daya Manusia

Peran strategis SDM diwujudkan dalam menopang fokus bisnis Perusahaan melalui peningkatan kapabilitas individu untuk menunjang kinerja organisasi, pembangunan kompetensi strategis, dan regenerasi tenaga kerja untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Rukindo telah menyusun *roadmap* SDM sebagai acuan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika usaha. *Roadmap* SDM yang telah disusun Rukindo adalah sebagai berikut.

HR Development Roadmap

The strategic role of HR is realized in supporting the Company's business focus through enhancement of individual capabilities to support the organization performance, strategic competency development, and regeneration of workforce to support business sustainability.

Rukindo has prepared a roadmap for its HR development, which has also been adjusted with the Company's Long-Term Plan will then be reviewed regularly in accordance with the business dynamic. The HR roadmap that Rukindo has formulated is as follows:

Rencana Strategis Strategic Plan



Berdasarkan *Roadmap* SDM 5 (lima) tahunan 2019-2023 yang telah dipersiapkan, inisiatif strategi yang telah dilakukan di tahun 2019 adalah seputar pembenahan beberapa aspek dan juga pembuatan surat keputusan (beberapa masih dalam tahap proses) mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem remunerasi dan penghasilan pekerja;
2. *Tim Ad hoc* untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan;
3. Kerja sama dengan lembaga pemenuhan pekerja *outsourcing*;
4. Pelayanan kesehatan pekerja dan pensiunan pegawai;
5. Ketentuan perjalanan dinas.

Selain perubahan keputusan Direksi dan pembenahan surat keputusan yang mengikutinya, Perusahaan juga telah melakukan sejumlah aktivitas lainnya terkait SDM yaitu:

1. Pemutakhiran sistem *E-Office*;
2. Penggunaan sistem HRIS (*Human Resource Information System*) dengan pihak ketiga;
3. Pengadaan mobil dinas;
4. Pengadaan APD (*Safety Shoes, Coverall, Wearpack Uniform* (PDL) dan *Helm*) bagi Pekerja Galangan dan Awak Kapal;
5. Pengadaan baju PDL;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Rekrutmen SDM

Ketersediaan tenaga kerja yang memadai dan kompeten dimulai dari perekrutan SDM. Perusahaan membutuhkan calon pekerja yang sesuai dengan standar kualitas kerja yang berlaku di lingkungan Rukindo untuk mengisi jabatan dan formasi tenaga kerja yang kosong atau akan kosong. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan kerja Perusahaan untuk mendukung aktivitas operasional, peningkatan kerja, dan pencapaian target Perusahaan.

Tata cara dan pokok-pokok pedoman perekrutan tenaga kerja yang berlaku di Rukindo telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.044/KP.011/XII/DIRUT-2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pola Pengadaan Pekerja.

Based on the 5 (five) years HR Roadmap of 2019-2023 that has been prepared, the strategic initiative in 2019 was around the improvement of several aspects as well as the creation of decree (some were still on progress) regarding the following matters:

1. Remuneration and income system for worker;
2. Ad hoc team to support the Company's operating activities;
3. Cooperation with external institution to hire outsource;
4. Healthcare services for workers and retirement insurance;
5. Regulation on work travel.

In addition to the decision from the Board of Directors and review on the following decree, the Company has also conducted various activities regarding HR such as the following:

1. Updated the E-Office system;
2. Utilization of HRIS (Human Resources Information System) with third party;
3. Procurement of official working vehicle;
4. Procurement of personal protective equipment (PPE) including Safety Shoes, Coverall, Wearpack Uniform (PDL) ad Helmet for Shipyard and Vessel Crew;
5. Procurement of PDL attire;
6. Implementation of training and education.

HR Recruitment

The availability of adequate and competent workforce started from HR recruitment. The Company needs quality candidates with the level of quality that is applicable to work at Rukindo and fill the empty position (or those that will be empty in the near future). This is important in order to maintain the Company's sustainable performance to support the operational activity, performance improvement and the Company's target achievement.

The procedure and the principal guidelines to recruit workers has been enacted in the Decree of Board of Directors Number: KD.044/KP.011/XII/DIRUT-2016 on November 29, 2016 regarding the Pattern of Worker Procurement.

Proses Rekrutmen

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pelamar kerja yang telah memenuhi persyaratan profesional memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Rukindo tanpa ada perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin dan golongan.

Wewenang pengadaan pekerja berada pada Direksi. Dalam prosesnya, Direksi menetapkan pengadaan pekerja melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang formasi yang tersedia;
2. Pengumuman rencana penerimaan pekerja;
3. Penetapan jadwal seleksi;
4. Penyusunan materi seleksi;
5. Pelaksanaan seleksi;
6. Evaluasi hasil seleksi dan penentuan kelulusan (hasil seleksi);
7. Pengumuman hasil seleksi.

Pengadaan pekerja dapat dilakukan secara fungsional atau oleh Tim Pengadaan Pekerja. Dalam keadaan tertentu, pengadaan dapat dilakukan melalui pihak ketiga (lembaga/instansi pengadaan/rekrutmen pekerja).

Pengadaan pekerja di Rukindo terdiri atas:

1. Pekerja Tetap Perusahaan;
2. Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan kepada Perusahaan;
3. Pekerja Tidak Tetap dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Secara garis besar, seleksi calon pekerja Perusahaan dilakukan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumuman pengadaan pekerja di Rukindo melalui: media massa/*website*/internet, institusi atau lembaga pendidikan, *job fair*, penawaran langsung kepada calon pelamar potensial;
2. Proses pengecekan latar belakang untuk memastikan pemenuhan persyaratan ketentuan umum para calon pekerja Rukindo. Pada proses ini, Perusahaan melakukan proses seleksi dari *email* pelamar yang masuk ke *email* resmi perekrutan Perusahaan yaitu recruitment@rukindo.co.id;
3. Proses administrasi;
4. Seleksi penerimaan pekerja mencakup: psikotes, tes kualifikasi persyaratan posisi dalam jabatan, pemeriksaan kesehatan, wawancara akhir;

Recruitment Process

The Company is committed to implementing a recruitment process that is in accordance with the applicable rules and legislations. Every candidate that has met the professional requirements has the same opportunity to be part of Rukindo without any differences regarding race, ethnicity, religion, gender and class group.

The authority to recruit candidate lies on the Board of Directors. The Board of Directors has determined the procedures to recruit workers as follows:

1. Research on the available formation;
2. Announcement on the plan to accept workers;
3. Determination of selection schedule;
4. Formulation of selection material;
5. Selection process;
6. Evaluation of selection result and determination of graduation (selection result);
7. Announcement of selection result.

Recruitment of candidates can be done unilaterally by each function or through the Worker Procurement Team. In certain condition, the recruitment can be done by a third party (institution of worker recruitment).

The recruitment that is applicable at Rukindo consist of:

1. Permanent Worker of the Company;
2. Worker of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) assigned to the Company;
3. Contract Worker with Specific Working Time Agreement (PKWT).

In general, the selection of candidates for the Company is done through the following stages:

1. Announcement of available position at Rukindo through: mass media/*website*/internet, educational institution, job fair, direct offer to potential candidate;
2. Background check in ensuring the conformity of a candidate with the general requirement of Rukindo. The selection process here is done through the email that the candidate has sent to the official recruitment email of the Company at recruitment@rukindo.co.id;
3. Administration process;
4. Selection of hiring a worker that include: psikotest, qualification test as requirement to sit in a certain position, health check, final interview;

5. Penerimaan pekerja dan proses berlanjut ke program induksi bagi pekerja baru.

Pada saat pertama kali bergabung menjadi Insan Rukindo, setiap pekerja baru akan mengikuti proses orientasi yang telah disiapkan yang mencakup mengenai Visi, Misi, Nilai/Budaya Perusahaan, pedoman dan kebijakan yang berlaku, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan.

Recruitment Result

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan rekrutmen terhadap staf (direkrut 10 orang dari 32 peserta) dan TNO. Perusahaan juga melakukan kegiatan mutasi dan perekrutan kru kapal guna menunjang kegiatan operasional kapal keruk dan alat bantu. Rincian mengenai rekrutmen dan penambahan kru yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

5. Admission for worker, followed by an induction program for new worker.

When joining Rukindo for the first time, every new worker shall follow the orientation process covering Vision, Mission, Corporate Values/Culture, guideline and policy and other things related to the Company's business process.

Recruitment Result

In 2019, the Company has conducted a recruitment program for staff (10 out of 32 participants were recruited) and TNO. The Company has also mutated several workers and recruited crews to support the operational dredging and equipment utilization activities. The detail regarding the recruitment and addition of crews is as follows:

No.	Sub Direktorat (Subdit) Sub Directorate (Subdit)	Jumlah (orang) Total (people)
Rekrutmen Staf Staff Recruitment		
1.	Subdit Komersial Subdit Commercial	2
2.	Subdit SDM dan Logistik Subdit HR and Logistic	4
3.	Sekretaris Direktur Utama Secretary for Managing Director	1
4.	Subdit Keuangan Subdit Finance	1
5.	Subdit Armada Subdit Fleet	1
6.	SPI SPI	1
Rekrutmen TNO TNO Recruitment		
1.	Subdit SDM dan Logistik Subdit HR and Logistic	1
2.	Sekretaris Direktur Utama Secretary for Managing Director	1
3.	Tenaga Kebersihan Cleaning Service	1
Kru Kapal Crew		
1.	Penambahan kru CSD Batang Hari 30 Addition of CSD Batang Hari 30 crew	14
2.	Mutasi Mutation	13

Tingkat Perputaran Pekerja

Seperti bidang usaha lainnya, bidang usaha pengerukan yang dijalani Perusahaan juga mengalami *turnover* pekerja. Berdasarkan data internal, tingkat *turnover* pekerja pada 2019 rata-rata sebesar 3%. Bila dibandingkan dengan tingkat *turnover* tahun sebelumnya sebesar 51%, tingkat *turnover* pekerja di 2019 lebih rendah. Hal ini disebabkan karena di tahun 2019 Rukindo baru memulai kembali melakukan perekrutan pekerja baru untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan.

Data tingkat *turnover* pekerja mengenai hasil rekrutmen telah disampaikan pada bagian rekrutmen. Sedangkan data tingkat *turnover* pekerja mengenai pekerja yang keluar dari Rukindo adalah sebagai berikut:

No.	Alasan Reason	Jumlah (orang) Total (people)
1.	Pensiun alami Natural retirement	-
2.	Meninggal (karena sakit/kecelakaan kerja) Deceased (due to illness/accident related to work)	-
3.	Mengundurkan diri karena keinginan pribadi Resigned due to personal reason	5
4.	Mengundurkan diri karena dipindahtugaskan ke anak perusahaan IPC lainnya Resigned because transferred to other subsidiaries of IPC	-
5.	Dipecat Laid off	-

Sekilas Profil SDM Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, jumlah pekerja Perusahaan tercatat sebanyak 150 orang, meningkat sebanyak 11,11% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 135 pekerja. Peningkatan jumlah pekerja ini disebabkan karena Perusahaan melakukan perekrutan pekerja baru untuk meningkatkan kinerja usaha sesuai dengan perkembangan bisnis. Informasi mengenai komposisi pekerja telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan.

Kesejahteraan SDM

Perusahaan senantiasa meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan prestasi dan produktivitasnya serta memastikan target kinerja dapat tercapai.

Worker Turnover

Just like any other business, the dredging business is also experiencing worker turnover. Based on our internal data, the average turnover rate in 2019 was 3%. Compared to the previous year, which amounted to 51%, the turnover in 2019 was lower. This occurred because in 2019, Rukindo has just started to start recruiting again for its operational activities.

The turnover rate for new workers has been discussed in the recruitment section. The turnover rate of workers who resigned from Rukindo can be seen in the following:

A Glance of 2019 HR Profile

As of December 31, 2019, the Company had 150 workers, increased 11.11% compared to 135 workers in 2018. The increase occurred because the Company has just recruited new workers to improve the performance as the business is growing. Information regarding the composition of our workers can be found in the Company Profile section.

HR Welfare

The Company has always been improving the welfare of our workers in accordance with the applicable regulations. This is done to motivate our workers in improving their performances and productivities and also ensuring that they can achieve the targets.

Kebijakan Remunerasi

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Perusahaan untuk menjadi Pemimpin Pasar Pengerukan di Indonesia, Divisi SDM menitikberatkan strategi pengelolaan SDM pada penetapan paket remunerasi yang memperhatikan kesejahteraan pekerja. Rukindo memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/10/3/DIRUT-2018 tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Pekerja. Dalam surat keputusan tersebut juga terdapat struktur remunerasi (upah/penghasilan) bagi setiap pekerja yang telah disesuaikan juga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berikut struktur keseluruhan remunerasi serta komponen imbal jasa yang diterima oleh para pekerja. Struktur remunerasi ini diterima berbeda-beda oleh para pekerja, sesuai dengan level jabatan dan status pekerja.

Remuneration Policy

To achieve the Company's Vision to be the Market Leader in Dredging Field in Indonesia, the HR management of our HR Division is placed around the remuneration package that ensures the welfare of our workers. Rukindo has a remuneration policy that is enacted based on the Decree of Board of Directors Number: 15/10/3/DIRUT-2018 regarding the Determination and Procedures to Reward the Workers with Bonuses. The decree also stipulated the remuneration structure for every worker by taking reference to the Law Number 13 in 2003 regarding Employment.

The overall remuneration structure and allowance for workers can be found in the following information. The remuneration structure is different for workers, in accordance with their level of position and status.

Keterangan Description	Pekerja IPC IPC Worker	Pekerja Rukindo Rukindo Worker	
		Status Darat Land Status	Status Laut (Awak Kapal) Sea Status (Crew)
Upah Pokok Basic Salary	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Tunjangan Jabatan Position Allowance	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Ya/Yes	Ya/Yes	Tidak/No
Tunjangan Kehadiran Attendance Allowance	Ya/Yes	Ya/Yes	Tidak/No
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Bonus Bonus	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Insentif Performansi Performance Incentive	Ya/Yes	Ya/Yes	Tidak/No

Perusahaan senantiasa mempertahankan kebijakan paket remunerasi yang menarik dan kompetitif untuk menjaga loyalitas pekerja. Paket remunerasi selalu dikaji secara berkala setiap tahunnya dengan berdasarkan kepada dinamika industri dan faktor ekonomi yang mempengaruhi seperti inflasi dan kebijakan peraturan dan perundang-undangan.

The Company has always maintaining an interesting and competitive remuneration package to make our workers loyal. The remuneration package has always been reviewed, regularly each year, in regard to the industry dynamic and economic factors such as inflation and legislation policy.

Pemberian Bonus bagi Pekerja

Rukindo memiliki kebijakan khusus untuk memberikan penghargaan kepada pekerja yang telah memberikan kinerja membanggakan untuk kemajuan bisnis Perusahaan secara keseluruhan. Kontribusi dan loyalitas pekerja tidak luput dari perhatian Perusahaan dan kinerja membanggakan tersebut dapat menjadi faktor penting untuk memotivasi Insan Rukindo lainnya untuk senantiasa menunjukkan kinerja maksimal.

Perusahaan memberikan bonus bagi pekerja dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/10/3/DIRUT-2018 tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Pekerja.

Pemberian bonus kepada pekerja dilakukan dengan berdasarkan kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Bonus diberikan atas kinerja yang bersangkutan pada tahun berjalan;
2. Bonus diberikan dalam hal Perusahaan mendapatkan laba;
3. Bonus diberikan dengan menggunakan perhitungan realisasi EBITDA Perusahaan;
4. Pemberian bonus berlaku untuk Pekerja Darat, Awak Kapal.

Pelayanan Kesehatan

Perusahaan senantiasa menjaga para pekerjanya untuk tetap berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan maksimal, mencapai target yang telah ditetapkan. Rukindo sangat memahami korelasi antara pekerja yang sehat dan peningkatan produktivitas usaha untuk kemajuan bisnis. Hal ini sangat penting, terutama mengingat jenis usaha Rukindo di bidang industri pengerukan dan galangan kapal yang memiliki risiko bawaan terkait pekerjaan lapangan.

Rukindo memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya melalui pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan, pengobatan, maupun pengembalian kesehatan seperti semula. Komitmen ini diberikan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 3/1/8/DIRUT-2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bagi Direksi, Komisaris Independen, Pekerja Dan Pensiunan Pegawai.

Bonus for Workers

Rukindo has a special policy to reward our workers who have done a great job in supporting our overall business performance. Their contribution and loyalty do not escape our attention and those proud achievement could be an important factor to motivate other Personnel of Rukindo to always showing maximum effort.

The Company gave a bonus for workers as regulated in the Decree of Board of Directors Number: 15/10/3/DIRUT-2018 regarding Determination and Procedures to Reward the Workers with Bonuses.

The bonus is given based on the following provisions:

1. Bonus is given based on the worker's performance in the current year;
2. Bonus is given when the Company obtained profit;
3. Bonus is given by using the calculation of EBITDA realization;
4. Bonus is applicable for both Land Worker and Crews.

Healthcare Facilities

The Company has always keeping its workers to remain healthy, both physically and spiritually, to be able to perform their best, and reach the targets. Rukindo really understands the correlation of a healthy worker with improvement of business productivity for performance growth. This is important considering the type of business of Rukindo in dredging and shipyard that have their own inherent risks on field work.

Rukindo has healthcare insurance for workers and their families through healthcare facilities that have the objective to prevent, cure and recuperate condition back to the primary condition. This commitment is given based on the Decree of Board of Directors Number: 3/1/8/DIRUT-2018 on January 3, 2018, regarding Healthcare Services for Board of Directors, Independent Commissioner, Workers and Retirees.

Fasilitas Penunjang Kesehatan

Perusahaan memiliki berbagai fasilitas penunjang kesehatan jasmani dan rohani para pekerja yang telah dipersiapkan di lingkungan kerja Rukindo. Perusahaan tidak ragu untuk melakukan investasi dalam memberikan sarana penunjang. Pemberian fasilitas ini tidak hanya dalam rangka untuk memaksimalkan produktivitas usaha semata, namun Rukindo ingin memberikan perhatian mendalam kepada para pekerjanya agar selalu merasa nyaman dan terlindungi ketika bekerja dan beraktivitas di lingkungan kerja Rukindo, baik di kantor ataupun di lapangan. Fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan Perusahaan untuk para pekerjanya mencakup:

1. P3K di Kantor Pusat maupun di Galangan.
2. Kegiatan olahraga 1 (satu) kali setiap satu bulan.
3. Disediakan tempat sholat di dalam kantor dan adanya Masjid di luar gedung kantor.
4. Tersedianya fasilitas asuransi selain BPJS yang dapat digunakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh pekerja.

Asuransi Kesehatan

Mengingat bidang industri Rukindo di bidang kepelabuhan dengan fokus aktivitas utama di lapangan, Perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan fasilitas asuransi kesehatan. Hal ini penting untuk menegaskan komitmen Rukindo dalam memberikan rasa aman bagi para pekerjanya untuk bekerja tanpa khawatir dan selalu merasa terlindungi. Rukindo memiliki berbagai kebijakan dan standar kerja serta pedoman untuk menjaga keamanan di lingkungan kerja. Perangkat kebijakan keamanan tersebut juga didukung oleh perangkat fasilitas lainnya sebagai sebuah inisiatif yang bersifat pengobatan kembali manakala terjadi kecelakaan kerja ataupun pekerja terkena kondisi sakit ketika berada di lingkungan kerja, melakukan dinas di luar tempat kerja, ataupun di tempat lainnya. Dengan mempertimbangkan segala faktor risiko, Perusahaan telah mempersiapkan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang berlaku sebagai berikut:

Keterangan Description	Pekerja IPC IPC Workers	Organik (Pekerja Rukindo) Organic (Rukindo Workers)	Non Organik (PKWT Rukindo) Non Organic (PKWT Rukindo)
Asuransi Kesehatan Dasar Basic Healthcare Insurance	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Asuransi Kesehatan Kecelakaan Kerja Healthcare Insurance for Work Accident	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes
Asuransi Kesehatan BRI Life Healthcare Insurance of BRI Life	Ya/Yes	Ya/Yes	Ya/Yes

Healthcare Supporting Facilities

The Company owns several facilities at our working environment to support the physical and mental condition of our workers. The Company did not hesitate when making an investment on the supporting facilities. The facilities were intended not only to maximize their productivities as Rukindo sincerely paying attention to workers for them to feel comfortable and protected while working and conducting activities within Rukindo, at the office or on the field. The facilities are as follows:

1. First Aid Kit (P3K) at the Head Office or Shipyard.
2. Sport activity once every month.
3. Praying room inside the office and a Mosque outside of office building.
4. Insurance facility other than Social Security (PBJS) that can be used anytime when needed by worker.

Health Insurance

Considering that Rukindo is on shipping industry with the primary focus of activities on the field, the Company pays special attention on the availability of healthcare insurance facility. This is important to assure our commitment in providing sense of safety to our workers to work without having to worry and always feel protected. Rukindo has several policies and working standard as well as guideline to keep the working environment safety. The safety policies are also supported with other facilities as an initiative in terms of recuperation whenever an accident occur or even if worker suffered illness when working at our working environment, going on official working trip, or at any other places. Considering all risks, the Company has prepared the insurance for healthcare and work accident as follows:

Komitmen Khusus Terkait BPJS Kesehatan

Perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap komitmennya untuk mengikutsertakan para pekerja dan keluarga mereka dalam fasilitas jaminan kesehatan yang disediakan oleh Negara. Sebagai perusahaan yang senantiasa memperhatikan dan mengikuti kebijakan regulasi dan peraturan perundangan-undangan, Rukindo memfasilitasi para pekerja dan keluarganya dengan mengikutsertakan mereka dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. Status keikutsertaan pekerja Rukindo per 31 Desember 2019 adalah 100% telah diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan untuk semua status pekerja, baik Pekerja IPC, Organik (Pekerja Rukindo), dan Non Organik (PKWT Rukindo).

Penilaian Kinerja SDM

Dalam rangka peningkatan kinerja (performansi) Perusahaan, maka dibentuklah pembinaan terhadap kinerja pekerja. Perusahaan telah menetapkan dan memberikan penghasilan kepada pekerja berupa Insentif Performansi yang berdasarkan kepada prinsip "*Pay for Performance*".

Rukindo telah menerapkan sistem manajemen kinerja sebagai upaya mengelola pencapaian kinerja pekerja secara objektif. Penilaian kinerja pekerja Rukindo menggunakan indikator yang dimuat dalam Kebijakan Penilaian Performansi Bulanan (P2B) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: KD.067/KP.035/VI/DIRUT-2017.

Special Commitment regarding BPJS Healthcare

The Company also pays special attention to its commitment to list the workers and their families in a healthcare insurance program that the Country provides. As a company that has always been following the regulations and legislations, Rukindo facilitates the workers and their families to participate Social Security Program of BPJS Healthcare. The participation rate of our workers on BPJS Healthcare as of December 31, 2019, was 100% and all our workers including IPC Workers, Organic (Rukindo Workers) and Non-Organic (Rukindo PWKT) have all participated.

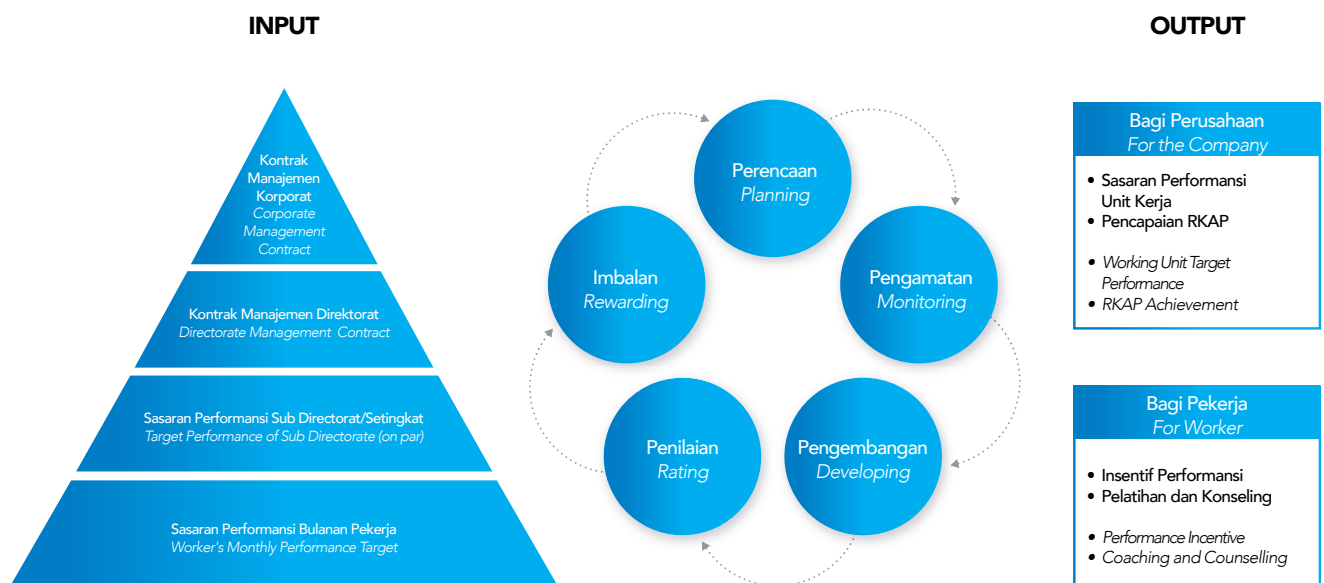
HR Performance Assessment

In improving the Company's performance, the development on worker's performance was also established. The Company has determined and facilitated the worker with a Performance Incentive that is based on "*Pay for Performance*" principle.

Rukindo has implemented the performance management system as an effort in managing the worker's performance objectively. The assessment of Rukindo workers are using the indicators that have been set on the Monthly Performance Assessment (P2B) based on the Decree of Board of Directors Number: KD.067/KP035/VI/DIRUT-2017.

Siklus Penilaian Performansi

Performance Assessment Cycle



Penilai (atasan langsung) dan pekerja (obyek penilaian) perlu bersikap aktif untuk menjamin pelaksanaan siklus penilaian performansi berjalan efektif. Penilaian performansi dinilai secara bulanan dan tahunan. Setiap pekerja memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan laporan performansi yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama-sama dengan atasan langsung. Unit pengelola sumber daya manusia (kepegawaian) berkewajiban mengevaluasi kelengkapan pengisian formulir performansi. Formulir ini kemudian diperlakukan sebagai data valid pada sistem informasi manajemen performansi.

Hasil dari penilaian performansi ini memiliki 2 (dua) dampak langsung yaitu bagi Perusahaan dan pekerja sendiri. Dampak langsung bagi Perusahaan mencakup sasaran performansi unit kerja yang kemudian akan berdampak positif terhadap pencapaian target RKAP di tahun berjalan. Sedangkan dampak langsung yang dirasakan oleh pekerja adalah insentif performansi yang mempengaruhi imbalan remunerasi serta pelatihan dan konseling.

Pada tahun 2019, Rukindo telah melaksanakan penilaian performansi kepada seluruh Insan Rukindo mengenai pekerjaan mereka.

The assessor (direct supervisor) and worker (assessment object) need to be active to assure that the performance assessment cycle can work effectively. Performance assessment is conducted monthly and annually. Every worker is obligated to fill and submit the agreed performance report to the direct supervisor. The human resources management unit (employment) is obligated to evaluate the completeness of the performance form. The form is then treated as the valid data on the performance management information system.

The performance assessment result has 2 (two) direct impacts for the Company and the worker. The direct impact for the Company is the performance of working unit, which will then have a positive impact on the achievement of RKAP in the current year. The direct impact for worker is the performance incentive, which will then affect the remuneration as well as training and counselling.

In 2019, Rukindo has conducted the performance assessment on all Personnel of Rukindo regarding their work.

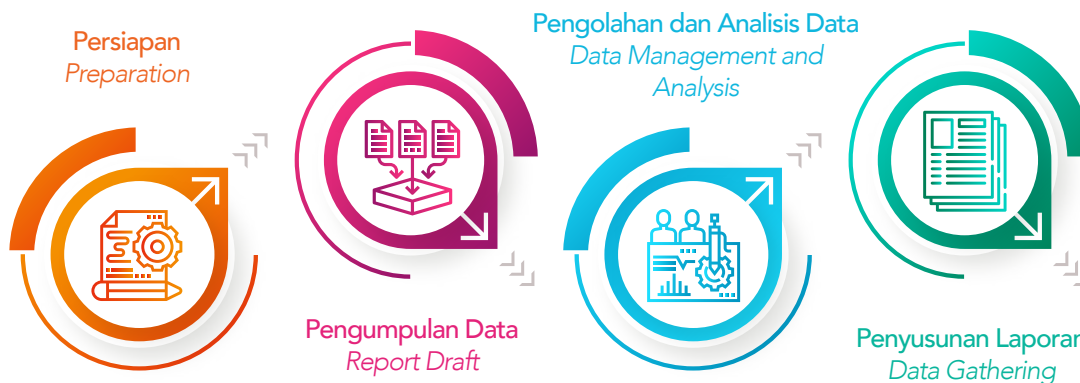
Tingkat Kepuasan Pegawai

Perusahaan juga telah mengadakan survei internal untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai dalam program "Survei Kepuasan Pekerja". Survei ini merupakan sebuah upaya Perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan para pekerja terhadap pekerjaannya. Pekerja yang puas niscaya akan meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas dan pelayanan Perusahaan.

Proses Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan pada 1 Oktober 2019 terhadap 124 orang pekerja yang merupakan pekerja struktural dan non struktural serta pekerja di kapal (kru). Proses survei selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020.

Tahapan Kegiatan Survei



Penyimpulan hasil survei disajikan dengan menggunakan skala *Likert* dengan skala penilaian untuk rata-rata harapan dan kenyataan (yang dirasakan responden) antara 1 sampai dengan 5. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode IPA (*Importance and Performance Analysis*) untuk menentukan sejauh mana perbedaan antara harapan dan kenyataan. Semakin besar gap antara harapan dengan kenyataan, semakin tinggi perhatian analisisnya. Tahap selanjutnya merupakan pembuatan *Scattergraph* berdasarkan data harapan dan kenyataan untuk menentukan prioritas penanganan gap/perbedaan. Berdasarkan *Scattergraph*, indeks kepuasan dibagi dalam 4 (empat) kuadran.

Employee Satisfaction Level

The Company has also conducted an internal survey of "Worker Satisfaction Survey" to measure the satisfaction level of our workers. This survey is part of our effort to measure the satisfaction level of our worker toward their works. A satisfied worker will undoubtedly increase productivity, responsibility as well as Company's quality and services.

Survey Implementation Process

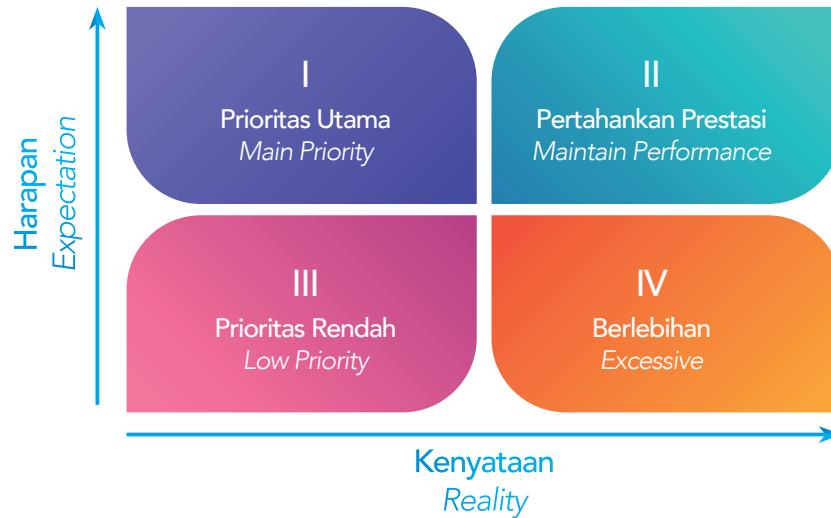
The survei was conducted on October 1, 2019 on 124 workers that are part of structural and non-structural workers as well as shipping crew. The survei was finished by January 20, 2020.

Survey Stages

The survey result was concluded using *Likert* scale with the average scale of expectation and reality (that the respondent felt) valued between 1 to 5. The data is then analyzed using IPA method (*Importance and Performance Analysis*) to determine the gap between expectation and reality. The bigger the gap between expectation and reality, the higher the concern for analysis. Next is *Scattergraph* that is built based on the data of expectation and reality to determine the priority of handling the gap/difference. Based on the *Scattergraph*, the satisfaction index is divided into 4 (four) quadrants.

Indeks Kepuasan

Satisfaction Index



Hasil Survei

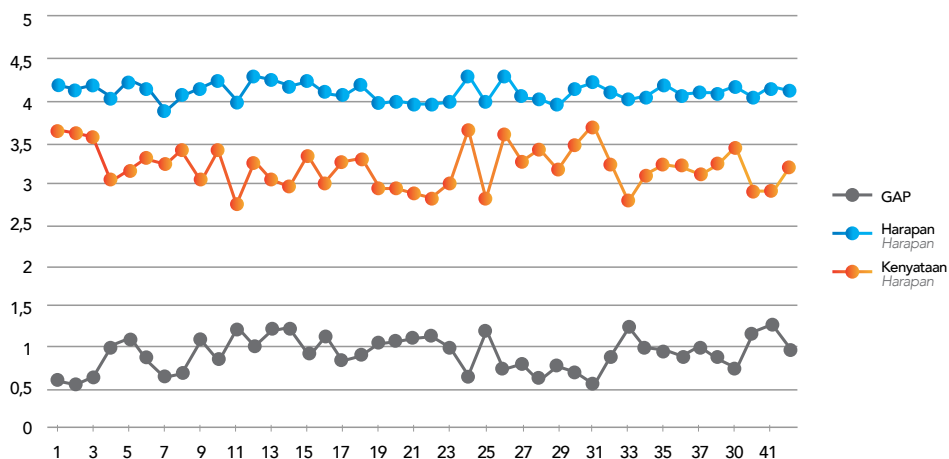
Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kepuasan pekerja (*Employee Satisfaction Index*) adalah sebesar 3,20 dari skala 5,00 indeks. Nilai ini termasuk dalam kategori “Cukup Puas”. Nilai tertinggi untuk kepuasan pekerja secara umum adalah pada pernyataan “Pengetahuan dan keahlian saya telah sesuai untuk menjalankan tugas” dengan indeks kepuasan 3,67. Sedangkan nilai terendah ada pada pernyataan “Penghasilan yang saya terima telah sepadan dengan beban kerja saya” dengan indeks kepuasan 2,75.

Survey Result

Based on the survey result, the Employee Satisfaction Index was 3.20 out of 5.00. The result falls in the “Somewhat Satisfied”. The highest value for the general satisfaction goes to “My knowledge and skills are adequate to do my job” with a satisfaction index of 3.67. While the lowest value goes to “My income is worth with my job” with a satisfaction index of 2.75.

Diagram Gap Hasil Survei Pekerja

Worker Survey Result Gap Diagram



Berdasarkan diagram gap di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

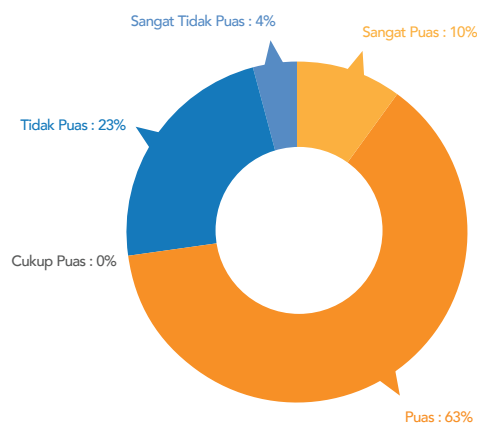
1. Harapan tertinggi terdapat pada pernyataan "Rekan kerja saya mampu untuk bekerjasama dalam tim kerja baik" dengan indeks harapan 4,31.
2. Harapan terendah terdapat pada pernyataan "Perusahaan memberdayakan prakarsa individu untuk penyelesaian pekerjaan" dengan indeks harapan 3,88.
3. Kepuasan/kenyataan tertinggi terdapat pada pernyataan "Pengetahuan dan keahlian saya telah sesuai untuk menjalankan tugas" dengan indeks kepuasan 3,67.
4. Kepuasan/kenyataan terendah terdapat pada pernyataan "Penghasilan yang saya terima telah sepadan dengan beban kerja saya" dengan indeks kepuasan 2,75.
5. Gap tertinggi terdapat pada pernyataan yaitu "Terdapat media komunikasi yang efektif antara manajemen dengan pekerja" dengan indeks gap 1,26.

Selain itu, Perusahaan juga mengukur tingkat kepuasan pekerja melalui survei jawaban pertanyaan terbuka. Salah satu pertanyaan penting yang dalam survei tersebut adalah "Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan kerja anda sebagai pekerja PT Pengerukan Indonesia?". Mayoritas pekerja (63%) menyatakan puas bekerja di Rukindo.

The gap diagram above can be explained into the following:

1. The highest expectation is on "My partner is able to cooperate well in a team" with expectation index of 4.31.
2. The lowest expectation is on "The Company utilizes individual achievement to finish the job" with expectation index of 3.88.
3. The highest satisfaction/expectation is on "My knowledge and skills are adequate to do my job" with satisfaction index of 3.67.
4. The lowest satisfaction/expectation is on My income is worth with my job" with a satisfaction index of 2.75.
5. The highest gap is on "There is an effective communication channel between management and worker" with gap index of 1.26.

In addition, the Company has also measured the satisfaction level of workers through open question. One of the important questions in the survey is "In overall, how much do you rate your satisfaction level in working at PT Pengerukan Indonesia?". Most workers (63%) said that they feel satisfied working at Rukindo.



Kesimpulan

Secara keseluruhan, level komitmen dan kepuasan masih berada pada angka yang baik (di atas 3,00). Hasil ini mengindikasikan bahwa perbaikan dan *sense of urgency* organisasi dalam memperbaiki pengelolaan SDM masih tergolong sedang. Seiring dengan peningkatan usaha dan kegiatan kerja Perusahaan, Rukindo akan senantiasa fokus untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia.

Kebijakan Pengembangan Karir

Perusahaan memiliki ketentuan perencanaan suksesi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi Manajemen Perusahaan. Kebijakan ini ditetapkan sebagai bagian untuk memastikan keberlanjutan usaha Perusahaan melalui ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas dengan penempatan dan pengembangan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Kebijakan dalam memastikan keberlanjutan usaha ditentukan salah satunya melalui pengembangan karir pekerja. Rukindo menetapkan pengembangan karir melalui sistem manajemen SDM berbasis kompetensi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di masing-masing posisi dalam struktur organisasi untuk setiap Subdit yang ada.

Rukindo mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program kaderisasi tanpa membedakan jenis kelamin ataupun latar belakang lain seperti suku, agama, dan antar golongan. Perusahaan senantiasa memastikan pelaksanaan kaderisasi dan pengembangan karir berjalan tepat dan sesuai sasaran untuk para pekerja yang kompeten.

Conclusion

In overall, the commitment and satisfaction level are still on a good scale (above 3.00). This result indicates that the improvement and sense of urgency for the organization on its HR management is still considered at a medium level. Align with the business development and Company's working performance, Rukindo will always be focusing to enhance and reinforce the human resources management.

Career Development Policy

The Company has a succession planning program that is an inseparable part of the Company's Management function. This policy is stipulated as part of our effort in ensuring the continuity of the Company's business through the availability of competent and qualified human resources by placing and developing workers in accordance with the Company's needs.

One of the policies in ensuring business continuity is through the development of workers' careers. Rukindo determines career development through a competency-based HR management system in accordance with the conditions set in each position in the organizational structure for each Sub-Directorate.

All of Rukindo's workers are participating in the career regeneration program without any differences on their gender or other backgrounds such as ethnic, religion and class. The Company has always ensured that the career regeneration and development are conducted properly and targeted the right person.

Pengelolaan Karir

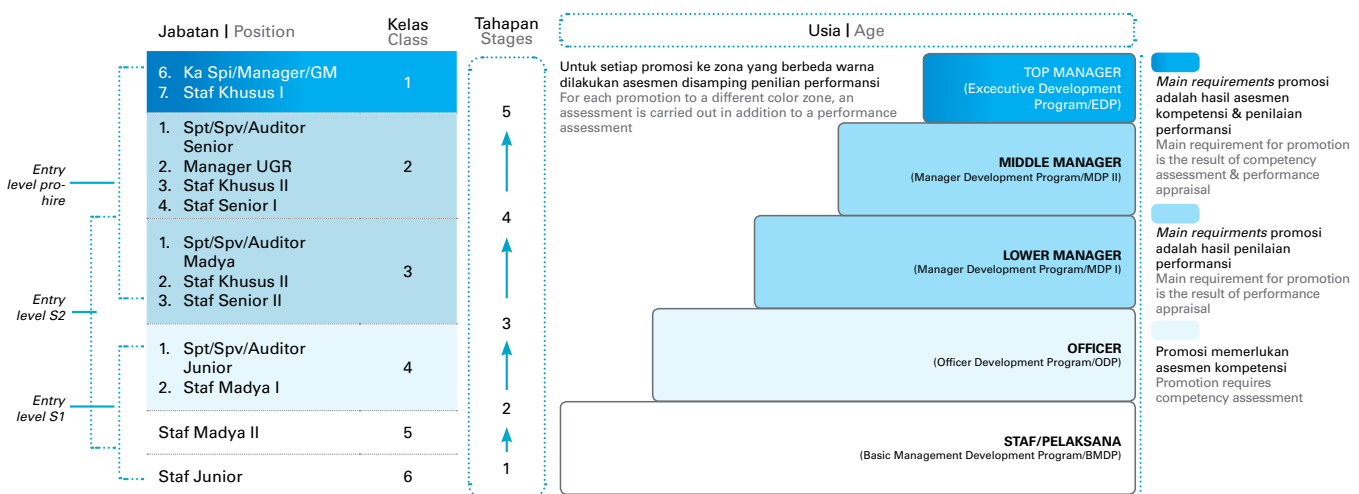
Berikut disampaikan peta pengembangan pengelolaan karir yang berlaku di Rukindo.

Career Path Zona 1 (Klaster Staf/Pelaksana)

Career Management

The applicable career development at Rukindo is outlined in the following chart.

Zone 1 Career Path (Cluster Staff/Operator)



Para pekerja dapat meningkatkan karir mereka berdasarkan 6 (enam) kelas jabatan seperti yang disajikan di bawah, mulai dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah.

1. Kelas 1: Ka SPI/Manager/GM; Staf Khusus I
2. Kelas 2: Spt/Spv/Auditor Senior; Manager UGR; Staf Khusus II; Staf Senior I
3. Kelas 3: Spt/Spv/Auditor Madya; Staf Khusus II; Staf Senior II
4. Kelas 4: Spt/Spv/Auditor Junior; Staf Madya I
5. Kelas 5: Staf Madya II
6. Kelas 6: Staf Junior

Usia termuda untuk menduduki jabatan kelas 1 (Staf Junior) di Perusahaan adalah 22 tahun. Usia tertua untuk menduduki jabatan kelas 1 (Top Manager) di Perusahaan adalah maksimal 56 tahun. Perusahaan menetapkan usia pensiun di atas 56 tahun.

Pekerja baru yang telah direkrut dapat memasuki kelas-kelas tertentu (entry level) jika memenuhi kriteria pendidikan dan pengalaman kerja minimum.

Our workers can advance their career into 6 (six) classes below, as outlined from the highest to the lowest position.

1. Class 1: Head of SPI/Manager/GM; Special Staff I
2. Class 2: Spt/Spv/Senior Auditor; Manager UGR; Special Staff II; Senior Staff I
3. Class 3: Spt/Spv/Middle Auditor; Special Staff II; Senior Staff II
4. Class 4: Spt/Spv/ Junior Auditor; Middle Staff I
5. Class 5: Middle Staff II
6. Class 6: Junior Staff

The youngest age to be at class 1 (Junior Staff) at the Company is 22 years old. The oldest allowed to be at class (Top Manager) at the Company is 56 years old at most. The Company has determined that the age for a worker to retire is beyond 56 years old.

The new recruitment can enter certain entry levels if suitable with the minimum requirements of educational and experience levels.

Secara garis besar, kenaikan kelas pekerja ditetapkan berdasarkan penilaian performansi. Akan tetapi, ada beberapa kelas yang membutuhkan asesmen khusus sebagai persyaratan kenaikan jabatan. Sebagai contoh, peningkatan kelas pekerja dari kelas 4 (empat) ke kelas 5 (lima) membutuhkan asesmen khusus karena telah memasuki zona *pre-leader*.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan asesmen terhadap 5 (lima) orang pekerja dari status jabatan PKWT ke PKWTT.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerjanya merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan pekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitas pekerja dan pengembangan usaha. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan kembali pada pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility*.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial terbentuk antara para pelaku usaha dan pekerjanya untuk menciptakan hubungan yang harmonis, kondusif dan berkeadilan di lingkungan kerja suatu perusahaan. Rukindo mengakui dan mendukung kebebasan bagi para pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai bentuk-bentuk hubungan industrial dan salah satunya melalui pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

In general, workers can increase their class based on their performance evaluation. However, there are certain class that require special assessment for promotion. For example, workers need a special assessment to be promoted from class 4 (four) to class 5 (five) as they are entering the *pre-leader* zone.

In 2019, the Company has assessed 5 (five) workers who were promoted from PKWT to PKWTT.

Health and Safety Environment (HSE)

The Company sees that health and safety environment for workers is important and is also influential for the continuance of the Company's operational activities. Workers' health and safety rate has a significant impact on their performance and productivities as well as business development. Further explanation regarding HSE is available on *Corporate Social Responsibility*.

Industrial Relations

Industrial relationship is formed between employer and its workers to create a harmonious, conducive and just relations in working environment of a company. Rukindo admitted and also supported the freedom of workers to join the union. Law Number 13 in 2003 regarding Employment has regulated the form of industrial relations and one of them is through the creation of Bipartite Cooperation Institution and consultation regarding issues related to industrial relations in a company, which its members consist of the employer and a union registered in a responsible institution of employment or labor element.

Perusahaan ataupun para pekerja Perusahaan belum memandang perlu untuk dibentuknya sebuah serikat pekerja. Walaupun demikian, Perusahaan menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional, terdaftar dan diakui secara hukum oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perusahaan meyakini bahwa hal ini dapat mendukung upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan semua pihak. Selain itu, sebagai catatan, pada tahun 2019 tidak terdapat adanya pemogokan kerja oleh pekerja dan insiden lain yang disebabkan yang berkaitan dengan diskriminasi yang dapat mempengaruhi proses operasional Perusahaan secara signifikan.

Kebijakan Pensiun

Kebijakan pensiun Perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengikat Perseroan Terbatas. Perusahaan menetapkan bahwa usia pensiun bagi pekerja adalah di atas 56 tahun. Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja melalui BRI Life.

Perusahaan juga mengimplementasikan kebijakan jaminan pensiun yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui keikutsertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Sehat Indonesia (JKN-KIS) atau Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan tingkat pendaftaran 100% untuk pekerja beserta anggota keluarganya.

The Company or its workers have not regarded that it is necessary to form a union. Even so, the Company ensures the freedom of workers to join a professionally managed union which listed and approved legally by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The Company believes that this is relatable to its effort in creating a harmonious and profitable relations with all parties. In addition, for the record, there was no incidents of strike or others from workers, which caused by an act of discrimination, that could affected the Company's operational process significantly.

Pension Policy

The Company's pension policy was made to be in accordance with the rules and regulations that bind a Limited Liability Company. The Company has determined that the age for workers to retire is above 56 years old. The Company has a BRI Life healthcare insurance for workers.

The Company has also implemented the pension policy that the Indonesian Government has determined by participating at National Healthcare Insurance Program – Indonesia Healthy Card (JKN-KIS) or National Social Security System (SJSN) through BPJS Employment with registration rate of 100% for all workers along with their families.



Rencana Pengelolaan SDM Tahun 2020

Program kerja SDM tahun 2020 ditetapkan dengan berdasarkan arah dan strategi Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2019-2023. Rencana ini juga mengikuti *Roadmap* SDM yang telah tersusun. Rencana pengelolaan SDM tahun 2020 meliputi:

1. Membangun mekanisme pelatihan *human capital* berkelas dunia.
2. Mengidentifikasi program pembelajaran untuk standarisasi dan peningkatan kapabilitas seluruh organisasi untuk menjadi perusahaan berkelas dunia.
3. Mempersiapkan program pertukaran pekerja untuk meningkatkan kompetensi sebagai perusahaan berkelas dunia.
4. Merancang *Shared Service Center* untuk memperbaiki efisiensi proses.

HR Development Planning in 2020

The HR working program in 2020 is determined based on the Company's direction and strategy outlined at the Long-Term Working Plan of 2019-2023. This plan also follows the HR Roadmap. The HR development planning in 2020 is as follows:

1. Create a global human capital training mechanism.
2. Identify learning program for standardization and improvement of the capabilities of the entire organization to become a world-class company.
3. Prepare the worker exchange program to increase the competency as a world-class company.
4. Create a Shared Service Center to improve the process efficiency.

Teknologi Informasi

Information Technology



Perusahaan menyadari arti penting pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi untuk membantu perkembangan usaha. Kemajuan TI dipercaya dapat membantu Perusahaan dalam memastikan terciptanya proses bisnis yang efisien, efektif, dan berdaya saing tinggi. Rukindo, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengerukan, memandang sangat perlu untuk mengoptimalkan pengembangan Teknologi Informasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam mewujudkan diri sebagai pemimpin pasar pengerukan di Indonesia.

Indonesia saat ini tengah memasuki era digital yang semakin canggih dengan perkembangan Industri 4.0 serta era IoT (*Internet of Things*) yang juga turut mempengaruhi Perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Proses bisnis melalui akses informasi dan data melalui sistem yang terpercaya dan dapat selalu diandalkan, untuk semua pekerja dan pemangku kepentingan, menjadi sebuah keharusan yang akan meningkatkan nilai usaha Rukindo.

The company realizes the importance of developing an integrated Information Technology (IT) to help business development. IT development can help the Company in ensuring the creation of an efficient, effective and highly competitive business processes. Rukindo, as a company in the dredging business, believed that it very necessary to optimize the Information Technology development in a sustainable manner to proclaim itself as the leader of the dredging market in Indonesia.

Indonesia is entering an increasingly sophisticated digital era with the development of Industry 4.0 and the era of IoT (Internet of Things), which also influenced the Company to adapt to these changes. Business process through access to information and data through a trusted system that can always be relied on, for all workers and stakeholders, is a necessity that will increase the business value of Rukindo.

Pengelolaan teknologi informasi di Rukindo dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat Perusahaan dan Hukum yang dibantu oleh staf Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.26/4/1/DIRUT-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Struktur Organisasi.

Master Plan Pengembangan TI

Pemanfaatan TI digunakan untuk mendukung kinerja usaha dan proses bisnis sehari-hari. Investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pengembangan TI disesuaikan dengan fokus bisnis dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses implementasi atau adaptasi sistem TI yang baru telah disesuaikan dan ditetapkan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika usaha.

Rukindo telah memiliki kebijakan pengelolaan TI yaitu Surat Keputusan Direksi No.22/12//35/DIRUT-2017 tentang Penetapan Master Plan Teknologi Informasi tanggal 22 Desember 2017 dan Keputusan Direksi No.KD.25/1/10/DIRUT-2018 tentang Layanan Teknologi Informasi sebagai panduan dalam pengelolaan TI di Perusahaan. Kebijakan tersebut disusun dan dievaluasi selaras dengan RJPP dan RKAP.

Rukindo telah memiliki *Master Plan* Teknologi Informasi sebagai arah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi. Berikut tahapan penerapan *Master Plan* Teknologi Informasi Rukindo.

The management of information technology at Rukindo is implemented under the coordination of Corporate Secretary and Legal, assisted by Information Technology staff, as regulated in the Decree of Board of Directors No.26/4/1/DIRUT-2018 on April 26, 2018 regarding the Organization Structure.

Master Plan of IT Development

IT is used to support business performance and daily business processes. The investment on IT development is adjusted to the business focus and work plan that has been prepared. The process of implementing or adapting a new IT system has been adjusted and prepared in regard to the Company's Long-Term Plan and will be reviewed periodically in accordance with business dynamics.

Rukindo own a management policy on IT through the Decree of Board of Directors No.22/12//35/DIRUT-2017 the Master Plan of Information Technology on December 22, 2017 and the Decree of Board of Directors No.KD.25/1/10/DIRUT-2018 regarding the Information Technology Services as a guideline of IT management at the Company.

Rukindo has an Information Technology Master Plan as a direction of information technology management. The implementation of Information Technology Master Plan at Rukindo is outlined below.

1

- Pembenahan Infrastruktur melalui analisa kebutuhan, *heatmap*, audit (*peripherals, PC, network*)
- *Data Storage & Data Central* dengan pengadaan perangkat server, serta instalasi OS dan konfigurasi server, yang mendukung proses sentralisasi data
- *Networking* dengan pengadaan perangkat jaringan yang menghubungkan seluruh pengguna berikut peralatan pendukungnya.
- *Infrastructure Improvement through needs analysis, heatmap, audit (peripherals, PC, network)*
- *Data Storage & Data Central through the provision of server equipment, installation of OS and server configuration, which supported the data centralization process*
- *Networking through the procurement of network devices that connect all users and their supporting equipment.*

2

- *Data Processing*, pengolahan dan pengelolaan data dengan mengacu kepada kebutuhan Organisasi/Perusahaan.
- *Need Analysis*, menggali kebutuhan Organisasi/Perusahaan atas kebutuhan aplikasi berbasis data.
- *Application Development*, pengembangan aplikasi yang bersifat *high priority* yang berimplikasi langsung pada operasional Organisasi/Perusahaan.
- *Data Evaluation*, evaluasi atas pertumbuhan data dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang memiliki implikasi langsung terhadap penggunaan perangkat (*storage & peripherals*).
- *IT Governance & IT Security*, manajemen TI dan Keamanan data serta upaya *preventive* dalam mengatasi ancaman dari luar.
- *Data Processing, data processing and management that refer to the needs of the Organization/Company.*
- *Need Analysis, exploring the needs of Organization/Company for data-based applications.*
- *Application Development, the development of high priority applications that has direct implications on the operations of the Organization/Company.*
- *Data Evaluation, an evaluation of data growth and other needs that have direct implications for the use of devices (storage & peripherals).*
- *IT Governance & IT Security, IT management and data security as well as preventive efforts in overcoming external threats.*

3

- *Review*, melakukan peninjauan ulang atas upaya yang sudah dilakukan.
- *Re Plan*, perencanaan ulang atas hasil yang dsudah dicapai dengan mengacu kepada kebutuhan dan arah kebijaksanaan Organisasi/Perusahaan.
- *Review, reviewing the conducted activities.*
- *Re Plan, re-planning the achievement by referring to the needs and direction of the Organization/Company policy.*

Pengembangan TI

Pengembangan infrastruktur TI di Rukindo difokuskan kepada pengembangan infrastruktur jaringan dalam 3 (tiga) hal utama yaitu:

1. Penambahan *Bandwidth* ISP dan *Backup*
2. Perancangan *Data Center*
3. Perancangan Sistem *Monitoring* Operasional Kapal

IT Development

The development of IT infrastructure at Rukindo is focused on network infrastructure in 3 (three) main areas, namely:

1. Additional ISP and Backup Bandwidth
2. Data Center Design
3. Design of Vessel Operational Monitoring System

Mengingat cakupan pengembangan TI yang cukup besar pada 3 (tiga) hal disebutkan sebelumnya, Perusahaan menetapkan bahwa pengembangan akan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahun 2020-2014. Tahun 2019 menjadi tahun persiapan awal pengembangan TI dan akan terus dilanjutkan di tahun 2020 hingga ke tahun-tahun berikutnya dengan sejumlah adaptasi yang dirasakan perlu ke depannya.

Penambahan *Bandwidth* ISP dan Backup

Penambahan *Bandwidth Internet Service Provider* (ISP) menjadi hal yang penting seiring dengan peningkatan kapasitas bisnis Perusahaan yang mendorong peningkatan penggunaan *software* dan jumlah pekerja pengguna (*user*). Perusahaan memerlukan jaringan dukungan jaringan yang stabil melalui peningkatan *bandwidth* dan *backup fiber optic*.

Perancangan *Data Center*

Pengembangan *data center* diperlukan untuk mendukung penyimpanan *cloud* Perusahaan. Penyimpanan *cloud* diperlukan untuk mendukung aplikasi Perusahaan dalam menggunakan *e-office*, P2B (terkait penilaian kinerja pekerja) dan *monitoring system* operasional Perusahaan.

Perancangan Sistem *Monitoring* Operasional Kapal

Perusahaan memerlukan sistem berbasis elektronik dalam sistem TI untuk bekerja secara global dengan pelayanan 7x24 jam. Sistem yang dikembangkan Perusahaan adalah "Sistem Informasi *Monitoring* Proyek Pengerukan" yang akan *memonitor* beberapa hal sebagai berikut:

1. Waktu efektif pengerukan
2. Ukuran produksi yang tercapai
3. Penggunaan bahan bakar
4. Pengelolaan sumber daya (alat produksi, fasilitas tenaga kerja, dan sebagainya)
5. Beban operasional
6. Hasil survei
7. *Vessel tracking*
8. Pemantauan administrasi proyek

Considering the large scope of IT development on 3 (three) aspects as mentioned before, the Company has planned to conduct a continuous development starting from 2020 to 2014. The initial preparation for IT development starts in 2019, continues to 2020, and ongoing into the following years with several adaptations, if necessary, in the future.

Additional ISP and Backup Bandwidth

Additional Internet Service Provider (ISP) Bandwidth becomes important along with the Company's growing business capacity which encourages the increase of software utilization and the number of users. The Company needs a stable network support through additional bandwidth and optical fiber backups.

Data Center Design

Data center expansion is needed to support the Company's cloud storage. Cloud storage is needed to support the Company's application in using *e-office*, P2B (related to employee performance evaluation) and monitoring of the Company's operational systems.

Design of Vessel Operational Monitoring System

The Company needs the electronic-based systems in its IT system to work globally with 24/7 service. The system that the Company is developing the "Dredging Project Monitoring Information System" to monitor several things as follows:

1. Effective dredging time
2. Production size achievement
3. Use of fuel
4. Management of resources (production equipment, labor facilities, etc.)
5. Operating expenses
6. Survey results
7. *Vessel tracking*
8. Project administration monitoring

Tata Kelola TI

Dalam setiap aktivitas operasionalnya, Perusahaan menyadari pentingnya untuk membangun kerangka TI sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam keseluruhan proses bisnis. Tata kelola TI dibentuk sebagai sebuah pedoman dalam pemanfaatan TI secara terstruktur mencakup keseluruhan proses bisnis. Tata kelola TI yang berlaku di Rukindo lebih ditekankan pada aspek keamanan dan kerahasiaan data Perusahaan untuk menjamin proses bisnis yang bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan. Pedoman tata kelola TI yang berlaku di Perusahaan telah ditetapkan dalam ketentuan IT *Master Plan* Perusahaan 2020-2024 yang telah disahkan oleh Direksi.

Tata Kelola TI yang berlaku mengatur mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penggunaan Internet
2. Kebijakan Keamanan *Password*
3. Kebijakan Standar PC, Desktop dan Laptop
4. Kebijakan Perangkat IT terkait Standarisasi Perangkat Lunak PC, Desktop atau Laptop atau *Handphone*
5. Kebijakan Akses Jaringan
6. Kebijakan Akses USB
7. Kebijakan Penggunaan *E-Mail*

IT Governance

In every operational activity, the Company understood the importance of building its IT framework in the entire business process to be in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). IT governance was formed as a guideline to use IT in a structured manner on all business process. The applicable IT governance at Rukindo is more emphasized on the security and confidentiality aspects of the Company's data to ensure responsible business processes for the interest of the Company. The guideline of IT governance was established in the IT Corporate Plan 2020-2024 that the Board of Directors has approved.

The applicable IT Governance regulates the following matters:

1. Internet Usage Policy
2. Password Security Policy
3. Standard PC, Desktop and Laptop Policies
4. IT Equipment Policy related to Desktop, PC or Laptop or Mobile Software Standardization
5. Network Access Policy
6. USB Access Policy
7. E-Mail Usage Policy





6

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance





“

“Tata Kelola Perusahaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberlanjutan usaha melalui pengelolaan Perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab.”

“Corporate Governance is inseparable to ensure business sustainability through the sound and responsible corporate management.”



Rukindo terus menyempurnakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas usahanya. Penyempurnaan GCG dipercaya dapat memenuhi harapan Pemangku Kepentingan akan produk dan pelayanan usaha yang handal dan terpercaya. Implementasi GCG juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Perusahaan secara efisien, efektif dan ramah terhadap lingkungan. Hasil akhir yang menjadi tujuan Perusahaan adalah perwujudan tingkat kepuasan yang optimal dari pengguna jasa dan masyarakat sehingga dapat menjaga eksistensi Perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

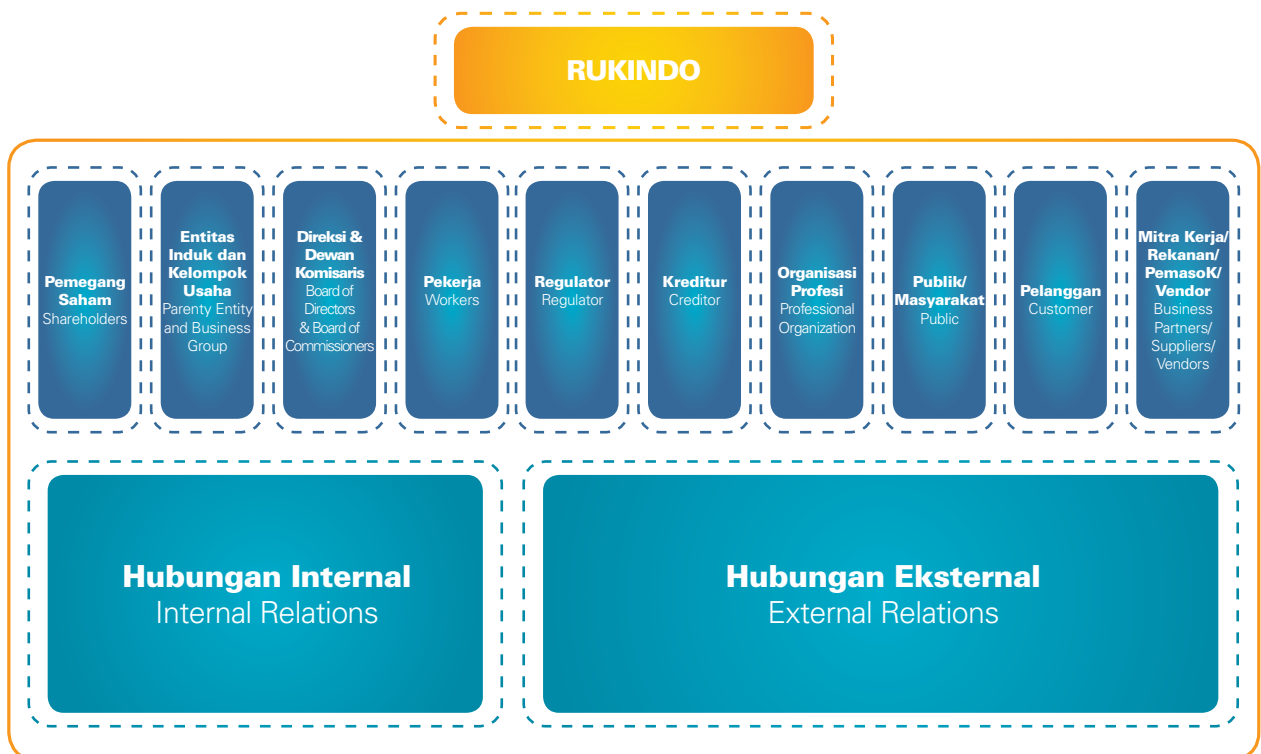
Dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Perusahaan menjadikan GCG sebagai sebuah sarana terstruktur dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan. Hal ini tentunya sangat penting guna memberikan nilai yang maksimal bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang. Implementasi GCG juga menandakan bahwa Perusahaan sangat menjaga kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya. Semua ini diwujudkan agar proses usaha Perusahaan dapat berjalan seirama dan senada dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika Perusahaan.

Rukindo continues to reinforce the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in every activity. Improvement of GCG is vital to meet stakeholder expectations to experience the products and services that are reliable and can be trusted. Quality of services and the Company's performance can also be improved and made to be efficient through an effective and environmentally friendly procedure. The end result, that the Company's tries to achieve, is to deliver an optimal level of satisfaction from the users of our services and the community, and therefore allow us to maintain the Company's growth sustainably.

Based on the explanation, the Company has made its GCG as a structured tool in increasing the success of our business and accountability. This is certainly very important as we are aiming to provide maximum value for Shareholders in the long run. The implementation of GCG also indicates that the Company is tightly guarding the interests of other Stakeholders. All these need to be realized so that the Company's business processes can run in harmony and in line with the laws and regulations and the Company's ethical values.

Hubungan Rukindo dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Rukindo Relations with Shareholders and Stakeholders



Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Legal Basis of Corporate Governance Implementation

Perusahaan memandang perlu untuk mengimplementasikan GCG dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta berupaya mematuhi setiap ketentuan terkait sesuai dengan kondisi Perusahaan. Ketentuan terkait yang menjadi dasar penerapan GCG Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Pengerukan Indonesia.

Berbagai ketentuan tersebut dirangkum ke dalam Pedoman *Good Corporate Governance* yang sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan. Pedoman tersebut menjadi payung kebijakan tata kelola perusahaan bagi setiap peraturan Perusahaan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan unit kerja organisasi dalam Perusahaan. Pedoman *Good Corporate Governance* telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Rukindo.

The Company believes that it is necessary to implement GCG to improve the Company's image and performance, as well as strive to comply with any regulations that are relevant with the Company. The related regulations which are the basis for the implementation of the Company's GCG are as follows:

1. Law No.40 in 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. SOE Minister Regulation No.PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance on State Owned Enterprises;
3. SOE Minister Regulation No.PER-09/MBU/2012 on July 6, 2012 regarding Amendment on SOE Minister Regulation No.PER-01/MBU/2011 August 1, 2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance on State Owned Enterprises;
4. Decree of State Owned Enterprises Ministry Secretary No.SK-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012 regarding Indicator/Assessment Parameter and Evaluation on Implementation of Good Corporate Governance on State Owned Enterprises;
5. Articles of Association of PT Pengerukan Indonesia.

Those regulations are summarized in the Good Corporate Governance Guideline that is in line with Company values. This guideline serves as the umbrella of corporate governance policy that is replicated a more specific application on the Company's regulations as what is needed by each of organizational working unit within the Company. Good Corporate Governance Guideline was established on December 15, 2016 by the Board of Commissioners and Directors of Rukindo.

Prinsip-prinsip GCG serta Komitmen dan Penerapannya

GCG Principles, Commitment, and Implementation

Perusahaan terus berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG secara terus menerus dilakukan Perusahaan, melalui pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman dan prosedur mengenai GCG. Perusahaan juga memperhatikan perkembangan keadaan lingkungan bisnis dan perkembangan usaha serta kinerja Perusahaan. Perusahaan telah mempublikasikan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur GCG di situs *web* resmi Perusahaan yakni www.rukindo.co.id bagi seluruh Insan Rukindo. Publikasi pedoman GCG juga menjadi bentuk komitmen Perusahaan untuk mengedepankan transparansi usaha.

The Company continues to strive on implementing GCG that follows the applicable laws and regulations. Improvement on the quality of GCG implementation continues to be done in accordance with best practices by updating our GCG policies, standards, guidelines, and procedures. The Company also considers the development of our business environment and performance. The Company has published GCG policies, standards, guidelines, and procedures on the Company's official website at www.rukindo.co.id for all Personnel of Rukindo. The publication of GCG guidelines is also a form of our commitment to promote business transparency.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

In applying GCG principles, the Company refers to 5 (five) basic principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, as released in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in decision-making process and transparency in disclosing material and relevant information about the Company.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of functions, implementation, and accountability of organs to ensure effective management of the Company.
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Compliance in the management of the Company with the applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Independensi Independency	Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. A condition where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Fairness and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that are regulated in the agreements and laws and regulations.

Penerapan Prinsip-prinsip GCG di Rukindo Implementation of GCG Principles at Rukindo

Prinsip Principle	Penerapan di Rukindo Implementation at Rukindo	
Keterbukaan Transparency	<p>Ditetapkannya pedoman-pedoman GCG</p> <p>Ditetapkannya prosedur dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan</p> <p>Terdapat beberapa media bagi Pemangku Kepentingan, termasuk lingkungan internal dan eksternal Perusahaan, untuk melakukan melakukan proses <i>monitoring</i> dan <i>controlling</i></p> <p>Perusahaan melakukan pelaporan secara berkala terkait kewajibannya sebagai sebuah entitas usaha kepada lembaga otoritas terkait</p>	<p>Establishment of GCG guidelines</p> <p>Establishment of procedures to improve Company performance</p> <p>Availability of several channels for Stakeholders, from both internal and external environment of the Company, to conduct the monitoring and controlling process</p> <p>Submission of regular reports to relevant authority that are in accordance with the Company's obligation as a business entity</p>
Akuntabilitas Accountability	<p>Terdapat uraian tugas masing-masing Insan Rukindo dan juga Sub Direktorat serta Unit Kerja terkait Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Dewan Komisaris</p> <p>Terdapat <i>Key Performance Indicators (KPI)</i> sebagai sebuah Kontrak Manajemen yang diturunkan (<i>cascading</i>) kepada seluruh Sub Direktorat dan Unit Kerja terkait sebagai panduan performansi</p> <p>Terdapat Pedoman Etika sebagai panduan Insan Rukindo untuk bersikap dalam kegiatan sehari-hari dan juga berhubungan dengan berbagai pihak internal dan eksternal terkait</p> <p>Ditetapkannya Prosedur Standar mengenai Internal Audit melalui fungsi SPI untuk menjamin terselenggaranya mekanisme <i>check and balance</i> dalam penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan</p>	<p>Job descriptions for each Personnel of Rukindo and Sub Directorates and Work Units</p> <p>The Company has a Corporate Work Plan and Budget that has been approved by the GMS/Board of Commissioners</p> <p>Key Performance Indicators (KPI) are available as a Management Contract, adapted as working guideline (<i>cascading</i>) to all Sub-Directorates and relevant Work Units</p> <p>Ethical Guidelines to guide the daily behavioral standard of Personnel of Rukindo and to communicate with various internal and external parties</p> <p>Establishment of Standard Procedures regarding Internal Audit through SPI to ensure the implementation of a check and balance mechanism of the Company's internal control system</p>
Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan untuk memastikan proses bisnis yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian</p> <p>Terdapat aktivitas audit baik secara internal, yang dilakukan oleh fungsi SPI, dan eksternal, yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan lembaga profesional lainnya, untuk menjamin penerapan prinsip usaha yang sehat</p> <p>Ketersediaan program CSR dan pelaksanaannya secara konsisten setiap tahunnya sebagai komitmen Perusahaan yang bertanggung jawab</p>	<p>Risk Management implementation to ensure that the Company has always been prioritizing the principle of prudence</p> <p>Internal and external audit activities by SPI and External Auditor, respectively, are always conducted to ensure the implementation of sound business principles</p> <p>CSR programs are available, and the implementation is conducted consistently every year as our form of commitment as a responsible company</p>
Independensi Independency	<p>Terdapat kebijakan yang mengatur benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)</p> <p>Masing-masing organ Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang menjamin kebebasan untuk bertindak sesuai dengan peran dan hak masing-masing</p> <p>Terdapat perjanjian pedoman dan kerja untuk menjamin masing-masing organ Perusahaan dan Insan Rukindo terbebas dari konflik kepentingan dan dapat menjalankan tugas secara independen</p>	<p>Availability of policies that regulated conflict of interest</p> <p>The set of dplementation of the Ds and responsibilities of each Company's organ is available to guarantee the freedom to act in accordance with its own roles and rights</p> <p>The guideline and work agreement are available to guarantee that each organ of the Company and personnel are free from conflicts of interest and are able to perform out their duties independently</p>
Kewajaran Fairness	<p>Terdapat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh Pemangku Kepentingan</p> <p>Terdapat peraturan dan kebijakan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa dalam proses bisnis</p> <p>Terdapat peraturan yang mengatur hubungan Perusahaan dengan mitra kerja dengan standar perlakuan yang setara tanpa ada perbedaan</p> <p>Terdapat saluran pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)</p>	<p>The regulations governing rights and obligations of all Stakeholders are available</p> <p>The regulations and policies governing the procurement of goods and services are available</p> <p>The regulations governing the Company's relations with partners with equal treatment without any difference are available</p> <p>The violation reporting channel (<i>Whistleblowing System</i>) is available</p>

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation Objectives



Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan adalah untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Memaksimalkan kinerja dan nilai Perusahaan bagi pemegang saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, agar Perusahaan memiliki daya saing tinggi.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola Perusahaan.
3. Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan nilai-nilai bagi Pemangku Kepentingan.
5. Meningkatkan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Good Corporate Governance (GCG) implementation within the Company has the objectives to:

1. Maximizing the Company's performance and value for shareholders through the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness, in order to have high competitiveness for the Company.
2. Encouraging professional, transparent, and efficient Company's management, empowering all functions, and improving the independence of the Company.
3. Encouraging the Company in making decisions and performing actions based on high moral values and compliance with prevailing rules and legislation, as well as awareness of the Company's social responsibilities to the Stakeholders, and preservation of the environment around the Company;
4. Improving Stakeholders value with due regards to other stakeholders.
5. Increasing the Company's competitiveness nationally and internationally so as to increase market confidence, which can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Implementation of Sustainable Governance

Perusahaan, melalui Dewan Komisaris dan Direksi, telah berkomitmen dalam mengimplementasikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu bentuk penerapan tata kelola secara berkelanjutan. *Good Corporate Governance* menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan dan menjalankan usaha, saat mematuhi peraturan perundang-undangan dan saat menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan. Selain itu, Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap rekomendasi penilaian GCG.

Jejak Langkah Penerapan GCG

Berikut ini disampaikan jejak langkah pengembangan penerapan GCG di Rukindo sejak implementasi pada tahun 2015 yang dinilai di tahun 2016.

2016

Penilaian terhadap implementasi GCG di tahun 2015 dilakukan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penilaian, Perusahaan berhasil mendapatkan skor 65,30 dari total skor 100,00. Skor tersebut memiliki predikat "CUKUP BAIK".

2017

Penilaian terhadap implementasi GCG di tahun 2016 dilakukan pada tahun 2017. Perusahaan berhasil meningkatkan skor penerapan GCG dengan mendapatkan skor 75,32 dari total skor 100,00. Skor tersebut memiliki predikat "BAIK".

2018

Perusahaan secara konsisten terus meningkatkan penerapan GCG setiap tahunnya. Berdasarkan penilaian terhadap implementasi GCG di tahun 2017 yang dilakukan pada tahun 2018, Perusahaan berhasil mencapai skor penilaian sebesar 85,94 dari total skor sebesar 100,00. Skor tersebut memiliki predikat "BAIK".

2019

Perusahaan terus meningkatkan penerapan GCG dan tidak pernah berhenti untuk terus menyesuaikan pedoman-pedoman yang dimiliki dengan perkembangan praktik-praktik terbaik sesuai peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian terhadap implementasi GCG di tahun 2018 yang dilakukan pada tahun 2019, Perusahaan berhasil mencapai skor penilaian sebesar 90,55 dari total skor sebesar 100,00. Skor tersebut memiliki predikat "BAIK".

The Company, through the Board of Commissioners and Directors, has made a commitment to implement the Corporate Governance Guidelines to realize its continuous implementation. Good Corporate Governance has become our consideration when making every decision, when performing actions, and when ensuring our compliance with laws and regulations and when conducting corporate social responsibility. In addition, the Company seeks to follow up on every recommendation from our GCG assessment.

GCG Implementation Milestones

The development of our GCG implementation since 2015, which was assessed in 2016, is outlined below.

2016

The GCG implementation in 2015 was assessed in 2016. Based on the assessment, the Company obtained 65.30 out of the total score of 100.00. The predicate of the score is "SOMEWHAT GOOD".

2017

The GCG implementation in 2016 was assessed in 2017. Based on the assessment, the Company obtained 75.32 out of the total score of 100.00. The predicate of the score is "GOOD".

2018

The Company has been consistent in improving its GCG implementation every year. Based on the GCG implementation in 2017, which was assessed in 2018, the Company obtained 85.94 out of the total score of 100.00. The predicate of the score is "GOOD".

2019

The Company has always been improving its GCG implementation and has never been stopping to continue to adjust its guidelines with the best practices and laws and regulations. Based on the GCG implementation in 2018, which was assessed in 2019, the Company obtained 90.55 out of the total score of 100.00. The predicate of the score is "GOOD".

Pengembangan GCG

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa penerapan GCG tetap terarah dan terencana setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta aktivitas bisnis yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi Rukindo dalam mengembangkan GCG. Rukindo menetapkan pengembangan GCG sebagai panduan bagi seluruh Insan Perusahaan untuk bersama-sama menerapkan *best practices* prinsip-prinsip GCG.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan GCG agar sesuai dengan *Roadmap* GCG, Rukindo melakukan *monitoring* dan juga *assessment* secara berkala. Implementasi *assessment* dilakukan berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Penilaian Implementasi GCG

Perusahaan melakukan penilaian (*assessment*) penerapan GCG secara berkala setiap tahun dalam rangka memonitor pemenuhan implementasinya. Penilaian GCG dilakukan dengan metode telaah terhadap dokumen, pengisian kuisioner, wawancara dan observasi.

Penilaian terhadap penerapan GCG pada tahun 2018 telah dinilai pada tahun 2019. Perusahaan menggunakan jasa penilaian dari pihak ketiga yaitu PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *assessment* implementasi *Good Corporate Governance* di Rukindo dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 yang meliputi penilaian terhadap 6 (enam) aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

GCG Development

The Company has always been ensuring that the GCG implementation remains directed and carefully planned every year. Our aim is to create sound business activities and encourage sustainable business growth. This thinking has become the basis for Rukindo in developing its GCG. Rukindo established the GCG development as a guideline for Personnel to join and implement the best practices of GCG principles.

In ensuring the GCG implementation to be in accordance with the GCG Roadmap, Rukindo regularly conducted the monitoring and assessment activities. The assessment is based on the standard instrument that is regulated in the Decree of the Minister of SOEs No. SK-16 / S.MBU/2012 regarding Indicators and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for SOEs.

GCG Implementation Assessment

The Company has always made a regular assessment on its GCG implementation every year to monitor its fulfillment rate. The GCG assessment is done through documents review, questionnaires, interviews, and observations.

The evaluation of the GCG implementation in 2018 was assessed in 2019. The Company relies on the services of an independent assessor, PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group). As explained earlier, the assessment of the Good Corporate Governance in Rukindo implementation was conducted by using the criteria on the standard testing instrument in the Decree of the Minister of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012 which included the assessment of the following 6 (six) key aspects:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Agency;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of Information and Transparency;
6. Other Aspects.

Pencapaian skor *assessment* GCG Perusahaan untuk periode tahun 2018 dan tahun 2017 disampaikan dalam Indikator Penilaian Penerapan dalam tabel berikut ini.

The Company's GCG assessment scores in 2018 and 2017 are presented in the Implementation Assessment Indicators in the following table.

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Value	Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018		Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017	
			Nilai Score	%	Nilai Score	%
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,930	99,003	6,797	97,824
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,538	94,872	8,127	93,269
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	33,373	95,352	24,450	91,895
4.	Direksi Board of Directors	35,00	33,714	96,326	29,174	92,855
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,367	81,850	4,796	67,088
6.	Aspek Lainnya Other aspects	5,00	0,625	12,500	0,000	0,000
	Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	90,548	90,548	85,942	85,942
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Classification			BAIK GOOD		BAIK GOOD

Berdasarkan 6 (enam) aspek pokok penilaian, capaian skor GCG Perusahaan adalah sebesar 90,548, yang kemudian dibulatkan menjadi 90,55 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 90,55%.

Based on the 6 (six) main assessment aspects, the Company's GCG score is 90.548, rounded to 90.55 of the maximum value of 100.00, which is equivalent to 90.55%.

Tindak Lanjut Rekomendasi dan Evaluasi GCG

Penilaian GCG tahun buku 2018 menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara bertahap sebagai perbaikan atas penerapan GCG Perusahaan yang dilakukan setelah penilaian. Rekomendasi perbaikan implementasi GCG pada tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

Follow-Up on GCG Recommendations and Evaluation

The GCG assessment in 2018 fiscal year brought several recommendations that we will gradually follow up to improve our GCG implementation. The recommendations of GCG implementation improvements for 2018 fiscal year are as follows:

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation
Komitmen Commitment	<p>Meningkatkan tingkat pemahaman GCG Code dan CoC kepada Dewan Komisaris dan karyawan. Increase the level of GCG Code and CoC understanding to the Board of Commissioners and employees.</p> <p>Meningkatkan tingkat pemahaman Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris dan Karyawan. Increase the level of Gratuity Control Policy understanding to the Board of Commissioners and Employees.</p>
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	<p>Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Determination of the definitive members of the Board of Directors by the GMS is no more than 30 (thirty) days after the end of the term of office.</p> <p>Pemegang Saham menetapkan secara formal dalam RUPS anggota Komisaris Independen sebanyak 20% dari anggota Dewan Komisaris eksplisit dengan memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi. Shareholders has formally determined at the GMS that the Independent Commissioners are explicitly as much as 20% of the members of the Board of Commissioners with competencies in legal and administrative fields.</p> <p>RUPS/Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. The GMS/Shareholders have determined the decisions that govern and determine the maximum numbers of positions in becoming Commissioners that may be hold by a member of the Board of Commissioners.</p> <p>Pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan tepat waktu. RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan. RJPP approval is carried out on time. GMS for endorsement/approval of RJPP shall be held no later than 60 (sixty) days after receiving the complete RJPP Draft or RJPP Revision or before the year of the RJPP period or the current RJPP Revision is ongoing.</p> <p>Mendokumentasikan Persetujuan/Keputusan RUPS untuk Pelepasan Aset. Documented the GMS Approval/Decision on Assets Exemption.</p> <p>Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. There is a system to appraise the individual performance of Directors that contains key performance indicators and success criteria.</p> <p>Terdapat <i>Key Performance Indicators/KPI</i> Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham. There are Directors' Key Performance Indicators/KPIs which contain individual targets that the Shareholders have approved.</p> <p>Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi. Shareholders assessed of the individual performance of Directors based on the Directors' performance report and the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' Performance.</p>
Dewan Komisaris Board of Commissioners	<p>Program Kerja Dewan Komisaris memuat rencana dan Anggaran Pelatihan bagi Dewan Komisaris. The Board of Commissioners Work Program contains training plans and budgets for the Board of Commissioners.</p> <p>Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners gave the approval on the RJPP draft that was submitted by the Directors.</p> <p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK. The Board of Commissioners provides direction on accounting policies and preparation of financial statements that are in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia SAK.</p> <p>Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and agreements with third parties.</p>

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation
	<p>Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.</p>
	<p>The Board of Commissioners conducts an assessment on the effectiveness of external audits activities through: (1) monitoring the suitability of the audit progress with work plan; (2) review the suitability of audit implementation with the public accountant profession standards; and (3) review the external audit results and the quality of external audit recommendations.</p>
	<p>Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.</p>
	<p>The Board of Commissioners conduct an assessment on the effectiveness of internal audit through: (1) review of the effectiveness of monitoring the follow-up of the audit results from SPI and external auditors; (2) review of the suitability of audit implementation with internal audit standards; (3) completeness of the findings and quality of recommendations of the internal audit results; and (4) review the work plan of supervision and its implementation; (5) SPI function management.</p>
	<p>Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.</p>
	<p>The Board of Commissioners conduct an assessment on the implementation of: (1) reviews of complaints related to SOEs that the Board of Commissioners has received as well as the submission of suggestions based on the review results to the Directors; (2) examination of all complaints that that the Board of Commissioners has received.</p>
	<p>Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas Terkait penilaian efektivitas audit internal, audit eksternal dan pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris, menggunakan perangkat di Dewan Komisaris.</p>
	<p>The Board of Commissioners conduct an assessment on the evaluation of internal audit effectiveness, external audit and complaints received by the Board of Commissioners, using the available tools that the Board of Commissioners possess.</p>
	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit eksternal.</p>
	<p>The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors on improving the effectiveness of external audits.</p>
	<p>Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.</p>
	<p>The Board of Commissioners assessed the Directors and reports the assessment results to Shareholders.</p>
	<p>Dewan Komisaris mendokumentasikan indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris beserta target-targetnya yang dibuat berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.</p>
	<p>The Board of Commissioners documented their performance indicators and targets based on their proposal that has been approved by the Shareholders.</p>
	<p>Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan yang telah direncanakan.</p>
	<p>The Board of Commissioners' meetings that have been conducted as planned.</p>
	<p>Pendokumentasian berkaitan dengan <i>progress monitoring</i> terkait hal yang perlu mendapatkan hasil keputusan, rekomendasi dan arahan dari Dewan Komisaris dalam bentuk Matrikulasi <i>Monitoring Progress</i> tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.</p>
	<p>Documentation related to progress monitoring related to matters that need to receive the decision results, recommendations and directions from the Board of Commissioners in the form of Matriculation Monitoring Progress follow-up on the decisions, recommendations and directions from the Board of Commissioners.</p>
	<p>Pendokumentasian berkaitan dengan <i>progress monitoring</i> terkait hal yang perlu mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dapat dilakukan dalam bentuk Matrikulasi <i>Monitoring Progress</i> Persetujuan Dewan Komisaris.</p>
	<p>Documentation related to monitoring progress on issues that need to get approval or recommendations from the Board of Commissioners in connection with the Company's management activities from the Directors can be done in the form of a Matriculation Monitoring Progress Approval of the Board of Commissioners.</p>

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation
Direksi Directors	<p>Menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 September tahun berjalan dan Pemegang Saham pada 60 hari sebelum tahun RJPP. Submit the RJPP draft to the Board of Commissioners no later than September 30th of the current year and to the Shareholders 60 days prior to the year of RJPP implementation.</p> <p>Melaksanakan <i>assessment</i> untuk menyusun <i>Database (list)</i> orang yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk mengisi posisi/jabatan yang ditargetkan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, dan meninggal dengan tak terduga berupa <i>management talent pool</i>. Conduct an assessment to compile a Database (list) of people who have sufficient skills, competencies, and experiences to fill available positions. The list became a management talent pool that shows who can take over the main jobs if employees stop, retire, and die unexpectedly.</p> <p>Melaksanakan seleksi berupa <i>assessment</i> untuk pejabat satu level di bawah Direksi sebagai implemmentasi suksesi. Conduct a series of assessments for officials of one level below the Directors as an implementation of succession.</p> <p>Memenuhi pencapaian target realisasi KPI Perusahaan setiap tahun yang ditetapkan. Achieve the Company's annual KPI targets.</p> <p>Menyusun kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi. Set the target of each Directorate (KPI Directorate) based on the targets set forth in the Management Contract and treat it as the performance of each Director.</p> <p>Menyampaikan tingkat pencapaian target kinerja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat secara khusus. Deliver the level of individual achievement of Directors' performance in the Directorate's Key Performance Indicators (KPI) Realization Report in particular.</p> <p>Melengkapi Arsitektur sistem informasi yang didesain sampai dengan level data dan sistem keamanan antara lain mencakup ketentuan <i>Disaster Recovery Center</i>, <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> dan <i>Disaster Recovery Plan (DRP)</i>. Complement the information system architecture which designed until the level of data and security systems which include, among many others, the provisions of the Disaster Recovery Center, Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP).</p> <p>Melaksanakan sistem TI sesuai dengan master plan dengan disertai perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Implement IT systems, along with a thorough IT planning, in accordance with the master plan that includes human resources, organizational management structures and the level of service that the IT is providing.</p> <p>Melaksanakan audit TI untuk mengetahui efektifitas implementasi TI yang telah dilakukan, baik oleh pihak internal ataupun oleh independen. Conduct IT audit, by both internal and independent parties, to determine the effectiveness of IT implementation.</p> <p>Menyampaikan kinerja sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris, termasuk realisasi IT <i>Master Plan</i> dan hasil audit TI baik diminta ataupun tidak diminta. Submit the information technology system performance to the Board of Commissioners, including the realization of the IT Master Plan and the results of IT audits whether requested or not.</p> <p>Perusahaan melengkapi pedoman mutu dengan ketentuan mengenai indikator standar pelayanan minimal (SPM) dan mempublikasikannya ke dalam <i>website</i>. The Company complements the quality guidelines with provisions regarding minimum service standard indicators (SPM) and publish them on the website.</p> <p>Meningkatkan kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (<i>risk awareness</i>) dengan melengkapi analisis risiko dalam penyusunan RKAP setiap tahun. Increase the sincerity of the Directors' risk awareness by completing a risk analysis in the preparation of the Annual Work Plan and Budget.</p> <p>Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang Laporan Profil Risiko dan laporan <i>monitoring</i> risiko sekurang-kurangnya secara triwulanan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Submit a report on the implementation of risk management on the Risk Profile Report and risk monitoring report to the Board of Commissioners and Shareholders, at least quarterly, in accordance with the Company's risk management policy.</p>

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation
	<p>Menetapkan Kebijakan sistem pengendalian internal yang antara lain mengatur pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporan. Establish an internal control system policy, which among others, regulates the elements of approach on the control environment, risk management, control activities, information and communication systems and monitoring, implementation, and reporting.</p>
	<p>Menyampaikan dokumentasi Laporan Auditor Independen atas Pengendalian Internal tahun 2018 dan Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2018. Submit documentation of the Independent Auditor's Report on 2018 Internal Control and the 2018 Independent Auditor's Report on Compliance with Laws and Regulations.</p>
	<p>Menyampaikan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal (Laporan Manajemen Triwulan) kepada Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulanan dalam laporan tindak lanjut <i>progress</i> temuan audit internal. Regularly submit the follow-up documentation regarding the internal and external audit results (Quarterly Management Report) to the Board of Commissioners, at least once every 3 (three) months.</p>
	<p>Meningkatkan kualitas layanan Perusahaan kepada Pelanggan, sehingga tingkat kepuasan pelanggan dapat tercapai. Improve the quality of the Company's services to customers to achieve a high level of customer satisfaction.</p>
	<p>Meningkatkan indeks kepuasan pekerja melalui peningkatan program kesejahteraan dan kompetensi pekerja. Improve the employee satisfaction index by enhancing employee welfare and competency programs.</p>
	<p>Meningkatkan kinerja Perusahaan sehingga dapat memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian seluruh target-target yang telah disepakati dalam <i>Key Performance Indicator</i> Perusahaan. Improve the Company's performance by achieving all targets that have been set forth in the Company's Key Performance Indicator to meet the Shareholders' expectations.</p>
	<p>Pedoman pelaksanaan rapat Direksi mengatur pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi. The Directors' meeting guidelines regulate the implementation of evaluation follow-up from the previous meeting and discussion/review of the directions/proposals and/or follow-up on the Board of Commissioners' decision that is related to the Directors' proposals.</p>
	<p>Pimpinan fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi (<i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>). The head of the Internal Audit function has recognizable expertise in the internal auditor's profession by obtaining professional certification (Certified Internal Auditor).</p>
	<p>SPI/Fungsi Internal Audit melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. SPI/Internal Audit Function conducts an assessment on the quality assurance program and overall improvement of the Internal Audit Function.</p>
	<p><i>Review (assessment)</i> berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap <i>Charter</i> Audit Internal, standar dan kode etik, efisiensi serta efektivitas dari Internal Audit memenuhi kebutuhan dari berbagai <i>Stakeholders</i>-nya, <i>assessment</i> yang dilakukan oleh <i>assessor</i> independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Regular review (assessment) is conducted to assess compliance with Internal Audit Charter, standards and codes of conduct, as well as the efficiency and effectiveness of Internal Audit for the sake of all Stakeholders, which the assessment is conducted by an independent assessor at least once every 5 (five) years.</p>
	<p>Pemanggilan RUPS dilakukan memenuhi jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Serta mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Announcement for the GMS is made no later than 14 days prior to the date of the holding of the GMS, excluding the date of the announcement and the date of the GMS. Also includes information that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date the GMS is announced to the date that the GMS will be held.</p>
	<p>RUPS/Keputusan Pemegang Saham mengesahkan/menyetujui RJPP dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan. The Decree of the GMS/Shareholders ratifies/approves the RJPP by no more than 60 days after the complete RJPP draft is received or before the RJPP period begins.</p>

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation
	<p>Panggilan RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.</p> <p>Announcement for the GMS include information on each agenda, including proposals that the Directors has planned to submit, given that such information has not yet been available when the announcement is made, then the information and/or proposal must be made available at the Company's office before the GMS is held.</p>
<p>Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency</p>	<p>Perusahaan memperoleh juara dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA). The company won the Annual Report Award (ARA).</p> <p>Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya. The Company participates and receives CSR (Sustainability Reporting Award) and alike.</p> <p>Perusahaan memperoleh penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. The Company receives other awards in publication and information disclosure.</p>
<p>Aspek Lainnya Other Aspects</p>	<p>Meningkatkan kinerja Perusahaan di bidang/area terkait bidang proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi sehingga menjadi <i>best practice</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. Improve the Company's performance in the fields/areas related to the process, supporting functions, organizational performance and strategy to make it as a best practice or benchmark for other companies.</p> <p>Meningkatkan kinerja Perusahaan sehingga mendapat kinerja terbaik di sektor usaha industri sejenis. Improve the Company's performance to generate the best performance in the business sectors of similar industries.</p>

Dari 54 rekomendasi tahun buku 2018, Rukindo telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh *assessor* pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2019 Rukindo hanya mendapatkan 27 rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti terus ditindaklanjuti (*follow up*) di tahun mendatang dikarenakan faktor di luar kendali Perusahaan. Rukindo berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan penilaian tersebut.

From 54 recommendations from the 2018 fiscal year, Rukindo has made a follow up on the recommendations from the assessors in 2019, and in 2019 Rukindo has received only 27 recommendations. Some recommendations that have not yet been followed up will be conducted in the coming year due to certain factors beyond the Company's control. Rukindo is committed to continue in making improvements that are based on the recommendations from the assessment.

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Socialization of Good Corporate Governance Policies

Perusahaan memandang perlu dilakukannya program sosialisasi yang berkesinambungan mengenai pedoman GCG. Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi kepada seluruh Insan Rukindo baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja. Program sosialisasi difokuskan untuk meningkatkan pemahaman Insan Rukindo terhadap penerapan GCG yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan praktik terbaik yang berlaku di industri. Sosialisasi ini diharapkan akan menimbulkan kesadaran dan kebutuhan bagi Insan Rukindo untuk menerapkan GCG secara konsisten dan terencana.

Sosialisasi melalui saluran komunikasi internal Perusahaan, salah satunya dengan menggunakan media *website*, di www.rukindo.co.id/tata-kelola-perusahaan. Melalui *website* ini, para pekerja dan Pemangku Kepentingan dapat mengakses informasi mengenai Tata Kelola Perusahaan. Materi yang disosialisasikan berupa:

1. Pedoman Perilaku
2. Tata Laksana Kerja
3. Rukindo Bersih atau pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*)
4. Pedoman Gratifikasi

The Company believes that there needs to be an ongoing socialization regarding GCG guidelines. The Company conducts the socialization activities on all management levels for all Personnel, to the Board of Commissioners, Directors, and workers. The socialization is focused to increase Rukindo's understanding on proper GCG implementation and to be in line with regulations and best practices in the industry. This socialization is expected to raise the awareness and made all Personnel to feel the need to implement GCG consistently and strategically.

The socialization is done through the Company's internal communication channels, one of which is through our website at www.rukindo.co.id/tata-kelola-perusahaan. Through this website, workers and Stakeholders can access the Corporate Governance information. The information contains the following:

1. Code of Conduct
2. Board Manual
3. Rukindo Bersih or Whistleblowing System
4. Gratification Guidelines

Struktur dan Kebijakan Penerapan GCG

GCG Structures and Policies

Rukindo memiliki struktur tata kelola dengan organ yang dipandang telah memadai baik dari segi struktur maupun kebijakan terkait penerapan GCG sesuai dengan skala usaha yang dimiliki saat ini. Selain itu, Perusahaan terus mengembangkan organ tersebut agar senantiasa relevan seiring dengan berkembangnya bisnis yang dijalankan serta *best practices* penerapan GCG.

Rukindo has a governance structure, complete with its own set of organs that should already be enough in terms of structure and policies that are related to the GCG implementation that is in accordance with the current business scale. In addition, the Company has also been developing these organs so that they are always relevant with the current business development and the best practices of GCG implementation.

Komitmen Direksi dan Manajemen dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2019 dapat dilihat dari pemenuhan dokumen *Soft Structure* GCG dan Kebijakan Direksi serta *Standard Operational Procedure* (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan Perusahaan.

The commitment from the Directors and Management in implementing Corporate Governance in 2019 can be seen from the fulfillment of the GCG Soft Structure documents and the Directors' Policy as well as the Standard Operating Procedure (SOP) that all are in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's development.

Soft Structure GCG yang Berlaku di Rukindo

Applicable GCG Soft Structures at Rukindo

Kebijakan (*soft structure*) GCG terdiri dari kebijakan-kebijakan pendukung yang merupakan perangkat ketentuan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam menunjang implementasi GCG di Perusahaan. Kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perusahaan serta ditinjau secara berkala untuk dilakukan pemutakhiran seiring dengan perkembangan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

GCG soft structure consists of supporting policies that are treated as a set of provisions and procedures to support the GCG implementation at the Company. The policy is designed in accordance with the terms and conditions of the Company and is regularly reviewed to be updated in line with the development of the Company and applicable regulations.

Kebijakan dan Prosedur Policies and Procedures	Penetapan Determination
Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Associations	Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember 2017 yang telah ditetapkan melalui Akta Notaris No.48 tanggal 28 Desember 2017 di hadapan Dahlia SH, Notaris di Jakarta. The Company's Articles of Association have been amended several times and the latest one was on December 28, 2017 and have been determined through Notarial Deed No.48 on December 28, 2017 before Dahlia SH, Notary in Jakarta.
Pedoman GCG GCG Guidelines	Disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016. Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada organ Perusahaan, pekerja dan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Pedoman GCG ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman GCG ini mencakup: Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan, Organ Perusahaan, Panduan Bagi Direksi dan Pedoman Korporat. Approved and signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The Guidelines have been socialized to the Company's organs, workers and Stakeholders. The GCG Guidelines are reviewed and updated regularly. These GCG Guidelines include: Corporate Governance Principles, Company Organs, Guidelines for Directors and Corporate Guidelines.
Pedoman Perilaku Code of Conduct	Perusahaan berkomitmen melaksanakan operasional bisnis yang sehat dan beretika. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2016 dan telah diperbaharui pada November 2017. Uraian lebih lengkap mengenai Pedoman Perilaku Perusahaan dijelaskan pada bab GCG bagian <i>Code of Conduct</i> dalam Laporan Tahunan Ini. The Company is committed to conduct sound and ethical business operations. The Company has a Code of Conduct that was established on December 16, 2016 and was updated on November 2017. A more detailed description of the Code of Conduct is explained in the GCG chapter of the Code of Conduct section in this Annual Report.

Kebijakan dan Prosedur Policies and Procedures	Penetapan Determination
Tata Laksana Kerja Board Manual	<p>Perusahaan memiliki pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama struktur GCG Perusahaan yang disebut <i>Board Manual</i>. <i>Board Manual</i> telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016. <i>Board Manual</i> ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. <i>Board Manual</i> Perusahaan mengatur tentang: Ketentuan Umum, Dewan Komisaris, Direksi, Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Penutup.</p> <p>The Company has the working guidelines, called the Board Manual, for the Board of Commissioners and Directors, as the main organ of the Company's GCG structure. The Board Manual was approved and signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The Board Manual is always reviewed and updated regularly if needed by the Company. The Company's Board Manual regulates: General Provisions, Board of Commissioners, Directors, Work Relations between the Board of Commissioners and Directors and Closing.</p>
Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) Policy on Gratification Management and Implementation of <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	<p>Sebagai Anak Perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Perusahaan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Rukindo yang diberlakukan pada tanggal 20 Desember 2016 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.036/HK.304/ XII/DIRUT-2016.</p> <p>As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Company refers to the Guidelines for the Management of Gratification and Whistleblowing System (WBS) Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on Rukindo, which effective since December 20, 2016 through a Decree of the Board of Directors Number: KD.036/HK.304/XII/DIRUT-2016.</p>

Struktur GCG Rukindo

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan terbatas, organ utama Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

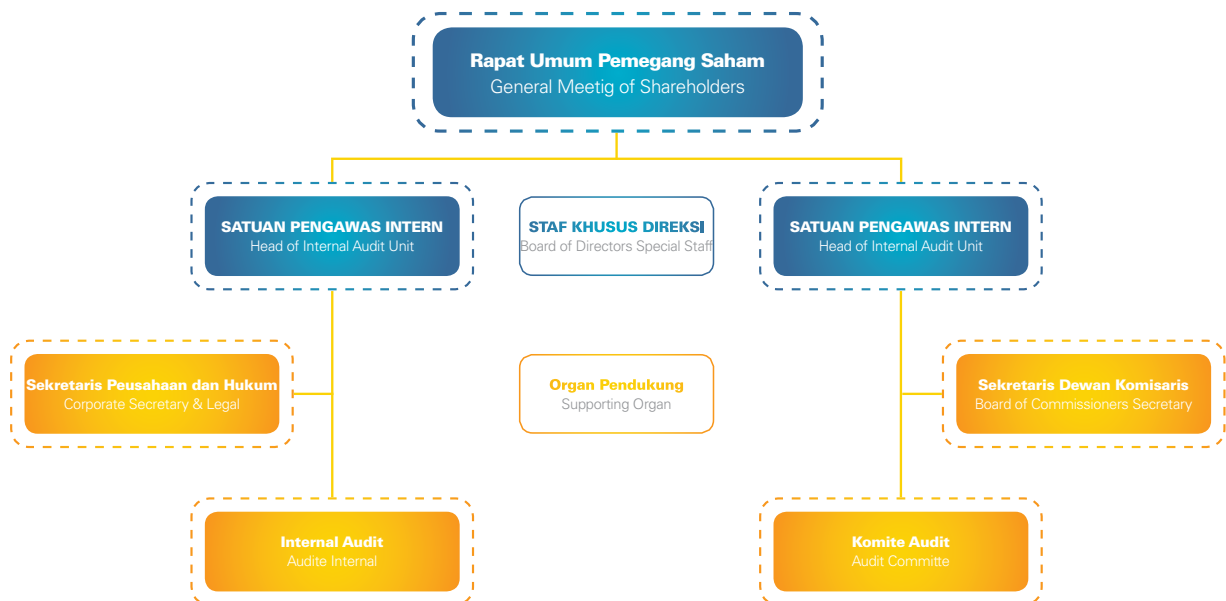
Hubungan yang erat dan harmonis antar organ Perusahaan, terutama organ utama, akan sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Keselarasan antar setiap organ Perusahaan hanya akan dapat berjalan dengan baik ketika masing-masing organ memahami fungsi dan tugas masing-masing secara jelas. Perusahaan telah menetapkan sebuah pedoman yang secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-masing organ utama Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

GCG Structure of Rukindo

Based on Law No.40 in 2007 regarding limited liability companies, the Company's main organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Directors. The Board of Commissioners and Directors have clear authorities and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the Articles of Association and Legislation.

A close and harmonious relationship between the Company's organs, especially the main organs, will be very influential in determining the success of the Company's management in accordance with the principles of GCG. The harmony between each organ of the Company will only be able to run well when each organ clearly understands their functions and duties. The Company has set a guideline that explicitly separates the functions and duties of each of the Company's main organs, which consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), Commissioners and Directors.

No.	Organ Utama Perusahaan Company's Main Organs	Organ Pendukung Supporting Organs	Keterangan Description
1.	RUPS GMS	-	RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. GMS is a Company organ that has exclusive authorities beyond the Directors or Board of Commissioners that are limited according to the Law and/or Articles of Association.
2.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Sekretaris Dewan Komisaris Komite Audit Secretary for the Board of Commissioners Audit Committee	Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi jalannya Perusahaan oleh Direksi dan memastikan agar sesuai dengan keputusan dan arahan RUPS dan ketentuan lainnya. The Board of Commissioners is a Company organ that has the duty to oversee the Company's operations by the Directors and ensure that it is in accordance with the resolutions and directions of the GMS and other provisions.
3.	Direksi Directors	Sekretaris Perusahaan dan Hukum Internal Audit Corporate Secretary and Legal Internal Audit	Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. The Board of Directors is the Company organ that is authorized and has full responsibility for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the targets and objectives of the Company and represents the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association.



Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information Regarding Major and Controlling Shareholders

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, dengan kepemilikan saham sebanyak 99,9% dari total saham Perusahaan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan representasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali bagi Rukindo.

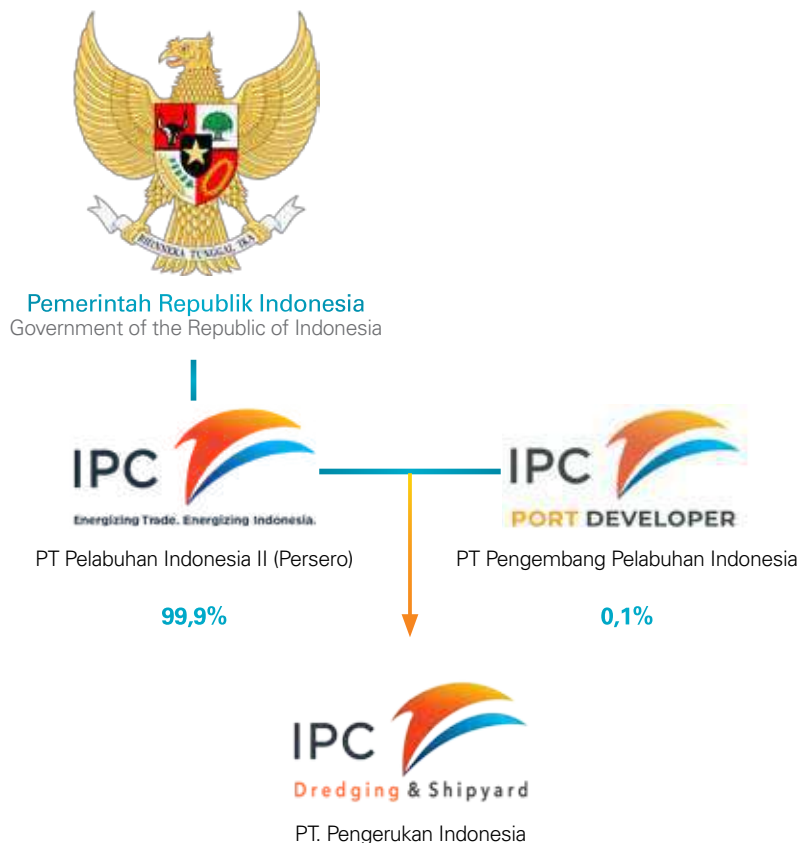
Sedangkan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki pemilik dan Pemegang Saham Tunggal yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Informasi lebih rinci terkait kepemilikan saham dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan terkait struktur dan komposisi Pemegang Saham. Adapun skema Pemegang Saham Utama dan Pengendali Rukindo dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the Major and Controlling Shareholder of the Company, with ownership of 99.9% of the Company's total shares. The President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is a representation of the Major and Controlling Shareholder for Rukindo.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has a single owner and Shareholder, namely the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia on 1,444,029 shares with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp1,444,029,000,000 at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

More detailed information regarding share ownership can be seen in the Company Profile section regarding the structure and composition of the Shareholders. The Major and Controlling Shareholder structure can be seen in the following chart.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk menjadi bagian dalam pengembangan Perusahaan melalui keputusan-keputusan dan arahan yang diberikan dalam RUPS. Pengambilan keputusan penting dalam RUPS memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perusahaan Terbatas semata-mata demi kepentingan Perusahaan.

Jenis-jenis dan Penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dengan referensi dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Baik RUPST dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen.

RUPST diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir. RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Selain RUPS yang diadakan dengan menghadirkan semua peserta secara fisik (RUPS Fisik) di dalam satu ruangan, Perusahaan juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler (RUPS Sirkuler).

Pelaksanaan RUPSTahun 2019

Rukindo telah melaksanakan RUPS Fisik sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Sirkuler sebanyak 1 (satu) kali.

Penyelenggaraan RUPSTahunan Tahun Buku 2018

Tempat Pelaksanaan

Perusahaan menyelenggarakan RUPSTahun Buku 2018 pada tanggal 27 Juni 2019 di Ruang Rapat Bandar Jaya B, Lantai 7, Kantor Pusat IPC.

Peserta Rapat

1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), selaku Pemegang Saham (99,91%):
Widyaka Nusapati: Direktur Keuangan
Direktur Utama berhalangan hadir dan memberikan kuasa kepada Direktur Keuangan.

General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the main organs in the corporate governance structure. The GMS is a forum for the Shareholders to be a part in the Company's development from the decisions and directions that they gave at the GMS. Important decision making at the GMS takes into account the Company's Articles of Association and Laws of Limited Liability Companies into consideration, by upholding the Company's interest.

GMSTypes and Organizations

Based on the Company's Articles of Association and referring to Law No.40 in 2007 regarding Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS). Both AGMS and EGMS have the highest authority in the corporate governance structure and become the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Management.

The AGMS is held annually, no longer than 6 (six) months after the Company's fiscal year ends. The EGMS can be held at any time if needed. In addition to the physical GMS where all participants are present (Physical GMS) in one room, the Company has a circular decision-making mechanism (Circular GMS).

2019 GMS

Rukindo has held 1 (one) time of Physical GMS and 1 (one) time of Circular GMS.

2018 FiscalYear Annual GMS

Meeting Location

The Company has held the Annual GMS for Fiscal Year 2018 on June 27, 2019 at Bandar Jaya B Meeting Room, 7th Floor, IPC Head Office.

Meeting Participants

1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as the Shareholder (99.91%):
Widyaka Nusapati: Director of Finance
The Managing Director was unable to attend and gave the authority to the Director of Finance.

2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selaku Pemegang Saham (0,09%):
Kiki M Hikmat: Plt. Direktur Utama
 3. Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia:
Dani Rusli Utama: Komisaris Utama
 4. Direksi PT Pengerukan Indonesia:
 - a. M. Hadi Syafitri Noor: Direktur Utama
 - b. Budi Priyanto: Direktur Keuangan dan SDM
 - c. Muhammad Yusuf: Direktur Komersial dan Teknik
2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia as the Shareholder (0.09%):
Kiki M Hikmat: Acting President Director
 3. Board of Commissioners of PT Pengerukan Indonesia:
Dani Rusli Utama: President Commissioner
 4. Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia:
 - a. M. Hadi Syafitri Noor: Managing Director
 - b. Budi Priyanto: Director of Finance and HR
 - c. Muhammad Yusuf: Director of Commercial and Engineering

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Keputusan RUPSTahunan di tahun 2019 untuk Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor 01078/2.1032/AU.1/03/0240-2/1/IV/2019 pada Tanggal 29 April 2019.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*volleidig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2018. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan.
- Menetapkan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 yaitu Rp17.491.449.672 sebesar 95% atau Rp16.616.877.188 sebagai Laba Ditahan dan 5% atau Rp874.572.484 sebagai Cadangan Umum dan tidak melakukan pembayaran Dividen.
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) untuk melakukan audit laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan Tahun Buku 2019. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) tidak dapat menyelesaikan audit dimaksud. Biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh KAP dimaksud menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- Tantiem atas kinerja Perusahaan Tahun Buku 2018 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diputuskan kemudian oleh pemegang saham.

2018 Fiscal Year Annual GMS Decisions

The decisions of each agenda at the 2018 Annual GMS are as follows:

- Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Report from the Board of Commissioners for Fiscal Year 2018 and ratified the Company's Financial Report for Fiscal Year 2018 that has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with the opinion "Fairly In All Material Aspects", as referred to in report Number 01078/2.1032/AU.1/03/0240-2/1/IV/2019 on April 29, 2019.
- Giving full exemption (*volleidig acquit et decharge*) to the Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company according to their respective responsibilities and actions in Fiscal Year 2018. The ratification and exemption of these responsibilities do not relinquish the legal responsibility against the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company if the report is proven to violate the legislations and/or if in the future there is evidence of actions that are deviant and/or harm the Company.
- -Determine the use of net income for Fiscal Year 2018 of Rp17,491,449,672 in which 95% or Rp16,616,877,188 is determined as Retained Earnings and 5% or Rp874,572,484 as General Reserves and no Dividends were paid.
- Determine the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young) to audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2019, including the audit on performance and compliance for Fiscal Year 2019. Giving the authority to the Company's Board of Commissioners to determine other KAP in the KAP Purwanto, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young) is unable to complete the audit. The costs of audit by the Public Accounting Firm becomes the Company's responsibility.
- The bonus for the Company's performance in Fiscal Year 2018 for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be decided later by the shareholders.

RUPS Sirkuler

Pada tahun 2019, Perusahaan juga telah melaksanakan RUPS Sirkuler sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Circular GMS

In 2019, the Company has also held 1 (one) Circular General Meeting of Shareholders with the following details.

Tanggal Date	Keputusan Decision	Realisasi Realization
19 Desember 2019 December 19, 2019	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris Amendment of the Company's Articles of Association as well as Dismissal and Appointment of Commissioners	Sudah terealisasi. Has been realized.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPSTahun 2018

Di tahun 2018, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPSTahunan untuk Tahun Buku 2017 pada tanggal 30 Januari 2018 dan 26 April 2018. Semua hasil keputusan RUPSTahunan tahun 2018 telah direalisasikan pada tahun 2018 dengan informasi seperti tabel di bawah.

Follow Up on 2018 GMS Decisions

In 2018, the Company has held 2 (two) Annual GMS for 2017 Fiscal Year on January 30, 2018 and April 26, 2018. The results of the Annual GMS of 2018 have all been realized in 2018 with the following information.

RUPSTahunan 30 Januari 2018 Annual GMS on January 30, 2018	
Keputusan Decision	Realisasi Realization
<p>Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018.</p> <p>Menyetujui Kontrak Manajemen Tahun 2018 sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) ini;</p> <p>Pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan tersebut di atas, agar mengikuti ketentuan, prosedur dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang berlaku;</p> <p>Jangka waktu berlakunya Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Perusahaan ini adalah dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.</p> <p>Approval of the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).</p> <p>Approval of 2018 Management Contract as attached as an integral part of the Shareholders' Resolution, Outside the (Circular) General Meeting of Shareholders;</p> <p>The decisions mentioned above must be implemented in compliance with the prevailing provisions, procedures, and Good Corporate Governance (GCG) principles;</p> <p>The period of validity of the Shareholders' Resolution Outside the Company's (Circular) General Meeting of Shareholders is from January 1, 2018 to December 31, 2018.</p>	<p>Semua keputusan telah terealisasi. All decisions have been realized.</p>

RUPS Tahunan 26 April 2018 Annual GMS on April 26, 2018	
Keputusan Decision	Realisasi Realization
<p>Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan Perusahaan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor RPC-6310/PSS/2018 tanggal 16 April 2018;</p> <p>Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>volleidig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2017. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan perusahaan;</p> <p>Menetapkan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 Perusahaan;</p> <p>Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan Tahun Buku 2018;</p> <p>Penetapan Insentif Kinerja tahun buku 2017 serta Penetapan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Semua keputusan telah terealisasi. All decisions have been realized.</p>
<p>Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements of the Fiscal Year 2017, audited by Public Accountant Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with "Unqualified Opinion" as referred to in Report No.RPC-6310/PSS/2018 dated April 16, 2018;</p> <p>Granted full exemption (<i>volleidig acquit et decharge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Company's management and supervision, in accordance with their respective responsibilities and actions in the Fiscal Year 2017. However, such release and discharge shall not relinquish any legal liability to the Directors and/ or Board of Commissioners of the Company if the report discloses any violation of applicable law and/or if in the future it is proven to be unlawful and/or harming the Company;</p> <p>Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2017;</p> <p>Appointment of Public Accountants Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2018, including performance audit and compliance audit of the Fiscal Year 2018;</p> <p>Determination of Performance Incentive for the fiscal year 2017 and Salaries, Honorarium, Allowances, and other Facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2019

Dewan Komisaris dapat terdiri dari 1 (satu) orang anggota. Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dan harus berdasarkan kepada keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Perusahaan juga mengatur mengenai jabatan rangkap anggota Dewan Komisaris yang melarang anggota untuk memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau perusahaan swasta;
2. Jabatan lainnya yang menyangkut kepengurusan dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan partai politik untuk pencalonan diri menjadi anggota legislatif atau kepala/wakil daerah;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut. Komposisi Dewan Komisaris pada pembahasan di GCG hanya membahas komposisi per 31 Desember 2019 dan tidak membahas komposisi hingga selesainya Laporan Tahunan pada pertengahan 2020.. Seluruh Dewan Komisaris yang menjabat tahun 2019 telah melewati *fit and proper test*. Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Board of Commissioners has clear authorities and responsibilities in accordance with its respective roles, as mandated on the Company's Articles of Association and prevailing rules and legislation. The Board of Commissioners is reporting directly to the Shareholders through GMS.

Composition of Board Commissioners in 2019

The Board of Commissioners may consist of 1 (one) member. In the event that there is more than one member of the Board of Commissioners, each member cannot act individually and must be based on the Board of Commissioners' decision.

Members of the Board of Commissioners are appointed from the candidates that the Shareholders are proposing. The term of office of members of the Board of Commissioners is set to be 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

The Company also regulates about concurrent position of members of the Board of Commissioners which prohibit members from holding other position as follows:

1. Member of the Board of Directors of a SOE or ROE or a private company;
2. Other positions related to the management in political activities of political party for self-nomination to become legislative members or regional heads/representatives;
3. Other positions that may lead to a conflict of interest.

The composition of the Company's Board of Commissioners in 2019 can be seen in the following table. The composition of Board of Commissioners in this GCG is only discussing the composition as of December 31, 2019 and does not discuss about the composition by the time the Annual Report is finished in mid-2020.. All Commissioners in 2019 have passed the fit and proper test. The profiles of all members of the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Official Period
Prasetyadi	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 19 Desember 2019. Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No.63 dated December 19, 2019.	Pertama First
Bambang Supriyadi Ervan	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 19 Desember 2019. Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No.63 dated December 19, 2019.	Pertama First
Syaiful Islam	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 19 Desember 2019. Shareholders Circular Decision Number: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding the Amendment of Articles of Association and Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and was notarized based on Deed No.63 dated December 19, 2019.	Pertama First
Dani Rusli Utama*	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/20/1/1/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003066 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan telah diaktakan berdasarkan Akta No.09 tanggal 16 Februari 2017. Shareholders Circular Decision Number: HK.568/20/1/1/PI.II-17 and Number: PPI-623-003066 regarding Appointment of President Commissioner and was notarized based on Deed No.09 dated February 16, 2017.	Pertama First

Catatan:

* Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Note:

* The company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

Independensi Dewan Komisaris

Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perusahaan. Demikian pula *Board Manual* Perusahaan mengatur secara khusus tentang keberadaan Komisaris Independen. Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi dengan Rukindo.
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga kemiliteran dan tidak bekerja di Rukindo atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Rukindo.

Independency of Board of Commissioners

SOE Minister State Regulation No.PER-01/MBU/2011 specifically regulates about the Independent Commissioner. Likewise, the Company's Board Manual specifically regulates about the Independent Commissioner. The criteria of Independent Commissioner as stipulated in the Board Manual for Commissioners is as follows:

1. Not serving as a Director in a company affiliated with Rukindo.
2. Not working for the Government including ministries, military institutions and for Rukindo or its affiliates in the last 3 (three) years.
3. Free from business interests or activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the scope of Rukindo.

Dalam ketentuan mengenai Perusahaan Terbatas, khususnya Perusahaan Terbuka, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

RUPS Rukindo belum memutuskan untuk menetapkan adanya Komisaris Independen dalam Perusahaan. Namun demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hingga 31 Desember 2019, dapat dikatakan bersifat independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Berikut disampaikan informasi mengenai independensi Dewan Komisaris terkait hubungan afiliasi, kepemilikan saham, rangkap jabatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

In the provisions regarding Limited Liability Companies, especially Public Companies, Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who do not have financial and management relations, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of Directors and/or Controlling Shareholders or with other companies that may hinder or inhibit his position to act independently in accordance with the GCG principles. The Independent Commissioner is responsible for supervising and representing the interests of Minority Shareholders.

The GMS has not yet decided to establish an Independent Commissioner at the Company. However, all members of the Board of Commissioners who have served as of December 31, 2019 can be said to be an independent member. All members of the Board of Commissioners do not have financial and management relations, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of Directors and/or Controlling Shareholders.

The following is the information regarding the independence of the Board of Commissioners regarding affiliation, share ownership, concurrent positions, and other criteria in accordance with the rules and regulations.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Prasetyadi	Syaiful Islam	Bambang Supriyadi Erwan	Dani Rusli Utama*
Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi dengan Rukindo. <i>Not serving as a Director in a company affiliated with Rukindo.</i>	V	V	V	V
Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga kemiliteran dan tidak bekerja di Rukindo atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. <i>Not working for the Government including ministries, military institutions and for Rukindo or its affiliates in the last 3 (three) years.</i>	V	V	V	V
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Rukindo. <i>Free from business interests or activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the scope of Rukindo.</i>	V	V	V	V
Status <i>Status</i>	V	V	V	V

Keterangan:

V = Independen

X = Tidak Independen

*Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Note:

V = Independent

X = Not Independent

* The company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

Board Manual

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mengacu kepada *Board Manual* Perusahaan yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016. *Board Manual* dibentuk dengan maksud untuk menjelaskan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, agar tercipta integritas dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. *Board Manual* dipercaya akan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk mempertegas komitmennya dalam menjalankan amanat tugas Perusahaan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab.

Board Manual Perusahaan telah disusun dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .

Beberapa hal yang diatur dalam *Board Manual* terkait lingkup pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Persyaratan, komposisi dan keanggotaan masa jabatan;
2. Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban;
4. Wewenang;
5. Hak;
6. Etika jabatan;
7. Evaluasi kinerja;
8. Rapat;
9. Pengambilan keputusan;
10. Sekretaris Dewan Komisaris;
11. Komite Dewan Komisaris;
12. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab Dewan Komisaris Rukindo adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini akan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan

Board Manual

In conducting its duties, the Board of Commissioners refers to the Company's Board Manual which was ratified and signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The Board Manual was formed with the intention to describe the working relations between the Board of Commissioners and Directors to form an integrity among them when conducting the Company's business activities. The Board Manual is set to help the Board of Commissioners and Directors to reinforce their commitment in carrying out what the Company has mandated, which should be conducted seriously, with full dedication and responsibility.

The Company's Board Manual was prepared by referring to SOE Minister Regulation Per-01/MBU/2011 on August 1, 2011 Jo. State Minister of SOE Minister Regulation Number Per-09/MBU/2012 on July 6, 2012 regarding Implementation of Good Corporate Governance.

Several matters that are regulated in the Board Manual regarding the scope of the Board of Commissioners' duties are:

1. Requirements, composition and term of office;
2. Induction program and capability enhancement;
3. Duties, responsibilities and obligations;
4. Authority;
5. Rights;
6. Ethics of positions;
7. Performance evaluation;
8. Meetings;
9. Decision making;
10. Secretary of the Board of Commissioners;
11. Committees of the Board of Commissioners;
12. Working relations between the Board of Commissioners and Directors.

Duties, Obligations and Responsibilities of Board of Commissioners

Duties, Obligations, Responsibilities of the Board of Commissioners of Rukindo are to conduct the function to oversee the management of the Company and compare it with the established work plans. This will be accounted for by the Board of Commissioners to the GMS. The Board of Commissioners is tasked to oversee the management policies,

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memberikan nasihat kepada Direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP dan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan yang dirangkum dan diuraikan secara terperinci sebagaimana diatur dalam Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Rukindo.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris yang aktif bertugas masih dipegang oleh Dani Rusli Utama mengingat pergantian Dewan Komisaris dari anggota lama ke anggota baru dilakukan menjelang akhir tahun 2019. Oleh karena itu belum terdapat informasi mengenai pembagian tugas Dewan Komisaris.

the general management of the Company and the Company's business activities that the Directors are conducting. The Board of Commissioners is also responsible to provide the Directors with advice and also oversee the implementation of RJPP, RKAP and Articles of Association, GMS Decree, applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives.

In conducting these duties, each member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations, as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Have a good faith, act prudence and be responsible in conducting supervisory duties and providing advice to the Directors for the interests of the Company and in accordance with the Company's objectives.

Each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in conducting his duties.

If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibility lies on all of them.

The duties and obligations of the Board of Commissioners refer to the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association which are summarized and described in detail as stipulated in the Board Manual of Rukindo

Board of Commissioners Division of Duties

In 2019, the Board of Commissioners who were active at that time was still Dani Rusli Utama as the replacement of the Board of Commissioners from old to new members was done towards the end of 2019. Therefore, there is no information regarding the Board of Commissioners division of duties.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Sesuai *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris mencakup persyaratan formal yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan material.

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Tidak pernah dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit, tidak dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
3. Tidak terdapat hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan.

Terdapat persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan material yang mempertimbangkan integritas, dedikasi dan pemahaman anggota akan fungsi manajemen. Anggota juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru

Perusahaan memiliki program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Penanggung jawab program ini adalah Sekretaris Perusahaan dan Hukum. Materi yang disampaikan dalam program pengenalan mencakup kondisi Perusahaan secara umum dan hal-hal lain yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan pedoman serta kelengkapan GCG yang dimiliki Perusahaan;
2. Masalah-masalah strategis yang meliputi rencana usaha jangka pendek dan panjang, kinerja keuangan dan operasional dan lainnya;
3. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak-hak Dewan Komisaris.

Criteria for Board of Commissioners Members

In accordance with the Board Manual owned by the Company, the requirements to become a member of the Board of Commissioners include formal requirements which are the basic requirements stipulated by the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, material requirements.

Members of the Board of Commissioners are individuals who:

1. Competent in carrying out legal actions;
2. Never within 5 (five) years prior to nomination has been declared bankrupt, has never been a member of the Board of Commissioners or Directors who were found guilty of causing a Company or a Public Company to be declared bankrupt, not convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector;
3. Has no blood relation or has a relation due to marriage.

There are other requirements which are material that consider the integrity, dedication and understanding regarding the management function. Members are also required to have adequate knowledge in the Company's business fields and can provide sufficient time to conduct their duties in accordance with the regulations.

Induction Program for New Members of Board of Commissioners

The Company has an induction program for the newly appointed members of the Board of Commissioners. The responsibility to conduct the program lies with the Corporate Secretary and Legal. The induction program covers the information regarding the general condition of the Company and other matters which include:

1. The implementation of GCG principles and GCG guidelines and completeness owned by the Company;
2. Strategic issues which include short and long term business plans, financial and operational performance and others;
3. Obligations, duties, responsibilities, authorities and rights of the Board of Commissioners.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris Perusahaan yang baru yaitu Prasetyadi (Komisaris Utama), Bambang Supriyadi Ervan (Komisaris), Syaiful Islam (Komisaris), yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: PPI-400-19122019-020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 19 Desember 2019 telah mengikuti program pengenalan dimaksud. Pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan bahwa program pengenalan harus dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut.

Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Perusahaan menilai penting untuk meningkatkan kapabilitas Dewan Komisaris. Hal ini sangat berguna bagi Dewan Komisaris untuk dapat selalu mengetahui perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan. Peningkatan kapabilitas diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan Dewan Komisaris untuk mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari yang dapat berdampak bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Selama tahun 2019, kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh semua anggota Dewan Komisaris adalah mengenai Pelatihan dari Grup IPC, Minuat Indonesia – *Problem Solving Decision, Making Creative Thinking Technique*.

Realisasi Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2019

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi beserta jajarannya untuk periode tahun 2019. Laporan pengawasan Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 10 Desember 2019 yang memuat pokok-pokok tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), telah dilaksanakan rapat koordinasi, evaluasi serta tindak lanjut antara Dewan Komisaris dengan Direksi;

In 2019, the new Company's Board of Commissioners namely Prasetyadi (President Commissioner), Bambang Supriyadi Ervan (Commissioner), Syaiful Islam (Commissioner), who were appointed based on the Decision of Circular GMS Number: SK. 03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 and Number: PPI-400-19122019-020 regarding Amendments to the Company's Articles of Association and Dismissal and Appointment of Members of the Commissioners on December 19, 2019 following the induction program. This implementation is in accordance with the provisions that regulated that the induction program must begin no more than 3 (three) months after the appointment of the members of the Board of Commissioners.

Capabilities Enhancement Program for Board of Commissioners

The Company believes that it is important to enhance the capability of the Board of Commissioners. This is very useful for the Board of Commissioners to be able to keep up with the latest developments in the Company's core business. The capability enhancement is expected, in the later stage, to improve the ability of the Board of Commissioners to anticipate future problems that may impacted the Company's sustainability and progress.

During 2019, the training and competency development activities that all members of the Board of Commissioners have participated were the Training from the IPC Group, Minuat Indonesia – *Problem Solving Decision, Making Creative Thinking Technique*.

Realization of Implementation of Board of Commissioners Duties in 2019

In 2019, the Board of Commissioners had oversaw the Company's management activities that the Directors and their staffs have conducted during 2019. The Board of Commissioners' supervisory report was signed by the Board of Commissioners on December 10, 2019 which contained the main duties that the Board of Commissioners have conducted during 2019 as follows:

1. In regard of implementation of the supervisory function on the Company's management policies on implementation of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), a coordination, evaluation and follow-up meeting have all been conducted by the Board of Commissioners and Directors;

2. Beberapa permasalahan yang dilakukan pembahasan antara lain terkait dengan realisasi triwulan, tahunan, serta permasalahan strategis lainnya yang memerlukan tindak lanjut segera;
 3. Pencapaian target RKAP yang menjadi perhatian Dewan Komisaris seperti realisasi kegiatan operasi, pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya dan pertumbuhan laba perusahaan;
 4. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh aspek pada proses bisnis Perusahaan termasuk aspek-aspek satuan pengawas internal, teknologi informasi, pengelolaan manajemen risiko, pengembangan karir dan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan mutu dan pelayanan, tindak lanjut GCG pada tahun sebelumnya, serta aspek-aspek lainnya dimana pelaksanaannya dilakukan secara terdokumentasi pada rapat-rapat Dewan Komisaris atau kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan secara langsung baik terdokumentasi atau tidak terdokumentasi.
2. Discussion regarding several issues related to realization in quarterly and annually basis and other strategic issues that require immediate follow-up;
 3. The achievement of RKAP target that has been the main concern of the Board of Commissioners including the realization of operational activities, revenue growth, cost efficiency and profit growth;
 4. The realization of Board of Commissioners' supervisory functions have fulfilled all aspects of the Company's business processes including the internal audit unit, information technology, risk management, career and HR development, accounting policies and preparation of financial statements, quality and service policies, GCG follow-up in the previous year, as well as other aspects where the implementation was conducted and documented at the Board of Commissioners meetings or other supervisory activities which were documented or undocumented

Rapat Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dalam rapat tersebut.

Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2019 yang diadakan bersama dengan Komite Audit. Walaupun demikian, Komite Audit juga memiliki mekanisme rapat internal komite yang dilaksanakan dengan mengundang Dewan Komisaris. Sedangkan rapat gabungan (rapat koordinasi) bersama Direksi dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dan juga dihadiri oleh Komite Audit. Daftar kehadiran dan agenda rapat internal Dewan Komisaris dan rapat koordinasi dengan Direksi, yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dapat dilihat dalam tabel berikut. Sedangkan rapat Komite Audit yang mengundang Dewan Komisaris disajikan dalam pembahasan mengenai Komite Audit.

Board of Commissioners Meeting

As stipulated in the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Commissioners meetings must be held periodically, at least once a month. The Board of Commissioners may invite the Directors to the meeting.

The Board of Commissioners has held 3 (three) internal meetings during 2019 which were held jointly with the Audit Committee. Nevertheless, the Audit Committee has its own internal committee meeting mechanism which has also been inviting the Board of Commissioners. In addition, the joint meetings (coordination meetings) with the Directors were held 8 (eight) times and were also attended by the Audit Committee. The list of attendance and agenda of the Board of Commissioners' internal meetings and coordination meetings with the Directors, which have been carried out by the Board of Commissioners, can be seen in the following table. While the Audit Committee meeting that invited the Board of Commissioners is presented in the Audit Committee section.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit
Board of Commissioners Internal Meeting with Audit Committee

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
15 Mei 2019 May 15, 2019	<ul style="list-style-type: none"> KPI Perusahaan Manajemen Risiko Kinerja Audit Internal dan Eksternal Penghapusbukuan Aset Tetap Laporan Keuangan Triwulan I 2019 Hal-hal yang dianggap perlu <ul style="list-style-type: none"> Company KPI Risk management Internal and External Audit Performance Permanent Asset Bookkeeping Quarterly Financial Statements I 2019 Necessary issues 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit</p> <p>Member of the Board of Commissioners, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
30 Juli 2019 July 30, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan semester I tahun 2019 Pengadaan kapal TSHD Hal-hal yang dianggap perlu Financial Statements for the first semester of 2019 Procurement of TSHD vessel Necessary issues 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit</p> <p>Member of the Board of Commissioners, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
7 Oktober 2019 October 7, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan triwulan III tahun 2019 Pembelian kapal keruk baru tipe TSHD Hal-hal yang dianggap perlu Financial Statements for the third quarter of 2019 Purchase of new dredger vessel of TSHD Necessary issues 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit</p> <p>Member of the Board of Commissioners, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>

Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
Coordination Meeting between Board of Commissioners and Directors

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
20 Februari 2019 February 20, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian 6 (enam) unit kapal Pemeriksaan khusus Audit Internal (SPI) Koordinasi dengan Audit Eksternal Peluang pengerjaan pengerukan Permasalahan lahan <ul style="list-style-type: none"> Assessment results on 6 (six) vessels Special Audit by Internal Audit (SPI) Coordination with External Audit Dredging work opportunities Land issues 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit</p> <p>Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
9 Mei 2019 May 9, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil audit khusus SPI Percepatan perolehan pendapatan untuk pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan Percepatan penagihan piutang Optimalisasi produksi pengerukan sesuai target RKAP 2019 Upaya perpanjangan sewa kapal Evaluasi kerja sama sewa kapal keruk <ul style="list-style-type: none"> Follow up on SPI specific audit results Acceleration to collect receivables on completed works Acceleration collect receivables Optimization of dredging production according to the 2019 RKAP target Extension of vessel rental Evaluation on dredging vessel rental cooperation 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit</p> <p>Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>

Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi Coordination Meeting between Board of Commissioners and Directors		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
21 Juni 2019 June 21, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan pencapaian kinerja 2018 Penetapan penggunaan laba bersih sebagai cadangan umum Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2019 Penetapan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 Rencana pendanaan investasi pengadaan kapal TSHD Usulan <i>Rolling Plan</i> RJPP 2019-2023 Laporan Laba Rugi per 31 Mei 2019 Persiapan agenda rapat selanjutnya Discussion of 2018 achievements Determination of net income use as general reserves Determination of the Public Accounting Firm (KAP) for the 2019 financial year Determination of bonuses/performance incentives for Directors and Board of Commissioners in 2018 Investment plan to procure TSHD vessel RJPP 2019-2023 Rolling Plan Proposal Income Statement as of May 31, 2019 Preparation for the next meeting agenda 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
15 Juli 2019 July 15, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses administrasi dan penyediaan alat produksi Percepatan penyelesaian permasalahan internal dan eksternal Pencapaian pendapatan sesuai target RKAP tahun 2019 Koordinasi antar departemen Pembahasan kontrak kerja pengerukan Rencana pendanaan investasi pengadaan kapal TSHD Percepatan penagihan piutang Penyelesaian kewajiban hutang Manajemen perkapalan Perusahaan Persiapan agenda rapat selanjutnya Acceleration on administration process and provision of production equipment Acceleration to solve internal and external issues Achievement of revenue in line with the 2019 RKAP target Coordination between departments Discussion on dredging work contracts Investment plan to procure TSHD vessels Acceleration to collect receivables Settlement of debt obligations Corporate vessel management Preparation for the next meeting agenda 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
16 Agustus 2019 August 16, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan per Juli 2019 Informasi terbaru mengenai status kapal Perusahaan Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Company performance as of July 2019 Latest information on the status of the Company's vessels Coordination between the Board of Commissioners and Directors 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>
16 September 2019 September 16, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bisnis Perusahaan ke depannya Laporan hasil temuan Audit Internal dan Eksternal tahun 2018 Kinerja Perusahaan per Agustus 2019 Informasi kemunduran proyek Future business development Internal and External Audit 2018 report Company performance as of August 2019 Project setback information 	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee</p>

Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi Coordination Meeting between Board of Commissioners and Directors		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
7 Oktober 2019 October 7, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan kapal baru Kinerja Perusahaan per September 2019 Usulan penyesuaian tujuan serta kegiatan usaha (Pasal 3 ayat 2) Anggaran Dasar Perusahaan sesuai KBLI 2017 Procurement of new vessels Company performance as of September 2019 Proposal to adjust the objectives and business activities (Article 3 paragraph 2) of the Company's Articles of Association in accordance with the 2017 KBLI 	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee
13 November 2019 November 13, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan per September 2019 Restrukturisasi utang Perusahaan Pengadaan kapal baru Pembahasan 10 (sepuluh) program prioritas 2019 Revisi RKAP 2020 Company performance as of September 2019 Corporate debt restructuring Procurement of new vessels Discussion on 10 (ten) priority programs in 2019 Revised RKAP 2020 	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit Member of the Board of Commissioners, Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee

Catatan:

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris yang aktif bertugas masih dipegang oleh Dani Rusli Utama mengingat pergantian Dewan Komisaris dari anggota lama ke anggota baru dilakukan menjelang akhir tahun 2019.

Notes:

In 2019, the Board of Commissioners is still Dani Rusli Utama since the replacement of the Board of Commissioners from old to new members was done towards the end of 2019.

Berdasarkan informasi mengenai rapat dan agenda yang telah diungkapkan sebelumnya, berikut disampaikan informasi mengenai frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris di tahun 2019.

Based on information about the meetings and agendas earlier, the frequency of meetings and the attendance rate of the Board of Commissioners in 2019 are outlined as follows.

Nama (Jabatan) Name (Position)	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting			Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Coordination Meeting with Audit Committee			Rapat Koordinasi dengan Direksi Coordination Meeting with Directors		
	Jumlah	Kehadiran	%	Jumlah	Kehadiran	%	Jumlah	Kehadiran	%
Dani Rusli Utama* (Komisaris Utama) (President Commissioner)	3	3	100	5	5	100	8	8	100

Catatan:

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris yang aktif bertugas masih dipegang oleh Dani Rusli Utama mengingat pergantian Dewan Komisaris dari anggota lama ke anggota baru dilakukan menjelang akhir tahun 2019.

Notes:

In 2019, the Board of Commissioners is still Dani Rusli Utama since the replacement of the Board of Commissioners from old to new members was done towards the end of 2019.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sangat memperhatikan masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para komite pendukungnya melalui laporan berkala dan pertemuan rutin. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas melalui rapat koordinasi dan tindak pengawasan yang didukung oleh komite-komite pendukungnya. Hingga akhir tahun 2019, komite pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Penilaian kinerja komite Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pada tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite. Kriteria penilaian kinerja komite meliputi realisasi laporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, rekomendasi yang diberikan dan frekuensi rapat yang dilakukan komite dalam membantu fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan fungsinya di tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite pendukung telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dengan memberikan masukan dan rekomendasi secara efektif.

Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners pay close attention about the input and recommendations from their supporting committees through regular reports and meetings. The Board of Commissioners are able to perform their duties through coordination meetings and supervisory actions with the support of the supporting committees. Until the end of 2019, the supporting committees of the Board of Commissioners consist of the Secretary of the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Evaluation on the Board of Commissioners committees is based on the duties and obligations that are stated in the Committee Charter and the Committee's Work Program. The criteria for evaluation include the realization of the committee's tasks according with their responsibilities, their recommendations and the frequency of their meetings to assist the supervisory and advisory function of the Board of Commissioners. In performing their functions in 2019, the Board of Commissioners considers that the supporting committees have done their duties and responsibilities by providing effective input and recommendations.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Suksesi Direksi

Anggota Direksi ditentukan melalui rangkaian mekanisme suksesi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham yang mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Komposisi Direksi Tahun 2019

Direksi berjumlah setidaknya 1 (satu) orang atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategi Perusahaan. Salah seorang anggota Direksi Perusahaan diangkat menjadi Direktur Utama. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Perusahaan juga mengatur mengenai jabatan rangkap anggota Direksi yang melarang anggota untuk memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau perusahaan swasta;
2. Jabatan lainnya yang menyangkut kepemimpinan dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan partai politik untuk pencalonan diri menjadi anggota legislatif atau kepala/wakil daerah;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik atau sirkuler;
5. Anggota Dewan Komisaris perusahaan lain, kecuali:
 - a. Anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan;
 - b. Mewakili/memperjuangkan kepentingan Perusahaan.

The Board of Directors is the Company's organ that has the authority and is fully responsible to manage the Company for its best interest, in accordance with the Company's aims and objectives. The Board of Directors is also authorized to represent the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions in the Articles of Association.

Succession of Board of Directors

In determining the members of the Board of Directors, the Company has a series of succession mechanisms that have been set in accordance with the stipulations from the Shareholders, which refer to applicable regulations and laws. In addition, the stipulations also refer to the Articles of Association and the Board Manual.

Composition of Board of Directors in 2019

The Board of Directors should at least 1 have (one) person or more, adjusted to the needs, level of complexity, and the Company's strategic plan. One member of the Board of Directors is appointed as the Managing Director. The members have a term of office for 5 (five) years and can also be reappointed for 1 (one) more term of office.

The Company has also regulated about concurrent position for the members which prohibit them to hold two positions as follows:

1. Member of the Board of Directors of a SOE, ROE or private company;
2. Other positions related to management in political activities or political parties, self-nominated to become legislative members or regional heads/representatives;
3. Other positions that may lead to a conflict of interest;
4. Dismissed based on the decision made from physical or circular GMS;
5. Members of the Board of Commissioners of other companies, except:
 - a. Subsidiaries/joint ventures of the relevant SOEs;
 - b. Represent/fight for the interests of the Company.

Komposisi Direksi Perusahaan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut. Seluruh Direksi yang menjabat tahun 2019 telah melewati *fit and proper test* dan dinyatakan lulus. Profil seluruh anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The composition of the Company's Directors in 2019 can be seen in the following table. All Directors who were appointed in 2019 have passed the fit and proper test. The profiles of all members of the Board of Directors can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Establishment	Periode Jabatan Office Period
Wahyu Hardiyanto	Direktur Utama Managing Director	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No.217 tanggal 29 Juli 2019. Shareholders Circular Decision Number: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No.217 dated July 29, 2019.	Pertama First
Indra Sigit Satyaputra	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No.217 tanggal 29 Juli 2019. Shareholders Circular Decision Number: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No.217 dated July 29, 2019.	Pertama First
Ari Santoso	Direktur Komersial dan Teknik Director of Commercial and Engineering	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No.217 tanggal 29 Juli 2019. Shareholders Circular Decision Number: sK.03/1/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 and Number: PPI-623-003066 on July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors and was notarized based on Deed No.217 dated July 29, 2019.	Pertama First
M. Hadi Syafitri Noor*	Direktur Utama Managing Director	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi. Shareholders Circular Decision Number: HK.568/10/3/9/PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 on March 10, 2017 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors.	Pertama First
Budi Priyanto*	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi. Shareholders Circular Decision Number: HK.568/10/3/9/PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 on March 10, 2017 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors.	Pertama First
Muhammad Yusuf*	Plt. Direktur Komersial dan Teknik Act Director of Commercial and Engineering	Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK.03/21/3/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: PPI-623-005167 tanggal 6 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi. Shareholders Circular Decision Number: HK.568/10/3/9/PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 on March 10, 2017 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors.	Pertama First

Catatan:

* Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

* The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Independensi Direksi

Board Manual Perusahaan mengatur secara khusus tentang independensi Direksi untuk memastikan bahwa Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan. Independensi menjadi salah satu faktor yang harus dijaga dengan ketetapan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perusahaan.
2. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

Berikut disampaikan informasi mengenai independensi Direksi terkait hubungan afiliasi, kepemilikan saham, rangkap jabatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Independency of Directors

The Company's Board Manual specifically regulates the independency of the Directors to ensure that they can act properly for the Company's interests in general. Independency is a factor that must be maintained with the following provisions:

1. Other than Directors, any other party is prohibited from engaging in or interfering in the management of the Company.
2. Each member of the Board of Directors is prohibited from performing activities that could interfere with their independence in managing the Company.

Information regarding the independency of Directors related to affiliation, share ownership, concurrent positions, and other criteria in accordance with regulations and laws is outlined below.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Wahyu Hardiyanto	Indra Sigit Satyaputra	Ari Santoso	M. Hadi Syafitri Noor*	Budi Priyanto*	Muhammad Yusuf*
Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perusahaan. Other than Directors, any other party is prohibited from engaging in or interfering in the management of the Company.	V	V	V	V	V	V
Setiap anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan. Each member of the Board of Directors is prohibited from performing activities that could interfere with their independence in managing the Company.	V	V	V	V	V	V
Status	V	V	V	V	V	V

Keterangan:

V = Independen

X = Tidak Independen

* Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

V = Independent

X = Not Independent

* The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Board Manual

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengacu kepada *Board Manual* Perusahaan yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016. *Board Manual* dibentuk dengan maksud untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, agar tercipta integritas dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. *Board Manual* dipercaya akan membantu Direksi untuk mempertegas komitmennya dalam menjalankan amanat tugas Perusahaan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Board Manual Perusahaan telah disusun dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .

Beberapa hal yang diatur dalam *Board Manual* terkait lingkup pelaksanaan tugas Direksi adalah:

1. Persyaratan, komposisi dan keanggotaan masa jabatan;
2. Pengangkatan dan pemberhentian;
3. Jabatan rangkap;
4. Benturan kepentingan;
5. Independensi (kemandirian);
6. Etika Jabatan;
7. Kewajiban, tugas dan tanggung jawab
8. Hak dan wewenang;
9. Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas;
10. Rapat dan pengambilan keputusan;
11. Penilaian dan evaluasi kinerja;
12. Organ pendukung;
13. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual

In carrying out their duties, the Directors refer to the Company's Board Manual that has been ratified and signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The Board Manual was established with the intention to describe the standard pattern of working relations between the Board of Commissioners and Directors in performing their duties to bring integrity in performing the Company's business activities. The Board Manual is set to help the Directors to reinforce their commitment to be serious, fully dedicated and be responsible, in accordance with the principles of Good Corporate Governance, in performing the mandate that the Company has given.

The Company's Board Manual has been prepared by referring to SOE Ministerial Regulation Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 Jo. State Minister of SOE Regulation Number Per-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 regarding Implementation of Good Corporate Governance.

Several issues that are regulated in the Board Manual regarding the scope of Directors' tasks are:

1. Requirements, composition and term of office of members;
2. Appointment and dismissal;
3. Concurrent positions;
4. Conflict of interest;
5. Independency;
6. Code of Conduct;
7. Obligations, duties, and responsibilities
8. Rights and authorities;
9. Induction and capability enhancement program;
10. Meetings and decision making;
11. Assessment and performance evaluation;
12. Supporting organs;
13. Working relations between the Board of Commissioners and Directors.

Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab Direksi

Direksi Rukindo memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab secara umum untuk menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Tugas dan kewajiban Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan yang dirangkum dan diuraikan secara terperinci sebagaimana diatur dalam Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Rukindo.

Tugas Direksi secara garis besar terdiri dari tugas-tugas yang terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Perusahaan;
2. Strategi dan rencana kerja;
3. Sistem akuntansi, pembukuan, dan laporan;
4. Manajemen risiko;
5. Teknologi informasi;
6. Pengendalian intern;
7. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM);
8. Pengadaan barang dan jasa;
9. Peningkatan mutu layanan;
10. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
11. Pengelolaan informasi;
12. Serta tugas lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas namun penting untuk menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan.

Dalam hal tanggung jawab, mengenai pengurusan Perusahaan, Direksi berkewajiban untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS. Terdapat tanggung jawab secara renteng bagi setiap anggota Direksi namun setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Perusahaan dan mengambil keputusan lain di luar rapat Direksi.

Terdapat pembagian tugas di antara anggota Direksi untuk menjamin pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien tanpa menghilangkan tanggung jawab secara kolegal. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang setiap anggota Direksi di Perusahaan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sendiri dan

Duties, Obligations and Responsibilities of Directors

In general, Rukindo's Directors has the duties, obligations, and responsibilities to conduct the function of managing the Company, based on the agreed Work Plan and Budget (RKAP). This management will be accounted for at the GMS. The duties and obligations of the Directors refer to the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association which are summarized and described in detail as stipulated in the Board Manual of Rukindo for both Directors and Board of Commissioners.

The duties of Directors, in general, consist of several tasks as outlined as follows:

1. Company Documents;
2. Strategies and work plans;
3. Accounting, bookkeeping, and reporting systems;
4. Risk management;
5. Information technology;
6. Internal control;
7. Management of human resources (HR);
8. Procurement of goods and services;
9. Improvement of service quality;
10. Relations with Stakeholders;
11. Information management;
12. As well as other tasks that are not included above but as important to ensure the continuity of the Company's business.

In terms of responsibilities, regarding the management of the Company, the Directors are obligated to follow the GMS instructions. There are collegial responsibilities for each member of the Board of Directors, but each Director has a personal responsibility if the person done something wrong or neglected to perform the duties for the best interest of the Company's business and even makes other decisions outside the Board of Directors' meeting.

There is a division of tasks among members of the Board of Directors to ensure that they can perform their tasks more effectively and efficiently without eliminating collegial responsibilities. The composition and division of duties and authority of each member of the Board of Directors in the Company have been determined unilaterally by themselves

dijabarkan secara lebih rinci dalam struktur organisasi serta diperbaharui sesuai kebutuhan.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam rangka menjamin efektivitas tugasnya, Direksi melaksanakan pembagian tugas di antara anggota yang mencakup seluruh bidang tugas Direksi sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota secara perorangan atau kolektif. Pada tahun 2019, Direksi Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi Rukindo per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada informasi berikut ini.

and haven been described in thoroughly in the organizational structure and updated as needed

Division of Duties among Board of Directors

To ensure that Directors can perform their duties effectively, there are division of tasks among members that cover all areas of their duties to be in accordance with their respective obligations, responsibilities and authorities and therefore create clarity on the role of members, both individually or collegially. In 2019, the Company's Board of Directors consist of 3 (three) members with different positions and responsibilities. The division of duties and responsibilities of each Director of Rukindo as of December 31, 2019 can be seen in the following information.

Wahyu Hardiyanto Direktur Utama/Managing Director

Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan dan Hukum, Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha, para Manager/General Manager serta bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi perusahaan dan unit kerja kapal, proyek pengerukan dan/atau reklamasi dan proyek perbaikan/perawatan alat produksi secara menyeluruh dan mengendalikan pelaksanaan fungsi unit kerja serta bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Controlling the Board of Directors' policies held by Directors, Head of Internal Audit Unit, Corporate Secretary and Legal, Head of Business Planning and Development, Managers/General Managers, and together with Directors in their positions as Directors of companies and ship work units, dredging projects and/or reclamation, and comprehensive production equipment repair/maintenance projects, controlling the work unit functions, and being responsible for implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Indra Sigit Satyaputra Direktur Direktur Keuangan dan SDM/Director of Finance and HR

Merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan Sumber Daya Manusia dan Umum, Keuangan, *Health, Safety, Security, Environment, Quality* dan Manajemen Risiko (HSSEQ dan Manajemen Risiko) serta logistik sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

Planning, controlling, and implementing the coaching activities of Human Resources and General Services, Finance, Health, Safety, Security, Environment, Quality, and Risk Management (HSSEQ and Risk Management), and logistics, in accordance with the predetermined Company's strategies and policies.

Ari Santoso Direktur Komersial dan Teknik/Director of Commercial and Engineering

Merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan pembinaan, operasi, armada, galangan dan perbengkelan kapal sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

Planning, controlling, and implementing the coaching activities of operations, fleet, shipyard, and shipbuilding, in accordance with the predetermined company's strategies and policies.

Kriteria Anggota Direksi

Sesuai *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, persyaratan untuk menjadi anggota Direksi mencakup persyaratan formal yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan material.

Criteria for Members of Board of Directors

In accordance with the Company's Board Manual, the requirements to become a member of the Board of Directors include formal, basic requirements, set forth in the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and other material requirements.

Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan material mencakup sikap mental dan kesehatan fisik seorang Direksi yang dapat dipercaya mengemban tugasnya dan berdedikasi untuk kemajuan Perusahaan dan juga tidak terlibat dalam kegiatan politik sebagai anggota partai ataupun sebagai calon. Calon anggota Direksi juga diwajibkan tidak menjabat Direksi suatu perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Program Pengenalan Anggota Direksi Baru

Perusahaan memiliki program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Penanggung jawab program ini adalah Sekretaris Perusahaan dan Hukum. Materi yang disampaikan dalam program pengenalan mencakup kondisi Perusahaan secara umum dan hal-hal lain yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan pedoman serta kelengkapan GCG yang dimiliki Perusahaan;
2. Masalah-masalah strategis yang meliputi rencana usaha jangka pendek dan panjang, kinerja keuangan dan operasional dan lainnya;
3. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak-hak Direksi.

Pada tahun 2019, Direksi Perusahaan yang baru yaitu Wahyu Hardiyanto (Direktur Utama), Indra Sigit Satyaputra (Direktur Keuangan dan SDM), dan Ari Santoso (Direktur Komersial dan Teknik), yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: sK.03/I/7/6/MrA/uT/Pr. rr-19 dan Nomor: PPI-623-01012019-001 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan telah diaktakan berdasarkan Akta No.217 tanggal 29 Juli 2019 telah mengikuti program pengenalan dimaksud.

Members of the Board of Directors are individuals who are capable to perform legal actions, except in the last 5 (five) years prior to their appointment are:

1. Declared bankrupt;
2. A member of the Board of Directors or Board of Commissioners who were found guilty of causing and/or the Company to go bankrupt;
3. Convicted of a criminal offense that is detrimental to the State finances, SOEs, companies, and/or related to the financial sector.

Material requirements that include the mental attitude and physical health of a Directors who can be trusted to perform the duties and is dedicated to the pursue the Company's progress and not involve in political activities as a member of a political party or as a candidate. The candidates are also required to not serve as a Director for other companies for 2 (two) consecutive periods.

Induction Program for New Member of Board of Directors

The Company has an induction program for the newly appointed members of the Board of Directors. The responsibility to conduct this program lies on the Corporate Secretary and Legal. The induction program covers the general condition of the Company and other matters including:

1. The implementation of GCG principles and GCG guidelines and completeness owned by the Company;
2. Strategic issues which include short and long term business plans, financial and operational performance and others;
3. Obligations, duties, responsibilities, authorities and rights of the Board of Commissioners.

In 2019, the new Directors are Wahyu Hardiyanto (Managing Director), Indra Sigit Satyaputra (Director of Finance and HR), and Ari Santoso (Director of Commercial and Engineering), who were appointed based on the Decision of the Company's Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK .03/I/7/6/MrA/u/Pr/rr-19 and Number: PPI-623-01012019-001 dated July 1, 2019 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and notarized based on Deed No.217 dated July 29, 2019, has participated in the induction program.

Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

Perusahaan menilai penting untuk meningkatkan kapabilitas Direksi. Hal ini sangat berguna bagi Direksi untuk dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan. Peningkatan kapabilitas diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan Direksi untuk mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari yang dapat berdampak bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Selama tahun 2019, kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh semua anggota Direksi adalah mengenai Pelatihan dari Grup IPC, Minuat Indonesia – *Problem Solving Decision, Making Creative Thinking Technique*.

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2019

Pada tahun 2019, Direksi Rukindo telah melaksanakan berbagai kegiatan program kerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam berupaya mencapai target Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan RKAP.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris dalam rapat tersebut. Secara garis besar, rapat Direksi menjadi satu mekanisme pengambilan keputusan secara formal bagi Direksi sehingga dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat.

Direksi telah melaksanakan rapat internal sesuai kebutuhan selama tahun 2019. Sedangkan rapat gabungan (rapat koordinasi) bersama Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dan juga dihadiri oleh Komite Audit. Pembahasan mengenai rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan dalam pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Direksi, baik anggota Direksi yang lama sebelum perubahan dan anggota Direksi per 31 Desember 2019 telah mengikuti setiap rapat.

Capability Enhancement for Board of Directors

The Company believes that it is important to improve the capabilities of the Directors. This is very useful for the Directors to keep updated with current information in the Company's core business. The capability enhancement is expected to improve the ability of Directors to anticipate future problems that may impacted the Company's sustainability and progress.

In 2019, the training and competency development programs that all Directors have followed were the Training from IPC Group, Minuat Indonesia – *Problem Solving Decision, Making Creative Thinking Technique*.

Realization of Board of Directors Duties in 2019

In 2019, the Board of Directors of Rukindo has conducted various activities as a form their duties and responsibilities in striving to achieve the Company's overall targets that have been set forth in the RKAP.

Board of Directors Meeting

As stipulated in the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Directors meetings must be held periodically, at least once a month. Directors can invite the Board of Commissioners to attend the meeting. Broadly speaking, the Board of Directors meeting becomes a formal decision-making mechanism for the Directors and therefore there should be minutes after every meeting.

The Board of Directors have conducted the internal meetings in 2019 according to their needs. In addition, the joint meetings (coordination meetings) with the Board of Commissioners were held 8 (eight) times and were also attended by the Audit Committee. Discussions at the coordination meetings have been presented in the Board of Commissioners' Meeting. Every member of the Board of Directors, both of the old members prior to change and those as of December 31, 2019, have attended every meeting.

Berdasarkan informasi mengenai rapat dan agenda yang telah diungkapkan sebelumnya, berikut disampaikan informasi mengenai frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Direksi di tahun 2019.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Direksi sangat memperhatikan masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para komite pendukungnya melalui laporan berkala dan pertemuan rutin. Direksi juga memanfaatkan komite pendukungnya sebagai perpanjangan tangan dalam mengelola Perusahaan. Hingga akhir tahun 2019, Komite pendukung Direksi terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Hukum dan Internal Audit.

Penilaian kinerja komite Direksi dilakukan berdasarkan pada tugas dan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab serta program kerja masing-masing komite. Kriteria penilaian kinerja komite meliputi realisasi laporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, rekomendasi yang diberikan dan frekuensi rapat yang dilakukan komite dalam membantu fungsi pengelolaan Direksi. Dalam pelaksanaan fungsinya di tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite pendukung telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan masukan dan rekomendasi secara efektif.

Based on earlier information regarding the meetings and agendas, the information regarding the frequency of meetings and the attendance of Directors in 2019 are outlined below

Assessment of Committees Under the Board of Directors

The Directors pay close attention about the input and recommendations from their supporting committees through regular reports and meetings. The Directors also utilize its supporting committee as an extension in managing the Company. Until the end of 2019, the Committee that supports the Directors consists of the Corporate Secretary and Legal and Internal Audit.

The evaluation on the Directors' committees is based on their duties and obligations set forth in the provisions concerning the duties and responsibilities and the working programs of each committee. The criteria to evaluate the performance of the committee covers the realization of the committee's duties in accordance with their respective responsibilities, recommendations and the frequency of meetings that the committees have conducted to assist the Board of Directors' management functions. In conducting the functions in 2019, the Directors believed that the supporting committees have performed their duties and responsibilities properly by through input and recommendations.

Assessment Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam pertumbuhan Perusahaan. Hal ini membuat *assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan. *Assessment* terhadap Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan kriteria yang dituangkan ke dalam indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham.

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris tahun 2019 dilakukan untuk menilai kinerja Dani Rusli Utama, anggota Dewan Komisaris yang lama, mengingat pergantian Dewan Komisaris dari anggota lama ke anggota baru dilakukan menjelang akhir tahun 2019.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian, yaitu Rapat Dewan Komisaris, Kunjungan Kerja, Pelatihan Dewan Komisaris, serta Pengawasan dan Pemberian Nasihat. Berikut disampaikan indikator, bobot dan target KPI Dewan Komisaris.

As the main organ in the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the growth of the Company. This makes the assessment on these two organs to be very important. The assessment on the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012.

Assessment on the Performance of Board of Commissioners

The policies on measurement and evaluation on the performance of the Board of Commissioners are regulated in the Board Manual with the following provisions and procedures:

1. The GMS must determine the Key Performance Indicators based on the proposal from the Board of Commissioners.
2. The Performance Indicators is a measurement to assess the implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities in providing supervision and advice that are in accordance with statutory provisions and/or articles of association.
3. The Board of Commissioners must submit quarterly reports on the realization of the Performance Indicators Achievement to the Shareholders.

The assessment on the Board of Commissioners performance is conducted by the Shareholders through the GMS, and it was all based on the criteria in the performance and target indicators set forth and approved by the Shareholders.

The Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2019 were set forth to assess the performance of Dani Rusli Utama, the previous member of the Board of Commissioners, seeing that the replacement of the Board of Commissioners from old to new members was done towards the end of 2019.

There are 4 (four) aspects on the assessment, such as the Board of Commissioners Meeting, Site Visit, Board of Commissioners Training, as well as Supervision and Advice. The the indicators, values and targets for the Board of Commissioners KPI are outlined as follows.

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Value	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement (%)	Skor Score
1.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting						
1.a.	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting	Kehadiran Attendance	17	6	2	33	6
1.b.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors	Kehadiran Attendance	17	6	5	83	14
1.c.	RUPS Laporan Tahunan Annual Report GMS	Kehadiran Attendance	16	1	1	100	16
2.	Kunjungan Kerja Site Visit						
2.a.	Tingkat kehadiran Dewan Komisaris Attendance Level of Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	5	1	0	0	0
2.b.	Laporan hasil kunjungan kerja Report of Site Visit	Laporan Report	5	1	0	0	0
3.	Pelatihan Dewan Komisaris Board of Commissioners Training						
3.a.	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development for Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	10	1	1	100	10
3.b.	Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi Report of Competency Development		10	1	1	100	10
4.	Pengawasan dan Pemberian Nasihat Supervision and Advice						
4.a.	Pendapat dan saran atas RJPP Opinion and recommendation on RJPP	Hari Day	2	H+30	7	100	2
4.b.	Pendapat dan saran RKAP Opinion and recommendation on RKAP	Hari Day	1	H+30	7	100	1
4.c.	Pendapat dan saran atas laporan berkala Opinion and recommendation on regular report	Hari Day	1	H+14	1	100	1
4.d.	Pendapat dan saran atas Laporan Tahunan Opinion and recommendation on Annual Report	Hari Day	1	H+30	3	100	1
4.e.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS Responses to the actions of the Board of Directors which must obtain GMS approval	Hari Day	1	H+14	3	100	1
4.f.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Responses to the actions of the Board of Directors that must obtain Board of Commissioners approval	Hari Day	1	H+14	4	100	1
4.g.	Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan Important things about changes in the business environment that have a major impact on business and company performance	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.h.	Merespons saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) Respond to suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees)	Hari Day	1	H+14	2	100	1

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Value	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement (%)	Skor Score
4.i.	Arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan Direction on reinforcement of the company's internal control system	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.j.	Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan Company risk management policies and implementation	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.k.	Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut Human resource policy and implementation	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.l.	Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut Accounting policies and preparation of financial statements and the implementation	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.m.	Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya Procurement policy and implementation	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.n.	Evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP Evaluation on the implementation of RKAP	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.o.	Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris Transactions or actions within the scope of the Board of Commissioners' authority	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.p.	Memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif Ensure that external and internal audits and internal audits are conducted effectively	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.q.	Pembahasan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan Discussion on indications of declining company performance	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.r.	Memberikan arahan terhadap usulan remunerasi Direksi Give direction to the proposal of Directors remuneration	Hari Day	1	H+14	2	100	1
4.s.	Memantau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Monitor the implementation of the good corporate governance principles	Hari Day	1	H+14	2	100	1
Jumlah/Total			100				76

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi yang berlaku di Rukindo, sesuai dengan *Board Charter* Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.
2. Kinerja Direksi didasarkan pada kolegial berupa kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Assessment on the Performance of Board of Commissioners

The applicable evaluation process at Rukindo on the Directors performance, that is set in accordance with the Company's Board Charter, is as follows:

1. The Directors compile and submit the Company's performance, formulated based on collegial targets, to Board of Commissioners.
2. The performance of Directors is a collegial performance that is set forth as a management contract signed by the Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders.

3. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.
 4. Kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3. The Directors compile and submit the performance of each Directorate, based on the Management Contract, to the Board of Commissioners and treat it as the performance of each Director.
 4. The Directors performance is determined based on their duties, authorities, obligations and responsibilities that are set forth in the Company's Articles of Association, by GMS decisions, and applicable laws and regulations.
 5. The Directors performance, both collegially and individually, will be evaluated annually by the Shareholders at the GMS.

Kinerja Direksi sesuai dengan target RKAP Perusahaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pembahasan mengenai RKAP Perusahaan tahun 2019 dapat dilihat pada Perbandingan Target dan Realisasi 2019 yang terdapat pada Laporan Tahunan ini.

The Directors' performance is set forth in accordance with the Company's target in the RKAP that is set every year. Discussions on the Company's RKAP in 2019 can be seen in the Comparison of 2019 Targets and Realizations in this Annual Report.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Rukindo ditetapkan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017 dan NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 serta berdasarkan Keputusan Pemegang Saham. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan penghasilan yang berupa *tantien/insentif kinerja* yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration for the Board of Commissioners and Directors of Rukindo is stipulated based on the reference to SOE Ministerial Regulation Number PER-04/MBU/ 2014 which has been amended several times by SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/06/2016, Number PER-01/MBU/06/2017 and NUMBER PER-06/MBU/06/2018 and based on Shareholders Decision. The income, in the form of permanent salary or honorarium, allowances and facilities, is determined based on several factors including the Company's business scale, business complexity, inflation rates, financial condition and ability and other relevant factors, and should not be conflicting with the applicable regulations. In addition, there is another income such as bonuses/performance incentives that are varied (*merit rating*) and the determination is done by considering the performance and financial capabilities of the Company, as well as other relevant factors.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure of Board of Commissioners and Directors

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure for Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure for Directors
<p>Honorarium</p> <p>Tunjangan yang terdiri atas:</p> <p>Tunjangan Hari Raya;</p> <p>Purna jabatan;</p> <p>Tunjangan transportasi.</p> <p>Fasilitas, yang terdiri atas:</p> <p>Fasilitas kesehatan;</p> <p>Perkumpulan profesi;</p> <p>Bantuan hukum.</p> <p>Tantiem/insentif kinerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>).</p> <p>Honorarium</p> <p>Allowances comprising of:</p> <p>Holiday allowance;</p> <p>Pension;</p> <p>Transportation allowance.</p> <p>Facilities comprising of:</p> <p>Medical facility;</p> <p>Professional associations;</p> <p>Legal aid.</p> <p>Tantiem/performance incentives, in which the tantiem may consist of additional Long Term Incentives/LTI.</p>	<p>Gaji</p> <p>Tunjangan yang terdiri atas:</p> <p>Tunjangan Hari Raya;</p> <p>Tunjangan komunikasi;</p> <p>Purna jabatan;</p> <p>Tunjangan pakaian;</p> <p>Tunjangan cuti tahunan;</p> <p>Tunjangan perumahan.</p> <p>Fasilitas, yang terdiri atas :</p> <p>Fasilitas kendaraan dinas;</p> <p>Fasilitas kesehatan;</p> <p>Perkumpulan profesi;</p> <p>Bantuan hukum;</p> <p><i>Club membership</i>;</p> <p>Biaya representasi.</p> <p>Tantiem/insentif kinerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>).</p> <p>Salary</p> <p>Allowances comprising of:</p> <p>Holiday allowance;</p> <p>Communication allowance;</p> <p>Pension;</p> <p>Uniform allowance;</p> <p>Annual leave;</p> <p>Housing allowance.</p> <p>Facilities comprising of:</p> <p>Official vehicle;</p> <p>Medical facilities;</p> <p>Professional associations;</p> <p>Legal aid;</p> <p>Club membership;</p> <p>Representation fee.</p> <p>Tantiem/performance incentives, in which the tantiem may consist of additional Long Term Incentives/LTI.</p>

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi mempertimbangkan indikator yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Dalam hal ini indikator yang dimaksud adalah *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak manajemen Direksi sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja Direksi.

Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Rukindo menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Indicator to Determine the Remuneration for Directors

Remuneration for Directors is based on the indicators that the Shareholders have decided. In this case, the indicator is referring to the Key Performance Indicator (KPI) or the management contract, as one way to assess the Directors' performance.

Remuneration Procedure for Board of Commissioners and Directors

Rukindo determines the income for the Board of Commissioners and Directors through the General Meeting of Shareholders, by taking into account the following provisions:

1. Direktur Utama: 100%
2. Direktur: 90% dari Direktur Utama
3. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama
4. Komisaris: 90% dari Komisaris Utama

1. Managing Director: 100%
2. Director: 90% of the Managing Director
3. President Commissioner: 45% of the Managing Director
4. Commissioner: 90% of the President Commissioner

Penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melalui tahapan sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai berikut:

The income for the Board of Commissioners and Directors can go through several stages as described in the Guidelines for Subsidiary Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as follows:

Tahap/Step 1	Tahap/Step 2	Tahap/Step 3	Tahap/Step 4
Direksi Perusahaan dapat mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi. The Company's Board of Directors can submit remuneration proposals to the Board of Commissioners to obtain recommendations.	Dewan Komisaris melakukan kajian remunerasi dan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris, selanjutnya Direksi meneruskan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. The Board of Commissioners reviews remuneration and after obtaining a recommendation from the Board of Commissioners, the Board of Directors goes to the GMS to obtain approval.	Usulan remunerasi dikaji terlebih dahulu oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Pemegang Saham Utama. The proposed remuneration is reviewed in advance by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the Major Shareholder.	Persetujuan dan pengesahan atas besaran, bentuk dan waktu berlaku remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan Pemegang Saham dalam RUPS atau Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler (RUPS Sirkuler). Approval and ratification of the amount, form, and time of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be carried out by the Shareholders in the GMS or Circular Shareholders' Resolutions (Circular GMS).

Nilai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Rukindo ditetapkan berdasarkan RUPS. Ketetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Remuneration Values of Board of Commissioners and Directors

The remuneration for Rukindo's Board of Commissioners and Directors remuneration is based on the GMS. The remuneration structure for the Board of Commissioners can be seen in the following table.

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Amount
Komisaris Utama President Commissioner	Honorarium Honorarium	45% dari gaji Direktur Utama 45% from the salary of Managing Director
Komisaris Commissioner	Honorarium Honorarium	90% dari gaji Komisaris Utama 90% from the salary of President Commissioner

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Amount
Komisaris Utama dan Komisaris President Commissioner and Commissioner	Tunjangan: Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	1 kali Honorarium. 1x Honorarium.
	Santunan Purna Jabatan Pension	25% Honorarium setahun. 25% of annual Honorarium
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% Honorarium 20% Honorarium
	Fasilitas: Facilities:	
	Kesehatan Healthcare	Diberikan hanya untuk Komisaris Independen dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Provided only to Independent Commissioner as health insurance or reimbursement of medical expenses.
	Perkumpulan Profesi Professional Associations	Diberikan sesuai anggaran Perusahaan. Given according to the Company's budget.
Bantuan Hukum Legal Assistance	Diberikan sesuai kebutuhan. As needed.	

Sedangkan ketentuan remunerasi untuk anggota Direksi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

The remuneration structure for members of the Board of Directors can be seen in the following table.

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Amount
Direktur Utama President Director	Gaji Salary	Diberikan sesuai ketentuan Perusahaan. Given according to the Company's provision.
Direktur Director	Gaji Salary	Diberikan sesuai ketentuan Perusahaan. Given according to the Company's provision.
Direktur Utama dan Direktur Managing Director and Director	Tunjangan: Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	1 kali Gaji. 1 time Salary.
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan at cost. Given at cost.
	Santunan Purna Jabatan Pension	25% Gaji setahun. 25% annual Salary.
	Tunjangan Pakaian Uniform Allowance	Diberikan sesuai anggaran Perusahaan. Given according to Company's budget.
	Tunjangan Cuti Tahunan Annual Leave Allowance	Hak cuti dapat diambil setelah bekerja 12 bulan, tanpa diberikan tunjangan cuti tahunan. Leave entitlement can be taken after 12 months of work, without annual leave allowance.
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	40% dari Gaji 40% of Salary
Fasilitas: Facilities		
Kendaraan Dinas Official Vehicles	Diberikan kendaraan dinas. Provided with official vehicles.	

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Amount
	Kesehatan Healthcare	Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Provided as health insurance or reimbursement of medical expenses.
	Perkumpulan Profesi Professional Associations	Diberikan sesuai anggaran Perusahaan. Given according to Company's budget.
	Bantuan Hukum Legal Assistance	Diberikan sesuai kebutuhan. As needed.
	Club Membership Club Membership	Diberikan sesuai anggaran Perusahaan. Given according to Company's budget.
	Biaya Representasi Representation Fees	Diberikan sesuai anggaran Perusahaan. Given according to Company's budget.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi

Affiliated Relations

Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, dengan kepemilikan saham sebanyak 99,9% dari total saham Perusahaan.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama Direksi maupun antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, serta Komite lainnya tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

Information on Major/Controlling Shareholders

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the Major and Controlling Shareholder of the Company, with ownership of 99.9% of the Company's total shares.

Disclosure of Affiliated Relations between Directors, Board of Commissioners, and Major/Controlling Shareholders

Among fellow members of the Board of Commissioners, fellow Directors as well as between the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, and other Committees, there is no affiliation existed as referred to in the provisions on Good Corporate Governance. Disclosure of affiliation includes family relations and financial relations. The financial relations can be in the form of debts, business cooperation, and others. The family relations can be in the form of special relations mainly due to blood relations including relations of husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on.

	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with				Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Share Owners	Komite Lainnya Other Committees	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Share Owners	Komite Lainnya Other Committees
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Prasetyadi (Komisaris Utama/President Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Bambang Supriyadi Ervan (Komisaris/ Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Syaiful Islam (Komisaris/ Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Dani Rusli Utama* (Komisaris Utama/President Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Direksi Board of Directors								
Wahyu Hardiyanto (Direktur Utama/ Managing Director)	x	x	x	x	x	x	x	x

	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with				Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Share Owners	Komite Lainnya Other Committees	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Share Owners	Komite Lainnya Other Committees
Indra Sigit Satyaputra (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ari Santoso (Direktur Komersial dan Teknik/Director of Commercial and Engineering)	x	x	x	x	x	x	x	x
M. Hadi Syafitri Noor** (Direktur Utama/Managing Director)	x	x	x	x	x	x	x	x
Budi Priyanto** (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	x	x	x	x	x	x	x	x
Muhammad Yusuf** (Plt. Direktur Komersial dan Teknik/Act. Director of Commercial and Engineering)	x	x	x	x	x	x	x	x

Keterangan:

x = tidak memiliki hubungan

v = memiliki hubungan

* Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

** Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

x = has no relation

v = has a relation

* The Company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

** The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Concurrent Position between Board of Commissioners and Board of Directors

Informasi mengenai hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2019 diungkapkan dalam tabel berikut ini.

Information regarding the management relationships of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in other companies in 2019 is disclosed in the following table.

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Dewan Komisaris As a Commissioner	Sebagai Direksi As a Director	Jabatan Lain Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Prasetyadi (Komisaris Utama/ President Commissioner)	x	v	x
Bambang Supriyadi Ervan (Komisaris/Commissioner)	x	x	v
Syaiful Islam (Komisaris/ Commissioner)	x	x	x
Dani Rusli Utama* (Komisaris Utama/President Commissioner)	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Wahyu Hardiyanto (Direktur Utama/ Managing Director)	x	x	x
Indra Sigit Satyaputra (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	x	x	x
Ari Santoso (Direktur Komersial dan Teknik/Director of Commercial and Engineering)	x	x	x
M. Hadi Syafitri Noor** (Direktur Utama/Managing Director)	x	x	x
Budi Priyanto** (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	x	x	x
Muhammad Yusuf** (Plt. Direktur Komersial dan Teknik/ Act. Director of Commercial and Engineering)	x	x	x

Keterangan:

x = tidak memiliki jabatan rangkap

v = memiliki jabatan rangkap

* Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

** Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

x = has no relation

v = has a relation

* The Company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

** The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Dalam merangkap jabatan, Dewan Komisaris dan Direksi telah memahami ketentuan yang terdapat di *Board Manual* mengenai rangkap jabatan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memahami untuk tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perusahaan, yang dilarang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

In holding concurrent positions, the Board of Commissioners and Directors have understood the regulations in the Board Manual regarding concurrent positions. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are aware to not hold another position that can have a direct conflict of interest with the Company, which is prohibited according to the stipulation in the Articles of Association, and/or contrary to the provisions of the applicable laws and regulations. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have also signed a statement of not having a conflict of interest (Integrity Pact) and declare it in a written statement on any matters that have the potential to cause a conflict of interest and submit it to the GMS, as well as complying with applicable laws and regulations, including not involving himself as an insider trading for personal gain.

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Prasetyadi (Komisaris Utama/President Commissioner)	Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II/IPC-Jakarta (2016-sekarang) Director of Operation and Information System at PT Pelabuhan Indonesia II/IPC-Jakarta (2016-present)
Bambang Supriyadi Ervan (Komisaris/Commissioner)	Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi Informasi dan Kehumasan (2017-sekarang) Special Staff for the Minister of Transportation in Information Technology and Public Relations (2017-present)
Syaiful Islam (Komisaris/Commissioner)	-
Dani Rusli Utama* (Komisaris Utama/President Commissioner)	-
Direksi Board of Directors	
Wahyu Hardiyanto (Direktur Utama/Managing Director)	-
Indra Sigit Satyaputra (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	-
Ari Santoso (Direktur Komersial dan Teknik/Director of Commercial and Engineering)	-
M. Hadi Syafitri Noor** (Direktur Utama/Managing Director)	-
Budi Priyanto** (Direktur Keuangan dan SDM)/Director of Finance and HR)	-
Muhammad Yusuf** (Plt. Direktur Komersial dan Teknik/Act. Director of Commercial and Engineering)	-

Keterangan:

x = tidak memiliki hubungan

v = memiliki hubungan

* Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

** Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

x = has no relation

v = has a relation

* The Company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

** The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership Disclosure on Board of Commissioners and Directors

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan di Rukindo dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Information regarding the share ownership on members of the Company's Board of Commissioners and Directors, at Rukindo and other companies, is regularly disclosed through the list of members' share ownership.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Rukindo	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Prasetyadi (Komisaris Utama/President Commissioner)	x	x
Bambang Supriyadi Ervan (Komisaris/Commissioner)	x	x
Syaiful Islam (Komisaris/Commissioner)	x	x
Dani Rusli Utama* (Komisaris Utama/President Commissioner)	x	x
Wahyu Hardiyanto (Direktur Utama/Managing Director)	x	x
Indra Sigit Satyaputra (Direktur Keuangan dan SDM/Director of Finance and HR)	x	x
Ari Santoso (Direktur Komersial dan Teknik/Director of Commercial and Engineering)	x	x
M. Hadi Syafitri Noor** (Direktur Utama/Managing Director)	x	x
Budi Priyanto** (Direktur Keuangan dan SDM/Director of Finance and HR)	x	x
Muhammad Yusuf** (Plt. Direktur Komersial dan Teknik/Act. Director of Commercial and Engineering)	x	x

Keterangan:

x = tidak memiliki saham

v = memiliki saham

* Perusahaan telah memberhentikan Dani Rusli Utama dengan hormat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

** Perusahaan telah memberhentikan M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf dengan hormat dari jabatannya masing-masing dan berlaku efektif semenjak tanggal pemberhentian berlaku.

Notes:

x = has no share ownership

v = has a share ownership

* The Company has respectfully dismissed Dani Rusli Utama from his position as President Commissioner and has been effective since the date of dismissal.

** The Company has respectfully dismissed M. Hadi Syafitri Noor, Budi Priyanto, Muhammad Yusuf from their respective positions and has been effective since the date of dismissal.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity Policies for Board of Commissioners and Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan upaya untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif dan optimal. Selain itu, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan. Hal ini sekaligus mendorong praktik non diskriminasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan.

Kebijakan Perusahaan dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan aspek keberagaman, namun belum ditetapkan secara tertulis yang mengatur mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Saat ini, keberagaman komposisi ditentukan sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan pembagian tugas bidang pengawasan bagi Dewan Komisaris dan pembagian tugas bidang pengelolaan bagi Direksi.

Per 31 Desember 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan semuanya terdiri dari laki-laki. Hal ini dikarenakan bidang kerja Rukindo di bidang pengerukan yang lebih diminati oleh laki-laki. Walaupun demikian, Perusahaan memastikan bahwa pekerja di berbagai posisi lainnya tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir tanpa adanya diskriminasi *gender*.

The Company ensures that the composition of the Board of Commissioners and Directors is adequately diverse to show our effort in encouraging a more objective, comprehensive, and optimal decision-making process. In addition, the diverse composition of the Board of Commissioners and Directors is expected to enrich their perspective in the decision-making process and therefore provide added value to the implementation of Corporate Governance within the Company. This also encourages the non-discrimination practice that the Company has applied.

The Company's policy in determining the composition of the Board of Commissioners and Directors has also considered the diversity aspect, but has not yet been stipulated formally that regulates about the composition of the Board of Commissioners and Directors in terms of education (field of study), working experience, age. Currently, the diverse composition is determined according to the Company's needs that is based on the division of supervising duties for Board of Commissioners and the division of management duties for Directors.

As of December 31, 2019, all members of the Company's Board of Commissioners and Directors are male. This is because Rukindo's work in the dredging sector is more attractive to men. However, the Company ensures that workers in various other positions still have the same opportunity to develop their careers without gender discrimination.

Nama Name	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Riwayat Pendidikan Education Background	Pengalaman Profesional Professional Experience
Prasetyadi	50 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya Master Port Engineering dari University of Le Havre, Prancis Sarjana Teknik Bidang Mesin/Konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Master in Management from Airlangga University, Surabaya (2015) Master in Port Engineering from University of Le Havre, France (1988) Bachelor in Machinery/Construction Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (1993)	CEO di Terminal Teluk Lamong Manajer Senior Departemen Teknik dan Operasi di cabang Makassar dan Surabaya CEO at Lamong Bay Terminal Senior Manager of Engineering and Operation Department at Makassar and Surabaya branches
Bambang Supriyadi Ervan	62 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Ilmu Pengetahuan Hubungan Masyarakat dari Boston University, Massachusetts, Amerika Serikat Sarjana Fakultas Publisistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung Master of Science of Public Relations from Boston University, Massachusetts, United States Bachelor in Publication from Padjajaran University, Bandung	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Komunikasi Publik Chief of Communication and Public Information Bureau Chief of Communication and Information Technology Center Chief of Information and Data Center Chief of Public Communication Center
Syaiful Islam	57 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan Master in Management from Sriwijaya University, Palembang, South Sumatera Bachelor of Geology Engineering from Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi	Direktur Utama Senior Manager Corporate Social Responsibility (CSR) President Director Senior Manager of Corporate Social Responsibility
Wahyu Hardiyanto	53 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Teknik Sipil dari ITN, Malang Bachelor of Civil Engineering from ITN, Malang	Direktur Engineering General Manager General Manager Terminal Deputi General Manager Operasi Staf Utama Teknik Sr. Director of Engineering General Manager General Manager Terminal Deputi General Manager of Operation Senior Main Staff of Engineering

Nama Name	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Riwayat Pendidikan Education Background	Pengalaman Profesional Professional Experience
Indra Sigit Satyaputra	53 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Magister dari University D' Amiens, Prancis Bachelor of Economy from Gadjah Mada University, Yogyakarta Master from D' Amiens University, France	Sekretaris Perusahaan Staf Direksi Direktur Keuangan & SDM Koord.Utama PMO Bidang Support & Enablers Sr KPO Corporate Secretary Board of Directors Staff Director of Finance & HR Main Coordinator of PMO of Support & Enablers Sr KPO
Ari Santoso	46 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Bandar Lampung Magister Business Administration dari Renmin University, Tiongkok Bachelor of Economy and Accounting from Trisakti University, Jakarta Master in Marketing Management from Bandar Lampung University Master in Business Administration from Renmin University, China	VP Hubungan Pelanggan VP Hubungan Lembaga Senior Specialist Teknik dan Manajemen Risiko GM Cabang Bengkulu GM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis VP of Customer Relationship VP of Institution Relationship Senior Specialist of Engineering and Risk Management GM of Bengkulu Branch GM of Planning and Business Development

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Secara garis besar, Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan. Komite Audit membantu untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan.

Surat Keputusan (SK) mengenai Komite Audit Rukindo ditetapkan terakhir kali oleh SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-013/DKPI/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit. Terjadi perubahan Komposisi anggota Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor: KEP-022/DKPI/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada RUPS.

Komposisi Komite Audit Tahun 2019

Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau yang dapat bertindak independen. Sekurang-kurangnya anggota Komite Audit terdiri dari 2 (dua) anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Pada tahun 2019, struktur keanggotaan Komite Audit masih hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota. Akan tetapi, dalam tugas kesehariannya, anggota Komite Audit telah berkoordinasi dengan Dewan Komisaris, terutama dalam pelaksanaan rapat yang selalu melibatkan Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

The Audit Committee is formed and established by the Decree of the Board of Commissioners and reported to the Board of Commissioners. Broadly speaking, the Audit Committee has the duty to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of the Board of Directors' functions in managing the Company. The Audit Committee helps to ensure that the Company is managed with sound management in a manner consistent with the principles of GCG that is formulated in the Company values and ethics.

The Decree (SK) regarding the Audit Committee of Rukindo was determined lastly by the Board of Commissioners' Decree Number: KEP-013/DKPI/VII/2017 dated July 1, 2017 regarding the appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee. There was a change regarding the members of the Audit Committee that is determined based on the Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-022/DKPI/IX/2018 dated September 10, 2018 regarding the Appointment of Audit Committee. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, which then reported to the GMS.

Composition of Audit Committee in 2019

The member of Audit Committee comes from the Board of Commissioners, an Independent Commissioner, or those who can act independently. The members of the Audit Committee should at least consist of 2 (two) members that came from the Board of Commissioners or from outside the Company. In 2019, the structure of Audit Committee members consists of 1 (one) member. However, in daily activities, the Audit Committee has also coordinated with the Board of Commissioners, particularly when conducting meetings, the Audit Committee has always involved the Board of Commissioners. The term of office for members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and this is in accordance with the stipulation in the Articles of Association of the Company and can be re-elected for 1 (one) more period.

Komposisi Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 can be seen in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Office Period
Rusli	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor: KEP-022/DKPI/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-022/DKPI/IX/2018 dated September 10, 2018	Pertama First

Profil Komite Audit Tahun 2019

Audit Committee Profile in 2019



Rusli
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place of Birth and Date	58 tahun per 31 Desember 2019 Bandar Lampung, 10 Mei 1961 58 years old as of December 31, 2019 Bandar Lampung, May 10, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1954, Jakarta Bachelor of Economy Management from the University of August 17, 1954, Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor: KEP-022/DKPI/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-022/DKPI/IX/2018 dated September 10, 2018
Pengalaman Kerja Working Experience	Kabid Adm & Keuangan Satker Sorong dan Priok Kantor Pusat IPC (2014-2017) Kabid Adm & Keuangan Satker Priok (2011-2014) Asisten Manager Pend & Perbend Pelb Plg (2008-2011) Supervisor Anggaran Pelabuhan Palembang (2006-2008) Supervisor Nota Penjualan Pelabuhan Palembang (2004-2006) Head of Administration and Finance of Sorong and Priok Work Unit Headquarters of IPC (2014-2017) Head of Administration & Finance Head of Priok Working Unit (2011-2014) Assistant Manager & Treasury of Pelb Plg (2008-2011) Palembang Port Budget Supervisor (2006-2008) Palembang Port Sales Invoice Supervisor (2004-2006)

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Rukindo tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Rukindo. Setiap anggota telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Kriteria independensi anggota Komite Audit yang berlaku di Rukindo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Rusli
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Rukindo dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not an inside man of a public accounting firm, legal consulting office, or other party that provides audit and non-audit services or other consulting services to Rukindo within the past 6 (six) months.	V
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Rukindo. Do not have direct or indirect shares at Rukindo.	V
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead and/or control the Company within the past 6 (six) months.	V
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Rukindo. Has no family relations due to marriage and a descendant up to the second degree, both horizontally and vertically with the Commissioners, Directors, and Major Shareholders of Rukindo.	V
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Do not have direct and indirect business relations related to the Company's business activities.	V
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not in an institution whose business activities provide services to the Company.	V
Status Status	V

Keterangan:

V = Independen

X = Tidak Independen

Independency of Audit Committee

The Audit Committee members do not have personal interests/relations that may bring negative impacts and conflicts of interest for Rukindo. Each member has fulfilled the requirements to be appointed as a member of the Audit Committee. The applicable criteria of independency for members of the Audit Committee can be seen in the following table.

Notes:

V = Independent

X = Not Independent

Pedoman Komite Audit

Komite Audit Rukindo telah dilengkapi pedoman dalam pelaksanaan tugasnya yang disebut Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 10 September 2018. Pedoman tersebut disusun berdasarkan fungsinya dan ketentuan di dalam Perusahaan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Audit tersebut mengatur tentang:

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Dasar
4. Tugas Komite Audit
5. Tanggung Jawab Komite Audit
6. Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit

Audit Committee Charter

The Audit Committee of Rukindo has been equipped with guidelines to perform their duties, called the Audit Committee Charter, which was established by the Board of Commissioners on September 10, 2018. The guidelines were prepared based on their functions and the provisions that have been stipulated at the Company and refer to the applicable laws and regulations. The Audit Committee Charter regulates:

1. Background
2. Purpose
3. Basis
4. Duties of the Audit Committee
5. Responsibilities of the Audit Committee
6. Formation and Appointment of the Audit Committee

7. Struktur Keanggotaan Komite Audit
8. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
9. Persyaratan Integritas dan Kompetensi
10. Rapat Komite Audit
11. Masa Tugas Komite Audit

Pedoman Komite Audit ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan organisasi Perusahaan. Selain itu pemutakhiran Pedoman Komite Audit mempertimbangkan kebutuhan Komite yang ada pada Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Pedoman Komite Audit. Tugas Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Pedoman Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah mendapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Sebagai pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris, Komite Audit menyusun dan menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain memuat telaahan, saran, dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit yang harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya program kerja tahunan Komite Audit;
3. Menyusun laporan Triwulan 1, 2 dan 3.

7. Audit Committee Membership Structure
8. Audit Committee Membership Requirements
9. Integrity and Competency Requirements
10. Audit Committee Meeting
11. Term of Office of the Audit Committee

The Audit Committee Guidelines are periodically reviewed in accordance with the development of the Company's business activities and organization. In addition, the update of the Audit Committee Guidelines considers the needs of the Committee in the Company and complies with applicable laws and best practices.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee conduct their duties by referring to the Audit Committee Charter. The duties of the Audit Committee, as stated in the Audit Committee Charter, are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of implementation of tasks of external and internal auditors;
2. Assessing the activities and the audit results conducted by SPI and external auditors;
3. Providing recommendations on improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring there have been satisfactory evaluation procedures for all information issued by the company;
5. Identifying matters that require the attention and duties of the Board of Commissioners;
6. In the implementation of its duties and reporting, the Audit Committee is independent and reports directly to the Board of Commissioners.

As a responsibility to the Board of Commissioners, the Audit Committee compiles and submits the following reports:

1. Reports for the duties of the Audit Committee, which include reviews, suggestions, and matters that require the attention of the Board of Commissioners;
2. Annual Report of the Audit Committee Duties that must be submitted to the Board of Commissioners no later than 1 (one) month after the end of the Audit Committee's annual work program;
3. Compiling Q1, Q2, and Q3 Reports.

Pembagian Tugas Komite Audit

Pada tahun 2019, Komite Audit Perusahaan terdiri dari 1 (satu) orang anggota. Dengan demikian tidak terdapat pembagian tugas di antara anggota lainnya.

Kriteria Anggota Komite Audit

Berdasarkan *Board Manual* Rukindo yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016, anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, jika diperlukan;
6. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit secara konsisten dan berkelanjutan melakukan tugas-tugasnya dalam fungsi pengawasan. Komite Audit berkoordinasi secara erat dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal serta berbagai tingkat pejabat eksekutif Perusahaan. Pada tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%.
2. Komite Audit melaporkan ringkasan aktivitas kegiatan yang telah dilakukan secara triwulanan yang mencakup:
3. Melakukan kajian hasil kinerja Perusahaan dan informasi keuangan, baik secara triwulanan, per semester ataupun tahunan. Komite Audit memastikan laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan serta menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Division of Duties among Members of Audit Committee

In 2019, the Company's Audit Committee consists of 1 (one) member. Thus there is no division of duties among other members.

Criteria for Members of Audit Committee

Based on the Board Manual of Rukindo which was approved and signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016, the members of the Audit Committee must meet the following requirements:

1. Have high integrity and sufficient knowledge and professional experience in conducting supervision/inspection;
2. Do not have personal interests/attachments that may bring negative impacts and conflict of interests to the Company;
3. Can to communicate effectively;
4. Can provide enough time to complete the task;
5. Other requirements stipulated in the Audit Committee Charter, if needed;
6. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or an expertise in accounting or finance, and one of them must understand the Company's industry/business.

Implementation of Audit Committee's Duties

The Audit Committee have consistently and continuously performed their duties in terms of supervision. The Audit Committee has been coordinating closely with Internal Auditors, External Auditors and executive officers. In 2019, the Audit Committee has performed their duties and responsibilities as the following:

1. Conducted (17) seventeen meetings with an average attendance rate of 100%.
2. Reported the summaries of their activities on a quarterly basis including:
3. Reviewed the Company's performance and financial information, on quarterly, semesterly or annually basis. Ensures that the financial statements are in accordance with the provisions and reviews any complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi dan saran atas temuan Auditor Internal yang disepakati oleh manajemen. Komite Audit meneliti semua laporan Audit Internal dan mengidentifikasi setiap penyimpangan atau temuan yang dipandang signifikan oleh Komite Audit dan mendiskusikannya dengan kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan tindakan perbaikan.
 5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya dan memastikan telah mendapatkan prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
 6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan. Komite juga menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
 7. Komite Audit juga melaksanakan tugas khusus lainnya mencakup pelaksanaan survei lapangan untuk melihat kondisi fisik unit-unit kapal keruk yang dimiliki Perusahaan dalam rangka penghapusbukuan. Pelaksanaan tugas khusus ini dilakukan berdasarkan Surat Pemerintah Nomor: SP-008/DKP/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
4. Oversaw the follow-up on recommendations and suggestions from the Internal Auditor. Examined the Internal Audit reports and identified any significant irregularities or findings and discussed them with the head of the Internal Audit Unit (SPI) for corrective action.
 5. Gave recommendations to improve the management control system and its implementation and ensured that the evaluation was satisfactory.
 6. Gave the analysis and advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest. The Committee has also maintained the confidentiality of Company's documents, data and information.
 7. The Audit Committee has also performed other special tasks including site visit to check the physical condition of the Company's dredging units in term of write-off. This task has been implemented based on Government Letter Number: SP-008/DKP/IV/2019 dated April 26, 2019.

Rapat Komite Audit

Salah satu pelaksanaan tugas Komite Audit, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, adalah melalui pelaksanaan rapat. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit dilaksanakan bersama Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Rukindo. Komite Audit mengikuti rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali sepanjang tahun 2019. Rapat tersebut terdiri dari 5 (lima) kali rapat Komite Audit, 7 (tujuh) kali rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, 3 (tiga) kali rapat internal Dewan Komisaris, dan 2 (dua) kali rapat Komite Audit bersama SPI. Informasi mengenai rapat yang dihadiri oleh Komite Audit pada rapat internal Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan dalam pembahasan mengenai Dewan Komisaris. Daftar kehadiran dan agenda rapat-rapat lainnya yang telah dilaksanakan Komite Audit dapat dilihat dalam tabel berikut.

Audit Committee Meeting

One of the duties of the Audit Committee, in accordance with its functions and responsibilities, is to conduct meetings. The Audit Committee should be holding a regular meeting of at least once every month. The Audit Committee meeting is held together with the Board of Commissioners (President Commissioner) of Rukindo. The Audit Committee has attended 17 (seventeen) meetings throughout 2019. The meeting consisted of 5 (five) Audit Committee meetings, 7 (seven) coordination meetings of the Board of Commissioners and Directors, 3 (three) internal meetings of the Board of Commissioners, and 2 (two) Audit Committee meetings with SPI. Information regarding the meetings that the Audit Committee has attended at the internal meetings of the Board of Commissioners and the coordination meetings of the Board of Commissioners and Directors was conveyed in the discussion on the Board of Commissioners. The attendance list and other agenda of the meetings that the Audit Committee has conducted can be seen in the following table.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit Internal Meeting of the Board of Commissioners with the Audit Committee		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
28 Januari 2019 January 28, 2019	Laporan kegiatan Komite Audit tahun 2018 Laporan Keuangan tahun 2018 Hal-hal yang dianggap perlu Audit Committee activities report for 2018 2018 Financial Statements Other matters	DRU, R
28 Februari 2019 February 28, 2019	Laporan informasi terbaru kegiatan audit KAP atas laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2018 Latest information on audit activities by the KAP for the Company's Financial Statements for fiscal year 2018	DRU, R
6 Mei 2019 May 6, 2019	Evaluasi Laporan Keuangan per 31 Maret 2019 Hal-hal yang dianggap perlu Financial Statements evaluation as of March 31, 2019 Other matters	DRU, R
22 Juli 2019 July 22, 2019	Evaluasi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 (triwulan II) Hal-hal yang dianggap perlu Financial Statements evaluation as of June 30, 2019 (quarter II) Other matters	DRU, R
4 Oktober October 4	Evaluasi Laporan Keuangan per 30 September 2019 (triwulan II) Hal-hal yang dianggap perlu Financial Statements evaluation as of September 30, 2019 (quarter II) Other matters	DRU, R
Rapat Komite Audit bersama SPI Audit Committee Meeting with SPI		
27 Mei 2019 May 27, 2019	Telaah hasil pengawasan audit khusus <i>net off</i> piutang Pengawasan tindak lanjut audit performansi dari SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan tindak lanjut hasil Audit Internal Examine the results of special <i>net off</i> receivables audit Supervise the performance audit follow-up from the SPI of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the follow-up on the Internal Audit results	R, AIS, K
22 Agustus 2019 August 22, 2019	Informasi terbaru hasil pengawasan tindak lanjut Audit Internal dan Eksternal tahun 2018 Usulan pembahasan antara auditee dengan SPI, didampingi oleh Komite Audit yang akan dilaksanakan bersama dengan jadwal kegiatan pengawasan oleh SPI Latest information on the supervision results of 2018 Internal and External Audit follow-up Proposed discussion between the auditee and the SPI, accompanied by the Audit Committee, which will be carried out together later in accordance with the audit schedule of SPI	R, AIS, K

Catatan:

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris yang aktif bertugas masih dipegang oleh Dani Rusli Utama mengingat pergantian Dewan Komisaris dari anggota lama ke anggota baru dilakukan menjelang akhir tahun 2019.

Notes:

In 2019, the Board of Commissioners is still Dani Rusli Utama since the replacement of the Board of Commissioners from old to new members was done towards the end of 2019.

Keterangan/Notes:

DRU : Dani Rusli Utama
R : Rusli
AIS : Amir Indra Sassongko
K : Kumaidi
SEP : Suci Eka Pricilia

Berdasarkan informasi mengenai rapat dan agenda yang telah diungkapkan sebelumnya, berikut disampaikan informasi mengenai frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit di tahun 2019.

Based on the earlier information regarding the meetings and agendas, the meeting frequencies of and the attendance of the Audit Committee in 2019 can be seen as follows.

Nama (Jabatan) Name (Position)	Rapat Internal Komite Audit Internal Meeting of Audit Committee			Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of Board of Commissioners			Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors			Rapat Koordinasi dengan SPI Coordination Meeting with SPI		
	Jumlah Amount	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Amount	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Amount	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Amount	Kehadiran Attendance	%
Rusli (Anggota Komite Audit/ Member of Audit Committee)	5	5	100	3	3	100	7	7	100	2	2	2

Kebijakan Remunerasi

Honorarium anggota Komite Audit diberikan sesuai dengan *Board Manual* Perusahaan yang sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 15 Desember 2016. Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Remunerasi anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite Audit dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi anggota Komite Audit Rukindo sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pengembangan Kompetensi Pekerja pada Profil Perusahaan.

Remuneration Policy

Honorarium or salary for members of the Audit Committee is given in accordance with the Company's Board Manual that has been signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The remuneration for Audit Committee is determined by the Board of Commissioners, according to the Company's ability. The remuneration for Audit Committee is at most amounted to 20% of the salary of the Managing Director and does not allowed to receive other income other than the salary. Members of the Board of Commissioners who are also members of the Audit Committee are not entitled to additional income from their position other than the income that they received as members of the Board of Commissioners.

Development Program for Audit Committee's Competencies

The Company include the Audit Committee in the competency development activities. The competency development program for Rukindo's Audit Committee members throughout 2019 can be seen in the description related to Worker Competency Development in the Company Profile.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Komite Audit serta evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite Audit merupakan penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite dan kinerja masing-masing anggota Komite Audit yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Perusahaan menetapkan bahwa Komite Audit dapat melaksanakan program kerjanya dalam setiap waktu (*in any event*) di sepanjang 12 (dua belas) bulan periode 2019 dan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan Dewan Komisaris. Berdasarkan pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja dan pelaksanaan tugas Komite Audit di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Evaluation and Assessment on Audit Committee by the Board of Commissioners

The evaluation on the Audit Committee's performance as well as the evaluation on each member is based on the criteria of target achievement set forth in the Annual Audit Committee's Work Plan. The Board of Commissioners assesses the performance of the Committee and the performance of each member who is not a member of the Commissioners, at least once a year. The results of the evaluation which then used to prepare for improvement steps, development programs and reinforcement to support the Board of Commissioners.

The Company has stipulated that the Audit Committee can work any time (*in any event*) throughout the 12 (twelve) months of the 2019 period and at certain times as agreed with the Board of Commissioners. Based on the work program that have been implemented, the Board of Commissioners has considered that the Audit Committee has performed their duties properly in accordance with the agreed working program. The working program and implementation of the Audit Committee's duties throughout 2019 can be seen in the following table.

Program Kerja Working Program	Kegiatan Activities	Realisasi Realization
Hadir pada Rapat Kerja dengan Dewan Komisaris (intern) Present at a Working Meeting with the Board of Commissioners (internal)	Pembahasan kinerja Perusahaan Pembahasan Laporan Tahunan (<i>audited</i>) Tahun 2018 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS Pembahasan usulan RKAP tahun 2020 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2020 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS Penyusunan & pembahasan Program Kerja Komisaris tahun 2020 Pembahasan dalam rangka penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2020 Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 Pembahasan isu-isu strategis Discussion on Company performance Discussion on the Annual Report (<i>audited</i>) in 2018 in the preparation for the Pre GMS and GMS Discussion on the proposed 2020 RKAP and KPI/Management Contract in the preparation for the Pre GMS and GMS Preparation & discussion of the Board of Commissioners' 2020 Work Program Discussion in the preparation of the Board of Commissioners KPI in 2020 Discussion in the context of determining KAP to implement the General Audit of Financial Statements for fiscal year 2020 Discussion on strategic issues	Sudah terealisasi Has been realized

Program Kerja Working Program	Kegiatan Activities	Realisasi Realization
Hadir pada Rapat Dewan Komisaris dengan Manajemen Present at the Board of Commissioners' Meeting with Management	<p>Pembahasan laporan kinerja Perusahaan Pembahasan RKAP tahun 2020 Pembahasan Laporan Tahunan (<i>audited</i>) Tahun 2018 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS Pembahasan usulan RKAP tahun 2020 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2020 dalam rangka persiapan Pra Rups dan RUPS Pembahasan usulan RKAP tahun 2020 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2020 dalam rangka persiapan Pra Rups dan RUPS Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 Pembahasan hal-hal yang memerlukan persetujuan tertulis/rekomendasi Dewan Komisaris Pembahasan isu-isu strategis Discussion on the Company's performance report Discussion on RKAP 2020 Discussion on the proposed 2020 RKAP and KPI/Management Contract in the preparation for the Pre GMS and GMS Preparation & discussion of the Board of Commissioners' 2020 Work Program Discussion in the preparation of the Board of Commissioners KPI in 2020 Discussion in the context of determining KAP to implement the General Audit of Financial Statements for fiscal year 2020 Discussion on matters that require written approval/recommendations from the Board of Commissioners Discussion on strategic issues</p>	Sudah terealisasi Has been realized
Rapat dengan Pemegang Saham Meeting with Shareholders	<p>Pra RUPS dan RUPS pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan (<i>audited</i>) tahun 2019 Pra Rups dan RUPS pengesahan RKAP tahun 2020 KPI/Kontrak Manajemen tahun 2020 Pembahasan isu-isu strategis Pre GMS and GMS ratification on the Annual Report and 2019 annual audit Pre GMS and GMS for RKAP approval in 2020 KPI/Management Contract in 2020 Discussion on strategic issues</p>	Sudah terealisasi Has been realized
Melakukan Telaahan Evaluation	Melakukan telaahan atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari Kebijakan Manajemen Reviewing matters that need to be followed up from the Management Policy	Sudah terealisasi Has been realized
Rapat internal Komite Audit Internal Audit Committee meeting	Melakukan pertemuan rutin dengan anggota komite Hold regular meetings with committee members	Sudah terealisasi Has been realized
Program Pengembangan Program	Mengikuti seminar/workshop/kursus (pelatihan) untuk peningkatan kompetensi Attending seminars/workshops/training to increase competency	Sudah terealisasi Has been realized

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Function

Perusahaan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris dibantu Komite Audit. Namun, dalam penetapannya terkait nominasi dan remunerasi sepenuhnya menjadi wewenang PT Pelabuhan Indonesia II selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Informasi terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi, independensi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan pada tahun buku, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dalam pertemuan, pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selain itu, Prosedur nominasi dan remunerasi dijelaskan pada bagian Suksesi Direksi serta Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The company had not form a Nomination and Remuneration Committee. The function of the Nomination and Remuneration Committee is carried out by the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee. However, the determination of the nomination and remuneration is given fully to PT Pelabuhan Indonesia II as the Major and Controlling Shareholder. Information related to the name, position, and brief history of the members of the nomination and/or remuneration committee, independence, description of duties and responsibilities, a description of the implementation of activities in the fiscal year, frequency of meetings and the level of attendance at the meeting, a statement of the existence of nomination and/or remuneration committee guidelines can be seen in the Board of Commissioners and Audit Committee sections. In addition, the nomination and remuneration procedures are explained in the Directors Succession section and the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Directors.



Fungsi Manajemen Risiko

Risk Management Function

Sampai dengan akhir tahun 2019, Rukindo belum memiliki Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dijalankan oleh Dewan Komisaris dibantu Komite Audit. Informasi terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite Komite Manajemen Risiko, independensi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan pada tahun buku, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dalam pertemuan, pernyataan adanya pedoman Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Until the end of 2019, Rukindo did not have a Risk Management Committee. The implementation of the Risk Management function is carried out by the Board of Commissioners and assisted by the Audit Committee. Information related to the name, position, and brief profile of the members of the Risk Management Committee, independency, description of duties and responsibilities, description of the implementation of activities in the fiscal year, frequency of meetings and attendance at the meeting, statement of the existence of the Risk Management Committee guidelines can be seen in the section of Board of Commissioner and Audit Committee.



Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary for the Board of Commissioners

Struktur organisasi Dewan Komisaris Perusahaan telah dilengkapi dengan Sekretariat Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2019, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Endra Sutanto yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Nomor: KEP-031/DKPI/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris.

The organizational structure of the Company's Board of Commissioners has been completed with the Secretary for the Board of Commissioners. As of December 31, 2019, the Secretary for the Board of Commissioners is held by Endra Sutanto who had been determined based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number: KEP-031/DKPI/XI/2019 concerning Dismissal and Appointment of the Secretary for the Board of Commissioners.



Endra Sutanto

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary for the Board of Commissioners

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Nomor: KEP-023/DKPI/XII/2017 dan *Board Manual*, tugas Sekretariat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
8. Mengoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Komisaris dengan pihak lain;
10. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Duties of the Secretary for the Board of Commissioners

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number: KEP-023/DKPI/XII/2017 and the Board Manual, the duties of the Secretary for the Board of Commissioners are as follows:

1. Preparing meeting, including the Board of Commissioners' briefing sheet material;
2. Formulating minutes of the Board of Commissioners' meeting, in accordance with the Company's Articles of Association;
3. Administering the Board of Commissioners' documents;
4. Compiling the Work Program & Budget Draft of the Board of Commissioners;
5. Compiling the Board of Commissioners' Reports Framework;
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with legislation and implements the GCG principles;
7. Providing necessary information to the Board of Commissioners periodically and/or at any time requested;
8. Coordinating members of the Committee if needed in order to facilitate the duties of Board of Commissioners;
9. Being the liaison officer for the Board of Commissioners to other parties.
10. Carrying out other duties from the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sebagai upaya mewujudkan efektivitas fungsi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai pendukung Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut pada tahun 2019:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, misalnya menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat Dewan Komisaris, memelihara penomoran surat keluar Dewan Komisaris dan mengarsip surat masuk Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan: *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan; dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Telah mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite Dewan Komisaris dan tenaga ahli untuk keperluan Dewan Komisaris, misalnya seluruh data/laporan dari komite sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Perusahaan mengikutsertakan Sekretaris Dewan Komisaris dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi anggota Sekretaris Dewan Komisaris Rukindo sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pengembangan Kompetensi Pekerja pada Profil Perusahaan.

Implementation of the Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

To realize the effectiveness of the function of the Secretary to the Board of Commissioners to support the Commissioners duties, the Secretary to the Board of Commissioners has performed the following activities in 2019:

1. Conducting secretariat administration within the Board of Commissioners environment, such as conducting correspondence activities of the Board of Commissioners, maintaining the numbering of letters from the Board of Commissioners, and filing incoming letters of the Board of Commissioners.
2. Holding meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners with Shareholders, Board of Directors, or other relevant parties.
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to: monitoring follow-up of the results of decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners; administrative material regarding the Directors' report in managing the Company; administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners, in relation to the Company's management activities carried out by the Board of Directors.
4. Collecting technical data from the Board of Commissioners' committee and experts for the needs of the Board of Commissioners, e.g. all data/reports from the committee to be taken into consideration by the Board of Commissioners in making decisions.

Competency Development Program for the Secretary to the Board of Commissioners

The Company listed the Secretary to the Board of Commissioners in a series of competency development activities. The development program for the Secretary to the Board of Commissioners throughout 2019 can be seen in the description related to Worker Competency Development in the Company Profile.

Kebijakan Remunerasi

Honorarium anggota Komite Audit diberikan sesuai dengan *Board Manual* Perusahaan yang sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 15 Desember 2016. Sekretaris Dewan Komisaris diberi honorarium setiap bulan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan.

Selain honorarium per bulan, Sekretaris Dewan Komisaris juga mendapatkan tunjangan dan/atau tantiem atau insentif kerja.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris. Evaluasi tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan tugas-tugas pokok Sekretaris Dewan Komisaris. Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta memenuhi segala kebutuhan Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsi pengawasan Perusahaan.

Remuneration Policy

Honorarium for members of the Audit Committee is given in accordance with the Company's Board Manual that has been signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016. The Secretary to the Board of Commissioners is given a monthly honorarium of 15% of the salary of the Managing Director with the tax provisions borne by the Company.

In addition to the monthly honorarium, the Secretary also receives benefits and/or bonuses or work incentives.

Evaluation and Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

Every year, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Secretary to the Board of Commissioners. The evaluation is based on the performance results. Throughout 2019, the Board of Commissioners has considered that the Secretary to the Board of Commissioners has performed his main duties and fulfilled what the Board of Commissioners needed that related to their function in supervising the Company.

Sekretaris Perusahaan

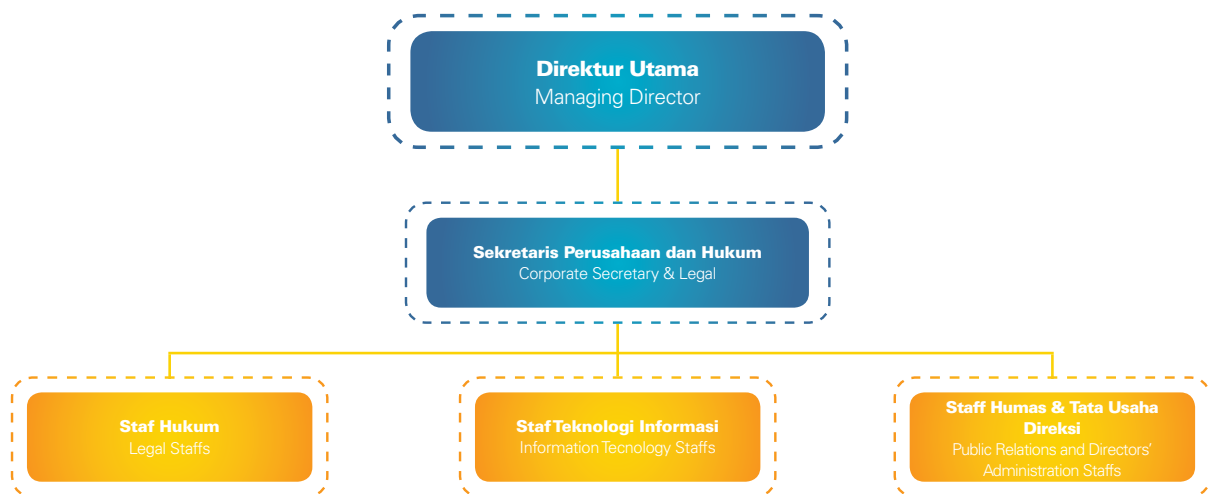
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu organ pendukung Direksi dalam menyempurnakan dan memastikan implementasi GCG Perusahaan memenuhi standar ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta *best practice*. Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Unit Kerja Sekretariat Perusahaan dan Hukum yang dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan dan Hukum. Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai *liaison officer* dan menjalankan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan dan Hukum diangkat oleh Direktur Utama dengan didahului persetujuan dari Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Struktur Unit Kerja Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Sekretariat Perusahaan dan Hukum membawahi 3 (tiga) bidang antara lain Hukum, Teknologi Informasi serta Humas dan Tata Usaha Direksi. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/4/1/Dirut-2018 tanggal 26 April 2018 adalah sebagai berikut:



The Corporate Secretary is one of the supporting organs of the Board of Directors in perfecting and ensuring that the implementation of the Company's GCG is in accordance with the regulation standard that is based on applicable laws and regulations and best practices. The function of the Corporate Secretary is carried out by the Corporate Secretary and Legal Working Unit led by the Corporate Secretary and Legal. The Corporate Secretary is functioning as a liaison officer and runs various Corporate Responsibility (CSR) programs.

The Corporate Secretary and Legal is appointed by the Managing Director with the approval from the Board of Commissioners. The Corporate Secretary reports directly to the Managing Director.

The Structure of The Corporate Secretary and Legal Working Unit

The Corporate Secretary and Legal Working unit oversee 3 (three) fields of work including Legal, Information Technology and Public Relations and General Administration for the Board of Directors. The organization structure of the Corporate Secretary is based on the Decree of the Board of Directors Number: 26/4/1/Dirut-2018 on April 26, 2018 as follows:

Profil Sekretaris Perusahaan dan Hukum

Sekretaris Perusahaan dan Hukum Rukindo per 31 Desember 2019 dijabat oleh Yasarman. Profil beliau telah disampaikan pada Profil Pejabat Senior pada Profil Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Berdasarkan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretariat Perusahaan dan Hukum melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;
5. Memberikan informasi yang materil dan relevan kepada *stakeholders*;
6. Menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;
7. Mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Direksi.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perusahaan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dan Hukum dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan dan Hukum sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pengembangan Kompetensi Pekerja pada Profil Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Sepanjang tahun 2019, Sekretariat Perusahaan dan Hukum telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

Profile of Corporate Secretary and Legal

The Corporate Secretary and Legal of Rukindo as of December 31, 2019 is held by Yasarman. His profile has been presented in the Senior Officials Profile in the Company Profile.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary and Legal

Based on the Board Manual of the Board of Commissioners and Directors, the Corporate Secretary and Legal is responsible to conduct the following functions:

1. Ensuring that the Company complies with the provisions related to the transparency, in line with the GCG principles.
2. Providing necessary information to the Board of Directors and Commissioners periodically and/or at any time requested.
3. Being the liaison officer.
4. Administering and storing Company documents, including but not limited to, List of Shareholders, Special Lists, and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and GMS.
5. Providing material and relevant information to stakeholders.
6. Organizing an induction program for newly appointed Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
7. Preparing meetings and compiling minutes of the Board of Directors' meeting.

Development Program for Corporate Secretary's Competency

The Company listed the Corporate Secretary and Legal in a series of competency development activities. The competency development program that the Corporate Secretary and Legal has followed throughout 2019 can be seen in the description related to Worker Competency Development in the Company Profile.

Implementation of Duties of the Corporate Secretary and Legal

Throughout 2019, the Corporate Secretary and Legal has performed the following duties and activities:

- Membuat dan merevisi Keputusan Direksi;
 - Merevisi Kontrak/Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan pihak eksternal Perusahaan;
 - Mengadakan rapat dengan Jamdatun perihal pendampingan hukum rencana pengadaan kapal baru jenis TSHD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka penunjukan Konsultan Independen untuk asesmen GCG tahun 2018;
 - Menyiapkan dokumen-dokumen dalam rangka asesmen GCG tahun 2018;
 - Pembentukan Tim Demobilisasi Kapal CSD Batang Hari 30;
 - Pelaksanaan asesmen GCG dengan menggunakan konsultan MUC dengan skor 90,548;
 - Usulan perubahan Anggaran Dasar Rukindo ke Dewan Komisaris sesuai dengan KBLI 2017;
 - Pelaksanaan program kerja *Health, Safety, Security, Environment and Quality* (HSSEQ);
 - Bidang Humas dan Tata Usaha Direksi.
- Made and revised the Decree of the Board of Directors;
 - Revised Contracts/Work Agreements and Work Orders (SPK) with external parties;
 - Held a meeting with Jamdatun regarding legal assistance to procure new type of TSHD vessels;
 - Prepared documents to appoint an Independent Consultant for the GCG assessment in 2018;
 - Prepared documents for GCG assessment in 2018;
 - Formed a Demobilization Team for Batang Hari 30 CSD Vessel;
 - Implemented the GCG assessment using a consultant, MUC, with a score of 90.548;
 - Proposed changes to Rukindo's Articles of Association, in accordance with the 2017 KBLI, to the Board of Commissioners;
 - Implemented the working program of Health, Safety, Security, Environment and Quality (HSSEQ);
 - Other Public Relations and Administration Activities for the Board of Directors.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Setiap tahun, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Perusahaan dan Hukum. Evaluasi tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan tugas-tugas pokok Sekretariat Perusahaan dan Hukum. Di sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa Sekretariat Perusahaan dan Hukum telah melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta memenuhi segala kebutuhan Direksi yang terkait dengan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Evaluation and Assessment of the Performance of the Corporate Secretary and Legal

Every year, the Board of Directors evaluates the performance of the Corporate Secretary and Legal. The evaluation is based on the implementation of tasks of the Corporate Secretary and Legal. Throughout 2019, the Board of Directors has considered that the Corporate Secretary and Legal had performed the main duties and fulfilled all that the Board of Directors needed related to the Company's management functions.

Audit Internal

Internal Audit

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan (*governance*). Fungsi Audit Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi dijalankan oleh unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.

Struktur Organisasi Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mekanisme internal dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan struktur organisasi Perusahaan, Satuan Pengawas Intern terdiri dari Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Pemeriksa (Auditor). Kedudukan dan struktur SPI Rukindo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/4/1/Dirut-2018 tanggal 26 April 2018 dalam bagan berikut. Secara struktur organisasi Perusahaan, SPI berada di bawah Direktur Utama.

Internal Audit is an activity to give an independent and objective assurance and consultation in order to increase the Company's values and enhance the operational activity, through a systematic approach, by evaluating and increasing the effectiveness of risk management, controlling, and process of corporate governance. The Internal Audit function is one of the Director's supporting organs which conducted by the Internal Audit Unit (SPI) led by the Head of Internal Audit Unit.

Organization Structure of Internal Audit

The Internal Audit Unit (SPI) is led by the Head of Internal Audit Unit that is appointed and dismissed by the Managing Director with an internal mechanism that require the approval of the Board of Commissioners. Based on the Company's organization structure, the Internal Audit Unit consist of Head of Internal Audit Unit and Auditors. The position and structure of Rukindo's SPI is based on the Decree of the Board of Directors Number: 26/4/1/Dirut-2018 dated April 26, 2018 that can be seen in the following chart. Based on the Company's organization structure, SPI is positioned under the Managing Director.



Profil Kepala Satuan Pengawas Intern

Kepala Satuan Pengawas Intern Perusahaan per 31 Desember 2019 dijabat oleh Amir Indra Sassongko Padmoprayitno. Profil beliau telah disampaikan pada Profil Pejabat Senior pada Profil Perusahaan.

Pedoman Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah dilengkapi Piagam Satuan Pengawasan Intern. Piagam ini mengatur mengenai visi, misi, ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab SPI. Piagam Audit Internal menetapkan kedudukan dan struktur Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Perusahaan, kode etik, independensi, objektivitas, profesionalisme, standar audit serta memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit. Piagam Satuan Pengawasan Intern ditinjau secara berkala dan diperbaharui apabila perlu.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

SPI melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada ketentuan (*job desc*) yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama. Berdasarkan *job desc*, Piagam Satuan Pengawasan Intern dan *Board Manual* Rukindo, tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal atau Program Kerja Pengawasan Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di unit-unit kerja dalam Perusahaan.
4. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil-hasil temuan audit yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Komite Audit.
6. Melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan atau audit khusus sesuai dengan permintaan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dengan tembusan ke Komite Audit.

Profile of Internal Audit Unit Head

The Head of Internal Audit Unit as of December 31, 2019 is held by Aamir Indra Sassongko Padmoprayitno. His profile has been presented in the Senior Officials Profile in the Company Profile.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit (SPI) has its own charter. This charter regulates the vision, mission, scope of work, authorities, and responsibilities of SPI. The Internal Audit Charter also regulates the position and structure of the Internal Audit Unit (SPI) at the Company, the code of conduct, the independency, objectivity, professionalism, audit standard and also gave the authority to access the document, reach the personnel, and review the properties that are related to the audit duties, and asserted the scope of work of the audit task. The Charter for the Internal Audit Unit is regularly reviewed and updated if necessary.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

SPI perform its duties by referring to the jobs desc that the Managing Director has set. Based on the job desc, the Internal Audit Unit Charter and Board Manual of Rukindo, the duties and Responsibilities of SPI are as follows:

1. Developing and implementing internal audit plan or Annual Supervision Work Program.
2. Assessing and evaluating the Internal Control System and Risk Management System in the Company in accordance with prevailing policies and conditions.
3. Auditing and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's work units.
4. Compiling the Audit Report and submitting the report to the Managing Director and the Board of Commissioners.
5. Supervising and evaluating the results of the audit findings that have been carried out, and reporting the results to the Managing Director and the Board of Commissioners, copied to the Audit Committee.
6. Carrying out and reporting the results of special audits or audits in accordance with requests to the Managing Director or the Board of Commissioners, copied to the Audit Committee.

7. Memelihara kemampuan dan profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi *professional*.
8. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit dan pengawasan yang baik dengan badan pengawasan lainnya.

Pola Hubungan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SPI memiliki hubungan kerja dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Hubungan SPI dengan Komite Audit

1. SPI menyampaikan rencana audit tahunan SPI kepada Dewan Komisaris, dalam hal ini Komite Audit. Komite Audit melakukan kajian atas rencana audit tahunan SPI.
2. Komite Audit dan SPI melakukan pembahasan dan koordinasi terkait efektivitas pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja audit, dan hambatan pelaksanaan audit.
3. SPI juga melaporkan hasil kegiatan audit kepada Komite Audit.
4. Komite Audit berwenang untuk memberikan masukan kepada Direksi atas efektivitas pelaksanaan tugas SPI.

Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal

1. SPI melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas.
2. SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pembahasan terhadap sasaran dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal dan untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
3. SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

Sumber Daya Manusia SPI

Rukindo terus mendorong peningkatan kinerja SPI dengan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Jumlah personil SPI tahun 2019 telah sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan.

7. Maintaining the auditor's competence and professionalism with adequate knowledge, skills, and experience, as well as professional certification.
8. Coordinating audit and supervisory activities with other supervisory institutions.

Relations Pattern

In performing its duties and responsibilities, SPI has a working relation with Audit Committee and External Auditor.

Relations between SPI and Audit Committee

1. SPI submit the annual audit plan to the Board of Commissioners, in this case the Audit Committee. The Audit Committee then assess the annual audit plan.
2. The Audit Committee and SPI then made a discussion and coordination regarding the effectiveness of internal control, the presentation of financial statements, the accounting policy, the audit report, the audit working program, and audit obstacles.
3. SPI has the obligation to report the audit result to the Audit Committee.
4. The Audit Committee has the authority to give input to the Directors on the effectiveness of SPI's work.

Relations between SPI and External Auditor

1. SPI coordinates and facilitates the External Auditor to perform their duties in order to create a seamless operation.
2. SPI coordinates with Audit Committee to discuss the target and scope of audit activities that the External Auditor will be doing and also consider all of the possible risks.
3. SPI, together with Audit Committee, monitors the work of External Auditor.

Human Resources of SPI

Rukindo continues to increase the performance of SPI by placing competent Human Resources (HR). The number of SPI personnel in 2019 is in accordance with the Company's business development.

Sampai dengan Desember 2019, Kepala SPI dan Auditor telah memenuhi jenjang sertifikasi profesi internal audit yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal.

Program Pengembangan Kompetensi SPI

Perusahaan mengikutsertakan SPI dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi SPI sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pengembangan Kompetensi Pekerja pada Profil Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2019

SPI telah melaksanakan program kerja dalam rangka mendukung sistem pengendalian internal di Rukindo. Selama tahun 2019, SPI Rukindo telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan Audit Eksternal dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tanggal 6 Mei-29 Juni 2019;
2. Pendampingan *monitoring* tindak lanjut hasil temuan audit Rukindo Periode Tahun 2018 oleh SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tanggal 7 Mei 2019;
3. Pelaksanaan audit khusus tanggal 4-29 Maret 2019 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 4/3/1/DIRUT-2019;
4. Pelaksanaan Audit Internal rutin semester I tahun 2019 pada tanggal 29 April-24 Mei 2019 sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 15/4/SDMK-2019;
5. Telah dilaksanakan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi audit performansi tahun 2018 pada Rukindo bersama dengan SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 7 Mei 2019;
6. Telah dilaksanakan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi audit performansi tahun 2018 pada Rukindo bersama dengan SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 15 Juli 2019;
7. Pelaksanaan Audit Internal rutin semester II tahun 2019 dan *monitoring* tindak lanjut temuan audit pada tanggal 10 September-11 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 20/09/01/SDMK-2019.

Until December 2019, the Head of SPI and also the Auditor have met the required certifications for an internal auditor profession to do their best in conducting their duties and responsibilities.

The Competency Development Program of SPI

The Company has included SPI in a series of competency development activities. The competency development activities of SPI during 2019 can be seen in the description regarding the Worker's Competency Development in the Company Profile.

Implementation of Internal Audit Duties in 2019

SPI has conducted the working program in order to support the internal controlling system at Rukindo. During 2019, Rukindo's SPI has performed the following activities:

1. External Audit Assistance from the Internal Audit Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on May 6-June 29, 2019;
2. Assistance in monitoring the follow up of 2018 audit findings on Rukindo by SPI of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on May 7, 2019;
3. Performed a special audit on 4-29 March 2019 in accordance with the Task Order Number 4/3/1/DIRUT-2019;
4. Performed a routine Internal Audit in the first semester of 2019 on April 29-May 24, 2019 in accordance with the Task Implementation Order Number: 15/4 /SDMK-2019;
5. Conducted a follow-up monitoring of the 2018 performance audit recommendations at Rukindo together with SPI of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on May 7, 2019;
6. Conducted a follow-up monitoring of the 2018 performance audit recommendations at Rukindo together with SPI of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on July 15, 2019;
7. Conducted routine Internal Audit on semester II of 2019 and monitored the follow-up on audit findings on 10 September-11 October 2019 in accordance with Work Order Implementation Number: 20/09/01/SDMK-2019

Evaluasi dan Penilaian Kinerja SPI

Setiap tahun, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja SPI. Evaluasi tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan tugas-tugas pokok SPI. Di sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa SPI telah melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta memenuhi segala kebutuhan Direksi yang terkait dengan fungsi pengelolaan dan pengawasan intern Perusahaan.

Evaluation and Assessment of SPI Performance

Every year, the Board of Directors are evaluating the performance of SPI. The evaluation is based on the performance of SPI in doing their works. In 2019, the Board of Directors have made an assessment that the SPI have done their duties and have met everything that the Directors needed in terms of the management and the internal control of the Company.

Audit Eksternal

External Audit

Rukindo menunjuk pihak eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Auditor eksternal merupakan pihak independen yang terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak-pihak lain. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dan menunjang sistem pengendalian internal Perusahaan. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang memadai sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan Perusahaan ke depan.

Rukindo has appointed an external party to perform an audit on the Company's financial statements. The external auditor is an independent party that is free from any influence of the Board of Commissioners, Board of Directors and others. This is done in order to maintain the accountability of financial statements and support the internal control system of the Company. In addition, this is done as part of gaining sufficient information as a consideration in formulating the future strategy of Company's development.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Compliance with the Indonesian Financial Accounting Standard

The Management is committed to present the Company's financial statement that is in accordance with the applicable Financial Accounting Standard in Indonesia that has been set forth by the Indonesian Institute of Accountants.

Mekanisme Penunjukan Audit Eksternal

Audit Eksternal Perusahaan, dalam hal ini dilakukan oleh Akuntan Publik, ditunjuk dengan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Mekanisme penunjukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki daftar calon Akuntan Publik untuk diserahkan kepada RUPS, setidaknya memuat informasi mengenai alasan pencalonan dan besarnya honorarium;

Mechanism to Appoint External Auditor

The Company's External Audit, in this case is conducted by the Public Accountant, is appointed through the agreed mechanism. The appointment mechanism is as follows:

1. The Board of Commissioners has a list of candidates to submit the Public Accountants to the GMS, that should at least contain information about the reasons for nomination and the amount of the honorarium;

2. RUPS kemudian menunjuk Akuntan Publik;
3. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, melakukan proses penunjukan Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Rukindo dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Dalam rangka menjamin kelancaran proses audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terpilih, Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh KAP sehingga memungkinkan KAP memberikan pendapatnya. Audit yang dilakukan oleh KAP dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

Akuntan Publik Tahun 2019

Berikut informasi mengenai Akuntan Publik Perusahaan pada tahun 2019.

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Purwantono, Sungkoro & Surja
Akuntan Accountant	Muhammad Kurniawan
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan RUPSTahun Buku 2017 yang telah dilaksanakan tahun 2018 Decision of the 2017 Fiscal Year General Meeting of Shareholders which was held in 2018
Tahun Audit Audit Period	2019
Jasa Services	Audit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2019 Audit of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2019
Jasa Lainnya Other Services	-

Informasi Auditor Eksternal 2015-2019

Informasi mengenai Auditor Eksternal yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan periode 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Audit Audit Opinion
2019	Muhammad Kurniawan Izin No. AP0240	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion on All Material Aspects

2. The GMS then appoints the Public Accountant;
3. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, then conducts the process to appoint the Public Accountant that is in accordance with the internal regulation to procure goods and services at Rukindo and, if necessary, can request assistance from the Directors in the appointment process.

External Audit Procedure and Audit Standard

In order to ensure the seamless process of the external audit by the elected Public Accounting Firm, the Company has provided all accounting records and supporting data that the KAP required to enable them giving the opinion. The audits that the KAP has conducted was in accordance with the Financial Accounting Standards (PSAK) Statement issued by IAI.

Public Accountant in 2019

The information regarding the Company's Public Accountant in 2019 is as follows.

Information Regarding External Auditor 2015-2019

Information regarding External Auditors that audited the Company's financial statements from 2015 to 2019 can be seen in the following table.

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Audit Audit Opinion
2018	Muhammad Kurniawan Izin No.AP.0240	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No.603/KM.1/2015	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion on All Material Aspects
2017	Muhammad Kurniawan Izin No.AP.0240	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No.603/KM.1/2015	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion on All Material Aspects
2016	Moch. Dadang Syachruna Izin No.AP.0697	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No.603/KM.1/2015	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion on All Material Aspects
2015	Moch. Dadang Syachruna Izin No.AP.0697	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No.281/KM.1/2010	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar, dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion on All Material Aspects

Audit Eksternal Lainnya

Pada tahun 2019, tidak terdapat pelaksanaan audit eksternal lainnya.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal. Berdasarkan koordinasi antara Komite Audit dan SPI, pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan di Perusahaan sepanjang tahun 2019 berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Other External Audits

In 2019, there were no other external audit activities.

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee has coordinated with the Internal Audit Unit (SPI) to review the effectiveness of the implementation of external audit. Based on the coordination between the Audit Committee and SPI, the implementation of external audit that has been conducted at the Company throughout 2019 has ran effectively in accordance with the applicable legislations.

Manajemen Risiko

Risk Management

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengerukan, Rukindo memiliki risiko usaha yang cukup besar. Manajemen Risiko menjadi bagian integral Perusahaan yang melekat pada budaya dan aktivitas kerja, khususnya dalam proses bisnis Rukindo. Proses manajemen risiko tersebut terdiri dari aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, serta *monitoring* dan telaah terhadap penanganan risiko.

As a company engaged in dredging services, Rukindo has a substantial business risk. Risk Management is an integral part of the Company and has become the working culture and part of the Company's activities, especially in its business processes. The risk management process consists of communication and consultation activities, context setting, risk assessment, risk management, and monitoring and review of risk management.

Struktur Manajemen Risiko

Struktur pengelola risiko di Rukindo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Risk Management Structure

The risk management structure at Rukindo is based on the Decree of Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 on May 15, 2019 is as follows:



Kebijakan, Kerangka dan Proses Manajemen Risiko

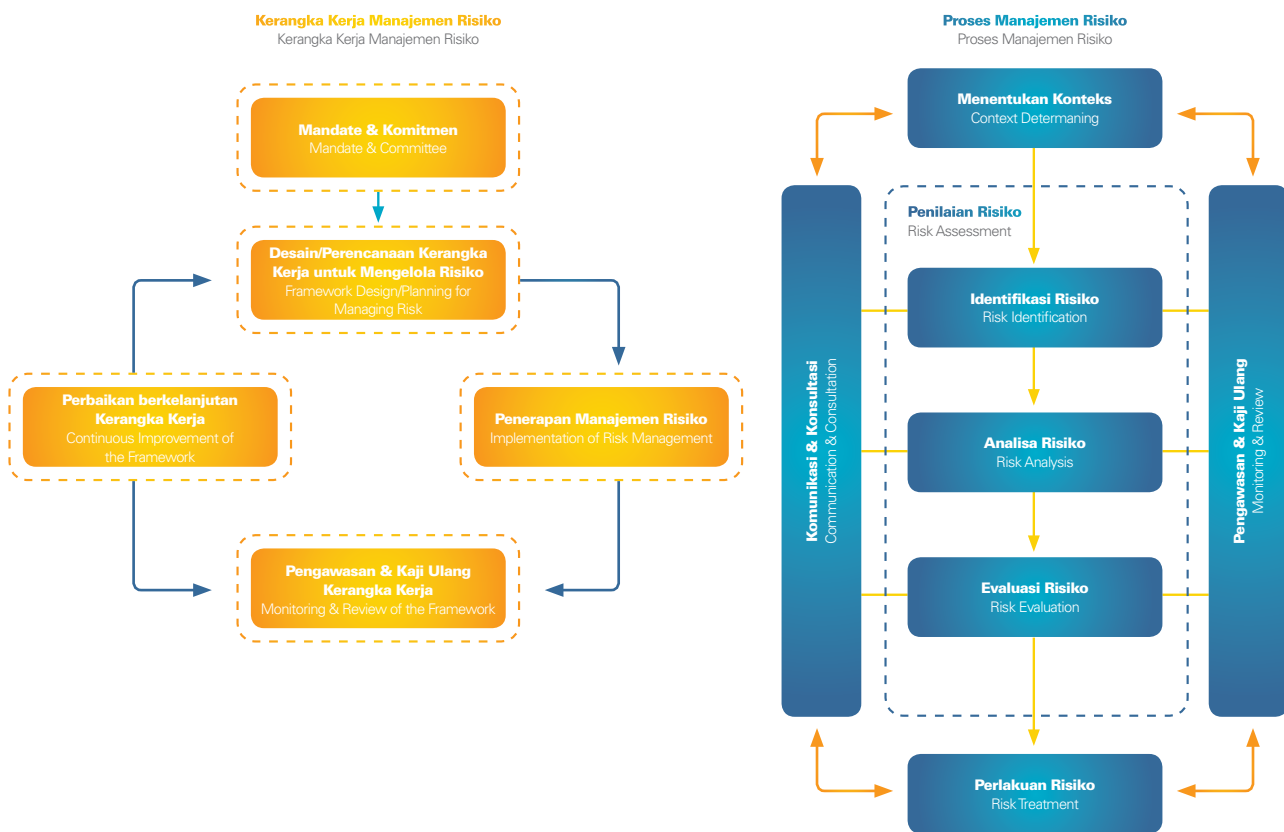
Sistem manajemen risiko di Perusahaan telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No: KD.033/OT.101/XI/DIRUT-2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko tanggal 27 Desember 2016. Kerangka Kerja Manajemen Risiko merupakan seperangkat komponen atau elemen yang memberikan landasan dan kerangka kerja untuk merencanakan, menerapkan, memonitor, mengkaji ulang, dan secara berkelanjutan memperbaiki proses Manajemen Risiko pada seluruh bagian organisasi. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi

Policies, Framework and Process of Risk Management

The risk management at the Company has been determined through the Decree of Board of Directors No: KD.033/OT.101/XI/DIRUT-2016 regarding the Risk Management Implementation Guideline on December 27, 2016. The Risk Management Framework is a set of components or elements that provide the foundation and framework for planning, implementing, monitoring, reviewing, and continuously improving the Risk Management process in all organization levels. This framework will ensure that the Company will receive full and adequate risk information from the Risk Management process that will

Risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses Manajemen Risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Kerangka dan Proses manajemen risiko Rukindo adalah sebagai berikut:

be documented and utilized as a basis for decision making. Rukindo's risk management framework and process is as follows:



Risiko Perusahaan dan Upaya Mitigasi

Pengelolaan risiko dilaksanakan pada kegiatan operasional, non operasional dan investasi di Perusahaan. Objek risiko operasional mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses bisnis pokok kepelabuhannya yang terukur dalam Sasaran Mutu dan KPI.

Proses manajemen risiko secara garis besar terdiri dari aktivitas penetapan konteks risiko, penilaian risiko, perlakuan risiko serta *monitoring* dan *review*. Aktivitas penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko. Seluruh aktivitas di dalam proses

Company Risks and Mitigation Efforts

Risk management is carried out on the Company's operational, non-operational, and investment activities. The operational risk object includes activities directly related to the core business processes, measured in the Quality Objectives and KPIs.

In general, the risk management process comprises of several activities that include the determination of the risk context, risk assessment, risk treatment as well as monitoring and review. Risk assessment consist of risk identification, risk analysis and risk evaluation. All risk management activities are supported by communication and consultation activities

manajemen risiko didukung oleh aktivitas komunikasi dan konsultasi antara Unit Kerja terkait sebagai pemilik risiko (*risk owner*) dari Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha.

Visi Perusahaan, arah kebijakan dan *corporate roadmap* yang diturunkan menjadi tema dari *milestone* tahunan serta sasaran Perusahaan menjadi perhatian di dalam penetapan konteks risiko. Aktivitas penilaian risiko yang disebut dengan *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)* dilaksanakan untuk menghasilkan profil risiko sehingga diperoleh gambaran secara umum mengenai prioritas penanganan risiko yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian sasaran Perusahaan.

Rencana tindakan penanganan (mitigasi) atas risiko-risiko terpilih (*top 10 risk*) kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM). Atas rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan dilakukan *monitoring* dan *review* terhadap realisasi pelaksanaannya dan efektivitas penurunan risiko setelah dilakukan mitigasi.

Keselaran antara upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan proses identifikasi dan upaya penanganan risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan tersebut tergambar dengan adanya keterkaitan antara alur penyusunan RKM dengan proses manajemen risiko sebagai berikut.

Review atas Sistem Manajemen Risiko

Pelaksanaan pengawasan dan telaah atas Sistem Manajemen Risiko dilakukan oleh tiga pihak yang meliputi pemantauan mandiri yang dilakukan oleh Pemangku Risiko dan Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha, pemantauan oleh atasan yang dilakukan oleh Manajemen Puncak di Perusahaan dan pemantauan oleh pihak ketiga yaitu pengawasan dan kaji ulang terhadap proses Manajemen Risiko dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak terkait di dalam proses penerapannya. Hal-hal yang diawasi dan dikaji ulang antara lain mencakup efektifitas proses Manajemen Risiko, efektifitas kinerja Manajemen Risiko dan efektifitas kontrol internal.

between the relevant Working Units (as risk owner) from the Business Planning and Development Bureau.

The Company's vision, policy and corporate roadmap as well as the Company's goals became the theme of the annual milestone and became a concern in setting the risk context. A risk assessment activity called Risk and Control Self-Assessment (RCSA) is conducted to produce a risk profile so that the general picture of risk management priorities that has a significant impact to achieve the Company's goals can be obtained.

The action plan for handling (mitigating) selected risks (top 10 risks) is then poured into the Management Work Plan (RKM). The agreed risk mitigation plan will then be monitored and reviewed and be measured on the effectiveness of its mitigation activities to reduce risk.

Alignment between target achievement, identification process and risk management are illustrated by the link between the RKM flow and the risk management process as follows.

Review on Risk Management System

The supervision and review of the Risk Management System is carried out by three parties, including self-monitoring carried out by Risk Stakeholders and Business Planning and Development Bureau, superiors' monitoring, which is carried out by Top Management in the Company, and monitoring by third parties, i.e. supervision and review of the Risk Management process carried out by an independent and unrelated party in the implementation process. Matters that are monitored and reviewed include the effectiveness of Risk Management, Risk Management performance, and internal controls.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Rukindo telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mencakup seluruh tahapan proses pengendalian kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi. Sistem Pengendalian Internal yang dimaksud meliputi kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Rukindo telah ditetapkan berdasarkan Nomor: 12/11/1/DIRUT-2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Konsep Sistem Pengendalian Internal Rukindo diarahkan sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) di mana di dalamnya terdiri dari lima elemen, yaitu:

1. Menciptakan sebuah komitmen bersama terhadap tanggung jawab, kompetensi, integritas dan nilai-nilai Perusahaan serta membentuk struktur, pembagian tugas, tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka membentuk lingkungan pengendalian dari level unit bisnis sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris (*control environment*).
2. Identifikasi dan penilaian terhadap kemungkinan munculnya fraud dan risiko (*risk assessment*).
3. Merancang dan mengembangkan aktivitas pengendalian dan *control* terhadap teknologi secara keseluruhan melalui kebijakan dan prosedur (*control activities*).
4. Mengembangkan dan mengontrol sistem akuntansi, informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi Perusahaan (*information and communication*).
5. Melakukan evaluasi dan kontrol secara terus-menerus serta mengomunikasikan setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan (*monitoring activities*).

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Fokus pengendalian Rukindo dalam sistem pengendalian internal adalah terkait aspek keuangan dan operasional. Pengendalian terhadap aspek keuangan dan operasional dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang mulai dari Unit Bisnis sampai dengan level Direksi dan Dewan

Rukindo has implemented an Internal Control System that covers all controlling process of the Company's activities at every level and every working unit in the organizational structure. The Internal Control System here also includes the authority, authorization, verification, reconciliation, assessment working performance, division of duties, and security of Company's assets. Rukindo's Internal Control System Policy has been established based on Number: 12/11/1/DIRUT-2018 regarding the Company's Internal Control System.

Internal Control System Framework

Rukindo's Internal Control System Framework is directed in line with the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which consists of five elements:

1. Creating a shared commitment to the Company's responsibility, competence, integrity, and values, and establishing a clear and accountable structure, segregation of duties, responsibilities in order to establish a controlled environment from the business unit level to the Board of Directors and Board of Commissioners (*control environment*).
2. Identifying and assessing the probability of fraud and risks (*risk assessment*).
3. Designing and developing overall monitoring and control activities on technology through policies and procedures (*control activities*).
4. Developing and controlling accounting, information, and communication systems internally and externally to generate more relevant information for the Company (*information and communication*).
5. Evaluating and conducting continuous control and communicating every aspect that need to be improved or refined (*monitoring activities*).

Financial and Operational Control

Rukindo's focus in the internal control system is related to financial and operational aspects. Control over financial and operational aspects is carried out thoroughly and gradually starting from the Business Unit up to the level of Board of Directors and Board of Commissioners. The internal

Komisaris. Proses pengendalian internal Rukindo juga melibatkan pihak eksternal sebagai auditor yang bersifat independen. Unit bisnis mengelola dan menyusun laporan keuangan dan kinerja operasionalnya sesuai dengan prosedur dan standar pelaporan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Fungsi manajemen risiko menganalisis dan menyusun profil risiko serta mitigasinya yang menjadi acuan unit bisnis sebagai pemilik risiko untuk mengelola risiko di masing-masing unit bisnisnya yang berkaitan dengan aspek keuangan dan operasional. Fungsi Internal Audit dibantu oleh Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan kinerja keuangan, operasional dan kepatuhan. Direksi memantau dan mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja dari unit bisnis dan Perusahaan secara umum serta laporan hasil audit dari Internal Audit dan Auditor Eksternal untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bersama Komite-komite melakukan telaah atas laporan keuangan dan operasional dan memberikan rekomendasi dari hasil telaah.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi dibantu fungsi Manajemen Risiko dan Internal Audit melakukan evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal Rukindo. Secara parsial evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi risiko Perusahaan yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun peta risiko. Selain itu, evaluasi dilakukan melalui kegiatan audit oleh internal audit dibantu pihak eksternal yang hasilnya dapat menggambarkan efektifitas sistem pengendalian internal dalam menekan tingkat pelanggaran ketentuan atau prosedur yang berlaku maupun temuan-temuan lain secara konsisten dan menyeluruh. Kemudian hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Direksi untuk dibahas oleh jajaran Direksi sebelum disampaikan ke pada Dewan Komisaris untuk kemudian ditelaah bersama Komite-komite untuk kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

control process also involves external parties that act as an independent auditor. The business unit manages and prepares financial reports and operational performance in accordance with the applicable procedures and reporting standards at the Company.

The risk management function analyzes and compiles the risk profiles along with the mitigation that serve as a reference for business units, which act as the risk owners, to manage the risks in each of their business units that are related to financial and operational aspects. The Internal Audit function is assisted by an External Auditor that conduct the audits on financial, operational and compliance performance. The Board of Directors monitors and evaluates the financial and performance reports of business units and the Company in general as well as reports on audit results from the Internal Audit and External Auditors – al then reported to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners, together with the Committees, review the financial and operational reports and provides recommendations on the results of the review.

Evaluation on the Internal Control System

The Board of Directors is assisted by the Risk Management and Internal Audit functions to evaluate the effectiveness of Rukindo's internal control system. Partially, the evaluation is the Company's risk evaluation, which then becomes the reference in preparing the risk map. In addition, the evaluation is conducted through internal audit activities, assisted by external parties. The results shall illustrate the effectiveness of the internal control system in suppressing the level of violation of applicable provisions or procedures, as well as other findings consistently and thoroughly. The evaluation results are reported to the Board of Directors to be discussed before being submitted to the Board of Commissioners to produce useful recommendations in improving the effectiveness of the internal control system.

Pedoman Perilaku

Code of Conduct

Rukindo telah menyusun standar etika yang sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan dan dituangkan ke dalam Kebijakan yang disebut Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Kebijakan tersebut menjadi sarana dalam membudayakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan Tata Nilai Perusahaan pada proses bisnis Perusahaan.

Tata Nilai Perusahaan

Kode Etik Perusahaan didasarkan pada nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dalam aktivitas pengelolaan, mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rukindo has compiled ethical standards that are in line with the Company's values and set forth in a Policy called the Code of Conduct. The policy is a means to cultivate the Good Corporate Governance Implementation based on Corporate Values in the Company's business processes.

Corporate Values

The Company's Code of Conduct is based on noble values as a foundation to manage the business activities and realizing the Company's vision, mission, and goals. The noble values within the Company's environment are as follows:

Tata Nilai Corporate Values	Penjelasan Description
<i>Service Excellent</i>	Memberikan pelayanan mutu yang baik, harga bersaing, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan aman, yang diwujudkan melalui tata kerja yang efektif dan efisien, serta sumber daya yang andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Providing good quality services, competitive prices, timely and safe work completion, which is realized through effective and efficient work procedures, and reliable resources to meet customer satisfaction.
<i>Professional</i>	Menjunjung tinggi nilai kemampuan membangun, memelihara dan menguntungkan bisnis usaha perusahaan yang berdaya saing tinggi, berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan perusahaan yang terbaik di Indonesia. Upholding the value of the ability to build, maintain, and benefit the company's business that is highly competitive, customer satisfaction-oriented, and striving to be the best company in Indonesia.
<i>Integrity</i>	Berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal serta disiplin dan patuh terhadap norma-norma hukum, etika dan kesusilaan yang berlaku di perusahaan. Honest in interacting with internal and external parties, discipline, and adhere to legal norms, ethics, and morality that apply in the company.
<i>Responsibility</i>	Memikul semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di <i>job deskripsi</i> , serta patuh dan bekerja sebatas tugas dan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh perusahaan. Carrying out all obligations and duties in accordance with the boundaries in the job description, and complying and working to the extent of the duties and responsibilities allowed by the company.
<i>Initiative</i>	Mampu dan mau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menunggu diperintah, serta memahami pentingnya kontribusi setiap karyawan bagi perusahaan. Able and willing to do what needs to be done without waiting for orders, and understand the importance of employee's contribution to the company.
<i>Teamwork</i>	Bekerja secara kelompok dengan keterampilan dan kompetensi yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai misi serta tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Working in team with complementary skills and competencies and committed to achieving the company's mission and goals effectively and efficiently.

Muatan Pedoman Perilaku

Content of Code of Conduct

Muatan Content	Penjelasan Description
Pendahuluan Introduction	Bagian ini memuat pengertian, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Perusahaan. This section contains the definition, Vision, Mission, Goals, and Values of the Company.

Muatan Content	Penjelasan Description
Etika Profesional Professional Ethics	Merupakan penjabaran etika dalam berhubungan dengan insan Rukindo, Pelanggan, Vendor, Komunitas dan Lingkungan, Institusi Pemerintah, dan terkait aktifitas politik. Definition of ethics in relation to personnel of Rukindo, Customers, Vendors, Communities, and the Environment, Government Institutions, and related political activities.
Etika Kerja Work Ethics	Merupakan penjabaran mengenai pendokumentasian dan pencatatan Perusahaan, kontrol internal, perjalanan dinas, kerahasiaan data dan atau informasi, menghadapi konflik kepentingan, anti penyuapan, serta media, komunikasi dan informasi. Definition of the documentation and recording of the Company, internal control, business trip, data and/or information confidentiality, facing conflicts of interest, anti-bribery, and media, communication and information.
Penegakan Pedoman Perilaku Enforcement of the Code of Conduct	Merupakan penjabaran mengenai Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku, Pelaporan Tindakan Penyimpangan serta Sanksi Pelanggaran. Definition of the person in charge of enforcing ethics and behavior, reporting acts of irregularities and sanctions for violations.
Penutup Closing	Menjelaskan bahwa Pedoman Perilaku menjadi satu kesatuan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan terkait proses <i>review</i> berkala serta pemutakhiran Pedoman Perilaku. Explaining that the Code of Conduct is an integral part of good corporate governance and is related to the periodic review process, and updates of the Code of Conduct.

Pemberlakuan Pedoman Perilaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan telah diperbaharui pada bulan November 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar ditetapkannya Pedoman Perilaku dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Perusahaan menekankan pemberlakuan Pedoman Perilaku bagi seluruh level organisasi di lingkungan Perusahaan dengan mewajibkan setiap elemen yang ada di Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin fungsi/proyek/galangan sampai dengan pekerja menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dimaksud.

Sosialisasi Pedoman Perilaku

Internalisasi *Code of Conduct* Perusahaan menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pemahaman dan komitmen bersama penerapan *Code of Conduct*. Upaya internalisasi *Code of Conduct* dilakukan dengan sosialisasi baik secara tatap muka langsung seperti seminar; media cetak seperti poster, buletin dan *standing banner*; serta memanfaatkan media *online* seperti *email*, Portal Perusahaan dan *website*.

Enforcement of the Code of Conduct for All Levels of Organization

The Code of Conduct has been compiled and set forth on 15 December 2016, and has been updated in November 2017, signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Based on the establishment of a Code of Conduct in the context of implementing Good Corporate Governance, the Company emphasizes the implementation of Code of Conduct for all levels of organizations within the Company, by requiring every element in the Company, from the Board of Commissioners, Directors, Leaders of functions/projects/shipyard up to the employees to sign a statement of compliance with the said Code of Conduct.

Socialization of Code of Conduct

Code of Conduct internalization in the Company is very important to achieve mutual understanding and commitment in implementing the Code of Conduct. The Code of Conduct internalization efforts are carried out by direct socialization such as seminars; print media such as posters, bulletins and standing banners; and utilizing online media, such as e-mail, company portal, and website.

Komitmen dan Penegakan Pedoman Perilaku di Lingkungan Perusahaan

Seluruh Insan Rukindo bersepakat dan berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Perilaku. Bentuk komitmen ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Komitmen tersebut paling kurang berisi pernyataan bahwa telah menerima, memahami, bersedia mematuhi Pedoman Perilaku, menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan bersedia menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran. Pernyataan komitmen tersebut menjadi salah satu bentuk penegakan Pedoman Perilaku dan Perusahaan akan menindak setiap pelaku pelanggaran Pedoman Perilaku dengan memberikan sanksi berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Kategori Pelanggaran Infringement Category	Jenis Sanksi Types of Sanction
1.	Pelanggaran ringan Light violations	Pemberian Teguran Lisan/Teguran Tertulis Written/Verbal Warning
2.	Pelanggaran sedang Medium violations	Pemberian Surat Peringatan I/Surat Peringatan II Warning Letter I/Warning Letter II
3.	Pelanggaran berat Heavy violations	Pemberian Surat Peringatan III/Penurunan PRL Individu/PHK Warning Letter III/Declining the PRL of the Individual/Termination of Employment.

Jumlah pelanggar *Code of Conduct* dan sanksi yang diberikan tahun 2019 adalah nihil.

Commitment and Enforcement of Code of Conduct in the Corporate Environment

All of Rukindo's employees agree and commit to comply with and implement the Code of Conduct. The commitment is in the form of signing a statement of compliance with the Code of Conduct. These commitments contain the statement that the undersigned has received, understood, is willing to comply with the Code of Conduct, to apply the Code of Conduct in carrying out daily tasks, and is willing to accept the consequences of committing a violation. The commitment is one form of enforcement of the Code of Conduct and the Company has committed to take action against any violators by imposing sanctions that are based on the category of violations. The types of sanctions for violating the Code of Conduct are as follows:

The number of violators of the Code of Conduct and sanctions imposed in 2019 is zero.

Gratifikasi

Gratification



Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan, isu anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi manajemen Perusahaan. Dalam semangat tersebut, manajemen terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN termasuk di dalamnya upaya pengendalian Gratifikasi.

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik *Stakeholder* maupun vendor yang seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Rukindo memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Rukindo untuk tidak terjerat dalam praktik Gratifikasi.

Pedoman pengelolaan gratifikasi ini diharapkan akan memperkuat penegakan GCG Perusahaan dan menjadi acuan bagi seluruh Insan Rukindo dalam menyikapi gratifikasi ketika berhubungan dengan pihak ketiga Perusahaan. Pedoman ini merupakan salah satu rangkaian dokumen penegakan GCG perusahaan di mana isi dalam pedoman ini selaras dengan pedoman GCG, Kode Etik Bisnis dan juga Tatalaksana Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Perusahaan.

As a professional, independent, and sustainable company with integrity, the issue of anti-corruption, collusion, and nepotism (KKN) becomes a priority for the Company's management. Based on that passion, the management continues to make efforts to free themselves from KKN, including gratification.

The Company realizes that in establishing business partnership with third parties, both Stakeholders and vendors are often involved in gratification, and therefore the Company needs a guideline to control it. This is done so that all Personnel of Rukindo have the same understanding on how to treat the gratification and help them to not be entangled in the act.

This guideline of gratification management is expected to strengthen the enforcement of the Company's GCG and become a reference for all Personnel of Rukindo when responding to gratification with the third parties. This guideline is one of the documents of GCG enforcement in which the content is made to be in line with GCG guidelines, the Code of Conduct and the Board Manual for the Directors and Board of Commissioners of the Company.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan secara sehat, sportif dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

The Board of Commissioners, Directors, and all employees have always upheld the fair competition in a sound and professional manner, which is in accordance with GCG principles. The Company is also committed to creating a sound business climate, avoiding actions or behaviors that may cause conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritize the interests of the Company above the interest of personal, family, group or certain class. The Company is also committed to always paying attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 in 2001 regarding Amendments to Law No. 31 in 1999 regarding Eradication of Corruption.

Kebijakan Anti Penyuapan

Anti-Bribery Policies

Rukindo secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan. Hal ini ditegaskan melalui komitmen bersama Insan Rukindo dalam melaksanakan Pedoman Etika Usaha dan Perilaku (*Code of Conduct/COC*) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016. Melalui Pedoman COC yang telah dibentuk, Rukindo mengharapkan semua Insan Rukindo untuk tidak memberi atau menerima semua hal yang terkait dengan penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak sesuai etika dalam kapasitas pekerjaan. Apabila terhadap pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Rukindo perlu melaporkannya kepada atasan untuk melakukan tindakan yang pantas dilakukan.

Rukindo is very assertive and prohibits all forms of bribery. This firm stance is enforced through a joint commitment among the Personnel of Rukindo, signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016, in implementing the Code of Conduct (COC). Through the COC Guidelines, Rukindo is expecting that all Personnel of Rukindo shall not give or accept everything related to offers, commitments, money, gifts, entertainment, or valuable items that are not in accordance with ethical standard that has the objective of encouraging a sense of favoritism, to influence, change decisions, violate working agreements, and other benefits that are not appropriate in terms of working capacity. If an external party offers or tries to do the same thing, the personnel of Rukindo need to report it to the supervisor for an appropriate action.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Official Wealth Report (LHKPN)

Sebagai bagian dari Grup IPC, yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan berkomitmen untuk merealisasikan semangat anti korupsi dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No.KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelaksanaan LHKPN Perusahaan

Pelaksanaan LHKPN Perusahaan mengacu pada ketentuan Pedoman COC yang berlaku di Perusahaan.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2019

Para pejabat Perusahaan yang termasuk dalam wajib lapor telah melakukan kewajibannya di tahun 2019 dalam hal pelaporan LHKPN.

As part of the IPC Group, which is owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is committed to realizing an anti-corruption spirit by submitting the State Officials Wealth Report (LHKPN). LHKPN is a list of all the assets of the State Officials which listed in the LHKPN form that has been prepared by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decree No.KEP 07/KPK/02/2005 regarding Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Officials Wealth Report.

In Law No.28 in 1999 article 2 (7) along with their explanations, the officials who have strategic functions in relation to state administrators – including the Board of Commissioners, Directors, and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

Implementation of LHKPN at the Company

The implementation of the Company's LHKPN refers to the provisions in the COC Guideline of the Company.

LHKPN Transparency on Company Officials in 2019

All of the Company's officials that are obligated to submit the LHKPN report have fulfilled their obligations in 2019.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Rukindo merupakan ratifikasi atas Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Penerapan WBS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Hal tersebut dikarenakan program tersebut terintegrasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku entitas pengendali dari Rukindo. Pedoman tersebut telah diberlakukan di Rukindo tanggal 20 Desember 2016 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.036/HK.304/XII/DIRUT-2016. Kebijakan tersebut diinternalisasikan pada setiap level jabatan yang ada di Rukindo melalui sosialisasi secara menyeluruh.

Pengelola WBS

Pengelolaan WBS di Rukindo terintegrasi pada Entitas Pengendali yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH. Tata cara pelaporan, alur proses dan tindak lanjut laporan dilakukan oleh Rukindo.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong pekerja dan *stakeholder* lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Rukindo berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan menjamin bahwa Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan dan perundang-perundangan terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Mekanisme WBS

Mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran yang berlaku di Rukindo, sesuai kebijakan WBS yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

Whistleblowing System (WBS) of Rukindo is a ratification of the Guidelines for Gratuity Control and Whistleblowing System (WBS) Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). This is because the program is integrated with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the holding of Rukindo. The guidelines have been implemented at Rukindo on 20 December 2016, through a Directors' Decree No.KD.036/HK.304/XII/DIRUT-2016. The policy is internalized on every level of PT Rukindo through intensive and comprehensive socialization.

WBS Manager

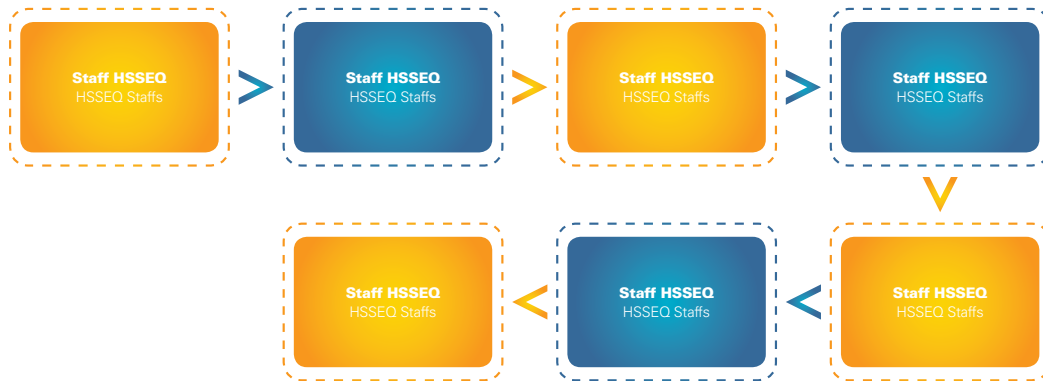
The Whistleblowing System management at Rukindo is integrated at the Holding Company, i.e. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the establishment of IPC BERSIH Committee. The Procedures of Reporting, Process Flow, and Follow-up Flow is handled by Rukindo.

Whistleblower's Protection

The Whistleblower's protection is intended to encourage any Company's personnel and other stakeholders to report violations and ensure the security of the Whistleblower and their family. Rukindo is committed to protecting Whistleblower in good faith and the Company shall comply with all relevant laws and prevailing best practices in the WBS implementation.

WBS Mechanism

Rukindo's whistleblowing system mechanism is in accordance with the WBS policy set forth as follows:

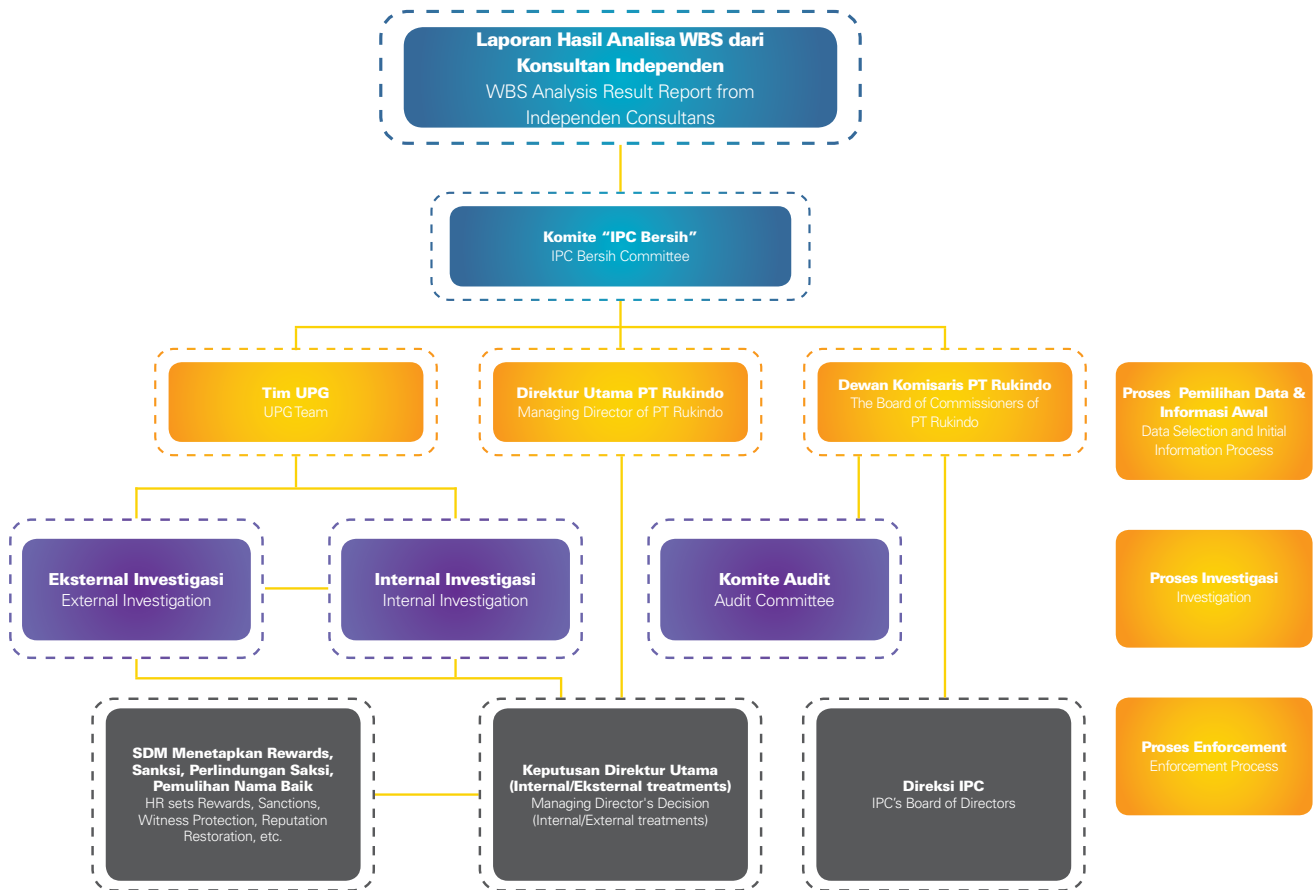


Penanganan Pelaporan

Penanganan atau tindak lanjut pelaporan melalui WBS dilaksanakan berdasarkan mekanisme sebagaimana dijabarkan pada bagan berikut:

Reporting Handling

Handling or follow-up of the report through WBS are carried out under the mechanism as outlined in the following chart:



Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat laporan WBS di sepanjang tahun 2019.

Number of Reports and Follow-Up

There were no WBS reports throughout 2019.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Significant Cases that the Company is Facing

Perkara penting yang dimaksud adalah kasus litigasi yang dihadapi oleh Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi. Kasus litigasi dapat diartikan sebagai permasalahan hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pajak, Peradilan Arbitrase maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum pidana dan perdata yang dihadapi Rukindo.

Sanksi Administrasi

Pada tahun 2019, tidak terdapat sanksi administrasi yang dihadapi Rukindo.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Pada tahun 2019, tidak terdapat perkara penting di luar aspek hukum yang dihadapi Rukindo.

Important cases are defined as the Litigation Case faced by the Company, Subsidiaries, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Litigation Case may be interpreted as a legal matter whose settlement is conducted through judiciaries, such as District Court, High Court, Tax Court, Judicial Arbitration, and Corruption Court.

Legal Issues

In 2019, there were no criminal and civil legal problems faced by Rukindo.

Administrative Sanction

In 2019, there were no administrative sanction faced by Rukindo.

Important Cases Outside of Legal Aspect

In 2019, there were no important cases outside of legal aspect faced by Rukindo.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Penetapan bidang-bidang tersebut disesuaikan dengan penerapan CSR yang sesuai dengan ISO 26000 yang mencakup Hak Asasi Manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, operasi yang adil, isu konsumen, perkembangan dan pelibatan komunitas yang semuanya bermula dari tata kelola Perusahaan sebagai pusat kegiatan CSR. Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a mean for the Company to build a strong, growing relations with stakeholders, such as the management and employees from the internal public and the surrounding communities and consumers from the external public. The determination is adjusted to the CSR implementation that is in accordance with ISO 26000 which covers Human Rights, labor practices, the environment, fair operations, consumer issues, community development and engagement and all of those activities are centralized from the corporate governance. Further information regarding the implementation of the Company's CSR can be seen in the Corporate Social Responsibility chapter in this Annual Report.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Funding Information for Political Activities

Pedoman Etika Usaha dan Perilaku (*Code of Conduct/ COC*) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Desember 2016 menegaskan bahwa Rukindo mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. Hal ini membawa arah kebijakan di mana Rukindo tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun di negara manapun. Perusahaan juga melarang Insan Rukindo untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota partai.

The Code of Conduct (COC) that has been signed by the Board of Commissioners and Directors on December 15, 2016, confirms that Rukindo remains neutral towards political parties. This leads to a commitment that Rukindo does not provide financial assistance to political parties, politicians or any candidates in any country. The Company also prohibits all Personnel of Rukindo from participating in political activities both in the management and as party members.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan mengeluarkan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pedoman ini memberikan landasan bagi proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Perusahaan; termasuk kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang berhubungan dengan persetujuan proses pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkup Perusahaan meliputi proses perencanaan, eksekusi, dan pengawasan atas proses yang berjalan, serta audit atas hasil dari pengadaan. melalui kebijakan dan pedoman tersebut, Perusahaan memberikan kerangka proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

To avoid the potential for conflicts of interest, the Company has issued an internal policy for the procurement of goods and services. This guideline provides the basis for the process of procurement of goods and services within the Company; including rules and restrictions related to the approval process for procurement of goods and services.

The Company's procurement of goods and services policy includes the planning, executing, and supervising processes, as well as procurement audit results. through these policies and guidelines, the Company provides a framework for the process of procurement of goods and services that is accountable and responsible.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data



Rukindo memberikan kemudahan akses informasi dan data Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan secara tepat waktu, akurat dan jelas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait aspek transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemangku Kepentingan yang dimaksud di sini berlaku bagi publik internal dan eksternal Perusahaan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.055/HK.304/XI/DIRUT-2016 tanggal 23 November 2016 tentang Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan Pengerukan Indonesia.

Rukindo has provided the Stakeholders with easy access on the Company's accurate and updated information and data that can be obtained timely, in terms of GCG principles implementation, particularly in regard to transparency aspects that in accordance with applicable laws and regulations. The Stakeholders here are the internal and external public of the Company. This commitment is reinforced with the Decree of the Board of Directors Number: KD.055/HK.304/XI/DIRUT-2016 dated November 23, 2016 regarding the Information Standards in the Dredging Environment in Indonesia.

Akses Informasi Information Access	Keterangan Description
Online	Informasi mengenai Rukindo dapat dilihat pada situs web resmi Perusahaan di www.rukindo.co.id Information about Rukindo can be seen on the Company's official website at www.rukindo.co.id
Media Sosial Social Media	Facebook : @rukindoshipyard Twitter : @pt_rukindo Instagram : @ipc_rukindo
Surat-menyurat/Surel Mail/Email	Email ke Kontak Rukindo yang dapat ditujukan ke admin@rukindo.co.id Alamat surat-menyurat Perusahaan: Jl. Industri 4, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 Email to Rukindo Contact at admin@rukindo.co.id The Company's correspondence can be directed to: Jl. Industri 4, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310
Telepon Phone	+6221 4301380
Media Massa Mass Media	Pesan yang disampaikan kepada media massa merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan pemahaman publik secara umum terhadap lingkup bisnis dan karakteristik Rukindo. Dalam upayanya membangun <i>awareness</i> publik, Rukindo melakukan optimalisasi pada ragam publikasi yang seperti melalui rilis berita pada tahun 2019. The information which conveyed to the mass media are those that can increase the general public's understanding about Rukindo's business scope and characteristics. In building public awareness, Rukindo optimizes the variety of publications such as through news releases that were issued in 2019.

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance*

Transparency of Bad Corporate Governance

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan masyarakat sekitar area pabrik serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan operasional Perusahaan sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Pada 2019 Perusahaan tidak menerima/menerima pengaduan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun lebih dari itu yakni memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Praktik *bad corporate governance* lainnya juga tidak terlihat pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian, LHKPN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

The Company realizes that its business activities are inseparable from direct and indirect interactions with the surrounding community and the environment. Therefore, any form of bad corporate governance has always been a concern for the Company when it comes to its operational activities and therefore it can minimize the negative impacts.

In 2019, the Company did not receive/receive complaints as a company that endanger the environment.

This is inseparable from the Company's commitment to community development and environmental preservation through corporate social responsibility. The Company is not only conducted a profit-oriented business activity, but more than that, the Company is committed to providing benefits to society and the environment.

Other practices of bad corporate governance were also not seen in terms of non-compliance in fulfilling tax obligations as well as inaccurate presentation, LHKPN, gratification and conflict of interest.



7

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility





“Rukindo berupaya memberikan manfaat dan nilai yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan melalui program Tanggung Jawab Sosial guna mendukung pembangunan berkelanjutan.”

"Rukindo strives to provide maximum benefits and values to all stakeholders through the Social Responsibility program to support sustainable development."



Komitmen Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility Commitment

Rukindo melaksanakan program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi bagi para Pemangku Kepentingan dalam berbagai aspek meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan program CSR diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh Pemangku Kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis untuk menjamin keberlangsungan usaha.

Komitmen Rukindo dalam menjalankan program CSR ditunjukkan melalui Keputusan Direksi Nomor: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pengelolaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menunjuk Sekretaris Perusahaan dan Legal untuk melaksanakan pengelolaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sekretaris Perusahaan dan Legal melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Rukindo runs the Corporate Social Responsibility (CSR) program as a form of our commitment to contribute to Stakeholders in various aspects of their life including economic, social and environmental aspects. The CSR program is expected to have a positive impact on all Stakeholders to create a harmonious relationship to ensure business sustainability.

Rukindo's commitment in conducting CSR programs is shown through Decree of Board of Directors Number: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 on October 12, 2016 regarding the Management of Corporate Social and Environmental Responsibilities as follows:

1. Appoint the Corporate Secretary and Legal to manage the social and environmental responsibilities.
2. Implement the social and environmental responsibilities based on the Corporate Working Plan and Budget.
3. Implement the social and environmental responsibilities based on the applicable propriety and fairness.

The Corporate Secretary and Legal reports the activities of social and environmental responsibilities to the Managing Director for further report to Shareholders.

Referensi Dasar Hukum CSR

CSR Legal Basis

Kegiatan CSR Perusahaan juga dipastikan mengacu kepada regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi referensi pelaksanaan CSR adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
3. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1991.

The Company's CSR activities are also ensured to refer to the applicable regulations. The regulations that become the reference for the Company to CSR are:

1. Law Number 40 in 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 in 2013 regarding Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of PT Pelabuhan Indonesia II;
3. Deed of Establishment of the Company Number 2 on October 1, 1991.

Struktur Pengelola CSR

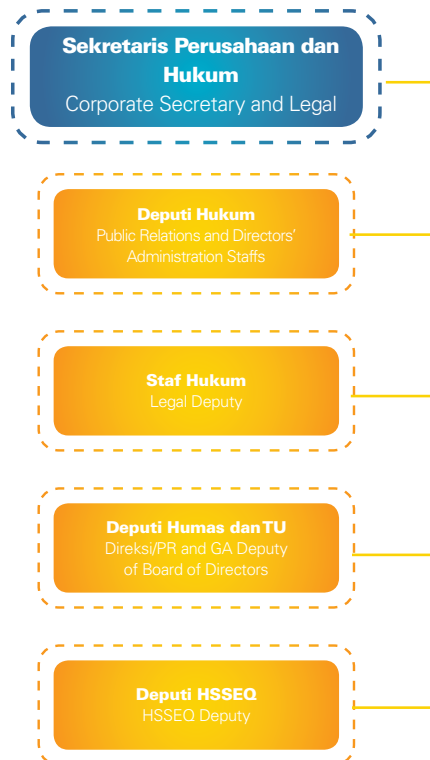
CSR Management Structure

Pelaksanaan program CSR di Rukindo dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh satu Organ Perusahaan yang khusus. Pengelolaan CSR dikelola secara khusus oleh Sekretariat Perusahaan dan Legal yang memiliki peran sebagai organ penghubung antara Perusahaan dengan masyarakat melalui rangkaian kegiatan komunikasi, salah satunya mengenai aspek tanggung jawab sosial Rukindo. Sekretariat Perusahaan dan Legal memiliki peran yang termasuk, namun tidak terbatas, pada beberapa hal mencakup pemetaan sosial, menyusun perencanaan, eksekusi program, pemantauan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program.

The CSR program at Rukindo is managed professionally and responsibly by a special organ of the Company. CSR management is specifically managed by the Corporate Secretary and Legal that has a role as a liaison between the Company and its community through a series of communication activities, one of which concerns the aspects of social responsibility. The role of Corporate Secretary and Legal covers, but not limited, on several matters including social mapping, planning, program execution, monitoring, and regular evaluations of program effectiveness.

Organisasi dan pengorganisasian inisiatif tanggung jawab sosial di lingkungan Perusahaan disajikan pada bagan di bawah ini:

The organization and management of social responsibility initiatives within the Company are presented in the chart below:



Metode dan Lingkup Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility Implementation Methods and Scope

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan senantiasa fokus dan untuk memberikan dampak yang optimal. Hal ini dapat terealisasi dengan penetapan program CSR yang fokus pada beberapa pilar. Penetapan bidang-bidang tersebut disesuaikan dengan penerapan CSR yang sesuai dengan ISO 26000 yang mencakup Hak Asasi Manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, operasi yang adil, isu konsumen, perkembangan dan pelibatan komunitas yang semuanya bermula dari tata kelola Perusahaan sebagai pusat kegiatan CSR.

The Company is always ensuring that the CSR activities are set to focus on providing optimal impact. This can be realized by establishing CSR programs that focus on several pillars. The determination of these fields is adjusted to the implementation of CSR in accordance with ISO 26000 which covers Human Rights, labor practices, environment, fair operations, customer issues, community development and engagement, which all stems from the governance of the Company as the center of CSR activities.



Rukindo mengidentifikasi sasaran dan masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar area operasi Perusahaan melalui metode asesmen yang dilakukan secara internal. Rukindo senantiasa melibatkan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan program-program CSR untuk

Rukindo identified the emerging social issues around its operational areas through an internal assessment method. Rukindo always involves its Stakeholders when establishing CSR programs to get an overview of the current issues and problems. Stakeholder engagement is also important to

mendapatkan gambaran mengenai isu dan permasalahan yang sedang terjadi. Pelibatan pemangku kepentingan juga penting untuk menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan program CSR Perusahaan. Dengan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, Rukindo membagi fokus penerapan CSR ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Menetapkan komunitas yang berada di lingkungan sekitar operasi termasuk dalam skala utama;
2. Komunitas di luar lingkungan operasi namun memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha, seperti konsumen;
3. Pihak lainnya yang juga merupakan komunitas dari Grup IPC secara keseluruhan.

Perusahaan juga memastikan bahwa program-program CSR yang dijalankan senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang dialami oleh Pemangku Kepentingan. Dalam rangka memastikan program-program CSR sesuai dengan kondisi pemangku kepentingan, Perusahaan telah menyediakan berbagai sarana komunikasi untuk menyampaikan keluhan mengenai berbagai permasalahan atau isu yang muncul akibat aktivitas operasional Perusahaan. Perusahaan senantiasa mengawasi dan mengukur dampak-dampak yang dapat ditimbulkan melalui metode asesmen yang dilakukan secara internal mulai dari pelanggan hingga otoritas dan regulator pembuat keputusan dan masyarakat sekitar area operasional.

determine the priorities in implementing the CSR programs. Based on the predetermined priority scale, Rukindo divides the focus of its CSR implementation into several categories as follows:

1. Determine that the community around our operational activities is categorized as our main priority;
2. The community outside our operational activities but still have a significant impact on our business sustainability, such as our customers;
3. And other parties who are also part of the community of IPC Group as a whole.

The Company is also ensuring that the CSR programs are always in accordance with the current situation and the conditions of our Stakeholders. Our method is done through various means of communication where the Stakeholders can submit their complaints regarding any issues due to the Company's operational activities. The Company continues to monitor and measure the impacts of our operational activities through an internal assessment method from customers to authorities and other regulators, as well as the community around the operational area.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Kegiatan Perusahaan

Affected or Influential Stakeholders due to the Company Activities

Perusahaan sangat menghargai keberadaan para Pemangku Kepentingan dalam aktivitas bisnis dan operasional. Hal ini membuat Perusahaan selalu menjaga hubungan harmonis dengan Pemangku Kepentingan. Perusahaan senantiasa berupaya untuk mempererat kerja sama dengan para Pemangku Kepentingan dengan salah satunya memperhatikan masukan dan aspirasi para Pemangku Kepentingan.

The Company highly values the presence of Stakeholders in the business and operational activities. This makes the Company has always maintain a harmonious relation with Stakeholders. The Company always strives to strengthen the cooperation with Stakeholders by always taking into account their input and aspirations.

Rukindo telah menentukan Pemangku Kepentingan yang terdampak atau berpengaruh pada kegiatan operasional Perusahaan. Rukindo secara berkala melakukan survei persepsi dari masing-masing *Stakeholder* terhadap kegiatan Perusahaan. Para Pemangku Kepentingan yang terdampak atau berpengaruh pada kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rukindo has determined the Stakeholders who are affected or influencing the Company's operational activities. Rukindo regularly surveys the perceptions of each Stakeholder on the Company's activities. The Stakeholders that are affected or influential to the Company's activities are as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode Pelibatan Involvement Method	Frekuensi Frequency	Topik Utama yang Diajukan Main Topics
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal 1 (satu) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun Minimum 1 (one) time of meeting in 1 (one) year	Dividen/pengembangan usaha/ tata kelola/manajemen Dividends/business development/governance/management
Pemerintah, Kementerian Government, Ministries	Pelaporan Kinerja Performance Report	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah terkait Conducted throughout the year in accordance with the invitation from the relevant government institution	Pengembangan usaha/investasi Business development/investment
Pemerintah Daerah Regional Government	Pelaporan Kinerja Performance Report	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah terkait Conducted throughout the year in accordance with the invitation from the relevant government institution	Pengembangan usaha/investasi Business development/investment
Asosiasi Association	Pertemuan Anggota Asosiasi Association Members Meeting	Sesuai undangan By invitation	Pengembangan dunia kepelabuhanan dan peningkatan kerja sama Port industry development and intense cooperation
Media Massa Mass Media	Konferensi Pers/Siaran Pers/ Keterbukaan Informasi Press Conference/Press Release/ Information Disclosure	Sepanjang tahun Throughout the year	Kinerja usaha/tata kelola/ keterbukaan informasi Business performance/governance/ information disclosure
Mitra Bisnis Unit Business Unit Partner	Proses Operasional Operational Process	Sepanjang tahun Throughout the year	Hubungan komersial Commercial relationship
Vendor Vendor	Proses Operasional Operational Process	Sepanjang tahun Throughout the year	Hubungan komersial Commercial relationship
Masyarakat lokal Local community	Penerapan CSR CSR Implementation	Sepanjang tahun Throughout the year	Pelaksanaan program Program implementation
Pekerja Worker	Survei kepuasan pekerja Employee satisfaction survey	Sekali setahun Once every year	Ketenagakerjaan/kesejahteraan Employment/welfare

Isu-isu terkait Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Kegiatan Perusahaan

Issues related to the Social, Economic, and Environmental Impacts of the Company's Activities

Rukindo menganalisis isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan usaha. Isu-isu yang berkaitan erat dengan operasional Perusahaan di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rukindo analyzes various important social, economic and environmental issues related to the impact of its business activities. Issues that are closely related to the Company's operations throughout 2019 were as follows:

No.	Isu Penting Important Issues	Keterangan Description
1.	Dampak Lingkungan Environmental Impact	Mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan ke lingkungan sekitar akibat adanya aktivitas operasional Perusahaan dan bagaimana pendekatan Perusahaan dalam menangani dampak tersebut. Regarding the impact that may be caused to the surrounding environment due to the Company's operational activities and how the Company approaches in handling these impacts.
2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Health and Safety Environment	Mengenai upaya Perusahaan untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan Perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Regarding the Company's efforts to always comply with applicable laws and regulations to ensure the health and safety of workers when in the Company and the development of human resources.
3.	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	Mengenai upaya Perusahaan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar aktivitas operasional Perusahaan melalui kegiatan CSR dan bantuan dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Regarding the Company's efforts to maintain harmonious relations with the communities surrounding the Company's operational activities through CSR activities and social aid for community welfare.
4.	Konsumen Customers	Mengenai upaya Perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi masyarakat luas dengan pembaruan teknologi dan inovasi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan juga berupaya meningkatkan meningkatkan kualitas produk dan layanan dan sosialisasi yang memenuhi aspek keterbukaan dan transparansi. Regarding the Company's efforts in providing services in accordance with customer needs and the conditions of the wider community with technological updates and innovations that are more environmentally friendly. The Company also seeks to improve the quality of products and services and outreach that meet the aspects of openness and transparency.

Pengelolaan Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Aktivitas Bisnis

Management of Social, Economic and Environmental Impacts due to the Business Activities

Dalam mengelola dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas bisnis, Perusahaan mempertimbangkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan. Perusahaan melakukan analisis yang berdasarkan kajian internal dan eksternal yang melibatkan Manajemen Perusahaan, pekerja serta masyarakat. Adapun pengelolaan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang berlaku di Rukindo adalah sebagai berikut:

Dampak Sosial Masyarakat

Rukindo menyadari pentingnya pengelolaan risiko sosial masyarakat yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses usaha. Rukindo mendedikasikan sumber daya yang cukup untuk mencegah, mendeteksi dan memitigasi semua jenis kecurangan dan penyalahgunaan keuangan. Guna memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar etika tertinggi, Rukindo selalu berupaya untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dalam rangka berpartisipasi menghindari dampak sosial yang semakin buruk akibat pencucian uang dan terorisme.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Tujuan operasi Rukindo adalah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, aman, dan efisien. Perusahaan mempercayai bahwa aktivitas ini akan memungkinkan Perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan.

Dampak Lingkungan Hidup

Rukindo menyadari perubahan iklim dapat berakibat buruk pada perekonomian Indonesia, komunitas para pelaku bisnis, para nasabah, dan juga bisnis Perusahaan. Rukindo memiliki komitmen dalam upaya memerangi perusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim. Rukindo terus-menerus mengajak para Pemangku Kepentingan untuk lebih memahami betapa pentingnya upaya menjaga kelestarian lingkungan. Manajemen Perusahaan melibatkan pekerja dalam pelaksanaan program keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan kerja serta memberikan dukungan praktis agar pekerja dapat turut mengendalikan dampak lingkungan mereka secara individual.

In managing the social, economic and environmental impacts from its business activities, the Company considers the latest issues, data and information that are relevant to the rights of Stakeholders. The Company conducts the analysis based on internal and external studies that involve the Management, workers and the community. The applicable management of social, economic and environmental impacts at Rukindo is as follows:

Community Social Impacts

Rukindo realizes the importance of conducting the social risk management for the community due to the Company's business activities. Risk management is an integrated part of the entire business process. Rukindo has dedicated enough resources to prevent, detect and mitigate all types of financial fraud and misuse. To ensure that the Company's business activities are conducted in accordance with the highest ethical standards, Rukindo always strives to ensure the compliance with the Law on Anti-Money Laundering and Eradication of Terrorism Funding to participate in avoiding the deteriorating social impacts of money laundering and terrorism.

Indirect Economic Impacts

Rukindo's operation is aimed to provide quality, safe and efficient services. The Company believes that this activity will enable us to make a positive contribution to the sustainable development of Indonesian society.

Environmental Impact

Rukindo is aware that climate change can have a negative impact on the Indonesian economy, the business environment, customers, and also the Company's business. Rukindo has a commitment to prevent environmental destruction that may have an impact on climate change. Rukindo keeps inviting Stakeholders to understand the importance of preserving the environment. The Company's Management engages workers in the implementation of safety, health and security programs in the working environment and provides practical support so that workers can participate in controlling their environmental impacts on their own.

Strategi dan Program Kerja Penanganan Isu-isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Strategy and Work Program for Handling Social, Economic and Environmental Issues

Isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perusahaan dengan rencana kerja dan anggaran yang relevan. Kegiatan operasional Perusahaan menjangkau beberapa daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya sendiri dengan berbagai permasalahan yang berbeda-beda. Hal ini membuat Perusahaan merencanakan strategi pelaksanaan kegiatan CSR dengan berdasarkan pada skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing area.

Penyaluran kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara garis besar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpengaruh positif dalam mendukung kegiatan operasi Perusahaan;
2. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain secara aktif dalam pelaksanaan CSR;
3. Sesuai dengan standar dan ketentuan dalam standar global ISO 26000.

Pengaduan

Perusahaan membuka pintu sebesar-besarnya apabila ada permasalahan terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan operasional Perusahaan. Surat pengaduan dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada admin@rukindo.co.id yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Social, economic and environmental issues have been well managed by the Company with relevant work plans and budgets. The Company's operational activities cover several areas in various regions in Indonesia. Each region has its own characteristic with various problems. This condition has made the Company to plan a strategy to implement CSR activities that are based on priority scale and adjusted to each area.

The general distribution of the Company's CSR activities in social, economic, and environmental aspects is based on the following principles:

1. Having a positive influence in supporting the Company's operations;
2. Involving the community and other stakeholders to be active in CSR program;
3. According with applicable global of ISO 26000.

Complaint

The Company opens its doors to any problems related to social, economic, and environmental impacts of the Company's operational activities. The complaints can be submitted by electronic mail (*e-mail*) to admin@rukindo.co.id intended to Corporate Secretary and Legal.

Tanggung Jawab Sosial Lebih dari Sekedar Kewajiban

Social Responsibility Beyond Obligation

Perusahaan senantiasa melakukan kegiatan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan terbatas dan industri Perusahaan secara umum.

The Company continues to conduct social responsibility activities in accordance with the applicable regulations and laws on the limited liability companies and the Company's industry in general.

No.	Kegiatan Activities	Dasar Regulasi Basis of Regulation	
1.	Keselamatan Kerja Work Safety	Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).	Law No.1 in 1970 regarding Work Safety; Government of the Republic of Indonesia Regulation No.50 in 2012 regarding the Implementation of Healthy and Safety Environment Management Systems (SMK3). Government Regulation No.50 in 2012 regarding the Implementation of Healthy and Safety Environment Management Systems (SMK3).
2.	Ketenagakerjaan Employment	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Law No.13 in 2003 regarding Manpower.
3.	Lingkungan Hidup Environment	Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Law No.40 in 2007 regarding Limited Liability Companies; Law No.32 in 2009 regarding Environmental Protection and Management.
4.	Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility	Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.	Government Regulation No.47 in 2012 regarding Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies.
5.	Perlindungan Konsumen Customer Protection	Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Law No.8 in 1999 regarding Customer Protection.

Inisiatif-inisiatif Rukindo di luar dari program CSR yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas adalah:

1. Melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman mereka tentang dampak lingkungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung;
2. Berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan terkait;
3. Bermitra dengan organisasi-organisasi terpilih yang secara aktif turut serta dalam upaya perlestarian lingkungan.

Rukindo's initiatives outside of the CSR program that are in accordance with the laws and regulations above are:

1. Involving stakeholders to ensure their understanding of environmental impacts, both direct and indirect impacts;
2. Contributing to the formation of public policies and related regulations;
3. Partnering with selected organizations that have active participation in environmental preservation efforts.

Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial

Work Plan and Budget Realization of Social Responsibility Programs



Selama tahun 2019 Perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR dengan biaya yang sepenuhnya berasal dari sumber internal Perusahaan.

During 2019, the Company has conducted its CSR activities with source of funding came from our own internal resources.

Tanggung Jawab Terkait Hak Asasi Manusia

Responsibilities Regarding to Human Rights



Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait HAM

Rukindo berkomitmen untuk memastikan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari telah memenuhi aspek perlindungan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia dari setiap Insan Rukindo dan Pemangku Kepentingan lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan Kode Etik Perusahaan yang di dalamnya telah memuat tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan, Insan Rukindo diharapkan untuk memberikan perhatian penuh pada Hak Asasi Manusia dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Rukindo bertekad untuk memperkuat hubungan industri dan menghargai Hak Asasi Manusia dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Company Commitments and Policies Regarding Human Rights

Rukindo is committed to ensuring that the Company's daily operational activities have met the required aspects of protection and enforcement of human rights for every Personnel of Rukindo as well as Stakeholders. This commitment is realized through the Company's Code of Conduct, which also discussed about human rights.

In our Code of Conduct, the Personnel of Rukindo is expected to pay full attention to Human Rights and the obligations should be conducted in accordance with applicable law. Rukindo is determined to strengthen industrial relations and respect human rights and the obligations in accordance with applicable rules and regulations.

Lingkup perumusan hak asasi manusia di lingkungan Perusahaan tercakup dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hubungan kerja antara Perusahaan dengan karyawannya, yang salah satunya mengatur tentang praktik non diskriminatif dan kebebasan berserikat. Sedangkan terkait hak asasi manusia bagi masyarakat sekitar area wilayah kerja, Perusahaan telah memiliki ketentuan yang tercantum dalam Pedoman COC Perusahaan.

Rencana Kegiatan

Rukindo menyusun rencana penerapan aspek HAM dengan melibatkan pekerja melalui berbagai media komunikasi internal Perusahaan dan perumusan PKB. Program tanggung jawab sosial di bidang HAM yang telah direncanakan menjadi upaya Perusahaan untuk mengantisipasi dampak dan risiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan.

Inisiatif Penerapan Tanggung Jawab Sosial Bidang HAM

Rukindo telah menerapkan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan aspek HAM melalui aktivitas berikut:

Penghormatan Hak Dasar Pekerja (Penghapusan Diskriminasi, Standar Pengupahan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengembangan Kompetensi)

Rukindo berkomitmen terhadap penghormatan hak dasar kerja dengan melaksanakan sejumlah praktik ketenagakerjaan yang menjadi bagian tanggung jawab kepada pegawai. Komitmen ini ditetapkan sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Rukindo menerapkan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang tidak membeda-bedakan para pekerjanya berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu dalam mengembangkan karir dan memperoleh pelatihan dan pengembangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud peran dan kontribusi Rukindo dalam tujuan pembangunan berkelanjutan PBB berupa pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Uraian lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dijelaskan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial terhadap Pegawai.

The scope in formulating human rights within the Company is covered on the Collective Labor Agreement (CLA) which regulates the working relations between the Company and its employees, one of which regulates non-discriminatory practices and freedom of association. In addition, the protection of human rights for the surrounding communities has been prepared through the COC Guideline that we own.

Working Plan

Rukindo has developed a plan to implement the human rights aspect by involving workers through the various channels of our own internal communications and the formulation of PKB. The social responsibility program in human rights is part of the Company's efforts to anticipate the impacts and risks of human rights violations that may occur in the Company's environment.

Initiative on the Implementation of Social Responsibility in the Field of Human Rights

Rukindo has implemented the human resource management that also has taken into account the human rights aspects, which realized through the following activities:

Honoring Workers' Basic Rights (Elimination of Discrimination, Wage Standards, Health and Safety Environment and Competency Development)

Rukindo is committed to respecting the basic rights of work by implementing a number of labor practices as part of our responsibilities to workers. This commitment was established as a form of compliance to the Law No. 13 in 2003 regarding employment, health and safety environment. Rukindo has applied the principle of equality and non-discrimination to never discriminate its workers based on ethnicity, religion, race, and groups whenever they wanted to develop their careers and receive training and development. The application of these principles is a form of Rukindo's role and contribution in the UN's sustainable development goals by providing proper work and encourage economic growth, as well as good health and well-being. Further description on the implementation of human rights principles is explained in the Chapter of Social Responsibility for Employees.

Hak Kebebasan Berserikat

Dalam Kode Etik Bisnis, Rukindo mengatur dan memberikan kebebasan dalam berserikat bagi pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional. Hal ini berguna untuk menjamin adanya sarana penghubung antar pekerja dan organisasi Perusahaan guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan semua pihak.

Perhatian pada Kelompok Rentan

Rukindo menghargai dan memberikan pelayanan khusus pada kelompok rentan maupun berkebutuhan khusus. Dalam rangka memberikan perhatian pada kelompok yang layak diberikan perhatian khusus, upaya yang telah dilakukan antara lain memberikan prioritas layanan kepada kaum disabilitas, nasabah berusia lanjut, ibu hamil dan bagi mereka yang sedang sakit dan butuh pertolongan.

Hak Penyaluran Aspirasi Politik

Sebagaimana diatur dalam Kode Etik Bisnis, Rukindo berkomitmen terhadap hak pekerja untuk berpartisipasi dalam penyaluran politik, hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pegawai yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik bertindak atas nama sendiri dan tidak mengatasnamakan Rukindo dan harus selalu menjaga citra dan reputasi Rukindo ketika beraktivitas dalam politik.

Perusahaan juga menyatakan bahwa segala aktivitas dan dana yang digunakan untuk aktivitas politik pekerja bersangkutan tidak berasal dari sumber daya Rukindo. Setiap pekerja yang terlibat dalam kegiatan politik tidak diperkenankan untuk beraktivitas, menggunakan dan menyebarkan atribut partai atau melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja Rukindo.

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial terkait Hak Asasi Manusia yang berasal dari sumber internal Perusahaan sendiri.

Freedom to Associate

In the Code of Conduct, Rukindo regulates and provides freedom for its workers associate and enter a professionally managed workers' organizations. This is useful to ensure the existence of a medium for the organization and its workers to connect and create harmonious industrial relations and mutual benefit for all.

Attention to Vulnerable Groups

Rukindo appreciates and provides special services to vulnerable groups and those with special needs. To give the special group with proper attention, Rukindo have given priority services to people with disabilities, elderly clients, pregnant women and those who are sick and need help.

Right for Political Aspirations

As stipulated in the Code of Conduct, Rukindo is committed to protect the right of its workers to participate in any form of political aspirations including the right to vote and be elected – all of these are in accordance with Law No.39 in 1999 regarding Human Rights. Employees who aspire to participate in political activities are regarded to act on their own behalf and not on behalf of Rukindo and must always maintain Rukindo's image and reputation when engaging in politics.

The Company has also regulated that the activities as well as the needed for those political activities had never came from Rukindo's resources. Every worker who is involved in political activities is not permitted to act, use and disseminate party attributes or conduct political campaigns and activities at Rukindo's working environment.

Cost

In 2019, the Company has used its internal resources to finance its social responsibility on Human Rights.

Tanggung Jawab Terkait Operasi yang Adil

Responsibilities Regarding Fair Operations



Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Komitmen Perusahaan membangun budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai panduan bagi seluruh karyawan. Prinsip-prinsip GCG memiliki posisi penting sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional dan panduan hubungan profesional dengan sesama rekan kerja dan pihak eksternal, serta untuk menciptakan praktik dan operasi yang adil dengan terbebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, dan berkompetisi dengan adil.

Rukindo telah menetapkan pedoman untuk menegakkan aktivitas operasi yang adil melalui:

1. Pedoman Pengelolaan Gratifikasi;
2. Penerapan *Whistleblowing System*;
3. Kode Etik Perusahaan;
4. Surat Keputusan Direksi KD.12/PL.105/IV/DIRUT-2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Commitments and Policies Regarding Fair Operations

The Company's commitment to build a culture of Good Corporate Governance (GCG) is by applying the GCG principles as a guideline for all employees. GCG principles have an important position to guide operational activities and professional relations with fellow colleagues and external parties, and to create fair practices and operations that are free from corruption and bribery, act neutral in political issues, and compete fairly.

Rukindo has established several guidelines to enforce fair operation through:

1. Gratification Guidelines;
2. Whistleblowing System Implementation;
3. Code of Conduct;
4. Decree of the Board of Directors KD.12/PL.105/IV/DIRUT-2015 regarding Procedures for Procuring Goods and/or Services.

Rencana Kegiatan

Rukindo telah melakukan perencanaan terkait aktivitas bisnis yang mencerminkan operasi yang adil. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam Rencana Bisnis yang wajib direalisasikan dan dimonitor pelaksanaannya dan dilaporkan salah satunya dalam Laporan Tahunan. Rukindo memiliki target untuk senantiasa berusaha menjalankan operasi yang adil dengan mengarahkan seluruh Insan Rukindo untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas usaha serta menciptakan suasana kerja yang sehat, nyaman, dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup Operasi yang Adil

Ruang lingkup operasi yang adil di lingkungan Rukindo, antara lain meliputi aspek pengendalian gratifikasi dan anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan usaha yang sehat, mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan dan menghormati hak kepemilikan.

Inisiatif Penerapan Praktik Operasi yang Adil

Penerapan praktik operasi yang adil dalam kegiatan bisnis Rukindo tercermin dalam inisiatif-inisiatif program sebagai berikut:

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi

Rukindo menjalankan kegiatan operasional dengan menerapkan prinsip pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu upaya Rukindo tersebut adalah dengan melarang pekerja memberi dan menerima hadiah/cendera mata dan hiburan dalam rangka mendapatkan informasi dan rahasia Perusahaan dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Rukindo. Apabila mendapatkan tawaran atau pemberian gratifikasi dan suap, pekerja Rukindo wajib menolak dengan cara yang santun dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Rukindo yang tercatat dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi & Penerapan *Whistleblowing System*.

Working Plan

Rukindo has prepared plans related to business activities that reflect fair operations. This plan is outlined in our main Business Plan that must be realized and monitored and reported one of which is in the Annual Report. Rukindo has a target to run a fair operation by directing all Personnel of Rukindo to act properly when conducting business activities and create a healthy, comfortable and responsible working environment.

Scope of Fair Operation

The scope of fair operation at Rukindo includes, among others, gratification and anti-corruption control, involvement in a responsible political affair, fair business competition, social responsibility in the supply chain and respecting ownership rights

Initiative on the Implementation of Fair Operation

The fair operation is reflected in the following initiatives:

Gratification and Anti-Corruption Control

Rukindo runs its operational activities by applying the principles of Good Corporate Governance (GCG). The realization is done by forbidding workers from giving and receiving gifts/souvenirs and any form of entertainment to obtain corporate information and secrets from parties who have business relationships or competitors of Rukindo. In the event that an offer or gratification and bribery is given, our workers must refuse politely and provide an explanation regarding the applicable regulation that is in force in Rukindo, which can be seen in the Gratification Guidelines & Whistleblowing System.

Persaingan Usaha yang Sehat

Rukindo telah berupaya mematuhi hukum persaingan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana diatur dalam Kode Etik. Upaya tersebut mengarahkan pegawai untuk tidak terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya sesuai peraturan dan arahan Pemerintah.

Tanggung Jawab dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Rukindo telah membentuk sistem smart *procurement* – sebuah aplikasi yang dipersiapkan untuk mempercepat proses pembelian dan pengembangan sistem di lingkungan Perusahaan. Rukindo berkomitmen terhadap pengadaan barang dan jasa yang adil melalui metode:

- Pelelangan/seleksi umum
Pelelangan/seleksi umum yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pemilihan/seleksi langsung
Pemilihan langsung/seleksi langsung yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- Penunjukan Langsung
Penunjukan Langsung yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak dibatasi nilainya dengan menunjuk 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat dengan Keputusan Direksi Rukindo tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Rukindo.
- Pembelian Langsung
Pembelian langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang-barang umum dan *spare parts* dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- Swakelola
Swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau sewa upah borongan tenaga kerja dan dikelola sendiri.

Fair Business Competition

Rukindo has strived to comply with the legal conduct and norms such as what has been set forth in the Code of Conduct. This will ensure that the workers will not engage in illegal activities, abusing the use of monopoly practice or other unfair trading activities, such as written in the Government regulations and their directions.

Responsibilities in the Procurement of Goods and Services

Rukindo has established a smart procurement system – an application to accelerate the process of purchasing and system development at the Company. Rukindo is committed to be fair when procuring goods and services through the the following methods:

- General auctions/selection
General auction/selection is a series of goods/services procurement activities with a value of more than Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah).
- Direct selection
Direct selection is a series of goods/service procurement activities with a value of up to Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah).
- Direct appointment
Direct Appointment is a series of goods/services procurement activities that are not limited in value by appointing 1 (one) provider that meets the requirements within the Decree of Board of Directors on Procurement of Goods and Services.
- Direct Purchase
Direct purchase is the procurement of general goods and spare parts with a value of up to Rp500,000,000.00 (five hundred million Rupiah).
- Self-management
Self-management is the implementation of working plan, performed and supervised on their own, using their own labor, utilizing their own tools or rent in bulk and self-managed.

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial terkait operasi adil yang berasal dari sumber internal Perusahaan.

Dampak dan Pencapaian

Selama tahun 2019, Rukindo tidak memiliki laporan mengenai kasus yang mencerminkan adanya indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan komisaris, anggota Direksi serta para pekerja. Perusahaan juga memastikan tidak terlibat ataupun berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan kode etik dan penerapan pakta integritas yang baik.

Rukindo juga menyadari bahwa secara tidak langsung pelaksanaan operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan dan kegiatan usaha Perusahaan di sepanjang tahun 2019. Hal ini juga memberikan pengaruh pada perolehan laba Perusahaan di tahun 2019. Jika Perusahaan tidak memastikan pelaksanaan operasi yang adil, niscaya para Pemangku Kepentingan akan kehilangan kepercayaan dan mengakibatkan risiko materiil bagi Perusahaan.

Cost

In 2019, the Company has financed its social responsibility related to fair operations by using its own resources.

Impact and Achievement

During 2019, Rukindo did not receive any report on cases that reflected indications of corruption and bribery that were faced by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and workers. The Company have ensured to not be involved or participated, either directly or indirectly, for any political party. Our action is influenced by the application of our code of conduct and the integrity pact.

Rukindo have also realized that in some way, the implementation of fair operation has increased our stature as a trusted business entity during 2019. This has affected the Company in gaining the profit in 2019. If the Company did not ensure the fair operation, surely the Stakeholders would loss their trust towards the Company and had brought us to suffer material loss.

Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup

Environmental Responsibility



Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Komitmen Rukindo terhadap pelestarian lingkungan hidup ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan memiliki program pemantauan dan pengelolaan lingkungan baik di lingkungan proyek maupun korporat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang ditetapkan Rukindo adalah memastikan perlindungan terhadap lingkungan dari risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perusahaan. Setiap kegiatan operasi Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri dan korporasi secara umum.

Company Commitments and Policies Regarding the Environment

Rukindo's commitment to environmental preservation is demonstrated by the implementation of a responsible operational activity that is based on Law Number 32 in 2009 regarding Environmental Protection and Management. The Company owns a program to monitor and manage the environment programs of our projects and around our operation to minimize negative impacts that we might bring to the environment.

Working Plan

Rukindo's plan is focused to ensure environmental protection from any risks that might be caused by the Company's operational activities. We are ensuring that our operations are within the corridor of the applicable rules and regulations set forth in the industry and the general guideline of a corporation.

Inisiatif Program CSR terkait Lingkungan Hidup

Penerapan praktik CSR terkait lingkungan hidup dalam kegiatan bisnis Rukindo tercermin dalam inisiatif-inisiatif program sebagai berikut:

Green Office

Rukindo menerapkan program *Green Office* dalam mengelola kantor dengan prinsip ramah lingkungan. Manajemen Rukindo beserta seluruh pekerja berupaya menjalankan berbagai program penghematan, antara lain penggunaan kertas, listrik dan air serta upaya mengelola sampah secara daur ulang. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Rukindo sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Pengukuran Pencahayaan, Kelembapan, dan Kebisingan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja dan berdampak terhadap produktivitasnya yaitu keadaan fisik lingkungan kerja. Kondisi lingkungan dengan kualitas yang baik akan memberikan rasa nyaman dan sehat sehingga mendukung kinerja dan produktivitas pekerja. Hal ini mendorong Rukindo untuk melaksanakan pengukuran dan penanganan komponen lingkungan yang mencakup pencahayaan, kelembapan, dan kebisingan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengukuran komponen lingkungan kerja sebagai upaya *monitoring* kondisi lingkungan kerja dapat terpelihara dengan baik. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa, upaya pengelolaan dan perbaikan terhadap lingkungan kerja senantiasa dilakukan secara berkala. Pokok-pokok kegiatan terkait lingkungan kerja yang telah dilakukan Perusahaan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Aspek Perhatian Focus of Attention	Identifikasi Identification	Pelaksanaan Implementation
1.	Pencahayaan Lighting	<p>Pencahayaan yang baik memungkinkan pegawai melihat obyek yang dikerjakan secara jelas, cepat dan tepat sehingga sistem pencahayaan perlu didesain dengan baik dalam proses pekerjaan yang berbahaya sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja.</p> <p>Proper lighting allows employees to see objects clearly and can do their work quickly and precisely and this has made the lighting system needs to be designed properly, especially in a dangerous working process to reduce working accidents.</p>	<p>Perusahaan memastikan bahwa tingkat pencahayaan yang ada di lingkungan kerja Perusahaan telah sesuai dengan standar pencahayaan yang baik dan semestinya. Upaya perbaikan terhadap pencahayaan yang rusak juga dilakukan secara berkala.</p> <p>The Company ensures that the lighting condition in our working environment has been prepared to be in accordance with the applicable industrial lighting standard. We have also prepared a contingency plan to repair any damaged lighting.</p>

Initiative on the CSR Program related to the Environment

Our CSR activities that are related to the environment are reflected in our program initiatives as follows:

Green Office

Rukindo implements the Green Office program in managing offices to be environmentally friendly. Rukindo's Management and all workers have run various energy saving programs that affected our use of paper, electricity and water as well as on recycled waste management. This is one form of our contribution toward the environment.

Measurement of Lighting, Humidity, and Noise

One of the factors that influence the performance of our workers and have an impact on productivity is the physical state of our working environment. A good environmental condition will provide a sense of comfort and health as to support the performance and productivity of our workers. This encourages Rukindo to measure and handle the environmental components which include lighting, humidity, and noise to identify our current conditions.

The Company had measured the components of our working environment for monitoring and maintaining purposes. The Company has always tried to manage and improve the working environment. The main activities related to the working environment that the Company has carried out in 2019 were as follows:

No.	Aspek Perhatian Focus of Attention	Identifikasi Identification	Pelaksanaan Implementation
2.	Kelembapan Humidity	Kelembapan yang tidak dikendalikan dengan baik akan berpengaruh terhadap kenyamanan pegawai dan gangguan kesehatan yang berdampak pada peningkatan beban kerja, mempercepat kelelahan hingga produktivitas pegawai turun. Uncontrolled humidity will affect our workers and may cause health issues and burden their workload, making them more tired and resulted in a failing productivity level.	Pengukuran tingkat kelembapan secara berkala untuk menjaga produktivitas karyawan dan Perusahaan. Upaya perbaikan terhadap tingkat kelembapan juga dilakukan secara berkala. Regularly measure the humidity levels to maintain the productivity of our employees and Company. We have made a regular effort to improve humidity levels.
3.	Kebisingan Noise	Kebisingan dengan intensitas tinggi dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, menimbulkan kesalahan komunikasi dan kecelakaan kerja yang fatal. Disturbing noises can disturb the workers to work calmly, damage their hearing and cause communication errors and fatal work accidents.	Pengukuran tingkat kebisingan secara berkala untuk menjaga tingkat kesehatan pekerja. Mengelola intensitas dan frekuensi suara serta waktu terjadinya kebisingan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Measuring noise levels regularly to maintain the health level of workers. Manage the intensity and frequency of sound and the time of occurrence of noise to reduce the impact.

Penghijauan

Rukindo melakukan penghijauan untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Peran aktif Perusahaan diwujudkan melalui penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk meningkatkan estetika dan kualitas lingkungan. Rukindo juga menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman dengan jenis tanaman yang disesuaikan dengan bangunan kantor.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Rukindo berkomitmen menerapkan keterbukaan dan mengedepankan sikap transparansi dalam mengelola masalah lingkungan. Hal ini termasuk menjamin masyarakat dan pihak lainnya memiliki akses untuk melakukan pengaduan terkait masalah lingkungan dengan menghubungi admin@rukindo.co.id atau +62 21 4301380 (*Hunting*) yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan Hukum. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan mengoordinasikannya dengan tim terkait untuk melakukan verifikasi dan mengatasi permasalahan dengan segera.

Restoration

Rukindo restore the environment to preserve it and help to reduce air pollution. The Company is being proactive by planting trees around its vicinity as a mean of aesthetics and improve the quality of the environment. Rukindo has also provided a green, open space with a type of plantation that can be adapted to office buildings.

Filing Complaints on Environmental Issues

Rukindo is committed to be open and transparent in managing any environmental issue. This includes our effort to ensure that the community and other parties are able to file any complaint regarding environmental issues through admin@rukindo.co.id atau +62 21 4301380 (*Hunting*) which intended to Corporate Secretary and Legal. The Company will follow up on every incoming report and coordinate with the relevant team to verify and resolve the issue immediately.

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup dengan menggunakan sumber dana dari Perusahaan sendiri.

Dampak dan Pencapaian

Rukindo telah memiliki sistem manajemen lingkungan yaitu ISO 14001:2015. Rukindo senantiasa berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi bisnis ke depan. Selain itu tidak terdapat pengaduan atau laporan terkait isu lingkungan yang disebabkan karena kegiatan operasional Perusahaan di sepanjang tahun 2019.

Rukindo menjadikan program tanggung jawab kepada lingkungan sebagai investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, bukan sarana biaya (*cost centre*) melainkan sarana meraih keuntungan (*profit center*). Tanggung jawab kepada lingkungan merupakan komitmen Rukindo untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan pemahaman tersebut, maka implementasi program tanggung jawab kepada lingkungan berperan strategis bagi Rukindo dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi bisnis ke depan.

Cost

In 2019, the Company has issued a budget for social responsibility related to the environment by using its own resources.

Impact and Achievement

Rukindo has an environmental management system that has been certified with ISO 14001:2015. Rukindo has always been active in preserving the environment to make it as an added value for our ongoing business. In addition there were no complaints or reports on environmental issues that were caused by the Company's operational activities throughout 2019.

We believed that the environmental responsibility program is our investment for business growth and sustainability and instead of treating it as a cost center, it should be treated as a profit center. The responsibility to the environment is Rukindo's commitment to support the creation of sustainable development. With this understanding, the environmental responsibility program has an important, strategic role for Rukindo in preserving the environment and thus bringing an added value for our future business development.

Tanggung Jawab Kepada Pekerja

Responsibility to Our Workers



Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Kepada Pekerja

Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab terhadap pekerja dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Penerapan kebijakan mengenai ketenagakerjaan telah dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta kesejahteraan pekerja. Komitmen dan kebijakan Perusahaan terkait tanggung jawab sosial kepada pekerja lebih ditekankan kepada aspek ketenagakerjaan yang memperlihatkan perhatian Perusahaan kepada kesejahteraan para pekerjanya. Informasi lain mencakup ketenagakerjaan yang tidak terdapat dalam pembahasan ini telah disampaikan pada bagian Profil Sumber Daya Manusia dan Tinjauan Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

Commitment and Policy to Workers

The Company's responsibility towards its workers are conducted with reference to:

1. Law Number 13 in 2003 regarding Manpower;
2. Regulation of the Republic of Indonesia Government Number 50 in 2012 regarding Health and Safety Environment Management System.

The implementation of manpower policies have been done to ensure that the employment activities are in accordance with the applicable laws and regulations and the welfare of workers. The Company's commitment and policies related to social responsibility to workers are more emphasized on labor aspects that show the Company's concern for the welfare of its workers. Other information regarding employment that is not included in this discussion has been discussed in the Human Resources Profile and Business Support Review sections in this Annual Report.

Rencana Kegiatan

Rukindo berupaya untuk menjadi perusahaan yang senantiasa melindungi dan memperhatikan karyawan dengan menaati setiap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan berupaya untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan memastikan keamanan kerja bagi seluruh karyawan. Standar penerapan mutu kerja dan prosedur kerja menjadi satu hal penting yang selalu masuk dalam rencana kerja Perusahaan setiap tahunnya.

Inisiatif Program CSR terkait Kewajiban kepada Pekerja

Rukindo telah melaksanakan program tanggung jawab terhadap pekerja melalui penerapan aspek ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini dijalankan demi meningkatkan produktivitas dan dukungan pekerja terhadap kegiatan operasional Rukindo sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja. Bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap kedua aspek tersebut selama tahun 2019 antara lain:

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perusahaan mendukung program Pemerintah yang melarang diskriminasi di dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) Pasal 6. Dukungan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Perusahaan yang memastikan penegakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi dalam kesempatan kerja dan pengembangan potensi tanpa membedakan ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal daerah, keturunan, usia, status perkawinan, kondisi fisik dan kondisi medis. Hal ini menjadi salah satu komitmen Perusahaan untuk memastikan hak asasi manusia setiap pekerja dapat terpenuhi dan senantiasa dilindungi.

Komposisi pekerja Perusahaan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 94% karyawan Perusahaan adalah laki-laki. Proporsi karyawan Perusahaan yang lebih banyak mempekerjakan lelaki karena sifat pekerjaan yang dibutuhkan lebih banyak untuk kebutuhan lapangan yang menuntut kekuatan fisik dan lebih diminati oleh laki-laki. Perusahaan tetap memastikan bahwa pekerja perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di lapangan, sesuai minat dan bakat.

Working Plan

Rukindo is striving to be a company that always protect and cares for its workers by obeying every regulation including those in the labor field. The Company tries to create a conducive working condition and ensure the job is secure for all workers to work for. The working standard and work procedure are important to always be included in the Company's annual working plan.

CSR Program Initiatives related to Obligations to Workers

Rukindo has conducted various programs to show its responsibility towards workers through the employment aspects as well as health and safety environment at our occupational area. These programs are carried out to increase the productivity of our workers and support them to boost Rukindo's operational activities while improving the quality of workers' life. The corporate responsibility programs that we have conducted for both aspects during 2019 are as follows:

Gender Equality and Job Opportunities

The Company supports the government program that prohibits discrimination to get job and earn a certain position, which stipulated in the Law No.13 in 2003 regarding Manpower (Law 13/2003) Article 6. This support has been stipulated in the Decree of Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 on May 15, 2019 regarding the Management Organization and Procedure of the Company which ensures the enforcement of the principle of equality and non-discrimination in employment opportunities and the potential development without differentiating race, believes, skin color, religion, gender, areas of origin, ancestry, age, marital status, physical condition and medical condition. This is one of the Company's commitments to ensure that the rights of every worker can be fulfilled and are always protected.

The composition of the Company's workers by gender shows that 94% of them are male. The proportion where we employ more men is because of the nature of our work that required physical strength and more desirable for men. The Company ensures that female workers have the same opportunities to work in the field, according to their interests and talents.

Kepuasan Pekerja

Perusahaan memahami bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara tingkat kepuasan pekerja dengan loyalitas pekerja. Rukindo senantiasa berupaya memperhatikan dan meningkatkan kepuasan pekerja melalui penerapan berbagai kebijakan seperti remunerasi, penghargaan, dan pemberian fasilitas serta kesehatan pekerja. Rukindo melakukan evaluasi kepuasan pekerja secara berkala melalui "Survei Kepuasan Pekerja".

Survei dilakukan pada 1 Oktober 2019 terhadap 124 orang pekerja yang merupakan pekerja struktural dan non struktural serta pekerja di kapal (kru). Proses survei selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kepuasan pekerja (*Employee Satisfaction Index*) adalah sebesar 3,20 dari skala 5,00 indeks. Nilai ini termasuk dalam kategori "Cukup Puas". Nilai tertinggi untuk kepuasan pekerja secara umum adalah pada pernyataan "Pengetahuan dan keahlian saya telah sesuai untuk menjalankan tugas" dengan indeks kepuasan 3,67. Sedangkan nilai terendah ada pada pernyataan "Penghasilan yang saya terima telah sepadan dengan beban kerja saya" dengan indeks kepuasan 2,75.

Hasil survei dianalisa Perusahaan sebagai sebuah salah satu bahan penting dalam menentukan kebijakan SDM ke depannya. Perusahaan melakukan proses identifikasi terhadap beberapa indikator penentu tingkat kepuasan pekerja untuk menjadi bahan diskusi secara internal dalam mengambil tindakan perbaikan secara terus-menerus untuk menjamin kepuasan pekerja dan produktivitas usaha.

Pencegahan Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

Rukindo melaksanakan proses rekrutmen dengan persyaratan kandidat pegawai minimal lulusan SLTA dengan usia di atas 18 tahun sehingga tidak terdapat praktik pekerja anak di bawah umur. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Rukindo dalam memenuhi Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Rukindo juga telah mengatur jam kerja dalam Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Perusahaan dan mengenai ketentuan lembur dalam Surat Keputusan

Employee Satisfaction

The Company understands that there is a mutually influential relationship between the level of employee satisfaction and employee loyalty. Rukindo has always been striving to pay attention and increase employee satisfaction through the implementation of various policies that regulate the remuneration, reward, and facilities and healthcare for workers. Rukindo has been conducting regular evaluation on employee satisfaction through the "Worker Satisfaction Survey".

The survey was conducted on October 1, 2019 on 124 workers that are part of structural and non-structural workers as well as shipping crew. The survey was finished by January 20, 2020.

Based on the survey result, the Employee Satisfaction Index was 3.20 out of 5.00. The result falls in the "Somewhat Satisfied". The highest value for the general satisfaction goes to "My knowledge and skills are adequate to do my job" with a satisfaction index of 3.67. While the lowest value goes to "My income is worth with my job" with a satisfaction index of 2.75.

The survey results were analyzed as an important material in determining future HR policies. The Company conducted the identifying process on several indicators to determine the level of employee satisfaction for internal discussion in taking continuous corrective actions to ensure worker satisfaction and business productivity.

Prevention of Child and Forced Labor

Rukindo has been conducting the recruitment process by setting the requirements that the candidate of our worker should be at least graduated from high school with an age above 18 years to keep the Company from the practice of a child labor. This is a form of Rukindo's commitment in fulfilling the Article 68 and Article 69 of Law No.13 regarding Manpower which regulates the prohibition of employing children, that is, anyone under the age of 18 years. Rukindo has also determined the working hours in the Decree of Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 on May 15, 2019 regarding the Management Organization and Procedure of the Company and regarding the provisions of overtime in

Direksi Nomor KD.048/KP.208/VI/DIRUT-2017 tentang Ketentuan Kerja Lembur Pekerja Rukindo. Perusahaan juga memastikan tidak terdapat keadaan mengenai pencegahan praktik kerja paksa yang dimuat dalam Keputusan Direksi Nomor: 15/5/1/RKD-2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Perusahaan. Kegiatan tersebut diterapkan oleh Rukindo secara konsisten, sehingga tidak terdapat pegawai yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak terjadi insiden kerja paksa yang dialami oleh pekerja Rukindo.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan prioritas utama dalam setiap pelaksanaan proyek kerja Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi pekerja dan mitra kerja dengan penerapan program perbaikan berkelanjutan melalui sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan kerja (ISO 45001). Hal ini ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pengerukan Indonesia Nomor: 13/05/02/Dirut-2020 tentang Tim Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan di PT Pengerukan Indonesia. Selama tahun 2019, perusahaan telah menerapkan beberapa program terkait dengan Kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh Divisi HSSEQ antara lain:

1. Pengurusan Asuransi *Marine Hull, P&I, Bunker Bluecard* dan *Wreck Removal*;
2. Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Keamanan Kapal ISPS *Code* oleh Auditor Eksternal;
3. Pekerjaan penanganan limbah unit galangan dan perbengkelan kapal;
4. Pelaksanaan *Surveillance Audit* perpanjangan sertifikat ISO unit Galangan dan Kantor Pusat Rukindo;
5. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL unit galangan dan Kantor Pusat Rukindo;
6. Pelaksanaan pelatihan penanganan Bahaya Kebakaran dengan melibatkan perwakilan dari seluruh unit di Rukindo;
7. Pelaksanaan sosialisasi dan penerapan *risk assessment* ke kapal-kapal;
8. Pelaksanaan sosialisasi dan penerapan pedoman penyusunan SOP.

the Decree of Board of Directors Number KD.048/KP.208/VI/DIRUT-2017 concerning Overtime. The Company has also been ensuring that there were no circumstances regarding the prevention of forced labor practices in the Decree of Board of Directors Number: 15/5/1/RKD-2019 on May 15, 2019 regarding the Management Organization and Procedure of the Company. The activity is consistently implemented by Rukindo, so that there are no employees under the age of 18 and there are no incidents of forced labor any of our workers had to suffer.

Health and Safety Environment

The Health and Safety Environment (HSE) aspect is the main priority in our every project. The Company is committed to increase the customer satisfaction level and provide a healthy and safe environment for workers and partners by implementing a continuous improvement program through the Health and Safety Management system (ISO 45001). This was stipulated in accordance with the Decision of the Directors of PT Pengerukan Indonesia Number: 13/05/02/Dirut-2020 regarding the Quality Management System Team, Health and Safety Environment (HSE) at PT Pengerukan Indonesia. In 2019, the Company has implemented several programs related to health and safety through the HSSEQ Division, including:

1. Managing the Marine Hull Insurance, P&I, Bluecard Bunkers and Wreck Removal;
2. Auditing the ISPS Code Ship Security Management System by an External Auditor;
3. Handling the waste of shipyard unit;
4. Conducting Surveillance Audit to extend ISO certificate for shipyard unit and Head Office;
5. Implementing the UKL-UPL of shipyard unit and Head Office;
6. Conducting fire drill by involving representatives from all units;
7. Disseminating information and applying risk assessment on ships;
8. Implementing socialization and application of guidelines for preparing SOP.

Mekanisme Pengaduan Masalah K3

Dalam hal pekerja merasa diperlakukan tidak wajar, tidak adil, tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Perusahaan menekankan penyelesaian yang komunikatif antara individu yang merasa dirugikan dan atasan langsung. Penekanan pada upaya komunikasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan, namun jika masih tidak tercapai kesepakatan, maka individu bisa melaporkan isu bersangkutan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial terkait pekerja (mencakup biaya gaji dan tunjangan, imbalan kerja, dan pelatihan dan pengembangan) yang berasal dari sumber internal Perusahaan sendiri.

Dampak dan Pencapaian

Rukindo telah merasakan dampak positif terhadap implementasi praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar peraturan perundangan-undangan serta standar industri. Hal ini dapat dirasakan dari tidak adanya laporan yang material dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi proses bisnis Perusahaan.

Mechanisms to File Complaint on HSE Issues

In the event if a worker feels that he is treated unfairly, uncommon, not in accordance with Corporate Regulations or the provisions of applicable labor laws, the Company choose to settle the issue through intense communication between the individuals who feel disadvantaged and their direct supervisors. The communication is intended to prevent further disputes, but if an agreement is far from being reach, then the individual can report the issue to get the best solution.

Cost

In 2019, the Company has used its own resources to finance the social responsibility that is related to workers (including salary and benefits, and training and development).

Impact and Achievement

Rukindo has felt the positive impact from the implementation of good labor practices that are in accordance with legislations and industry standards. This can be felt from the absence of any material report regarding employment that can affect the Company's business processes.

Tanggung Jawab di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Social Responsibility towards the Community



Komitmen dan Kebijakan kepada Masyarakat

Salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam mendorong keberlanjutan bisnis Perusahaan adalah masyarakat sekitar. Rukindo berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR yang membawa dampak positif dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat di sekitar area operasi Perusahaan. Rukindo melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan dengan mengacu kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Rukindo mempunyai komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang kemasyarakatan melalui Keputusan Direksi Nomor: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pengelolaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

1. Sekretaris Perusahaan dan Legal bertugas melaksanakan pengelolaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Commitment and Policy to the Community

One of the stakeholders who has an important role in driving the sustainability of the Company's business is its surrounding community. Rukindo is committed to conduct CSR activities that have a positive impact and provide tangible benefits for the lives of people around the Company's operational areas. Rukindo implements social and community development programs by referring to Law No.40 in 2007 regarding Limited Liability Companies especially on the article 74 related to Social and Environmental Responsibility.

Rukindo has a commitment towards the Corporate Social Responsibility to the community that is based on the Decree of the Board of Directors Number: KD.038/HK.304/X/DIRUT-2016 on October 12, 2016 regarding the Management of Corporate Social and Environmental Responsibility.

1. The Corporate Secretary and Legal is tasked to manage the Company's social and environmental responsibilities.
2. The implementation of corporate social and environmental responsibility is based on the Company's Work Plan and Budget.

3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4. Sekretaris Perusahaan dan Legal melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang ditetapkan Rukindo dalam kaitannya dengan pengembangan sosial kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan hubungan harmonis yang telah terjalin antara Perusahaan dan masyarakat sekitar. Pengembangan sosial yang diutamakan Perusahaan adalah mencakup terutama mencakup pengembangan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Perusahaan mempercayai bahwa kegiatan tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar akan membuat masyarakat semakin mendukung kegiatan operasional Perusahaan secara berkelanjutan.

Kegiatan Tahun 2019

Selama tahun 2019, Rukindo telah melakukan program CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Program ini mendorong terciptanya pembangunan masyarakat, kehidupan sosial aman, nyaman, dan berkelanjutan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Kegiatan-kegiatan CSR sosial kemasyarakatan yang telah direalisasikan oleh Rukindo sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Mudik Bersama dengan memberangkatkan 100 orang peserta mudik menggunakan 2 (dua) armada bus dari Tanjung Priok ke Purwokerto.
2. Penyerahan 10 ekor kambing kepada musala, masjid, dan yayasan sekitar Rukindo.
3. Kegiatan donor darah di Gedung Serba Guna Rukindo.

Mekanisme Pengaduan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Perusahaan juga membuka saluran pengaduan di bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sosial dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Saluran pengaduan ini juga dibuka sebagai sarana untuk membuka keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan mengenai program-program CSR. Tim terkait akan menindaklanjuti setiap

3. The implementation of corporate social and environmental responsibility is prepared by paying attention to the principles of proper conduct and fairness.
4. The Corporate Secretary and Legal reports the Company's social and environmental responsibility activities to the Managing Director for further report to the Shareholders.

Working Plan

The working plan that Rukindo has determined in terms of social development is to improve the harmonious relations that has existed between the Company and its surrounding communities. The social development is prioritized to develop the people's welfare and their living standard. The Company believes that the social responsibility activities for its surrounding communities will make the people more supportive of the Company's operational activities in a sustainable manner.

Activities in 2019

In 2019, Rukindo has conducted the CSR programs related to social and community development. This program encourages the community to develop, feel safe and comfortable and having a sustainable social life, and therefore improving the quality of the society in general. The CSR activities for the communities that have been realized by Rukindo in 2019 were as follows:

1. Implementation of the Homecoming Program by sending 100 participants in 2 (two) buses from Tanjung Priok to Purwokerto.
2. Donation of 10 goats to praying places (musala), mosques, and social foundations around Rukindo.
3. Blood donor at Rukindo's building.

Mechanisms to File Complaints on Social Problems

The Company has also provided a channel to submit any complain in the social sector. This is done to ensure the implementation of social activities can be run properly and right on target to those who really need it. The channel is also opened for the surrounding community to get more involve in making decisions regarding our CSR programs. The related team will follow up on every valid report and the result will be considered as part of our future CSR activity plan. Reporting

laporan yang valid dan akan dipertimbangkan sebagai rencana kegiatan CSR ke depannya. Pelaporan atau saran mengenai kegiatan CSR dapat disampaikan melalui +62 21 4301380 (*Hunting*) atau *admin@rukindo.co.id* ke Sekretaris Perusahaan dan Legal.

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab terkait sosial kemasyarakatan yang berasal dari sumber internal Perusahaan.

Dampak dan Pencapaian

Kegiatan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat sekitar area operasi Perusahaan membawa dampak secara tidak langsung terhadap pengembangan usaha Rukindo. Masyarakat sekitar dapat merasakan dampak positif dari kehadiran Perusahaan dan senantiasa mendukung kegiatan operasional. Isu-isu yang muncul terkait kegiatan operasional terbilang kecil dan tidak bersifat material yang dapat mengganggu kestabilan usaha. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan pemaksaan.

Penghargaan Awards



CSRTerbaik Indonesia Award 2019

Best of The Best CSR Indonesia Award 2019

Diterima dari Majalah CSR Indonesia dalam ajang CSR Award & Summit 2019.

Received from CSR Magazine Indonesia during the CSR Award & Summit 2019.

or suggestions regarding CSR activities can be submitted through +62 21 4301380 (*Hunting*) or *admin@rukindo.co.id* to Corporate Secretary and Legal.

Cost

In 2019, the Company has used its own internal resources to finance its social responsibility related for the communities.

Impacts and Achievements

The social activities for the communities around the Company's operational area have an indirect impact on the development of Rukindo's business. The surrounding community can feel the positive impact of the Company's presence and has always been supportive towards our operational activities. The issues that have arised related to operational activities were relatively small and not material enough to be disrupting our business stability. All problems could be solved properly without discrimination and coercion.

Tanggung Jawab kepada Pelanggan

Responsibility to Customers



Komitmen dan Kebijakan kepada Pelanggan

Rukindo bertekad untuk menjalankan bisnis pengerukan yang berkualitas. Hal ini menjadi wujud kontribusi Rukindo untuk mendukung pembangunan industri kepelabuhan yang menjadi salah satu program utama Pemerintah. Pelayanan terbaik kepada pelanggan menjadi salah satu komitmen Rukindo dalam memberikan kualitas pelayanan pengerukan dan galangan kapal yang sesuai dengan permintaan dan harapan pelanggan sesuai kontrak. Rukindo telah menerapkan sejumlah ketentuan dan pedoman untuk memastikan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan salah satunya melalui pedoman kebijakan mutu.

Rencana Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi menjadi pemimpin pasar pengerukan di Indonesia, Rukindo memiliki rencana untuk memastikan kegiatan operasional usaha sesuai dengan standar terbaik di bidang industri yang dijalani. Kepercayaan dan loyalitas pelanggan menjadi satu fondasi penting untuk mewujudkan pencapaian visi dan Perusahaan sangat memperhatikan mutu kerja para pekerjanya dan kualitas pelayanan. Hal ini dipercaya akan membawa dampak langsung ke kualitas layanan

Commitment and Policy to Customers

Rukindo is determined to run a quality dredging business. This is a form of Rukindo's contribution in supporting the development of port industry, one of the Government's main programs. Giving the best service to customers is one of Rukindo's commitments in providing quality dredging and shipyard services in accordance with customer requests and expectations according to the contract. Rukindo has implemented a number of provisions and guidelines to ensure that we can provide the best service to customers, including the policy on quality guideline.

Working Plan

In order to achieve its vision to become the market leader in the dredging field in Indonesia, Rukindo has a plan to ensure that the business operations are in accordance with the best standards in the industry. Customer trust and loyalty is an important foundation to help us achieve the vision and the Company is very concerned about the quality of work of its workers and the quality of the services that they provide. We believe that it will have a direct impact on the quality of the Company's services in the dredging field. The standard

Perusahaan di bidang pengerukan. Standar operasi kerja yang senantiasa mengedepankan mutu dan kualitas akan memberikan kinerja unggul bagi Perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Kegiatan Tahun 2019

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial terkait konsumen meliputi:

Survei Kepuasan Pelanggan

Rukindo melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala, untuk mengetahui tanggapan, respons dan harapan pelanggan terhadap layanan jasa yang telah diberikan melalui setiap *Customer Relation Officer* dari setiap pelanggan.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Perusahaan memberikan perhatian pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan produk dan jasa yang dihasilkan. Rukindo senantiasa memberikan upaya edukasi dan penyebaran informasi terkait kualitas kerja dari hasil pelayanan kepada pelanggan. Hal ini dengan sendirinya memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelanggan untuk senantiasa memperhatikan faktor keselamatannya dalam menggunakan pelayanan Perusahaan.

Peningkatan Layanan Pelanggan

Rukindo memandang perlindungan terhadap pelanggan sebagai suatu kewajiban. Hal ini tercermin dari pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh Rukindo selalu memperhatikan kesesuaian rangkaian prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan. Rukindo telah mendapatkan sertifikasi ISO 19001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi tersebut menunjukkan konsistensi Perusahaan dalam menjamin mutu dan layanan produk terkait tanggung jawab kepada pelanggan. Selain itu, Rukindo juga menjalankan program-program untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan seperti:

1. Mengungkapkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pelanggan mengenai jasa dan aktivitas operasional Rukindo yang secara potensial dapat mempengaruhi pelanggan. Informasi diberikan secara akurat, lengkap, dan mutakhir sehingga pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal.
2. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk

operating procedures that we have always been prioritizing are always promoting the quality services that will, in the end, provide superior performance from the Company to give our customers the ultimate satisfaction.

Activities in 2019

The activities that we have conducted regarding the social responsibility to customers include:

Customer Satisfaction Survey

Rukindo has conducted regular customer satisfaction surveys, to know about their responses and expectations to our services through our *Customer Relation Officer* of each customer.

Customer Health and Safety

The Company pays attention to the health, safety, and security of our products and services. Rukindo has always educated our customers and disseminated information related to our working quality and the results of our services to customers (testimonies). All these became a useful information for customers to always pay attention to their safety in using the Company's services.

Improved Customer Services

Rukindo believed that it is our obligation to protect our customers. This is reflected whenever we do our projects where we have always been very attentive to ensure that our operations were suitable with the standard operating procedures for customer health and safety. Rukindo has received the ISO 19001:2008 certification on Quality Management Systems. The certification shows the Company's consistency in guaranteeing the quality of our product and services that is also related to our responsibility to the customers. In addition, Rukindo has also conducted other programs to improve our services including:

1. Disclosure of relevant information that is required by customers regarding Rukindo's services and operational activities that can potentially affect them. The information is given fully, accurately, and always updated to ensure that our customers receive the maximum benefit.
2. Provide our customers with the convenience to access

mengakses informasi yang dibutuhkan, misalnya melalui Buletin, *Company Profile*, *Leaflet*, *Poster*, *Video*, *Website*, dan aktivitas penyebaran informasi lainnya yang memanfaatkan media internet.

3. Memberikan pelayanan kepada semua pelanggan seadil-adilnya baik dalam harga dan kualitas sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan Permasalahan Pelanggan

Rukindo berupaya memenuhi harapan pelanggan melalui program pengaduan pelanggan. Pengaduan atau keluhan pelanggan merupakan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Rukindo. Penyelesaian keluhan pelanggan dilaksanakan oleh Divisi Operasi. Program pengaduan pelanggan ini dapat diakses oleh pelanggan melalui beberapa saluran antara lain:

Pengaduan Permasalahan Pelanggan Filing for Customer Complaints	
Telepon	: 021-4301380
Phone	: marketing@rukindo.co.id
Surel	: beni_hermawan@rukindo.co.id
Email	

Biaya

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab terkait kepuasan pelanggan yang berasal dari sumber internal Perusahaan.

Dampak dan Pencapaian

Rukindo menjadikan program tanggung jawab kepada pelanggan sebagai investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, bukan sarana biaya (*cost center*) melainkan sarana meraih keuntungan (*profit center*). Tanggung jawab kepada pelanggan merupakan komitmen Rukindo untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan pemahaman tersebut, maka implementasi program tanggung jawab kepada pelanggan berperan strategis bagi Rukindo dalam membangun reputasi, seperti meningkatkan citra dan merek Rukindo. Perusahaan juga telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 tentang mutu untuk menjamin mutu produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.

information, for example through Bulletins, Company Profiles, Leaflets, Posters, Videos, Websites, and other channels that uses internet.

3. Provide fair services to all customers in terms of price and quality in accordance with the agreements and applicable regulations.

Mechanism to File for Customer Complaints

Rukindo strives to meet customer expectations through our own customer complaint program. Customer complaints are important information that can be followed up to improve the quality of our services. Resolving customer complaints becomes the responsible of the Operation Division. This customer complaint program can be accessed by customers through several channels including:

Cost

In 2019, the Company has used our own budget to finance the responsibility to customers.

Impacts and Achievements

Rukindo treats the responsibility program to customers as an investment for business growth and sustainability, not a cost center, but a profit center. The responsibility to customers is a commitment of Rukindo to support the creation of sustainable development. With this understanding, the implementation of the responsibility program to customers plays a strategic role for Rukindo in building its reputation, such as improving Rukindo's reputation and brand image. The Company also owns a certification of ISO 9001:2015 regarding quality to ensure the quality of its products and services to the customers.

Penghargaan dan Sertifikasi

Perusahaan juga menerima penghargaan dan sertifikasi dari pihak eksternal yang mengakui standar kualitas kerja Perusahaan. Penghargaan ini bukanlah sebuah tujuan namun menjadi sebuah bentuk apresiasi yang sangat dihargai oleh Perusahaan. Hal ini menjadi sebuah bukti dari komitmen Perusahaan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Awards and Certifications

The Company has received the awards and certifications from external parties who recognized the quality of our work. This award is not our goal but it is a form of appreciation that we highly valued. This is a proof of the Company's commitment to always provide the best service to customers.



Perusahaan Jasa Pengerukan Terkemuka & Terpercaya dengan Mutu & Kualitas Pelayanan Memuaskan 2019
Leading & Trusted Dredging Company with Excellent Quality & Satisfactory Services in 2019

Diterima dari "Bangun Indonesia dengan Cinta" Tahun 2019.
Received from "Bangun Indonesia dengan Cinta" in 2019.



Keunggulan Kualitas Perusahaan
Quality Excellence For Company

Diterima dari Indonesia Quality Excellence tahun 2019.
Received from Indonesia Quality Excellence in 2019.

2019

Laporan Tahunan
Annual Report



Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur
Jakarta, 14430

E-mail: admin@rukindo.co.id

Telepon: +62 21 4301380

Faksimili: +62 21 4353669

 PT Pengerukan Indonesia

 @pt_rukindo

 @ipc_rukindo



www.rukindo.co.id

PT Pengerukan Indonesia

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements as of December 31, 2019
and for the year then ended
with independent auditors' report*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENERUKAN INDONESIA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF
DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT PENERUKAN INDONESIA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
laini/Residential address/in accordance with
personal identity card
Nomor teleponi/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
laini/Residential address/in accordance with
personal identity card
Nomor teleponi/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa :

- Berlanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
- Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

- : Wahyu Hardiyanto
: Komplek Gedung Rukindo
: Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur
: Jakarta Utara
: Jl. Jatiluhur Raya Blok DC No. 10
: RT. 003/ RW. 012 Kel. Jaka Sampurna
: Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
: 021-4301380 ext. 300
: Direktur Utama/ President Director

- : Indra Sigit Satyaputra
: Komplek Gedung Rukindo
: Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur
: Jakarta Utara
: Komplek Sakura Regency Blok F No 18
: RT. 006/ RW. 017 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
: Kota Bekasi
: 021-4391380 ext. 500
: Direktur Keuangan/ Finance Director

declare that :

- I am responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended.
- The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
 - The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
- I am responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 April 2020/ April 30, 2020

Wahyu Hardiyanto
Direktur Utama/ President Director



Indra Sigit Satyaputra
Direktur Keuangan/ Finance Director

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PENERUKAN INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PENERUKAN INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-64	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/1/IV/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pengerukan Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pengerukan Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga telah menguji: (i) kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan terlampir, dan (ii) pengendalian internal Perusahaan.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan tersebut, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/1/IV/2020

The Shareholders, the Board of Commissioners
and the Board of Directors
PT Pengerukan Indonesia

We have audited the accompanying financial statements of PT Pengerukan Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. We have also tested: (i) the Company's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of the accompanying financial statements, and (ii) the Company's internal control.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, the Company's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of such financial statements, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/1/IV/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kepatuhan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan oleh BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan entitas, dan (ii) pengendalian internal entitas.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/1/IV/2020 (continued)

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Auditing Standards ("SPKN") established by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK"). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. An audit conducted in accordance with SPKN established by BPK also includes testing on: (i) the entity's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of the entity's financial statements, and (ii) the entity's internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/L/IV/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pengerukan Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 30 April 2020, masing-masing atas: (i) kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, dan (ii) pengendalian internal Perusahaan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01089/2.1032/AU.1/03/0240-3/1/IV/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

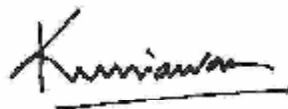
Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Pengerukan Indonesia as of December 31, 2019 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

We have separately issued reports dated April 30, 2020, on: (i) the Company's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of its financial statements, and (ii) the Company's internal control, respectively.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

30 April 2020/April 30, 2020

PT PENERUKAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	24.081.349.713	4,27,29	48.743.974.465	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto		5,29		Trade receivables - net
Pihak ketiga	5.173.190.000		3.299.907.571	Third parties
Pihak berelasi	12.736.201.478	27	37.040.702.918	Related parties
Pendapatan masih akan diterima		6,29		Accrued income
Pihak ketiga	5.421.254.369		-	Third parties
Pihak berelasi	32.541.482.947	27	16.814.032.548	Related parties
Persediaan	12.760.793.652	7	4.833.946.622	Inventories
Uang muka	-	8	514.457.810	Advances
Pajak dibayar di muka	19.788.502.655	16a	18.728.988.010	Prepaid taxes
Beban dibayar di muka	756.648.432	9	816.630.847	Prepaid expenses
Total Aset Lancar	113.259.423.246		130.792.640.791	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	247.235.253.871	10	227.299.799.195	Fixed assets – net
Aset lain-lain	-		38.045.630.059	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	247.235.253.871		265.345.429.254	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	360.494.677.117		396.138.070.045	TOTAL ASSETS

PT PENERUKAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	83.991.191.817	11,27,29	83.841.858.484	<i>Short-term loans</i>
Utang usaha		12,29		<i>Trade payables</i>
Pihak ketiga	8.987.104.215		31.640.874.980	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	1.450.399.807	27	661.617.986	<i>Related parties</i>
Utang lain-lain		13,29		<i>Other payables</i>
Pihak ketiga	6.524.007.960		5.910.000.337	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	763.656.564	27	993.543.900	<i>Related parties</i>
Pendapatan diterima di muka		14		<i>Unearned revenues</i>
Pihak ketiga	1.041.666.666		2.138.746.448	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	668.911.737	27	669.942.045	<i>Related parties</i>
Beban akrual	18.139.488.359	15,29	9.879.702.843	<i>Accrued Expense</i>
Utang pajak	1.200.118.239	16b	1.938.971.892	<i>Taxes payable</i>
Pinjaman jangka panjang - bagian lancar	74.576.359.139	17,27,29	75.242.399.980	<i>Long term loans - current maturities</i>
Liabilitas jangka panjang lainnya - bagian lancar	1.768.076.218	18,27,29	1.624.941.088	<i>Other non-current liabilities - current maturities</i>
Total Liabilitas Jangka Pendek	199.110.980.721		214.542.599.983	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	25.297.826.393	16e	28.876.104.603	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja	281.792.641	19	155.145.617	<i>Employee benefit liabilities</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	10.250.000.000	17,27,29	14.551.585.730	<i>Long term loans - net of current maturities</i>
Liabilitas jangka panjang lainnya - setelah dikurangi bagian lancar	946.906.559	18,27,29	2.835.159.499	<i>Other non-current liabilities - net of current maturities</i>
Total Liabilitas Jangka Panjang	36.776.525.593		46.417.995.449	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	235.887.506.314		260.960.595.432	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				<i>Capital stock - par value</i>
Rp1.000.000 per saham				<i>Rp1,000,000 per share</i>
Modal dasar - 2.000.000 saham				<i>Authorized capital - 2,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 612.164 saham	612.164.000.000	20	612.164.000.000	<i>Issued and fully paid - 612,164 shares</i>
Obligasi Wajib Konversi -195.000 saham				<i>Mandatory Convertible Bonds 195,000 shares -</i>
Nilai nominal - Rp1.000.000 per saham	195.000.000.000	21	195.000.000.000	<i>Rp1,000,000 - par value per share</i>
Cadangan umum	4.165.070.971	22	4.165.070.971	<i>General reserve</i>
Akumulasi defisit	(686.721.900.168)		(676.151.596.358)	<i>Accumulated deficit</i>
EKUITAS - NETO	124.607.170.803		135.177.474.613	EQUITY - NET
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	360.494.677.117		396.138.070.045	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PENERUKAN INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Year Ended
 December 31, 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes		2018
Pendapatan	156.204.513.820	23,27	226.913.134.732	Revenues
Beban usaha	(166.966.716.832)	24	(201.188.846.376)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya	17.510.348.892	25a	22.300.017.828	Other operating income
Beban operasi lainnya	(4.221.128.924)	25b	(23.230.276.401)	Other operating expenses
LABA USAHA	2.527.016.956		24.794.029.783	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	1.172.421.579	26a	3.337.674.376	Finance income
Beban keuangan	(14.088.781.975)	26b	(13.376.250.342)	Finance expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	(10.389.343.440)		14.755.453.817	INCOME (LOSS) BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final	(3.747.529.928)		(4.959.021.799)	Final tax expense
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(14.136.873.368)		9.796.432.018	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT
Kini	-	16c	-	Current
Tangguhan	3.575.351.048	16d	7.696.937.035	Deferred
		16e		
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(10.561.522.320)		17.493.369.053	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(11.708.653)		(2.559.175)	Remeasurements of defined benefit plans
Pajak penghasilan terkait	2.927.163		639.794	Related income tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(8.781.490)		(1.919.381)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(10.570.303.810)		17.491.449.672	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT Pengerukan Indonesia
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock	Obligasi wajib konversi/ Mandatory convertible bonds	Saldo Laba (Akumulasi Defisit)/ Retained Earnings (Accumulated Losses)		Ekuitas - neto/ Equity - net	
			Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2018	612.164.000.000	195.000.000.000	4.165.070.971	(693.643.046.030)	117.686.024.941	Balance as of January 1, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	17.493.369.053	17.493.369.053	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali program imbangan pasti	-	-	-	(1.919.381)	(1.919.381)	Other comprehensive income - remeasurement of defined benefit plans
Saldo 31 Desember 2018	612.164.000.000	195.000.000.000	4.165.070.971	(676.151.596.358)	135.177.474.613	Balance as of December 31, 2018
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(10.561.522.320)	(10.561.522.320)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali program imbangan pasti	-	-	-	(8.781.490)	(8.781.490)	Other comprehensive income - remeasurement of defined benefit plans
Saldo 31 Desember 2019	612.164.000.000	195.000.000.000	4.165.070.971	(686.721.900.168)	124.607.170.803	Balance as of December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PENERUKAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	154.681.148.906		Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(129.656.599.600)		Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(29.543.012.384)		Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(4.029.714.540)		Payment of income taxes
Penerimaan dari pendapatan keuangan	1.172.421.579		Cash receipts from finance income
Pembayaran beban keuangan	(13.712.979.688)		Payments of finance expenses
Penerimaan dari kegiatan operasional lain	2.973.734.746		Receipts from other operational activities
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(18.115.000.981)		Net cash flows provided by (used in) operating activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	9.500.000.000		Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	(3.833.796.937)	10	Acquisitions of fixed assets
Beban ditangguhkan	(7.719.806.244)		Deferred charges
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.053.603.181)		Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman	(4.500.000.000)	17	Payment loans
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	5.979.410		Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(24.662.624.752)		NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	48.743.974.465	4	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	24.081.349.713	4	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pengerukan Indonesia ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Pendirian Perusahaan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1991 mengenai pengalihan bentuk Perusahaan Umum Pengerukan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1984 menjadi Perusahaan Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2013, seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengerukan Indonesia (Persero) dialihkan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga status Perusahaan berubah menjadi PT Pengerukan Indonesia yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Dahlia, S.H., sebagai pengganti Fathiah Helmi, S.H., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang jasa pengerukan yang meliputi:

- Pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk;
- Reklamasi, transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan;
- Pekerjaan teknik sipil (*civil work*) yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan dan bangunan;
- Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan;
- Survei hidrografi dan topografi serta penyelidikan tanah (*soil investigation*);

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Pengerukan Indonesia (the "Company") was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

Establishment of the Company was due to enactment of Government Regulation No. 9 of 1991 regarding change in the form of Perusahaan Umum Pengerukan which was established based on Government Regulation No. 18 of 1983 jo. Government Regulation No. 33 of 1984 to be a state-owned limited liability company. Furthermore, based on Government Regulation No. 44 of 2013, all shares of the State of the Republic of Indonesia in PT Pengerukan Indonesia (Persero) were transferred to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), hence the Company's status was changed to be PT Pengerukan Indonesia under Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which was based on Deed No. 48 dated December 28, 2017, of Dahlia, S.H., as a substitute of Fathiah Helmi, S.H., regarding increase in the issued and paid capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018.

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the dredging services which includes:

- *Dredging of shipping channels, port basin and other locations which require dredging services;*
- *Reclamation, transportation of dredging output, procurement/development of land and building;*
- *Civil work related to dredging, reclamation, development of land and building;*
- *Consulting services related to dredging, reclamation, development of land;*
- *Hydrographical and topographical survey and soil investigation;*

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang jasa pengerukan yang meliputi: (lanjutan)

- Jasa galangan dan perbengkelan untuk perbaikan, pemeliharaan, pengembangan kapal keruk dan alat bantu serta kapal-kapal lainnya untuk keperluan usaha sendiri maupun untuk pihak lain serta penyediaan fasilitas untuk menunjang usaha pengerukan dan reklamasi;
- Jasa keagenan perusahaan/kapal keruk dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan pengerukan dan reklamasi;
- Kegiatan penguasaan (konsesi) dan penambangan pasir; dan
- Usaha penyewaan alat produksi, fasilitas penunjang produksi, dan *crewing*/pengawakan kapal.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1991.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430, Indonesia.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II") dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Manajemen kunci dan karyawan

Susunan manajemen kunci Perusahaan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Dewan Komisaris Komisaris Utama	Dani Rusli Utama
Direksi Direktur Utama Direktur SDM dan Keuangan Direktur Komersial dan Teknik	Wahyu Hardiyanto Indra Sigit Satyaputra Ari Santoso

31 Desember 2018

Dewan Komisaris Komisaris Utama	Dani Rusli Utama
Direksi Direktur Utama Direktur SDM dan Keuangan Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Teknik	M. Hadi Syafitri Noor Budi Priyanto Muhammad Yusuf

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana disebutkan di atas.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the dredging services which includes: (continued)

- Shipyard and workshop services for repair, maintenance and development of dredgers and their supporting tools and other vessels either for own business purposes or for other parties, as well as providing dredging and reclamation supporting facilities;
- Corporate/dredger agency services and other services related to dredging and reclamation;
- Sand controlling (concession) and mining activities; and
- Rent of production tools, production-supporting facilities, and ship crewing.

The Company commenced its commercial operations on October 1, 1991.

The Company's office is located in Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430, Indonesia.

The Company's parent is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II") and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Key management and employees

The composition of the Company's key management, which consists of Board of Commissioners and Board of Directors, are as follows:

December 31, 2019

Board of Commissioners President Commissioner
Board of Directors President Director Human Resource and Finance Director Commercial and Technical Director

December 31, 2018

Board of Commissioners President Commissioner
Board of Directors President Director Human Resource and Finance Director Acting Commercial and Technical Director

Key management personnel of the Company are the above mentioned members of Board of Commissioners and Board of Directors.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit
 Anggota Rusli

Audit Committee
 Member

Jumlah kompensasi yang diakru kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

The member of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Total compensation accrued for the Company's key management is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek	942.224.298	732.160.642	Short-term benefit
Imbalan asuransi pascakerja	51.124.500	51.130.500	Post-employment insurance benefit
Subtotal Dewan Komisaris	993.348.798	783.291.142	Sub-total Board of Commissioners
Direksi			Board of Directors
Imbalan kerja jangka pendek	4.351.777.843	4.488.012.459	Short-term benefit
Imbalan asuransi pascakerja	218.017.590	215.865.000	Post-employment insurance benefit
Subtotal Direksi	4.569.795.433	4.703.877.459	Sub-total Board of Directors
Total	5.563.144.231	5.487.168.601	Total

Perusahaan memiliki 14 orang karyawan tetap dan 132 karyawan tidak tetap pada tanggal 31 Desember 2019, 8 orang karyawan tetap dan 137 karyawan (tidak diaudit) tidak tetap pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki 4 karyawan tetap Pelindo II, pihak berelasi, yang ditugaskan di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan karyawan tetap Pelindo II, pihak berelasi, yang ditugaskan di Perusahaan.

The Company has 14 permanent employees and 132 non-permanent employees as of December 31, 2019 and 8 permanent employees and 137 non-permanent employees (unaudited) as of December 31, 2018. As of December 31, 2019, the Company has 4 permanent employees of Pelindo II, a related party, which were assigned to the Company. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are permanent employees of Pelindo II, a related party, which are assigned to the Company.

c. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 April 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

c. Completion of the financial statements

The management is responsible for the preparation of these financial statements which were completed and authorized for issuance on April 30, 2020. The Company's Board of Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait, beberapa standar akuntansi revisi dan baru yang telah diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2018.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan dasar biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs neto yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Dolar Amerika Serikat (\$AS)	13.901	14.481	United States Dollar (US\$)
Dolar Singapura (\$SG)	10.321	10.603	Singapore Dollar (SG\$)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

As disclosed in the related notes to the financial statements, several revised and new accounting standards are applied effective on January 1, 2018.

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept except as otherwise disclosed in the notes to the financial statements.

The statement of cash flows present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which are classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are prepared using the direct method.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the Company's functional currency.

b. Foreign currencies transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using average exchange rates of sell and buy published by Bank Indonesia at the last banking transaction day in the year. The resulting net gains or losses are recognized in the current year profit or loss.

The exchange rates used are as follows:

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (penyesuaian 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27 dan catatan lainnya yang relevan.

d. Instrumen keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode pelaporan.

Aset keuangan utama Perusahaan yang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima dan piutang lain-lain, uang jaminan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non - derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Transactions with related parties

The Company engages in transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (improvement 2010), "Related Party Disclosures". Such transactions are made based on terms agreed by the parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 27 and the other relevant notes.

d. Financial instruments

i) Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each reporting period.

The main financial assets of the Company, which include cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income and other receivables, security deposit are classified as loans and receivables. These financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila:

- (i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (ii) Perusahaan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Perusahaan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Perusahaan yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- (i) The rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- (ii) The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay. In this case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

Penurunan nilai

Impairment

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos penyisihan kerugian penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

ii) Liabilitas keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities upon initial recognition.

Liabilitas keuangan utama Perusahaan yang meliputi pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Liabilitas keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

The main financial liabilities of the Company, which include short-term loans, trade payables, other payables, accrued expenses and long-term loans, are classified as loans and borrowings. These financial liabilities are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Utang dan pinjaman dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Loans and borrowings are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan atas suatu liabilitas keuangan terjadi pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang saat ini ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

iii) Saling hapus instrumen keuangan

iii) Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv) Nilai wajar instrumen keuangan

iv) Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*arm's-length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

The fair value of financial instruments that are not actively traded in active markets is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Instrumen keuangan gabungan

v) Compound financial instrument

Instrumen keuangan gabungan merupakan instrumen keuangan non-derivatif yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari liabilitas dan ekuitas. Jika instrumen ini akan diselesaikan melalui pemberian sejumlah saham penerbit instrumen dengan nilai tetap dan nilai pokok instrumen tersebut dicatat dalam mata uang yang sama dengan mata uang fungsional dari entitas penerbit, maka instrumen ini adalah instrumen ekuitas. Jika bunga atas instrumen ini dibayarkan hanya untuk suatu pertimbangan, maka tidak ada komponen kewajiban dan keseluruhan instrumen diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.

A compound financial instrument is a non-derivative financial instrument that can be classified as both liability and an equity component. If this will be settled through delivery of a fixed number of the issuer's own shares and the principal of this is in the same currency as the functional currency of the issuing entity, then this feature is an equity instrument. If interest on this instrument is payable only at the discretion of the entity, then there is no liability component and the entire instrument is classified as an equity instrument.

e. Persediaan

e. Inventories

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan bahan bakar minyak dan suku cadang ditentukan dengan metode *first-in first-out*, sementara biaya perolehan pelumas ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of fuel and spare part is determined by first-in first-out method, while cost of oil is determined by weighted average method.

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat atau kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Sarana, dermaga dan dok	50	<i>Land facilities, jetty and dock</i>
Bangunan	20-25	<i>Buildings</i>
Kapal keruk	2-36	<i>Dredgers</i>
Alat bantu	4-10	<i>Tools</i>
Peralatan	5-10	<i>Equipments</i>
Kendaraan	5	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	2	<i>Office equipments</i>

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Prepaid expenses

Prepaid expenses are recognized as expenses over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

g. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation (except for land which are not depreciated) and impairment losses.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

h. Beban ditangguhkan

Beban ditangguhkan, disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain, merupakan biaya untuk penambahan peralatan, perluasan atau perawatan besar (*special docking*) kapal keruk dan alat bantu dengan nilai yang cukup besar/material yang dilaksanakan secara periodik. Perawatan besar (*special docking*) adalah persyaratan kelas yang dinyatakan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), diantaranya:

- Sertifikasi Klasifikasi Lambung dengan register tanda kelas A.100.1, terdiri dari lambung kapal dan peralatan keruk.
- Sertifikasi Klasifikasi Mesin dengan register tanda kelas SM, terdiri dari mesin utama dan mesin bantu.

Beban ditangguhkan diamortisasi selama 4 (empat) tahun untuk kegiatan rehabilitasi dan pengadaan perlengkapan atau peralatan, dan 2 (dua) tahun untuk kegiatan perbaikan.

Pada 31 Desember 2019, beban ditangguhkan seluruhnya direklasifikasi ke bagian aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Fixed assets (continued)

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Company conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

h. Deferred charges

Deferred charges, presented as part of other assets, are costs incurred for addition of equipments, expansion or major maintenance (*special docking*) of the dredgers and their tools with considerably material value which are held periodically. Major maintenance (*special docking*) is a class requirement stated by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), among others:

- Certificate of Classification Hull with register mark A.100.1 class, consisting of hull and dredging equipment.
- Certificate of Classification Machinery with register mark SM class, consisting of main engines and auxiliary engines.

Deferred charges are amortized for 4 (four) years for rehabilitation and procurement of supplies or equipments activities, and for 2 (two) years for repair activities.

As of December 31, 2019, deferred charges are entirely reclassified to part of fixed assets.

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Perusahaan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual, dengan nilai pakainya, dan ditentukan secara individual, kecuali apabila aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

i. Impairment of non-financial assets

At each end of reporting period, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash generating unit's fair value less costs to sell, and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**i. Penurunan nilai aset nonkeuangan
(lanjutan)**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

j. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

k. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Mengacu pada PSAK revisi tersebut, pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Impairment of non-financial assets
(continued)**

At each end of reporting period, the Company assesses whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on such asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

j. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.

k. Taxation

The Company applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". Referring to the revised PSAK, final tax is no longer governed by PSAK No. 46.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan usaha dari jasa konstruksi sebagai pos tersendiri, sementara beban pajak final atas penghasilan bunga disajikan sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Taxation (continued)

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scope out from PSAK 46 "Income Tax".

The Company presents final tax expense on operating revenue arising from construction services as a separate line item, while final tax expense on interest income is presented as part of other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax

Current tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment of income tax are presented as part of current tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company presented interest/penalty, if any, as part of other operating expenses.

Interest and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expenses.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai manfaat/beban pajak tangguhan dan termasuk dalam laba rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Taxation (continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as deferred tax benefit/expense and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period profit or loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Imbalan kerja karyawan

l. Employee benefits

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2015), Perusahaan mencatat penyisihan untuk imbalan kerja karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Saldo penyisihan yang diperlukan sebagaimana disebutkan di atas, diestimasi menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

In accordance with PSAK No. 24 (Revised 2015), the Company recognizes provision for its employee benefits in accordance with Law No. 13 Year 2003 concerning Labor. Under the law, the Company is required to pay separation payment, reward-for-service-years payment and rights compensation payment to its employees if the specified conditions are met. The amounts of the above-mentioned required provisions are estimated using the Projected Unit Credit method.

Untuk karyawan tetap Perusahaan yang merupakan karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II"), pihak berelasi, yang ditugaskan di Perusahaan, perhitungan dan kewajiban pembayaran dilakukan oleh Pelindo II, sementara Perusahaan memiliki kewajiban membayarkannya kepada Pelindo II sehingga disajikan sebagai utang lain-lain - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan (Catatan 13).

For all the Company's permanent employees who are the employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II"), a related party, which are assigned to the Company, the calculation and obligation to pay are conducted by Pelindo II, while the Company has an obligation to pay them to Pelindo II hence it is presented as other payables - related parties in the statement of financial position (Note 13).

m. Pengakuan pendapatan dan beban

m. Revenue and expense recognition

Pendapatan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.

Revenue is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed are recorded as unearned revenue.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual) atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis) or based on their beneficial period.

n. Peristiwa setelah periode pelaporan

n. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan ("peristiwa penyesuaian"), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

Post period-end events that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date ("adjusting events"), if any, are reflected in the financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Perusahaan telah menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Perusahaan berikut ini.

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan.

Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2019, the Company has adopted new accounting standards that are relevant to the Company are follows.

- 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes.

This improvement affirming the consequences of income tax on dividends arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.

- ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration.

This amendment clarifies the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments.

This Interpretation which is the interpretation of PSAK 46: Income Taxes, clarifies and provides guidance to reflect the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

p. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

p. Accounting standards issued but not yet effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: Financial Instrument, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020.

This PSAK is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**p. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang diakui dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi dan asumsi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat. Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2d.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)**

- Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020.

This amendment provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the recognized amount and disclosures in the financial statements. Due to uncertainty about these estimates and assumptions, actual results reported in future periods could be different with the estimates made. Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experiences and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable circumstances.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Classification of financial assets and liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2d.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang

Perusahaan melakukan evaluasi apabila terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat suatu penyisihan atas jumlah piutang usaha pelanggan tersebut guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat ditagih oleh Perusahaan. Penyisihan ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlahnya.

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai untuk piutang usaha yang dievaluasi secara individual, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi secara kolektif atas penurunan nilai.

Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang. Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Nilai tercatat piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keadaan piutang pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Allowance for impairment of receivables

The Company conducts an evaluation where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record allowances for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due. Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

The carrying values of trade receivables is disclosed in Notes 5. Based on the evaluation on the status of the receivable accounts at reporting date, the management believes that the allowances for impairment is adequate to cover any possible losses from uncollectible receivables.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, saat dan jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metode penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Perusahaan.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 29.

Masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Company based its assumption and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair value of financial assets and liabilities

The Company records certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence, timing and amount of changes in the fair values might differ if the Company uses different valuation method. Any changes in the fair values of these financial assets and liabilities would directly affect the Company's profit or loss.

The estimated fair values of financial assets and liabilities are disclosed in Note 29.

Useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these fixed assets.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2g. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada laba rugi Perusahaan.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Pajak kini

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan beban pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu dalam kegiatan usaha normal yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak kini diungkapkan dalam Catatan 16d.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Perhitungan pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 16e.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Useful lives of fixed assets (continued)

The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2g. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the Company's profit or loss.

The carrying values of fixed assets are disclosed in Note 10. The management believes that there is no indicator of fixed assets impairment as of the reporting date.

Current tax

Significant judgment is involved in determining the corporate income tax expense. There are certain transactions and computation during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. The Company recognizes liabilities for corporate income tax based on estimated taxable income.

The calculation of current tax is disclosed in Note 16d.

Deferred income tax

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The calculation of deferred tax is disclosed in Note 16e.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019/</u> <u>December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/</u> <u>December 31, 2018</u>
Kas	44.138.095	64.497.587
Bank		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	826.182.633	-
Pihak berelasi (Catatan 27)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.591.120.027	4.842.457.250
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	311.624.747	573.246.865
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	164.974.163	42.439.357
Dolar AS		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	143.310.048	71.333.406
Total bank	4.037.211.618	5.529.476.878
Deposito berjangka		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	5.000.000.000	28.000.000.000
Pihak berelasi (Catatan 27)		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.500.000.000	1.650.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000.000	13.500.000.000
Total deposito berjangka	20.000.000.000	43.150.000.000
Total	24.081.349.713	48.743.974.465

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

The details of cash and cash equivalents are as follows:

Cash on hand
Cash in banks
Third party
Rupiah
PT Bank Bukopin Tbk
Related parties (Note 27)
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total cash in banks
Time deposits
Third party
Rupiah
PT Bank Bukopin Tbk
Related parties (Note 27)
Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total time deposits
Total

Suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on the time deposits are as follows:

	<u>31 Desember 2019/</u> <u>December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/</u> <u>December 31, 2018</u>
Rupiah	6,0% - 7,7%	6,0% - 8,5%

Rupiah

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank have floating interest rate based on the offered rate from each bank.

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted in its use at the reporting date.

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha menurut pelanggan dan mata uang adalah sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables by customers and currencies are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bumi Samudera Agro Megah	5.150.348.165	5.150.348.165	PT Bumi Samudera Agro Megah
PT Global Jaya Maritimindo	3.437.500.000	-	PT Global Jaya Maritimindo
PT Indonesian Fortune Lloyd	2.941.788.430	569.000.000	PT Indonesian Fortune Lloyd
PT Dewi Rahmi	1.608.051.823	1.758.052.823	PT Dewi Rahmi
PT Marunda Jaya	1.422.190.000	2.595.307.460	PT Marunda Jaya
PT Abadi Bersama	964.122.223	964.122.223	PT Abadi Bersama
PT Pontianak Medan	493.162.523	493.162.523	PT Pontianak Medan
PT Trimuda Jaya Perkasa	475.000.000	475.000.000	PT Trimuda Jaya Perkasa
PT Cahaya Mentari C-Pangkalan Susu	364.790.000	364.790.000	PT Cahaya Mentari C-Pangkalan Susu
PT Borneo Sukses Makmur	313.500.000	-	PT Borneo Sukses Makmur
PT Mandiri Kokoh Abadi	250.000.000	250.000.000	PT Mandiri Kokoh Abadi
PT Dharma Bahari Utama	207.147.800	207.147.800	PT Dharma Bahari Utama
PT Tima Olilex Paraco	178.593.200	178.593.200	PT Tima Olilex Paraco
PT Sekupang Barelang	119.150.000	119.150.000	PT Sekupang Barelang
PT Harapan Baru Line	-	446.943.423	PT Harapan Baru Line
PT Putera Master Sarana P	-	212.870.000	PT Putera Master Sarana P
Lain-lain	895.445.326	900.932.054	Others
Subtotal pihak ketiga - Rupiah	18.820.789.490	14.685.419.671	Sub-total third parties - Rupiah
Dolar AS			US Dollar
SSS International Holdings Pte. Ltd.	47.324.376.028	49.298.884.704	SSS International Holding Pte. Ltd.
- Singapura			- Singapore
Miller Dredging Co. Inc.	2.905.533.506	3.026.760.696	Miller Dredging Co. Inc.
- India			- India
Dharti Dredging and Infrastructure Ltd.	695.050.500	724.050.000	Dharti Dredging and Infrastructure Ltd.
- India			- India
Subtotal pihak ketiga - Dolar AS	50.924.960.034	53.049.695.400	Sub-total third parties - US Dollar
Dolar Singapura			Singapore Dollar
Guan General Contractor Pte. Ltd.	78.902.057	81.059.667	Guan General Contractor Pte. Ltd.
- Singapura			- Singapore
Subtotal pihak ketiga	69.824.651.581	67.816.174.738	Sub-total third parties
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(64.651.461.581)	(64.516.267.167)	Allowance for impairment
Subtotal pihak ketiga - neto	5.173.190.000	3.299.907.571	Sub-total third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 27)			Related parties (Note 27)
Pelindo II	9.886.112.706	35.507.364.365	Pelindo II
PT Trans Pacific Petrochemical	1.507.000.000	-	PT Trans Pacific Petrochemical
Indotama	1.343.088.772	324.585.377	Indotama
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	-	1.092.057.361	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT ASDP Indonesia Ferry	-	116.695.815	PT ASDP Indonesia Ferry
PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	PT PAL Indonesia (Persero)
Subtotal pihak berelasi	12.736.201.478	37.040.702.918	Sub-total related parties
Neto	17.909.391.478	40.340.610.489	Net

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha menurut umur adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Belum jatuh tempo	9.437.201.783	14.313.663.324	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-30 hari	1.807.893.772	25.360.853.469	1-30 days
31-60 hari	1.165.481.945	541.352.000	31-60 days
61-150 hari	5.358.122.328	55.506.705	61-150 days
Lebih dari 150 hari	64.792.153.231	64.585.502.158	Over 150 days
Total	82.560.853.059	104.856.877.656	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(64.651.461.581)	(64.516.267.167)	Allowance for impairment
Neto	17.909.391.478	40.340.610.489	Net

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The details of trade receivables by age are as follows:

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Saldo awal	64.516.267.167	60.744.848.457	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	-	295.114.845	Allowance during the year
Pemulihan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25a)	(200.001.000)	(150.000.000)	Recovery of allowance during the year (Note 25a)
Efek selisih kurs tahun berjalan	335.195.414	3.626.303.865	Foreign exchange effect during the year
Saldo akhir	64.651.461.581	64.516.267.167	Ending balance

The movements in allowance for impairment of trade receivables are as follows:

6. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Pihak ketiga			Third parties
PT Putindo Trada Wasesa	1.292.622.920	-	PT Putindo Trada Wasesa
PT Ina Multi Trans	1.185.220.500	-	PT Ina Multi Trans
PT Marunda Jaya	809.460.273	-	PT Marunda Jaya
PT Borneo Sukses Makmur	793.421.919	-	PT Borneo Sukses Makmur
PT Merpati Marine Service	758.688.757	-	PT Merpati Marine Service
PT Jelajah Laut Nusantara	413.600.000	-	PT Jelajah Laut Nusantara
Lain-lain	168.240.000	-	Others
Subtotal pihak ketiga	5.421.254.369	-	Sub-total third parties

6. ACCRUED INCOME

Accrued revenues represent receivables from customers for services which have been delivered by the Company, but not yet billed (unbilled receivable). Details of the account as of December 31, 2019 dan 2018 are as follows:

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

6. ACCRUED INCOME

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	
Pihak berelasi (Catatan 27)			<i>Related parties (Note 27)</i>
Pelindo II	25.722.963.282	16.266.189.117	<i>Pelindo II</i>
PT Trans Pacific Petrochemical			<i>PT Trans Pacific Petrochemical</i>
Indotama	5.866.000.000	-	<i>Indotama</i>
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	952.519.665	547.843.431	<i>PT Jasa Armada Indonesia Tbk</i>
Subtotal pihak berelasi	<u>32.541.482.947</u>	<u>16.814.032.548</u>	<i>Sub-total related parties</i>
Total	<u>37.962.737.316</u>	<u>16.814.032.548</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan yang masih akan diterima berasal dari jasa pengerukan, pemeliharaan alur kolam, pembangunan kapal dan sewa gedung.

As of December 31, 2019, and 2018, accrued income mainly arises from dredging, port basin maintenance, ship building services and rental of building.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

The details of inventories are as follows:

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	
Suku cadang	9.520.533.012	5.422.647.558	<i>Spare parts</i>
Bahan bakar minyak	3.240.260.640	148.492.197	<i>Fuel</i>
Total	<u>12.760.793.652</u>	<u>5.571.139.755</u>	<i>Total</i>
Penyisihan persediaan usang	-	(737.193.133)	<i>Allowance for inventory obsolescence</i>
Neto	<u>12.760.793.652</u>	<u>4.833.946.622</u>	Net

8. UANG MUKA

8. ADVANCES

Pada tanggal 31 Desember 2018, uang muka terutama merupakan uang muka atas manajer proyek, unit usaha galangan and pejabat struktural dan nonstruktural.

As of December 31, 2018, advances are mainly advance for project manager, shipyard business unit and structural and non-structural officers.

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAID EXPENSES

Rincian beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

The details of prepaid expenses are as follows:

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	
Asuransi	756.648.432	751.062.847	<i>Insurance</i>
Lainnya	-	65.568.000	<i>Others</i>
Total	<u>756.648.432</u>	<u>816.630.847</u>	Total

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

		31 Desember/ December 31, 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan						Cost	
Tanah	4.336.949.000	-	-	-	4.336.949.000	Land	
Sarana, dermaga dan dok	25.137.155.282	-	-	-	25.137.155.282	Facilities, jetty and dock	
Bangunan	15.194.600.010	-	-	-	15.194.600.010	Buildings	
Kapal keruk	571.537.333.522	-	41.145.060.319	137.068.815.053	667.461.088.256	Dredgers	
Alat bantu	79.383.959.884	-	-	-	79.383.959.884	Tools	
Peralatan	7.490.213.504	-	-	1.612.975.713	9.103.189.217	Equipments	
Kendaraan	739.027.273	-	-	-	739.027.273	Vehicles	
Inventaris kantor	1.514.904.925	-	-	-	1.514.904.925	Office equipments	
Aset dalam penyelesaian	1.688.088.636	3.833.796.937	-	(1.612.975.713)	3.908.909.860	Construction in progress	
Total biaya perolehan	707.022.232.036	3.833.796.937	41.145.060.319	137.068.815.053	806.779.783.707	Total cost	
Dikurangi:						Less:	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Sarana, dermaga dan dok	9.681.048.941	789.206.745	-	-	10.470.255.686	Facilities, jetty and dock	
Bangunan	12.334.623.992	393.522.242	-	-	12.728.146.234	Buildings	
Kapal keruk	400.414.812.134	13.642.513.699	40.834.911.644	101.816.448.587	475.038.862.776	Dredgers	
Alat bantu	38.441.637.654	3.215.968.481	-	-	41.657.606.135	Tools	
Peralatan	3.655.768.647	799.348.885	-	-	4.455.117.532	Equipment	
Kendaraan	739.027.217	-	-	-	739.027.217	Vehicles	
Inventaris kantor	1.514.904.722	-	-	-	1.514.904.722	Office equipments	
Total akumulasi penyusutan	466.781.823.307	18.840.560.052	40.834.911.644	10.513.069.837	546.603.920.302	Total accumulated depreciation	
Dikurangi						Less:	
Penyisihan penurunan nilai	12.940.609.534	-	-	-	12.940.609.534	Allowance for Impairment	
Nilai buku	227.299.799.195				247.235.253.871	Net book value	
		31 Desember/ December 31, 2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan						Cost	
Tanah	4.336.949.000	-	-	-	4.336.949.000	Land	
Sarana, dermaga dan dok	25.137.155.282	-	-	-	25.137.155.282	Facilities, jetty and dock	
Bangunan	15.194.600.010	-	-	-	15.194.600.010	Buildings	
Kapal keruk	577.250.177.776	-	5.712.844.254	-	571.537.333.522	Dredgers	
Alat bantu	75.540.425.161	-	3.215.239.903	7.058.774.626	79.383.959.884	Tools	
Peralatan	5.588.607.686	1.901.605.818	-	-	7.490.213.504	Equipments	
Kendaraan	739.027.273	-	-	-	739.027.273	Vehicles	
Inventaris kantor	1.514.904.925	-	-	-	1.514.904.925	Office equipments	
Aset dalam penyelesaian	4.857.353.429	3.889.509.833	-	(7.058.774.626)	1.688.088.636	Construction in progress	
Total biaya perolehan	710.159.200.542	5.791.115.651	8.928.084.157	-	707.022.232.036	Total cost	
Dikurangi:						Less:	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Sarana, dermaga dan dok	8.891.842.196	789.206.745	-	-	9.681.048.941	Facilities, jetty and dock	
Bangunan	11.868.407.485	466.216.507	-	-	12.334.623.992	Buildings	
Kapal keruk	390.789.170.441	15.338.485.947	5.712.844.254	-	400.414.812.134	Dredgers	
Alat bantu	38.301.343.281	3.355.534.276	3.215.239.903	-	38.441.637.654	Tools	
Peralatan	3.128.779.446	526.989.201	-	-	3.655.768.647	Equipment	
Kendaraan	739.027.217	-	-	-	739.027.217	Vehicles	
Inventaris kantor	1.514.904.722	-	-	-	1.514.904.722	Office equipments	
Total akumulasi penyusutan	455.233.474.788	20.476.432.676	8.928.084.157	-	466.781.823.307	Total accumulated depreciation	
Dikurangi						Less:	
Penyisihan penurunan nilai	-	12.940.609.534	-	-	12.940.609.534	Allowance for Impairment	
Nilai buku	254.925.725.754				227.299.799.195	Net book value	

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress are as follows:

		31 Desember/December 31, 2019		
	Persentase Penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Acumulated cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Air Bag	90,00%	3.908.909.860	April/April 2020	Air Bag

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan pada beban usaha (Catatan 24).

Berdasarkan laporan penilaian dari Budi, Edy, Saptono & Rekan, penilai independen, tanggal 18 Februari 2019, Perusahaan mengakui penurunan nilai atas aset tetap tertentu yaitu TSHD Aru II, SB Seruni, SB Melati, SB Teratai dan sebesar Rp12.940.609.534 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Catatan 25b). Berdasarkan laporan penilaian tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan biaya pengganti baru.

KK Natuna, KK Timor dan TSHD Kalimantan II dijadikan jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 17).

Aset tetap tertentu diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pembajakan, gempa bumi, kecelakaan pada saat pengisian atau pengangkutan bahan bakar, perampokan (*burglary*) dan kerusakan mesin dan *hull (machinery breakdown)* pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Fistlight Indonesia dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp151.500.000.000 dan \$AS61.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp266.046.000.000 dan \$AS58.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. SK.03/7/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan PPI-400-005799 tanggal 7 Agustus 2018, Perusahaan menghapusbukkan aset tetap tertentu yaitu aset kapal CSD Kapuas, SB 54 dan SB 56. Perusahaan menjual aset tetap tersebut di tahun 2018 dan mencatat penjualan aset tetap sebesar Rp3.100.000.000 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif (Catatan 25a).

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. KU.02.08/16/10/1/PCB/UT/PI.II-19 dan PPI-623-16102019007 tanggal 16 Oktober 2019, Perusahaan menghapusbukkan aset tetap tertentu yaitu aset kapal TSHD Halmahera, CSD Tondano dan CSD Danau Laut Tawar. Perusahaan menjual aset tetap tersebut di tahun 2019 dan mencatat penjualan aset tetap sebesar Rp9.189.851.326 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif (Catatan 25a).

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset lain-lain ke akun aset tetap dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp137.068.815.053 dan Rp101.816.448.587.

10. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expenses are wholly allocated to operating expenses (Note 24).

Based on appraisal reports of Budi, Edy, Saptono & Rekan, an independent appraiser, dated February 18, 2019, the Company recognized allowances for impairment of certain fixed assets, namely TSHD Aru II, SB Seruni, SB Melati, SB Teratai and amounting to Rp12,940,609,534 for the year ended December 31, 2018 (Note 25b). Based on the appraisal reports, the valuation was determined in accordance with the Indonesian Appraisal Standard (SPI) and the appraisal method used is the new replacement cost approach.

TSHD Natuna, TSHD Timor and TSHD Kalimantan II are pledged as collateral for long-term loans (Note 17).

Certain fixed assets are covered by insurance against risks of losses due to fire, piracy, earthquakes, accidents when filling or removal of the fuel, burglary and damage to hull and machinery (machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Fistlight Indonesia and PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk with total coverage amounting to Rp151,500,000,000 and \$AS61,000,000 as of December 31, 2019 and Rp266,046,000,000 and US\$58,000,000 as of December 31, 2018. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from the risks.

Based on Decree of Board of Directors No. SK.03/7/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and PPI-400-005799 dated August 7, 2018, the Company has disposed certain fixed assets, namely CSD Kapuas, SB 54 and SB 56. The Company sold such fixed asset in 2018 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp3,100,000,000 in statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25a).

Based on Decree of Board of Directors No. KU.02.08/16/10/1/PCB/UT/PI.II-19 and PPI-623-16102019007 dated October 16, 2019, the Company has disposed certain fixed assets, namely TSHD Halmahera, CSD Tondano and CSD Danau Laut Tawar. The Company sold such fixed assets in 2019 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp9,189,851,326 in statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25a).

Reclassification in 2019 included reclassification from other assets to fixed assets with cost and accumulated depreciation amounted to Rp137,068,815,053 and Rp101,816,448,587, respectively.

**PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Rincian pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Pihak berelasi (Catatan 27)			Related party (Note 27)
Rupiah			Rupiah
Pelindo II			Pelindo II
Pokok	50.000.000.000	50.000.000.000	Principals
Bunga dan denda	33.991.191.817	33.841.858.484	Interests and penalties
Total	83.991.191.817	83.841.858.484	Total

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2013 dari Notaris Kartono, S.H., Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp40.000.000.000 dari Pelindo II dengan jangka waktu pembayaran selama 11 (sebelas) bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 4,5% per tahun. Pinjaman ini diberikan untuk digunakan sebagai dana talangan untuk penyelesaian utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pembayaran kewajiban pajak, perbaikan alat produksi, kewajiban kepada mitra usaha dan jasa konsultan hukum dan keuangan.

Bunga pinjaman dan denda atas pokok pinjaman telah diakui sesuai batas maksimal dalam perjanjian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, denda bunga sebesar 0,5% perbulan dari bunga pinjaman diakui Perusahaan secara periodik dan tidak ada batas maksimal yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pokok pinjaman ini sebesar Rp10.000.000.000.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 21 April 2014 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Perusahaan kembali memperoleh pinjaman tanpa jaminan sebesar dari Pelindo II Rp40.000.000.000 dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 4,5% per tahun.

Pinjaman ini diberikan untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan TSHD Irian Jaya, TSHD Seram, TSHD Betuah dan TSHD Sulawesi II di India, pengoperasian unit usaha galangan dan penyelesaian kewajiban kepada PT Daya Radar Utama.

Bunga atas pokok pinjaman telah diakui sesuai batas maksimal dalam perjanjian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, denda bunga sebesar 0,1% perbulan dari bunga pinjaman diakui Perusahaan secara periodik dengan batas maksimal sebesar 5% sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian.

11. SHORT-TERM LOANS

The details of short-term loans are as follows:

Based on Deed No. 1 dated May 2, 2013, of Notary Kartono, S.H., the Company obtained an unsecured loan amounting to Rp40,000,000,000 from Pelindo II with repayment term of 11 (eleven) months and bears interest at the rate of 4.5% per annum. This loan is provided as a bridging loan to be used for settlement of loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, payments of tax liabilities, repair of production tools, payables to business partners, and legal and financial consultant services.

The interest loan and penalty of principal loan has been recognized within the maximum limits in the agreement. For the years ended December 31, 2019 and 2018, penalty interest at 0.5% per month on the loan interest was recognized by the Company on a periodic basis and there is no maximum limit specified in the agreement.

As of December 31, 2019, and 2018, the principal of this loan outstanding amounted to Rp10,000,000,000.

Based on Deed No. 9 dated April 21, 2014, of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the Company obtained again an unsecured loan from Pelindo II amounting Rp40,000,000,000 with repayment term of 11 (eleven) months and bears interest at the rate of 4.5% per annum.

This loan is provided to be used for settlement of legal matters related to TSHD Irian Jaya, TSHD Seram, TSHD Betuah and TSHD Sulawesi II in India, operation of shipyard business unit and settlement of liabilities to PT Daya Radar Utama.

Interest of the loan principal has been recognized according to the maximum limit in the agreement. For the years ended December 31, 2019 and 2018, the interest penalty at 0.1% per month on the loan interest was recognized by the Company on a periodic basis with a maximum limit of 5% in accordance with what is stated in the agreement.

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pokok pinjaman ini sebesar Rp40.000.000.000.

11. SHORT-TERM LOANS (continued)

As of December 31, 2019, and 2018, the principal of this loan outstanding amounted to Rp40,000,000,000.

12. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

12. TRADE PAYABLES

The details of trade payables are as follows:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Mitra Usaha Kalbar	1.861.998.820	-	<i>PT Mitra Usaha Kalbar</i>
PT Bumi Cahaya Unggul	1.828.348.591	-	<i>PT Bumi Cahaya Unggul</i>
PT Suma Adi Jaya	1.805.500.000	-	<i>PT Suma Adi Jaya</i>
PT Prima Karya Maritim	968.320.000	-	<i>PT Prima Karya Maritim</i>
PT Elite Karya Mandiri	797.421.797	-	<i>PT Elite Karya Mandiri</i>
PT Asuransi Ramayana	310.000.000	-	<i>PT Asuransi Ramayana</i>
PT Belant Persada	199.639.080	-	<i>PT Belant Persada</i>
CV Iqbal Putra Pratama	191.342.552	-	<i>CV Iqbal Putra Pratama</i>
PT International Paint Indonesia	139.658.200	-	<i>PT International Paint Indonesia</i>
PT Marunda Mega Industri	119.730.500	4.288.432.250	<i>PT Marunda Mega Industri</i>
PT Fistlight Indonesia	77.886.218	191.754.673	<i>PT Fistlight Indonesia</i>
PT Idros Services	-	26.257.958.976	<i>PT Idros Services</i>
Lain-lain	687.258.457	902.729.081	<i>Others</i>
Subtotal pihak ketiga	<u>8.987.104.215</u>	<u>31.640.874.980</u>	<i>Sub-total third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 27)			<i>Related parties (Note 27)</i>
Pelindo II	1.207.183.854	626.995.886	<i>Pelindo II</i>
PT Danareksa Sekuritas	162.000.000	-	<i>PT Danareksa Sekuritas</i>
BPJS Kesehatan	80.193.853	-	<i>BPJS Kesehatan</i>
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	-	31.500.000	<i>PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia</i>
Lain-lain	1.022.100	3.122.100	<i>Others</i>
Subtotal pihak berelasi	<u>1.450.399.807</u>	<u>661.617.986</u>	<i>Sub-total related parties</i>
Total	<u>10.437.504.022</u>	<u>32.302.492.966</u>	Total

13. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

13. OTHER PAYABLES

The details of other payables are as follows:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2019	December 31, 2018	
Pihak ketiga			<i>Third party</i>
Karyawan	6.524.007.960	5.910.000.337	<i>Employees</i>
Pihak berelasi (Catatan 27)			<i>Related party (Note 27)</i>
Pelindo II	763.656.564	993.543.900	<i>Pelindo II</i>
Total	<u>7.287.664.524</u>	<u>6.903.544.237</u>	Total

Utang kepada karyawan seluruhnya merupakan uang titipan karyawan.

Payables to employees represents payables for deposits from employees.

Utang kepada Pelindo II seluruhnya merupakan utang imbalan kerja karyawan Pelindo II yang ditugaskan di Perusahaan.

Payables to Pelindo II represents payables for employees benefits of Pelindo II's employee which were assigned to the Company.

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rincian pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/
	December 31, 2019	December 31, 2018
Pihak ketiga		
PT Global Jaya Maritimindo	1.041.666.666	1.041.666.667
Guangzhou Dredging Co. Ltd. - China	-	1.097.079.781
Subtotal pihak ketiga	1.041.666.666	2.138.746.448
Pihak berelasi (Catatan 27)		
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	668.911.737	669.942.045
Total	1.710.578.403	2.808.688.493

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang didapatkan oleh Perusahaan atas sewa kapal Bali II dan CSD Batang Hari 30 serta sewa gedung kantor.

14. UNEARNED REVENUE

The details of unearned revenue are as follows:

Third parties
PT Global Jaya Maritimindo
China - Guangzhou Dredging Co. Ltd.
Sub-total third parties
Related parties (Note 27)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Total

Unearned revenues are incomes received by the company on lease of Bali II and CSD Batang Hari 30 and rent of the office building.

15. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/	31 Desember 2018/
	December 31, 2019	December 31, 2018
Operasional proyek dan subkontraktor	9.276.621.153	4.232.787.026
Perbaikan kapal	4.824.339.009	2.388.932.532
Upah karyawan	2.212.647.494	1.890.886.090
Jasa profesional	431.467.000	456.500.000
Lain-lain	1.394.413.703	910.597.195
Total	18.139.488.359	9.879.702.843

Beban akrual operasional proyek dan subkontraktor merupakan biaya atas pekerjaan pengerukan dan biaya terkait pembuatan kapal tunda milik Pelindo II.

15. ACCRUED EXPENSES

The details of accrued expenses are as follows:

Project operation and subcontractor
Vessels repairs
Employees' wages
Professional fees
Others
Total

The accrued expenses for the operations of the project and the subcontractors are costs related to dredging and the related costs to make tugboats owned by Pelindo II.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pajak dibayar dimuka seluruhnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

16. TAXATION

a. Prepaid taxes

As of December 31, 2019, and 2018, prepaid taxes represent Value Added Tax (VAT).

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 15	4.153.548	-	Article 15
Pasal 21	374.916.200	228.321.903	Article 21
Pasal 23	38.866.398	867.502.190	Article 23
Pasal 4 (2)	44.070.000	834.887.258	Article 4 (2)
PPN Keluaran	738.112.093	3.549.708	VAT Out
Lain-lain	-	4.710.833	Others
Total	1.200.118.239	1.938.971.892	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(14.136.874.377)	9.796.937.035	Income (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak 25%	3.534.218.594	(2.449.234.259)	Income tax expense at the tax rate of 25%
Pengaruh perbedaan permanen pada tarif pajak 25%	2.274.108.123	1.982.467.101	Effect of permanent differences at the tax rate of 25%
Pengaruh penyesuaian aset pajak tangguhan	(2.232.975.669)	8.163.704.193	Effect of adjustments on deferred tax assets
Manfaat pajak penghasilan	3.575.351.048	7.696.937.035	Income tax benefit

d. Pajak kini

d. Current tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before income tax and estimated tax income (tax loss) is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan	(10.389.343.440)	14.755.453.817	Income (loss) before final tax and income tax
Dikurangi:			Less:
Laba dari pendapatan jasa konstruksi dan sewa yang dikenakan pajak final	(17.903.429.990)	(23.297.689.319)	Profit from construction and rent revenue subject to final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan	(28.292.773.430)	(8.542.235.502)	Loss before income tax

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

d. Pajak kini (lanjutan)

d. Current tax (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Perbedaan temporer			Temporary differences
Penyisihan penurunan nilai piutang	(535.196.414)	4.229.274.189	Allowance for impairment of receivables
Imbalan kerja karyawan	71.028.356	1.355.881.365	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	14.190.614.992	16.579.949.555	Depreciation of fixed assets
Penurunan nilai aset tetap	-	12.940.609.534	Impairment of fixed assets
Penurunan nilai persediaan	-	737.193.133	Impairment of inventories
Pemulihan penurunan nilai persediaan	(737.193.133)	-	Recovery impairment of inventories
Suku bunga efektif yang belum diamortisasi	1.331.488.309	(1.521.884.508)	Unamortized effective interest rate
Perbedaan permanen			Permanent differences
Beban pajak	15.144.840	1.140.987.493	Tax expenses
Imbalan kerja karyawan	-	477.843.176	Employee benefits
Beban pajak final atas pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	9.251.814	12.691.041	Final tax expenses on finance income subject to final tax
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(1.018.551.292)	(1.363.743.037)	Finance income subject to final tax
Promosi	35.467.128	3.400.000	Promotion
Penyesuaian atas hasil surat ketetapan pajak (Catatan 16f)	-	6.450.774.944	Adjustment for tax assessment letter (Note 16f)
Manfaat dalam bentuk natura	2.584.381.516	2.637.265.580	Benefit in kind
Lain-lain	3.433.772.553	1.049.579.914	Others
Taksiran laba (rugi) fiskal tahun berjalan	(8.912.564.761)	36.187.586.877	Estimated tax income (loss) for the year
Pemanfaatan rugi pajak periode sebelumnya	-	(36.187.586.877)	Utilization of tax loss carry forward
Total taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(8.912.564.761)	-	Total estimated tax loss for the year

Akumulasi rugi fiskal Perusahaan berasal dari kerugian yang terjadi pada tahun-tahun pajak sebagai berikut:

The accumulated tax losses of the Company consist of losses incurred in the following fiscal years:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
2019	8.912.564.761	-	2019
2015	32.340.573.700	32.340.573.700	2015
2014	169.340.253.687	169.339.872.332	2014
Total akumulasi rugi fiskal	210.593.010.793	201.680.446.032	Total tax losses carryforward

Perusahaan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan atas dasar perhitungan sendiri (self-assessment).

The Company submits its Annual Corporate Income Tax Return on a self-assessment basis.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi fiskal.

16. TAXATION (continued)

d. Current tax (continued)

In 2019 and 2018, the Company does not recognize deferred tax assets arising from the cumulative tax losses.

e. Pajak tangguhan

Rincian manfaat pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred tax

The details of deferred tax benefit are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Diakui ke laba rugi			<i>Recognized in profit loss</i>
Penyusutan aset tetap	3.547.653.748	4.144.987.389	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Cadangan imbalan kerja	17.757.089	338.970.341	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang	(133.799.104)	1.057.318.547	<i>Allowance for impairment of receivables</i>
Penurunan nilai aset tetap		3.235.152.383	<i>Impairment of fixed asset</i>
Penurunan nilai persediaan	(184.298.283)	184.298.283	<i>Impairment of inventory</i>
Suku bunga efektif yang belum diamortisasi	332.872.077	(380.471.127)	<i>Unamortized effective interest rate</i>
Penyesuaian	(4.834.479)	(883.318.781)	<i>Adjustments</i>
Subtotal	3.575.351.048	7.696.937.035	<i>Sub-total</i>
Diakui dalam penghasilan komprehensif lain			<i>Recognized in other comprehensive income</i>
Imbalan kerja	2.927.163	639.794	<i>Employee benefits</i>
Total	3.578.278.211	7.697.576.829	Total

Rincian liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax liabilities are as follows:

	31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018	
Piutang	17.354.748.021	<i>Receivables</i>
Aset tetap	(47.476.412.063)	<i>Fixed assets</i>
Imbalan kerja	1.636.284.316	<i>Employee benefits</i>
Penurunan nilai aset tetap	3.235.152.383	<i>Impairment of fixed assets</i>
Penurunan nilai persediaan	-	<i>Impairment of inventory</i>
Suku bunga efektif yang belum diamortisasi	(47.599.050)	<i>Unamortized effective interest rate</i>
Neto	(25.297.826.393)	Net

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak

Pada tanggal 10 September 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2014 dan 2015 sebesar Rp7.201.615.695. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Perusahaan sebesar Rp6.450.774.944 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya (Catatan 25b). Pada tanggal 30 Oktober 2018, Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.060.628.202 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN sebesar Rp1.140.987.493.

16. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter

On September 10, 2018, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2014 and 2015 amounting to Rp7,201,615,695. The difference of the tax assessment with the Company's record amounting to Rp6,450,774,944 has been recorded as part of other operating expenses (Note 25b). On October 30, 2018, the Company has received this overpayment assessment amounting to Rp6,060,628,202 after being compensated with income tax payable of VAT amounting Rp1,140,987,493.

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Rincian pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

17. LONG-TERM LOANS

The details of long-term loans are as follows:

	31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018		
Pihak berelasi (Catatan 27)			<i>Related parties (Note 27)</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			<i>PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
Pokok	30.301.458.444	30.301.458.444	<i>Principal</i>
Bunga	23.984.060.962	22.201.573.329	<i>Interests</i>
Denda	27.300.000	27.300.000	<i>Penalties</i>
Subtotal	54.312.819.406	52.530.331.773	<i>Sub-total</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			<i>PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)</i>
Pokok	21.750.000.000	23.250.000.000	<i>Principal</i>
Bunga	5.743.064.733	6.078.804.911	<i>Interests</i>
Denda	20.475.000	20.475.000	<i>Penalties</i>
Subtotal	27.513.539.733	29.349.279.911	<i>Sub-total</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)			<i>PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)</i>
Pokok	3.000.000.000	6.000.000.000	<i>Principal</i>
Bunga	-	2.916.175.000	<i>Interests</i>
Denda	-	6.825.000	<i>Penalties</i>
Subtotal	3.000.000.000	8.923.000.000	<i>Sub-total</i>
Total	84.826.359.139	90.802.611.684	<i>Total</i>
Suku bunga efektif yang belum diamortisasi	-	(1.008.625.974)	<i>Unamortized cost of effective interest rate</i>
Total	84.826.359.139	89.793.985.710	<i>Total</i>
Dikurangi: Bagian lancar	74.576.359.139	75.242.399.980	<i>Less: Current maturities</i>
Bagian jangka panjang	10.250.000.000	14.551.585.730	<i>Long-term portion</i>

**PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2007 dari Notaris Kartono, S.H., Rukindo memperoleh pinjaman modal kerja sindikasi sebesar Rp16.000.000.000, Rp32.000.000.000, Rp24.000.000.000 dan Rp8.000.000.000 masing-masing dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito bank pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, yang ditetapkan pada setiap awal tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 3 (tiga) unit kapal keruk yaitu KK Natuna, KK Timor dan KK Halmahera (Catatan 10).

Pelindo II

Berdasarkan perjanjian pinjaman modal kerja sindikasi tersebut pada pasal 5 menjelaskan bahwa pinjaman modal yang diberikan bagian dari Pelindo II adalah sebesar Rp32.000.000.000 atau 40% dari total pinjaman modal kerja sindikasi. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman ini sebesar Rp54.312.819.406 dan Rp52.530.331.773 dimana pinjaman ini berserta akrual bunga dan denda diklasifikasikan masing-masing sebagai bagian jangka pendek pada pinjaman jangka panjang.

Pelindo III

Berdasarkan Surat Perjanjian No 14/12/3/DIRUT-2018 dan No PKS.55/HK.05018/P.III-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang restrukturisasi pinjaman modal kerja kepada Pelindo III, disepakati bahwa utang pokok Rukindo tetap sebesar Rp24.000.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semula sebesar Rp16.595.467.097 menjadi sebesar Rp6.267.150.000. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp10.328.467.097 pada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2018 (Catatan 25a).

Berdasarkan kesepakatan di atas, Perusahaan akan membayar utang pokok sebesar Rp10.000.000.000 setelah memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pelindo II dan/atau sumber dana lainnya yang diperoleh Perusahaan. Sedangkan sisa utang pokok sebesar Rp14.000.000.000 akan diangsur selama 7 tahun dengan dikenakan bunga sebesar rata-rata suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) mata uang Rupiah tenor 6 bulan. Sedangkan utang bunga sebesar Rp6.267.150.000 akan diusulkan untuk dihapus maksimal 50% dari total utang bunga dan sisanya dibayarkan secara proposional selama 7 (tujuh) tahun.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

Based on Deed No. 22 dated August 13, 2007, of Notary Kartono, S.H., the Company obtained syndicated working capital loans amounting to Rp16,000,000,000, Rp32,000,000,000, Rp24,000,000,000 and Rp8,000,000,000 from PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), respectively, with repayment term of 5 (five) years and bears interest at the rate equal to the average interest rate on 1-year time deposits of government-owned banks, which shall be determined at the beginning of each year. The loans are secured by 3 (three) units of dredgers, which are TSHD Natuna, TSHD Timor and TSHD Halmahera (Note 10).

Pelindo II

Based on the syndicated working capital loan agreement in article 5, it explains that the capital loan provided by Pelindo II is Rp32,000,000,000 or 40% of the total syndicated working capital loan. As of December 31, 2019, and 2018, the outstanding balance of these loans amounted to Rp54,312,819,406 and Rp52,530,331,773, where these loans along with accrued interests and penalties were classified as part of the short-term portion of the long-term loans, respectively.

Pelindo III

Based on the Agreement No. 14/12/3/DIRUT-2018 and No. PKS.55/HK.05018/P.III-2018 dated December 14, 2018 concerning the capital loan restructuring to Pelindo III, it was agreed that the Rukindo's principal debt still same which amounted to Rp24,000,000,000 while interest debts and penalties originally amounted to Rp16,595,467,097 became Rp6,267,150,000. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting to Rp10,328,467,097 to the 2018 statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25a).

Based on the agreement above, the Company will pay the principal loan amounting to Rp10,000,000,000 after obtaining additional capital injection from Pelindo II and/or other sources of funds obtained from the Company. The remaining principal loan of Rp14,000,000,000 will be paid in installments for 7 years which bears interest at the average rate of Jakarta Interbank Interest Rate (JIBOR) in Rupiah currency with a tenor of 6 months. While the interest payable of Rp6,267,150,000 will be submitted to be written off with maximum of 50% of the total interest and the remaining will be paid proportionally for 7 (seven) years.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pelindo III (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp27.513.539.733 dan Rp29.349.279.911.

Pelindo IV

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No 10/12/1/DIRUT-2018 dan No 8.HK.301/12/DKU-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penyelesaian pinjaman modal kepada Pelindo IV, disepakati bahwa utang pokok Rukindo yang semula sebesar Rp10.923.000.000 menjadi sebesar Rp8.000.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semua sebesar Rp5.531.822.366 menjadi sebesar Rp2.932.000.000. Jangka waktu pelunasan utang pokok, bunga dan denda tersebut adalah selama 3 tahun. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp2.608.822.000 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2018 (Catatan 25a).

Berdasarkan kesepakatan pada bulan Desember 2019, Rukindo memperoleh persetujuan dari Pelindo IV untuk menghapus bunga dan denda sebesar Rp2.923.000.000. Jumlah tersebut di atas telah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2019 (Catatan 25a).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp3.000.000.000 dan Rp8.923.000.000. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 9 Januari 2020.

18. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Pihak berelasi (Catatan 27)		
Dana Pensiun Perusahaan	2.905.378.975	4.973.359.121
Pelabuhan dan Pengerukan		
Suku bunga efektif	(190.396.198)	(513.258.534)
yang belum diamortisasi		
Total	2.714.982.777	4.460.100.587
Dikurangi: Bagian lancar	1.768.076.218	1.624.941.088
Bagian jangka panjang	946.906.559	2.835.159.499

17. LONG-TERM LOANS (continued)

Pelindo III (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp27,513,539,733 and Rp29,349,279,911.

Pelindo IV

Based on the Minutes of Agreement No. 10/12/1/DIRUT-2018 and No.8.HK.301/12/DKU-2018 dated December 10, 2018 concerning the settlement of capital loans to Pelindo IV, it was agreed that the Rukindo's principal debt which originally amounted to Rp10,923,000,000 became Rp8,000,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp5,531,822,366 became Rp2,932,000,000. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting to Rp2,608,822,000 to the 2018 statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25a).

Based on agreement on December 2019, Rukindo obtained approval from Pelindo IV to write off of interests and penalties amounting to Rp2,923,000,000. All amounts have been charged to the 2019 statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25a).

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp3,000,000,000 and Rp8,923,000,000. This loan was fully repaid on January 9, 2020.

18. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Related parties (Note 27)		
Dana Pensiun Perusahaan		
Pelabuhan dan Pengerukan		
Unamortized cost of effective interest rate		
Total		
Less: Current maturities		
Long-term portion		

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)

Berdasarkan surat No KPS.3/4/7/1/DP4-18 tanggal 4 Juli 2018 perihal tagihan denda bunga keterlambatan iuran pensiun, Perusahaan mempunyai kewajiban kepada DP4 sebesar Rp5.810.757.950 yang akan dibayar secara bertahap selama 36 bulan. Sedangkan pencatatan Perusahaan atas kewajiban tersebut sebesar Rp8.521.947.297. Sehingga atas selisih kewajiban tersebut, Perusahaan mencatat laba sebesar Rp2.711.189.347 (Catatan 25a).

18. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES (continued)

Based on letter No KPS.3/4/7/1/DP4-18 dated July 4, 2018 regarding the interest penalty for late pension benefit contributions, the Company has an obligation to DP4 of Rp5,810,757,950 which will be paid in installment for 36 months. Whereas the Company's records of this obligation amounting to Rp8,521,947,297. For the difference between the liabilities, the Company recorded gain amounting to Rp2,711,189,347 (Note 25a).

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menunjuk PT Pointera Aktuarial Strategis, aktuaris independen, untuk menghitung liabilitas imbalan kerja bagi karyawan tetapnya yang memenuhi kualifikasi. Penilaian aktuaris tersebut ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

As of December 31, 2019, the Company appointed PT Pointera Aktuarial Strategis, an independent actuary, to calculate the employee benefits liability for their qualified permanent employees. The actuarial valuation was determined using the *Projected Unit Credit* method based on the following assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto	7,35%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	<i>Salary growth rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5,00%	<i>Resignation rate</i>
Tingkat kecacatan	10% TMI 2011	<i>Disability rate</i>
Tabel mortalita	100% TMI 2011	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	56 tahun/year	<i>Normal retirement age</i>

Rincian liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liability are as follows:

	31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018	
Nilai kini liabilitas	281.792.641 155.145.617	<i>Present value of liability</i>

Beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	103.535.169	147.252.851	<i>Current service costs</i>
Biaya bunga	11.403.203	5.333.591	<i>Interest costs</i>
Beban yang diakui	114.938.372	152.586.442	<i>Long-term portion</i>

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Saldo awal tahun	155.145.617	-
Beban yang diakui dalam laba rugi	114.938.371	152.586.442
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	11.708.653	2.559.175
Liabilitas akhir tahun	114.938.372	155.145.617

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The movements of employee benefit liabilities are as follows:

Beginning balance of the year
Expense recognized in the profit or loss
Loss recognized in the other comprehensive income
Long-term portion

Pada tanggal 31 Desember 2019, dampak perubahan asumsi keuangan terhadap nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019, effects of change in financial assumptions on the present value of liability are as follows:

	1% lebih tinggi/ 1% higher	1% lebih rendah/ 1% lower	
Perubahan tingkat kenaikan gaji	28.572.480	(25.401.146)	Change in salary growth rate
Perubahan tingkat diskonto	(23.988.143)	27.377.098	Change in discount rate

Analisa jatuh tempo pembayaran imbalan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Maturity analysis of the benefit payments as of December 31, 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
Kurang dari 1 tahun	-	Less than 1 year
Antara 1-5 tahun	-	Between 1-5 years
Antara 5-10 tahun	1.128.328.747	Between 5-10 years
Lebih dari 10 tahun	9.361.930.010	More than 10 years

20. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

20. CAPITAL STOCK

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total nilai nominal/ Total nominal amount	Shareholders
Pelindo II	611.622	99,91%	611.622.000.000	Pelindo II
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	542	00,09%	542.000.000	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Total	612.164	100%	612.164.000.000	Total

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp2.000.000.000.000 yang terbagi atas 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, modal yang ditempatkan dan disetor penuh masing-masing adalah sebesar 542.164 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham No. 48 tanggal 28 Desember 2017 dari Dahlia, S.H., sebagai pengganti dari Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta, menyetujui diantaranya:

- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 70.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 sehingga seluruhnya menjadi Rp70.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Pelindo II.
- Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian tersebut, menyetujui penambahan penyertaan modal Pelindo II sebagai berikut:
 - Sebesar Rp40.000.000.000 merupakan hasil konversi dari utang Perusahaan kepada Pelindo II sesuai Akta No. 5 tanggal 5 September 2012 dari Notaris Kartono, S.H.
 - Sebesar Rp30.000.000.000 merupakan hasil konversi dari utang Perusahaan kepada Pelindo II sesuai Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2013 dari Notaris Kartono, S.H.
- Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal yang ditempatkan/disetor Perusahaan semula sebesar Rp542.164.000.000 menjadi sebesar Rp612.164.000.000 sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - Pelindo II sebanyak 611.622 saham atau Rp611.622.000.000.
 - PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sebanyak 542 saham atau Rp542.000.000.

20. CAPITAL STOCK (continued)

Authorized shares of the Company amounted to Rp2,000,000,000,000 divided into 2,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 per share. As of December 31, 2019, and 2018, the issued and fully paid is 542,164 shares at par value of Rp1,000,000, respectively.

Based on Statement of Deed of General Shareholders Meeting Decision without Shareholder's General Meeting No. 48 dated December 28, 2017 of Dahlia, S.H., as a substitute of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, agrees on the following:

- Issuance/placement of shares which are still in unissued amounting 70,000 shares at a par value of Rp1,000,000 so that all of them become Rp70,000,000,000 which was entirely taken by Pelindo II.
- To fulfill the issuance/placement of shares, it was approved that Pelindo II will have additional investment as follows:
 - In the amount of Rp40,000,000,000 as the result of conversion of the Company's debt to Pelindo II pursuant to Deed No. 5 dated September 5, 2012 of Notary Kartono, S.H.
 - In the amount of Rp30,000,000,000 as the result of conversion of the Company's debt to Pelindo II pursuant to Deed No. 1 dated May 2, 2013, Notary Kartono, S.H.
- With the increase of issued capital, the issued/fully paid of The Company amounting to Rp542,164,000,000 became Rp612,164,000,000 so that the Company's shareholders structure is as follows:
 - Pelindo II has 611,622 shares or Rp611,622,000,000.
 - PT Pengembang Pelabuhan Indonesia has 542 shares or Rp542,000,000.

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

- Penerbitan surat berharga berupa Obligasi Wajib Konversi ("OWK") sebesar Rp195.000.000.000 yang untuk pertama kali dibeli Pelindo II yang akan dikonversi menjadi modal Perusahaan pada akhir tahun ke-10.
- Menyetujui pembayaran utang kepada Pelindo II dari hasil penerbitan OWK sebagai berikut:
 - Sebesar Rp175.000.000.000 untuk membayar utang sesuai Akta No. 69 tanggal 18 Desember 2014 dari Devi Yuana Lisa, S.H., pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
 - Sebesar Rp20.000.000.000 untuk membayar utang sesuai Perjanjian No. HK.566/29/12/1/PI.II-15 dan No. KU.104/1/4/SDMK-2015 tanggal 29 Desember 2015.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018 serta disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0002086.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

20. CAPITAL STOCK (continued)

- Issuance of securities in the form of Mandatory Convertible Bonds ("MCB") amounting to Rp195,000,000,000 which is for the first time will be purchased by Pelindo II and will be converted into the Company's capital at the end of the 10th year.
- Approving debt payment to Pelindo II from MCB issuance as follows:
 - Rp175,000,000,000 to settle the loan in accordance with Deed No. 69 dated December 18, 2014 from Devi Yuana Lisa, S.H., as a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
 - Rp20,000,000,000 to settle the loan in accordance with Agreement No. HK.566/29/12/1/PI.II-15 dan No. KU.104/1/4/SDMK-2015 date December 29, 2015.

The amendment of the articles of association has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Notification of Acceptance of the Articles of Association Amendments No. AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Through Decision No. AHU-0002086.AH.01.11.Tahun 2018 dated January 10, 2018.

21. OBLIGASI WAJIB KONVERSI

21. MANDATORY CONVERTIBLE BONDS

		31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018					
Obligasi wajib konversi		<u>195.000.000.000</u>	<u>195.000.000.000</u>	<i>Mandatory convertible bonds</i>			
Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Pemegang OWK/MCB Holder	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/ Interest Payment Period	Tingkat Bunga tahun ke-1 sampai tahun ke-5/ Interest Rate of the 1st to 5th year	Tingkat Bunga tahun ke-5 samai tahun ke-10/ Interest Rate of 5th year to 10th year
Rp195.000.000.000	Perusahaan/ the Company	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	28 Desember 2017/ December 28, 2017	28 Desember 2027/ December 28, 2027	Setengah tahunan/Semi- Annually	5%	7%

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. OBLIGASI WAJIB KONVERSI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 47 dari Fathiah Helmi, S.H. tanggal 28 Desember 2017, Perusahaan menerbitkan efek surat utang berbentuk Obligasi Wajib Konversi ("OWK") sebesar Rp195.000.000.000 kepada Pelindo II. OWK ini memiliki jatuh tempo selama 10 tahun sejak tanggal penerbitan dengan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sampai dengan ulang tahun kelima OWK dan sebesar 7% per tahun terhitung setelah ulang tahun kelima OWK sampai dengan tanggal jatuh tempo atau tanggal konversi dimana pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pada saat tanggal jatuh tempo, OWK tersebut akan dikonversikan menjadi 195.000 saham Perusahaan dengan nominal Rp1.000.000 per saham.

Seluruh dana hasil dari penjualan OWK dipakai untuk membayar utang kepada Pelindo II.

22. CADANGAN UMUM

Akun ini merupakan reklasifikasi dari utang dividen atas laba tahun 1996 yang dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 November 2002.

23. PENDAPATAN

Rincian pendapatan menurut jenis jasa adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2019	2018
Pengerukan dan reklamasi	103.452.811.634	141.932.771.371
Bareboat charter	29.232.451.453	49.039.558.627
Jasa galangan	18.590.433.904	18.891.228.930
Sewa dan kerja sama usaha galangan	2.732.182.061	3.321.144.992
Pembangunan kapal	1.189.224.118	13.044.580.512
Jasa Floating repair	1.007.410.650	683.850.300
Total	156.204.513.820	226.913.134.732

21. MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (continued)

Based on Deed of Agreement of Mandatory Convertible Bond No. 47 of Fathiah Helmi, S.H. dated December 28, 2017, the Company issued debt securities in form of Mandatory Convertible Bonds ("MCB") amounting to Rp195,000,000,000 Pelindo II. The MCB has maturities of 10 years from the date of issue with interest at 5% per annum starting from the date of issue until the fifth year of MCB and 7% per annum counted after the fifth year of MCB up to the maturity date or conversion date where interest payments are made every 6 months.

Upon maturity date, the MCB will be converted to 195,000 of the Company's shares at par value of Rp1,000,000 per share.

All proceeds from the sale of MCB are used to settle the loan to Pelindo II.

22. GENERAL RESERVE

This account represents reclassification from dividend payables on the income for 1996 which was created based on the decision of Shareholders General Meeting dated November 7, 2002.

23. REVENUES

The details of revenue by types of service are as follows:

Dredging and reclamation
 Bareboat charter
 Shipyard services
 Shipyard rental and cooperation
 Ship building services
 Floating repair services

Total

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian pendapatan menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

23. REVENUES (continued)

The details of revenue by customers are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Guangzhou Dredging Co. Ltd. - China	16.512.451.451	36.539.558.627	<i>Guangzhou Dredging Co. Ltd. - China</i>
PT Global Jaya Maritimindo	12.500.000.000	12.500.000.000	<i>PT Global Jaya Maritimindo</i>
PT Borneo Sukses Makmur	4.080.747.318	-	<i>PT Borneo Sukses Makmur</i>
PT Indonesian Fortune Lloyd	3.448.962.390	517.272.727	<i>PT Indonesian Fortune Lloyd</i>
PT Putindo Trada Wisesa	2.585.245.840	-	<i>PT Putindo Trada Wisesa</i>
PT Marunda Jaya	2.582.750.773	689.716.000	<i>PT Marunda Jaya</i>
PT Ina Multi Trans	2.457.713.727	1.509.717.000	<i>PT Ina Multi Trans</i>
PT Merpati Marine Service	1.856.162.757	-	<i>PT Merpati Marine Service</i>
PT Pelayanan Tresnamuda Sejati	1.500.000.000	-	<i>PT Pelayanan Tresnamuda Sejati</i>
PT Samudera Ferry	-	3.499.516.200	<i>PT Samudera Ferry</i>
PT Putra Master Sarana Penyebrangan	-	2.561.700.000	<i>PT Putra Master Sarana Penyebrangan</i>
PT Munic Line	-	1.890.829.464	<i>PT Munic Line</i>
PT Transportasi Marina Jaya	-	1.525.580.000	<i>PT Transportasi Marina Jaya</i>
PT Karya Bayu Abadi Line	-	1.515.903.100	<i>PT Karya Bayu Abadi Line</i>
PT Harapan Baru Lines	-	1.273.788.112	<i>PT Harapan Baru Lines</i>
PT Agung Transina Raya	-	915.000.000	<i>PT Agung Transina Raya</i>
Lain-lain	1.006.943.022	1.145.062.526	<i>Others</i>
Subtotal pihak ketiga	48.530.977.278	66.083.643.756	<i>Sub-total third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 27)			<i>Related parties (Note 27)</i>
Pelindo II	97.406.035.752	154.977.351.883	<i>Pelindo II</i>
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	7.236.000.000	-	<i>PT Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	2.896.044.691	3.786.928.094	<i>PT Jasa Armada Indonesia Tbk</i>
PT ASDP Indonesia Ferry	135.456.099	1.584.510.999	<i>PT ASDP Indonesia Ferry</i>
PT Dock Kodja Bahari	-	480.700.000	<i>PT Dock Kodja Bahari</i>
Subtotal pihak berelasi	107.673.536.542	160.829.490.976	<i>Sub-total related parties</i>
Total	156.204.513.820	226.913.134.732	Total

24. BEBAN USAHA

24. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Kerjasama mitra usaha	65.966.314.792	102.359.661.658	<i>Partnership</i>
Gaji dan tunjangan	28.455.378.915	30.679.861.253	<i>Salaries and benefits</i>
Bahan	20.300.444.464	22.206.427.358	<i>Material</i>
Penyusutan (Catatan 10)	18.840.560.052	20.476.432.676	<i>Depreciation (Note 10)</i>
Umum	11.698.614.648	9.668.575.019	<i>General</i>
Amortisasi	10.513.069.837	4.467.808.962	<i>Amortization</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	5.428.218.953	6.551.392.490	<i>Repair and maintenance</i>
Asuransi	3.373.294.119	2.820.773.873	<i>Insurance</i>
Administrasi kantor	2.419.033.526	1.957.913.087	<i>Office administration</i>
Total	166.994.929.306	201.188.846.376	Total

Beban kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban subkontrak alat bantu pengerukan dalam menyediakan kegiatan pelayanan pengerukan dan pemeliharaan alur kolam.

Partnership expenses mainly represent subcontracting costs for dredging supporting equipment in terms of providing dredging services and port basin maintenance.

PT Pengerukan Indonesia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
Notes to the Financial Statements
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA

25. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

a. Pendapatan operasi lainnya

a. Other operating income

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Laba penjualan aset tetap (Catatan 10)	9.189.851.325	3.100.000.000	Gain on sale of fixed assets (Note 10)
Pendapatan atas sisa suku cadang	3.258.612.000	-	Income from remaining spare part
Pendapatan atas pembebasan utang bunga dan denda pinjaman (Catatan 17 dan 18)	2.923.000.000	15.648.478.810	Income from waive of loan interest and penalties (Notes 17 and 18)
Pemulihan penurunan nilai persediaan Klaim/denda	737.193.133	-	Recovery of impairment of inventories Claims/penalties
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 5)	239.714.873	315.703.561	Recovery of allowance for impairment of receivables (Note 5)
Laba selisih kurs - neto	200.001.000	150.000.000	Gain on foreign exchange - net
Pendapatan atas pembatalan proyek	171.057.829	276.866.283	Income from project cancellation
Pendapatan penjualan limbah scrap	-	2.254.060.000	Income from sale on scrap
Lain-lain	-	484.180.000	Others
	790.918.732	70.729.174	
Total	17.510.348.892	22.300.017.828	Total

Pendapatan atas pembatalan proyek merupakan pendapatan yang diakui Perusahaan atas proyek yang dibatalkan oleh pelanggan yang sudah melakukan pembayaran uang muka dimana uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan.

Income from project cancellation represents income recognized by the Company for the project canceled by the customers who already paid the advance whereby the advance can not be returned.

b. Beban operasi lainnya

b. Other operating expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Denda	3.389.133.504	-	Penalties
Penyusutan penurunan nilai persediaan dan aset tetap (Catatan 7 dan 10)	-	13.677.802.667	Allowance for impairment of inventories and fixed assets (Notes 7 and 10)
Penyesuaian atas hasil surat ketetapan pajak (Catatan 16f)	-	6.450.774.944	Adjustment for tax assessment letter (Note 16f)
Beban pajak	-	1.436.102.338	Tax expenses
Penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 5)	-	295.114.845	Allowance for impairment of receivables (Notes 5)
Lain-lain	831.995.420	1.370.481.607	Others
Total	4.221.128.924	23.230.276.401	Total

26. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

26. FINANCE INCOME AND EXPENSES

a. Pendapatan keuangan

a. Finance income

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Bunga deposito - neto	1.045.342.078	1.307.293.192	Interest on time deposit - net
Jasa giro	127.079.501	222.735.116	Interests on current accounts
Keuntungan dari penyesuaian suku bunga efektif	-	1.807.646.068	Gain on effective interest rate adjustment
Total	1.172.421.579	3.337.674.376	Total

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN
(lanjutan)

26. FINANCE INCOME AND EXPENSES (continued)

b. Beban keuangan

b. Finance expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Bunga pinjaman	13.987.046.776	13.069.123.850	<i>Interests on loan</i>
Administrasi bank	101.735.199	307.126.492	<i>Bank charges</i>
Total	14.088.781.975	13.376.250.342	Total

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ <i>Nature of relationship</i>	Nama pihak berelasi/ <i>Name of related party</i>	Jenis transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
Entitas induk/ <i>Parent</i>	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Penjualan jasa pengerukan, pinjaman/ <i>Sale of dredging services, long-term loan</i>
Entitas sepengendali PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ <i>Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Sewa kantor, penjualan jasa galangan/ <i>Office rental, sale of shipyard services</i>
	PT IPC Terminal Petikemas	Sewa kantor/ <i>Office rental</i>
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	Pembelian jasa pelatihan/ <i>Purchase of training services</i>
	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Penjualan jasa penyewaan kapal/ <i>Sale of vessel charter services</i>
Entitas sepengendali Pemerintah/ <i>Entities under common control of the Government</i>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ <i>Financial transaction</i>
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ <i>Financial transaction</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ <i>Financial transaction</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ <i>Financial transaction</i>
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Penjualan jasa pengerukan, pinjaman jangka panjang/ <i>Sale of dredging services, long-term loan</i>
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Penjualan jasa pengerukan, pinjaman jangka panjang/ <i>Sale of dredging services, long-term loan</i>
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman jangka panjang/ <i>Long-term loan transaction</i>

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ <i>Entities under common control of the Government (continued)</i>	PT PAL Indonesia (Persero)	Penjualan jasa pengerukan, penjualan jasa galangan/ <i>Sale of dredging services, sale of shipyard services</i>
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa pengerukan, penjualan jasa galangan/ <i>Sale of dredging services, sale of shipyard services</i>
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Pembelian jasa pengurusan sertifikat dan dokumen kapal/ <i>Purchase of ship certificates and documentation services</i>
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ <i>Purchase of insurance services</i>
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	Penempatan dana pensiun karyawan/ <i>Placement of employees pension Fund</i>
	PT Danareksa Sekuritas	Jasa konsultan/ <i>Consultant service</i>
	PT ASDP Indonesia Ferry	Penjualan jasa pengerukan, penjualan jasa galangan/ <i>Sale of dredging services, sale of shipyard services</i>
	BPJS Kesehatan	Pembelian jasa kesehatan/ <i>Purchase of health services</i>

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The detail of balances and transactions with related parties are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember/December 31		
	2019	2018	
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.591.120.027	4.842.457.250	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	311.624.747	573.246.865	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	164.974.163	42.439.357	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	143.310.048	71.333.406	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	3.211.028.985	5.529.476.878	Subtotal

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Deposito berjangka		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.500.000.000	1.650.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000.000	13.500.000.000
Subtotal	15.000.000.000	15.150.000.000
Total	18.211.028.985	20.679.476.878
Presentase dari total aset	5,05%	5,22%

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Cash and cash equivalents (Note 4) (continued)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Time deposits		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.650.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.500.000.000	13.500.000.000
Subtotal	15.150.000.000	15.150.000.000
Total	20.679.476.878	20.679.476.878
Percentage from total assets	5,22%	5,22%

Piutang usaha (Catatan 5)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Pelindo II	9.886.112.706	35.507.364.365
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	1.507.000.000	-
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1.343.088.772	324.585.377
PT ASDP Indonesia Ferry	-	1.092.057.361
PT PAL Indonesia (Persero)	-	116.695.815
Total	12.736.201.478	37.040.702.918
Presentase dari total aset	3,53%	9,35%

Trade receivables (Note 5)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Pelindo II	35.507.364.365	35.507.364.365
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	-	-
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	324.585.377	324.585.377
PT ASDP Indonesia Ferry	1.092.057.361	1.092.057.361
PT PAL Indonesia (Persero)	116.695.815	116.695.815
Total	37.040.702.918	37.040.702.918
Percentage from total assets	9,35%	9,35%

Pendapatan masih akan diterima (Catatan 6)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Pelindo II	25.722.963.282	16.266.189.117
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	5.866.000.000	-
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	952.519.665	547.843.431
Total	32.541.482.947	16.814.032.548
Presentase dari total aset	9,03%	4,24%

Accrued revenues (Note 6)

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Pelindo II	16.266.189.117	16.266.189.117
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	-	-
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	547.843.431	547.843.431
Total	16.814.032.548	16.814.032.548
Percentage from total assets	4,24%	4,24%

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan masih akan diterima dari Pelindo II merupakan pendapatan masih akan diterima atas jasa pengerukan di pelabuhan Pontianak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Ciwandan, Jakarta International Container Terminal (JICT), Cirebon, pembangunan kapal di Tanjung Priok dan Bengkulu.

As of December 31, 2019 and 2018, accrued revenues from Pelindo II represents accrued income for dredging services at port of Pontianak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Ciwandan, Jakarta International Container Terminal (JICT), Cirebon, ship building in Tanjung Priok and Bengkulu.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Pinjaman jangka pendek (Catatan 11)

Short-term loans (Note 11)

31 Desember/December 31

	2019	2018	
Pelindo II	83.991.191.817	83.841.858.484	Pelindo II
Presentase dari total liabilitas	35,61%	32,13%	Percentage from total liabilities

Utang usaha (Catatan 12)

Trade payables (Note 12)

31 Desember/December 31

	2019	2018	
Pelindo II	1.207.183.854	626.995.886	Pelindo II
PT Danareksa Sekuritas	162.000.000	-	PT Danareksa Sekuritas
BPJS Kesehatan	80.193.853	-	BPJS Kesehatan
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	-	31.500.000	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Lain-lain	1.022.100	3.122.100	Others
Total	1.450.399.807	661.617.986	Total
Presentase dari total liabilitas	0,61%	0,25%	Percentage from total liabilities

Utang lain-lain (Catatan 13)

Other payables (Note 13)

31 Desember/December 31

	2019	2018	
Pelindo II	763.656.564	993.543.900	Pelindo II
Presentase dari total liabilitas	0,32%	0,38%	Percentage from total liabilities

Pendapatan diterima di muka (Catatan 14)

Unearned revenue (Note 14)

31 Desember/December 31

	2019	2018	
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	668.911.737	669.942.045	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Presentase dari total liabilitas	0,28%	0,26%	Percentage from total liabilities

Pinjaman jangka panjang (Catatan 17)

Long-term loans (Note 17)

31 Desember/December 31

	2019	2018	
Pelindo II	54.312.819.406	52.530.331.773	Pelindo II
Pelindo III	27.513.539.733	28.973.477.624	Pelindo III
Pelindo IV	3.000.000.000	8.290.176.313	Pelindo IV
Total	84.826.359.139	89.793.985.710	Total
Presentase dari total liabilitas	35,96%	34,41%	Percentage from total liabilities

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 18)

Other non-current liabilities (Note 18)

31 Desember/December 31

	2019	2018
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	2.714.982.777	4.460.100.587
Presentase dari total liabilitas	1,15%	1,71%

*Dana Pensiun Perusahaan
Pelabuhan dan Pengerukan*

Percentage from total liabilities

Pendapatan (Catatan 23)

Revenues (Note 23)

**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,**

	2018	2018
Pelindo II	97.406.035.752	154.977.351.883
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	7.236.000.000	-
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	2.896.044.691	3.786.928.094
PT ASDP Indonesia Ferry	135.456.099	1.584.510.999
PT Dock Kodja Bahari	-	480.700.000
Total	107.673.536.542	160.829.490.976
Presentase dari total pendapatan	68,93%	70,88%

*Pelindo II
PT Trans Pacific Petrochemical
Indotama
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT ASDP Indonesia Ferry
PT Dock Kodja Bahari*

Total

Percentage from total revenue

28. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

Perjanjian pekerjaan signifikan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Significant work agreements entered into by the Company are as follows:

No.	Pihak/ Counterparty	Deskripsi pekerjaan/ Work description	Awal kontrak/ Start of contract	Akhir kontrak/ End of contract	Nilai kontrak/ Contract Value
Pengerukan dan reklamasi/Dredging and reclamation					
1.	Pelindo II	Pekerjaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam di Wilayah Kerja Pelindo II / <i>Provided Work of Maintenance Waterway and Pond in Pelindo II's Working Area</i>	30 Oktober 2017/ <i>October 30, 2017</i>	29 Oktober 2022/ <i>October 29, 2022</i>	Sesuai progress fisik per proyek pekerjaan/ <i>As per progress physic per project work</i>
2.	Pelindo II	Pengerukan Alur dan Kolam Tanjung Priok Tahap 1 dan 2/ <i>Dredging of waterway and pond of Tanjung Priok Phase 1 and 2</i>	1 Desember 2017/ <i>December 1, 2017</i>	28 Maret 2019/ <i>March 28, 2019</i>	Rp34.386.878.000

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian pekerjaan signifikan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Significant work agreements entered into by the Company are as follows: (continued)

No.	Pihak/ Counterparty	Deskripsi pekerjaan/ Work description	Awal kontrak/ Start of contract	Akhir kontrak/ End of contract	Nilai kontrak/ Contract Value
Pengerukan dan reklamasi (lanjutan)/Dredging and reclamation (continued)					
3.	Pelindo II	Pengerukan Alur Pelabuhan Pontianak/ <i>Dredging of waterway of Pontianak</i>	4 Mei 2018/ <i>May 4, 2018</i>	18 Oktober 2019/ <i>October 18, 2019</i>	Rp57.720.838.810
4.	Pelindo II	Pengerukan Alur Pelabuhan Bengkulu/ <i>Dredging of waterway of Bengkulu</i>	4 April 2019/ <i>April 4, 2019</i>	4 Juli 2019/ <i>July 4, 2019</i>	Rp30.556.825.300
5.	Pelindo II	Pengerukan Alur Pelabuhan Teluk Bayur/ <i>Dredging of waterway of Teluk Bayur</i>	18 Juni 2019/ <i>June 18, 2019</i>	18 Agustus 2019/ <i>August 18, 2019</i>	Rp4.361.805.176
6.	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Pengerukan Alur Perairan, Basin dan Berth / <i>Dredging of waterway, Basin and Berth</i>	27 Agustus 2019/ <i>August 27, 2019</i>	27 Desember 2019/ <i>December 27, 2019</i>	Rp27.400.000.000
Jasa docking/Docking services					
7.	PT Merpati Marine Service	Docking perbaikan KM Laut Bersih 34/ <i>Docking repair of KM Laut Bersih 34</i>	19 September 2019/ <i>September 19, 2019</i>	8 Oktober 2019/ <i>October 8, 2019</i>	Rp340.054.000
8.	PT Puan Ramadha Karya	Docking perbaikan TB Mulia Bersama/ <i>Docking repair of TB Mulia Bersama</i>	3 Mei 2019/ <i>May 3, 2019</i>	12 Mei 2019/ <i>May 12, 2019</i>	Rp117.430.000
9.	PT Borneo Sukses Makmur	Penggunaan workshop untuk pembangunan kapal/ <i>Use of workshops for ship building</i>	13 Mei 2019/ <i>May 13, 2019</i>	13 Oktober 2019/ <i>October 13, 2019</i>	Rp570.000.000
10.	PT Pelayaran Tresnamuda Sejati	Docking perbaikan KM TMS Glory/ <i>Docking repair of KM TMS Glory</i>	21 Februari 2019/ <i>February 21, 2019</i>	7 Maret 2019/ <i>March 7, 2019</i>	Rp1.186.966.158
11.	PT Jelajah Laut Nusantara	Docking perbaikan KM Rania/ <i>Docking repair of KM Rania</i>	12 Agustus 2019/ <i>August 12, 2019</i>	5 September 2019/ <i>September 5, 2019</i>	Rp661.400.000
12.	PT Putindo Trada Wisesa	Docking perbaikan KN Parang/ <i>Docking repair of KN Parang</i>	24 Juli 2019/ <i>July 24, 2019</i>	10 Juli 2019/ <i>July 10, 2019</i>	Rp2.585.245.840
13.	PT Wintermar Offshore Marine	Docking perbaikan SMS Supporter/ <i>Docking repair of SMS Supporter</i>	9 September 2019/ <i>September 9, 2019</i>	20 September 2019/ <i>September 20, 2019</i>	Rp79.500.000
14.	PT Ina Multi Trans	Docking perbaikan KN Aldebaran/ <i>Docking repair of KN Aldebaran</i>	24 Juli 2019/ <i>July 24, 2019</i>	26 November 2019/ <i>November 26, 2019</i>	Rp2.370.442.818

PT Pengerukan Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Pengerukan Indonesia
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian pekerjaan signifikan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Significant work agreements entered into by the Company are as follows: (continued)

No.	Pihak/ Counterparty	Deskripsi pekerjaan/ Work description	Awal kontrak/ Start of contract	Akhir kontrak/ End of contract	Nilai kontrak/ Contract Value
Jasa docking (lanjutan)/Docking services (continued)					
15.	Yayasan Dokter Peduli	Perbaikan mengapung TK Liputan Perkasa/ <i>Floating repair of TK Liputan Perkasa</i>	15 Oktober 2019/ <i>October 15, 2019</i>	15 November 2019/ <i>November 15, 2019</i>	Rp242.280.000
16.	PT Indonesia Fortune Llyod	Docking perbaikan MV Sally Fortune/ <i>Docking repair of MV Sally Fortune</i>	27 September 2019/ <i>September 27, 2019</i>	16 Februari 2020/ <i>February 16, 2020</i>	Rp3.966.235.118
Jasa Charter					
17.	Guangzhou Dredging Comp	Sewa kapal CSD Batang Hari/ <i>Bareboat Charter CSD Batang Hari</i>	11 Juli 2014/ <i>July 11, 2014</i>	10 Juli 2019/ <i>July 10, 2019</i>	US\$13,142,898
18.	PT Global Jaya Maritimindo	Sewa kapal Bali II/ <i>Bareboat Charter Bali II</i>	26 Juli 2015/ <i>July 26, 2015</i>	25 Juli 2020/ <i>July 25, 2020</i>	Rp62.500.000.000
Jasa Sewa					
19.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Sewa kantor/ <i>Office rental</i>	1 November 2018/ <i>November 1, 2018</i>	31 Oktober 2023/ <i>October 31 2023</i>	Rp1.292.971.360
20.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Sewa kantor/ <i>Office rental</i>	3 Februari 2017/ <i>February 3, 2017</i>	2 Februari 2022/ <i>February 2, 2022</i>	Rp2.888.826.600

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar didefinisikan sebagai nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar, bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

	2019		Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value
	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value		
Aset keuangan				
Lancar				
Kas dan setara kas	24.081.349.713	24.081.349.713		
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	5.173.190.000	5.173.190.000		
Pihak berelasi	12.736.201.478	12.736.201.478		
Pendapatan masih akan diterima				
Pihak ketiga	5.421.254.369	5.421.254.369		
Pihak berelasi	32.541.482.947	32.541.482.947		
Total aset keuangan	79.953.478.507	79.953.478.507	105.898.617.502	105.898.617.502
Liabilitas keuangan				
Jangka pendek				
Pinjaman jangka pendek	83.991.191.817	83.991.191.817		
Utang usaha				
Pihak ketiga	8.987.104.215	8.987.104.215		
Pihak berelasi	1.450.399.807	1.450.399.807		
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	6.524.007.960	6.524.007.960		
Pihak berelasi	763.656.564	763.656.564		
Beban akrual	18.139.488.359	18.139.488.359		
Pinjaman jangka panjang - bagian lancar	74.576.359.139	74.576.359.139		
Liabilitas jangka panjang lainnya - bagian lancar	1.768.076.218	1.768.076.218		
Jangka panjang				
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	10.250.000.000	10.250.000.000		
Liabilitas jangka panjang lainnya - setelah dikurangi bagian lancar	946.906.559	946.906.559		
Total liabilitas keuangan	207.397.190.638	207.397.190.638	227.181.684.827	227.181.684.827

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Estimasi nilai wajar pinjaman jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lainnya, kecuali pinjaman jangka panjang kepada Pelindo II, ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The following table presents a comparison between the carrying value and estimated fair value of the Company's financial instruments as of December 31, 2019 and 2018.

	2019		Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value			
Aset keuangan					Financial assets
Lancar					Current
Kas dan setara kas	24.081.349.713	24.081.349.713	48.743.974.465	48.743.974.465	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto					Trade receivables - net
Pihak ketiga	5.173.190.000	5.173.190.000	3.299.907.571	3.299.907.571	Third parties
Pihak berelasi	12.736.201.478	12.736.201.478	37.040.702.918	37.040.702.918	Related parties
Pendapatan masih akan diterima					Accrued income
Pihak ketiga	5.421.254.369	5.421.254.369	-	-	Third parties
Pihak berelasi	32.541.482.947	32.541.482.947	16.814.032.548	16.814.032.548	Related parties
Total aset keuangan	79.953.478.507	79.953.478.507	105.898.617.502	105.898.617.502	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Jangka pendek					Current
Pinjaman jangka pendek	83.991.191.817	83.991.191.817	83.841.858.484	83.841.858.484	Short-term loans
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	8.987.104.215	8.987.104.215	31.640.874.980	31.640.874.980	Third parties
Pihak berelasi	1.450.399.807	1.450.399.807	661.617.986	661.617.986	Related parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	6.524.007.960	6.524.007.960	5.910.000.337	5.910.000.337	Third parties
Pihak berelasi	763.656.564	763.656.564	993.543.900	993.543.900	Related parties
Beban akrual	18.139.488.359	18.139.488.359	9.879.702.843	9.879.702.843	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang - bagian lancar	74.576.359.139	74.576.359.139	75.242.399.980	75.242.399.980	Long-term loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - bagian lancar	1.768.076.218	1.768.076.218	1.624.941.088	1.624.941.088	Other non-current liabilities - current maturities
Jangka panjang					Non-current
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	10.250.000.000	10.250.000.000	14.551.585.730	14.551.585.730	Long-term loans - net of current maturities
Liabilitas jangka panjang lainnya - setelah dikurangi bagian lancar	946.906.559	946.906.559	2.835.159.499	2.835.159.499	Other non-current liabilities - net of current maturities
Total liabilitas keuangan	207.397.190.638	207.397.190.638	227.181.684.827	227.181.684.827	Total financial liabilities

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Short-term financial assets and liabilities:

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, trade payables, other payables, and accrued expenses. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities, except long-term loans with Pelindo II, are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi nilai wajar pinjaman jangka pendek dan jangka panjang ke Pelindo II tidak dapat ditelaah terhadap nilai wajarnya dikarenakan tidak tersedianya informasi-informasi yang diperlukan untuk mengukur nilai wajar secara handal.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

Hirarki nilai wajar:

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Perusahaan tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko likuiditas, risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

**29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The estimated fair values of current and non-current loans to Pelindo II can not be assessed to their fair value since the information required to reliably measured the fair value were not available.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

Fair value hierarchy:

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Company does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Company does not present fair value hierarchy under PSAK 68 "Fair Value Measurements"

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, credit risk, interest rate risk and foreign exchange risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perusahaan berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, the management monitors and maintains a level of cash on hand and in banks deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual payments.

31 Desember/December 31, 2019

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Pinjaman jangka pendek	83.991.191.817	-	-	-	83.991.191.817	Short - term loans
Utang usaha	10.437.504.022	-	-	-	10.437.504.022	Trade payables
Utang lain-lain	7.287.664.524	-	-	-	7.287.664.524	Other payables
Beban akrual	18.139.488.359	-	-	-	18.139.488.359	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	74.576.359.139	5.500.000.000	4.750.000.000	-	84.826.359.139	long - term loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.757.192.111	957.790.666	-	-	2.714.982.777	Other non - current liabilities
Total	196.189.399.972	6.457.790.666	4.750.000.000	-	207.397.190.638	Total

31 Desember/December 31, 2018

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Pinjaman jangka pendek	83.841.858.484	-	-	-	83.841.858.484	Short - term loans
Utang usaha	32.302.492.966	-	-	-	32.302.492.966	Trade payables
Utang lain-lain	6.903.544.237	-	-	-	6.903.544.237	Other payables
Beban akrual	9.879.702.843	-	-	-	9.879.702.843	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	75.242.399.980	7.801.585.730	6.750.000.000	-	89.793.985.710	long - term loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.908.969.713	2.551.130.874	-	-	4.460.100.587	Other non - current liabilities
Total	210.078.968.223	10.352.716.604	6.750.000.000	-	227.181.684.827	Total

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counter parties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage credit trade with the Company and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima dan piutang lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31,	
	2019	2018
Kas dan setara kas	24.081.349.713	48.743.974.465
Piutang usaha	17.909.391.478	40.340.610.489
Pendapatan masih akan diterima	37.962.737.316	16.814.032.548
Uang jaminan	-	15.000.000
Total	79.953.478.507	105.913.617.502

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan bank, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga. Walaupun Perusahaan memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap, manajemen Perusahaan secara terus menerus melakukan penelaahan atas suku bunga yang telah ditetapkan tersebut. Apabila suku bunga pasar turun secara signifikan, manajemen Perusahaan akan melakukan negosiasi untuk menurunkan suku bunga tersebut.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Perusahaan yang terekspos terhadap risiko suku bunga:

	2019				Jumlah/Total
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		
	Kurang dari atau sama dengan satu tahun/ ≤ 1 Year	Lebih dari satu tahun/ > 1 Year	Kurang dari atau sama dengan satu tahun/ ≤ 1 Year	Lebih dari satu tahun/ > 1 Year	
Aset Keuangan					
Kas dan setara kas	24.037.211.618	-	-	-	24.037.211.618
Liabilitas Keuangan					
Pinjaman jangka pendek	-	-	83.991.191.817	-	83.991.191.817
Pinjaman jangka panjang	20.263.539.733	10.250.000.000	54.312.819.406	-	84.826.359.139
Obligasi wajib konversi	-	-	-	195.000.000.000	195.000.000.000

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit risk (continued)

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, accrued revenue and other receivables.

Credit risk exposure relating to assets in the statements of financial position is as follow:

	31 Desember/ December 31,
	2019
Cash and cash equivalents	48.743.974.465
Trade receivables	40.340.610.489
Accrued income	16.814.032.548
Security deposits	15.000.000
Total	105.913.617.502

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposure to the interest rate risk relates primarily to cash on hand and in banks, short-term loans and long-term loans.

The Company does not have a formal hedging policy for interest rate risk. Even though the Company has loans with fixed interest rates, the Company's management continuously assesses such defined interest rates. If the market interest rates drop significantly, the Company's management will negotiate accordingly to lower its interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Company's assets and liabilities exposed to interest rate risk:

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (Icontinued)

	2018				Jumlah/Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate			
	Kurang dari atau sama dengan satu tahun/ <= 1 Year	Lebih dari satu tahun/ > 1 Year	Kurang dari atau sama dengan satu tahun/ <= 1 Year	Lebih dari satu tahun/ > 1 Year		
Aset Keuangan						Financial Asset
Kas dan setara kas	48.679.476.878	-	-	-	48.679.476.878	Cash and cash equivalents
Liabilitas Keuangan						Financial Liability
Pinjaman jangka pendek	-	-	83.841.858.484	-	83.841.858.484	Short-term loans
Pinjaman jangka panjang	22.712.068.207	14.551.585.730	52.530.331.773	-	89.793.985.710	Long term loans
Obligasi wajib konversi	-	-	-	195.000.000.000	195.000.000.000	Mandatory convertible bonds

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to changes in interest rates to profit before income tax is as follows:

	31 Desember/December 31		
	2019	2018	
Kenaikan 50 basis poin	(215.882.292)	(154.812.848)	Increase by 50 points
Penurunan 50 basis poin	215.882.292	154.812.848	Decrease by 50 points

Risiko nilai tukar

Foreign exchange risk

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan bank dalam Dolar AS.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the foreign currency exchange rate risk relates primarily to cash in banks denominated in US Dollar.

Perusahaan juga memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

The Company also has transactional foreign currency exposures from its operational transactions. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the Company. The Company does not have a formal hedging policy for transaction denominated in foreign currency. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 December 31, 2019 and
 for the Year then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar ini sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, beban dibayar dimuka, dan pendapatan diterima dimuka dalam Dolar AS.

	Kenaikan (penurunan) nilai tukar mata uang/ <i>Increases (decreases) on foreign exchange rates</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+100bps (-)100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2018	(+100bps (-)100bps

Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi.

Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses manajemen permodalan selama periode pelaporan.

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2019/ December 31, 2019
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others	
Pinjaman jangka panjang	89.793.985.710	(4.500.000.000)	-	(476.626.571)	84.826.359.139

Long term loans

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign exchange risk (continued)

This foreign exchange risk mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, prepaid expenses, and unearned revenue denominated in US Dollar.

	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(120.715.626) 120.715.626	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2019</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2018	(20.412.848) 20.412.848	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2018</i>

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its businesses and to maximize the shareholders' value.

The Company manages its capital structures and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions.

To maintain and adjust the capital structures, the Company may adjust dividend payments to the shareholders, issue new shares or raise debt financing.

No changes were made in the capital management objectives, policies or processes during the reporting period.

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

**PT PENERUKAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENERUKAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Operasi Perusahaan telah dan dapat terus dipengaruhi oleh wabah Covid-19 yang dimulai pada awal 2020 dan telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak kedepan dari wabah Covid-19 di Indonesia dan Perusahaan tidak pasti saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau perluasan wabah dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi risiko pada pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan. Namun, dampak kedepan juga akan tergantung pada efektivitas tanggapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu, pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

The Company's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 that started in early 2020 and has spread to many countries including Indonesia. The effects of Covid-19 to the Indonesian economy include adverse effect to the economic growth, decline in capital markets, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operations. The exact future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Company are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe impact on Indonesian economy and the Company, which may face risks in earnings, cash flows and financial condition. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia.

Beside that, on March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.